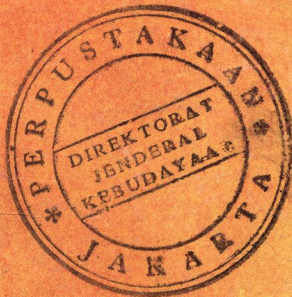


MILIK DEPDIKBUD
Tidak Diperdagangkan



SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA SELATAN



Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

570.9816 MAM 8

MILIK DEPDIBUD
Tidak Diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SUMATERA SELATAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
PALEMBANG 1985

P R A K A T A

Tahun anggaran 1984/1985 buku " Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan dicetak ulang (cetakan ke 2) untuk memenuhi permintaan para pembaca, terutama untuk bahan informasi mengisi perpustakaan sekolah - sekolah di daerah Sumatera Selatan.

Usaha untuk lebih menyempurnakan hasil Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan, senantiasa ditingkatkan. Keberhasilan ini ditunjang'oleh adanya kerjasama oleh tenaga peneliti yang menaruh minat terutama bantuan tenaga peneliti dari Universitas Sriwijaya, dibantu oleh pemerintah daerah bapak gubernur, bapak bupati serta camat yang langsung memberikan bimbingan bersama Kakandepdikbud di kabupaten dan kecamatan di mana penelitian ini diadakan.

Kepada Kakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam pelaksanaan penerbitan buku ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Semoga buku " Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan " ini akan banyak manfaatnya bagi menambah hazanan budaya di daerah ini.

Palembang, Januari 1985

Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan
Pemimpin,



Zainal Abidin Hanif
Drs. Zainal Abidin Hanif

NIP. 130232522

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan tahun 1980 / 1981, yang merupakan cetakan ulang dengan mengutamakan penyebarluasan bagi sekolah dan instansi di daerah Sumatera Selatan.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, pemerintah daerah kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Drs. Ma'moen Abdullah, Dra. Ny. Weny, Drs. Djamiran, Drs. M. Alimansyur dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Sutrisno Kutoyo, Masykuri.

Harapan kami terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Januari 1985
Pemimpin Proyek IDKD Pusat



Drs. Ahmad Yunus

NIP. 130146112

**Kata Sambutan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan.**

Penulisan naskah Penelitian Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 1980/1981 telah selesai, bahkan telah selesai pula dievaluasi oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat.

Aspek Sejarah dengan judul "Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan" kini mendapat kesempatan untuk dicetak ulang dan diedarkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan, pada cetakan ke 2 1984/1985.

Kepercayaan yang telah dilimpahkan oleh IDKD Pusat kepada IDKD Sumatera Selatan untuk mencetak dan menerbitkan kedua buku diatas sangat kami hargai. Kepada Tim Proyek IDKD Sumatera Selatan dan segenap tim peneliti baik dari Universitas Sriwijaya maupun Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan melalui kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas usaha serta ketekunan dalam meneliti, mengolah serta menyusun naskah yang amat berharga itu.

Kepada Pimpro IDKD Pusat yang memberikan kepercayaan kepada Daerah Sumatera Selatan untuk mencetak buku dimaksud, juga kami ucapkan terima kasih Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan itu akan menjadi modal bagi petugas Proyek IDKD Sumatera Selatan tim peneliti tahun 1981/1982 agar lebih giat lagi menjalankan tugasnya serta lebih menyempurnakan lagi hasil penelitian kebudayaan di Daerah Sumatera Selatan.

Selanjutnya dengan menyadari segala kekurangan yang ada dalam usaha meningkatkan hasil penelitian kebudayaan daerah Sumatera Selatan selama ini, kiranya buku ini dapatlah menjadi pendorong dan dasar untuk lebih menyukkseskan usaha seterusnya. Selain itu terkandung harapan agar buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan dapat menambah bahan koleksi di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, juga untuk pengetahuan bagi semua pembaca sebagai upaya untuk terus membina dan mengembangkan kebudayaan Nasional.

Palembang, Januari 1985.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATERA SELATAN



M. Z. ABIDIN
NIP. 130041039

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1985
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL DEPDIKBUD	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT	4
B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAR	11
BAB II PENDIDIKAN TRADISIONAL	15
A. PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDHA	15
B. PENGARUH AGAMA ISLAM	23
BAB III PENDIDIKAN BARAT	33
A. PENGARUH PORTUGIS DAN VOC	33
B. KEADAAN PADA ABAD KE-19	34
BAB IV PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20	36
A. PENDIDIKAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA	36
1. Pengaruh Politik Etika	36
2. Pendidikan Sekolah Dasar	37
3. Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	42
B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL	43
1. Motivasi	43
2. Kelembagaan	45
BAB V PENDIDIKAN JAMAN JERANG	55
A. PENDIDIKAN PEMERINTAH	55
1. Pendidikan dasar	60
2. Pendidikan Kejuruan	62
B. PENDIDIKAN SWASTA	64
BAB VI PENDIDIKAN JAMAN INDONESIA MERDEKA	66
A. PENDAHULUAN	66
1. Landasan Idiil	66
2. Tujuan Pendidikan	66
3. Sistem Persekolahan	69
4. Kesempatan Belajar	71
5. Kurikulum	72
6. Pendidikan di Sumatera Selatan	73

B. PENDIDIKAN DASAR	74
1. Sekolah Dasar	74
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)	78
C. PENDIDIKAN MENENGAH	80
1. Sekolah Menengah Pertama	80
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)	87
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)	89
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	93
D. PENDIDIKAN KEJURUAN	94
1. Pendidikan Guru	94
2. Pendidikan Ketrampilan Keluarga	117
3. Pendidikan Perekonomian	121
4. Pendidikan Teknik dan Kejuruan lainnya	127
5. Kursus-kursus Pegawai Negeri	138
E. PENDIDIKAN TINGGI	140
1. Universitas Sriwijaya	140
2. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	147
3. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)	154
4. Akademi Administrasi Niaga Negara (AANN)	155
5. Akademi Teknologi Negeri (ATN. PAT)m	159
6. Akademi Perawat (Akper) Jurusan Umum	160
7. Akademi Koperasi (AKOP)	162
8. Kursus BI Bahasa Inggris	163
F. PENDIDIKAN NON FORMAL	163
G. PENDIDIKAN SWASTA	164
1. Kelembagaan	170
2. Pendidikan Dasar	172
3. Pendidikan Menengah	173
4. Pendidikan Kejuruan	175
5. Pendidikan Guru	179
6. Pendidikan Tinggi	180
7. Pendidikan Non Formal	184
H. PENDIDIKAN LUAR BIASA	185
I. PESANTREN DAN MADRASAH	187
DAFTAR KEPUSTAKAAN	190
DAFTAR INFORMAN	195
DAFTAR KATA-KATA	197

BAB I PENDAHULUAN

Propinsi Sumatera Selatan yang kita kenal sekarang ini, meliputi delapan daerah Kabupaten dan dua daerah Kotamadya terletak 102° dan 180° Bujur Timur dan antara $1^{\circ}30'$ dan 4° Lintang Selatan dengan dilintasi Bujur Timur 105° sebagai dasar penentuan waktu Indonesia bagian Barat. Di sebelah utara daerah ini dibatasi oleh Propinsi Jambi dan Laut Cina Selatan, di sebelah timur oleh Selat Karimata dan Laut Jawa, di sebelah selatan oleh Propinsi Lampung dan di sebelah barat oleh Propinsi Bengkulu. Pada jaman dahulu daerah ini pernah menjadi pusat perdagangan dalam dan luar negeri, setelah muncul kerajaan Sriwijaya sebagai suatu talasokrasi (suatu kekuasaan laut) pada akhir abad ke-7 Masehi.

Sebagai suatu kerajaan maritim yang memiliki armada angkatan laut yang ampuh dalam kerangka penguasaan Selat Malaka dan Selat Sunda, ia juga merupakan pusat studi agam Buhda.¹⁾ Tetapi kemudian ia berangsur-angsur menjadi lemah pada permulaan abad ke-11 Masehi, bahkan pada jaman Raja Kertanegara (peristiwa Pemalayu 1275) dan Sumpah Palapa Patih Gajah Mada telah mengakhiri kerajaan itu dalam tahun 1377 Masehi.

Setelah itu pada tahun 1521 Masehi, ketika cahaya Matahari Wilwatikta sudah pudar tenggelam di kaki langit keruntuhannya, maka mulailah muncul kembali bandar Palembang sebagai pusat penguasa tunggal yang pernah memegang peranan penting di Asia Tenggara. Palembang sebagai tanah asal Raden Patah, berkembang menjadi pusat politik-ekonomi dan kebudayaan dengan Islam sebagai motor pendorong yang kuat

Ketika jaman Kesultanan Palembang, sebelum pemerintahan kolonial Belanda menguasai daerah ini pada awal abad ke-19, secara geografis nama "Sumatera Selatan" mencakup seluruh wilayah bagian Selatan Sumatera termasuk Bangka Belitung.

Setelah daerah ini dikuasai pemerintah kolonial Belanda, daerah Sumatera bagian Selatan terbagi atas keresidenan-keresidenan, yang masing-masing dikepalai oleh Residen. Keresidenan Palembang sendiri, demikian pula keresidenan-keresidenan yang lain, terbagi atas beberapa *Adfeling* yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen, dan suatu *Afdeling* terbagi lagi beberapa

1. Satyawati Suleiman. *Concise Ancient History of Indonesia*, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1977 hal. 17. Pada permulaan tahun 1980 Tim Peneliti dari P4N Dirjen Kebudayaan di bawah pimpinan Dra. S. Suleiman telah meninjau lokasi daerah Bukit Siguntang dan sekitarnya, dan telah menemukan kreweng-kreweng porselin dan gerabah dari abad ke-8 dan ke-9 Masehi.

Onderafdeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kontrolur (*Binnenlandsch Bestuur Ambtenaren*) dan penguasa-penguasa tradisional oleh penduduk pribumi seperti : *Demang, Pasirah, Pembarap, Penghulu (Inheemsche Bestuur Ambtenaren)* dengan dibantu oleh perabot desa yang terdiri dari Kerio, Punggawa dan *Khotib*. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila daerah Sumatera bagian Selatan yang sekarang terdiri dari beberapa Propinsi memiliki adat kebiasaan dan latar belakang historis yang sama, sehingga masa lampau daerah ini tidak punya terbatas pada kehidupan politik saja, tetapi juga meliputi perkembangan 'sosial budaya, khusus mengenai pendidikan di daerah ini. Tetapi setelah pengakuan Kedaulatan 1949, daerah yang terdiri dari beberapa keresidenan itu, secara bertahap mulai ada usaha ke arah otonomi yang terlepas dari Palembang sebagai ibukota propinsi dan yang paling akhir (bulan Nopember 1968) daerah Bengkulu melepaskan diri dari Palembang sebagai ibukota propinsi Sumatera Selatan.

1. Tujuan Penelitian

Secara umum Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum sepenuhnya mampu menyediakan data dan informan kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat, Sedangkan secara khusus untuk mengumpulkan dan menyusun buku sejarah Daerah tentang Sejarah Pendidikan di daerah secara tematis, terutama untuk melengkapi pengetahuan tentang Sejarah Pendidikan dengan mendokumentasi pemikiran pendidikan dan mencatat tokoh-tokoh pendidikan.

2. MASALAH

Salah satu aspek kebudayaan daerah Sumatera Selatan yang belum banyak diungkapkan adalah *Sejarah Pendidikan*, karena belum banyak diteliti dan dikembangkan secara sempurna. Secara kronologis yang terperinci mengenai aspek tersebut belum pernah dibukukan secara utuh dan belum pula merupakan suatu kebulatan untuk seluruh Daerah Sumatera Selatan. Kalau saja ada, catatan mengenai pendidikan di daerah ini, biasanya disisipkan pada buku Sejarah Pendidikan Nasional.

Dengan demikian suatu masalah yang dihadapi sekarang dalam aspek ini, adalah belum adanya suatu tulisan lengkap dan menyeluruh tentang *sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan* sampai sekarang ini.

Dalam hubungan ini dirasa amat perlu melakukan pencatatan tentang bahan-bahan sejarah pendidikan, yang merupakan salah satu aspek kehidupan masyarakat daerah ini dari abad ke abad, bahkan pada zaman kebesaran kerajaan Sriwijaya telah ada lembaga pendidikan tinggi dengan reputasi internasional. Oleh sebab itu pencatatan yang demikian dirasakan sangat penting gunanya, di samping untuk memelihara kebudayaan daerah sebagai sumber kebudayaan nasional, juga untuk melengkapi dan meramu Sejarah Pendidikan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

Untuk melakukan suatu penelitian yang mendalam dan sempurna guna mengatasi masalah ini, sudah barang tentu memerlukan biaya yang cukup besar dan tersedianya waktu yang cukup banyak. Oleh karena waktu dan dana yang tersedia terbatas, maka hasil laporan ini tidak lengkap, dan sesungguhnya masih banyak bahan sejarah yang belum dapat dikumpulkan oleh para ahli.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi Sejarah Pendidikan Tradisional, Pendidikan Barat, Pendidikan abad ke-20 dan termasuk Pendidikan jaman Jepang yang dikelola oleh Departemen P dan K atau di luar Departemen tersebut. Bahan-bahan sejarah yang tersebut di atas sejauh mungkin telah diusahakan oleh anggota Tim peneliti untuk menjangkau seluruh wilayah administrasi Propinsi Sumatra Selatan yaitu: Kabupaten MURA, MUBA, LAHAT, LIOT, OKI, OKU, BANGKA, BELITUNG dan dua daerah Kotamadya (Palembang dan Pangkalpinang).

4. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian

Pelaksanaan survai ini berdasarkan surat perjanjian-kerja No. 017/IDKD/V/80/SS, tanggal 27 Mei 1980, yang telah memakan waktu enam bulan mulai dari persiapan sampai menjadi naskah, dan secara terperinci tahap pelaksanaannya sebagai berikut:

Persiapan untuk terjun ke lapangan, diskusi dan pengarahan antara anggota Tim, survai lapangan, pengolahan data, Penulisan konsep naskah/diskusi, editing evaluasi dan revisi, dan perbanyak laporan setelah revisi. *Field research* dilakukan di daerah Kabupaten/Kotamadya, kecuali daerah Bangka-Belitung tidak didatangi secara langsung mengingat biaya yang tidak memungkinkan.

Sebagaimana lazim dilakukan oleh peneliti-peneliti di lapangan, maka dibentuklah suatu tim peneliti dan kemudian ditetapkan lokasi-lokasi sebagai *sample* dari populasi yang akan diteliti, suatu *sample* yang merupakan bagian dari populasi, sebagai contoh dari populasi tersebut. Penelitian telah berlangsung sejak bulan Juli hingga awal Nopember 1980 dengan didahului studi kelayakan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pengolahan dan analisa data berlangsung selama bulan Nopember sampai akhir bulan Desember 1980, yang sterusnya dilanjutkan dengan penulisan naskah sebagai laporan terakhir. Mengenai metoda penelitian yang digunakan sebagai landasan kegiatan pelaksanaan untuk mendapatkan sumber data sejarah Pendidikan adalah metoda deskriptif.

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 1. Studi kelayakan dan observasi ke daerah-daerah penelitian yang telah ditetapkan, 2. Mela-

kukan wawancara dengan mempergunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan lebih dulu, dan 3. Melakukan studi kepustakaan sebagai unsur penunjang (pelengkap) untuk membandingkan bahan-bahan yang telah diperoleh dari lapangan atau bahan-bahan yang erat hubungannya dengan tujuan penelitian studi kepustakaan ini.

A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT

Pulau Sumatera yang membujur dari arah barat laut ke tenggara dengan memotong garis khatulistiwa, secara administratif telah terbagi atas beberapa propinsi, dan salah satu daripada propinsi itu adalah Propinsi Sumatra Selatan dengan ibukotanya Palembang. Pada awal revolusi fisik wilayah Propinsi Sumatra Selatan tidak seperti yang ada sekarang, melainkan juga daerah yang sekarang menjadi wilayah Propinsi -Jambi, Bengkulu dan Lampung. Oleh karena itu sisa-sisa peninggalan yang terdapat di daerah-daerah ini merupakan jalinan yang tak dapat dipisahkan apabila ditinjau dari segi geografis. Kemudian dalam perkembangan sejarah, di alam kemerdekaan daerah-daerah tersebut secara bertahap berdiri sendiri dengan status propinsi, dan salah satu di antara propinsi itu adalah Propinsi Sumatra Selatan yang lazim dikenal dengan nama daerah "Batanghari Sembilan."

Luas daerahnya $\pm 109.254 \text{ Km}^2$ dengan penduduknya $\pm 3.803.260$ orang, sehingga tiap-tiap Km^2 didiami oleh penduduk ± 35 orang,²⁾ suatu daerah yang relatif jarang penduduknya jika dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Bali.

Kalau kita perhatikan lebih lanjut mengenai peta daerah Sumatra Selatan ini, maka tampak oleh kita daerah ini pun seperti daerah-daerah lain di sepanjang pulau Sumatra terbagi atas dua daerah berdasarkan tinggi rendahnya dari permukaan laut. Sebelah barat yang menjadi hulu sungai Batanghari Sembilan sampai ke lereng Bukit Barisan merupakan dataran tinggi (pegunungan) dengan hutan yang lebat, sedangkan daerah-daerah sepanjang pantai timur Sumatra sebagian besar dataran rendah dan rawa-rawa. Semakin dekat dengan pantai atau kuala sungai daerahnya terdiri dari rawa-rawa yang ditumbuhi hutan bakau (*mangrove*) seperti: kayu gelam, pohon nipah dan lain-lain. Meskipun daerah ini sepanjang tahun mendapat curah hujan yang cukup tinggi, namun masyarakat masih dapat membedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Oleh sebab itu iklim di daerah ini sangat ditentukan oleh angin musim, yang pada bulan-bulan Nopember Desember Januari Pebruari dan Maret menghembus angin dari arah barat dengan membawa hujan, sedangkan dalam bulan Mei-Juni-Juli-Agustus dan September menghembus angin dari jurusan tenggara yang membawa ud

2) Dikutip dari Biro Statistik dan Sensus Kantor Gubernur Sumatra Selatan.

ra kering dari Benua Australia. Dengan adanya musim kering dan hujan, maka suhu udara di daerah ini rata-rata tinggi dan curah hujan yang tinggi pula.³⁾

Pada umumnya sifat-sifat sungai di daerah ini mempunyai perbedaan tinggi permukaan air pada sepanjang aliran, tebingnya curam, banyak rintangan batang kayu yang tak hanyut dan terbenam di pinggir-pinggir sungai, banjir setiap tahun dan proses pendangkalan serta pembentukan rawa-rawa berlangsung terus sampai ke muara sungai. Sungai Musi yang panjangnya ± 553 Km menjadi induk Batanghari Sembilan, mulai dari muara sungai Lematang sudah mulai terdapat pembentukan rawa-rawa sampai ke kuala Sungsang. Pada tiap kali pasang naik permukaan tanah digenangi air, terutama di musim hujan hampir sebagian besar daerah tersebut terendam air dan penuh dengan lumpur. Karena daerah ini letaknya di daerah tropis sebelah selatan Khatulistiwa, iklimnya lembab dan hujan yang turun banyak sekali sedangkan hutan rimba sudah berhenti pada ketinggian 1.000 meter di daerah pegunungan sebagai akibat pengawanan yang tebal dan udara dingin. Sebagai akibat keadaan alam itu di daerah ini sampai sekarang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di pedesaan, proses pembentukan rawa-rawa di sepanjang tebing sampai ke kuala sungai, lebatnya hutan rimba, sukarnya komunikasi antara daerah yang satu dengan lainnya, lebih-lebih di musim penghujan itulah sebabnya maka induk sungai Musi dengan anak Batanghari Sembilanlah menjadi faktor terpenting bagi lalu lintas perdagangan, penanaman kekuasaan, pemasukan kebudayaan dari luar oleh golongan emigran yang berasal dari pulau sekitarnya atau dari pedagang-pedagang asing.

Mengenai batas propinsi Sumatera Selatan dengan daerah Jambi, Bengkulu dan Lampung, secara mutlak tidak ada ketentuan yang dibuat oleh manusia, kecuali batas-batas yang telah ditetapkan berdasarkan sejarah pertumbuhan daerah dan yang kemudian diikrarkan oleh perjanjian antar daerah. Batas alam yang dapat diketengahkan adalah Bukit Barisan yang memisahkan daerah ini dengan Propinsi Bengkulu dan aliran Sungai Masuji yang memisahkan dengan daerah Lampung.

Daerah Sumatera Selatan meliputi delapan Kabupaten yaitu: Musi Banyuasin, (MUB) Musi Rawas, (MURA) Lematang Ilir Ogan Tengah, (LIOT) Lahat, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Bangka Belitung dan dua Kotamadya (Palembang dan Pangkal Pinang), didiami oleh berbagai suku bangsa dan mempunyai berbagai dialek, bahasa, adat-istiadat dan letak geografis yang berbeda-beda. Menambah ragam suku bangsa di daerah ini terdapat pula penduduk pendatang, sehingga timbul istilah adanya penduduk asli yang dikenal dengan nama "orang Kubu", atau suku Anak Dalem. Suku Anak Dalem ini mendiami daerah pedalaman kabupaten MUBA misalnya:

3) R.W. van Bammelen, *The Geology of Indonesia*, vol. IA, the Hague, 1949, halaman 6.

daerah Bayunglincir Bayat dan daerah sungai Lilin. Di samping itu terdapat pula di daerah pantai pulau Belitung suku Sekak atau Sawang dan di pulau Bangka sendiri hidup suku Mapur yang hidupnya di daeratan.⁴⁾

Di samping itu masing-masing daerah Kabupaten memiliki logat bahasanya sendiri-sendiri seperti: Kabupaten Ogan Komerling Ilir terdapat suku Pegagan, Meranjat, Kayu Agung, Bedamaran, Teloko dan lain-lain. Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu terdapat suku Ranau, Daya, Kisam, Komerling dan Ogan. Di Kabupaten (LIOT) terdapat suku Semendo Darat, Lematang dan Enim. Di Kabupaten Lahat ada suku Pasemah, Kikim, Lintang dan Lematang. Di Kabupaten MURA dan MUBA terdapat suku Rejang, Palembang, Bawas, Kubu dan Saling.⁵⁾ Kadang-kadang di antara penduduk dalam satu lingkungan daerah wilayah Kabupaten memiliki bahasa yang masing-masing tidak saling dimengerti misalnya: Bahasa Komerling, bahasa Kayu Agung, bahasa Rejang dan sebagainya. Hal ini mungkin disebabkan antara lain karena sukarnya komunikasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, di mana bahasa-bahasa itu berkembang melalui proses pemecahan dan isolasi yang lama antara kelompok-kelompok yang mengucapkan bahasa-bahasa tersebut. Bahasa-bahasa daerah yang terdapat di daerah ini belum begitu banyak diteliti, dan baru akhir-akhir ini nampaknya Lembaga UNSRI dipercayakan untuk melakukan penelitian di bidang tersebut oleh Pusat Bahasa di Jakarta.

Sistem huruf yang khas dimiliki oleh masyarakat di daerah ini dikenal dengan nama "tulisan Ulu" yang mirip dengan tulisan Batak. Aksara tersebut ditulis pada kulit kayu (*karas*), tanduk hewan dan bambu yang sampai sekarang belum banyak diteliti oleh para ahli. Selain dari pada itu mereka mempergunakan huruf "Arab Gundul", yang sudah barang tentu huruf tersebut dikenal setelah agama Islam datang di daerah ini pada abad ke-8 Masehi.⁶⁾

Barang siapa yang pernah berlayar menyusur sungai Musi dan anak-anak sungainya, akan nampak di kiri-kanan sungai hutan belukar yang diselingi dusun-dusun kecil di sana-sini, sedangkan di kota Palembang dan Pedamaran ada rumah sakit terapung di atas air di sebelah menyebelah aliran sungai, seperti yang telah pernah digambarkan oleh W.P. Groeneveldt mengenai

4) Tim Penyusun Monografi daerah Propinsi Sumatera Selatan *Monografi Sumatera Selatan*, Perwakilan Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan, 1974, hal. 39.

5) *Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan* Proyek IDKD 1977/1978, hal. 36.

6) *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD, 1977/1978 hal. 142 Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke-II, *Masuk dan Perkembangan Agama Islam di bumi Sriwijaya*, Plaju 1974 hal. 23.

Palembang dalam abad ke-17.⁷⁾ Dusun-dusun kecil yang dimaksudkan itu merupakan pusat kehidupan masyarakat, yang termasuk ke dalam masyarakat hukum teritorial yang terkecil dan terdiri dari kampung-kampung. Pada umumnya rumah rakyat didirikan di atas tiang kayu, dan besar kecilnya rumah tergantung kepada kemampuan orang itu sendiri. Mungkin dulunya untuk menghindari bahaya banjir dan serangan binatang buas. Rumah-rumah itu biasanya berbentuk bujur sangkar memanjang dengan pintu tangganya menghadap ke jalan raya dengan membelakangi sungai (*perigi*). Atapnya ada yang mempergunakan daun rumbia yang dianyam dan kebanyakan sekarang ini mempergunakan atap genteng. Pada umumnya bahan kayu yang dipergunakan untuk rumah adalah kayu kelas satu seperti kayu unglan, kayu tembesu dan lain-lain. Menurut kepercayaan setempat, rumah panggung atau limas yang didirikan di atas tiang kayu akan lebih memudahkan upacara pemandian mayat sebelum dikuburkan dan sekaligus mempercepat roh-roh jahat untuk terus masuk ke dalam bumi. Di samping rumah-rumah tersebut, kita akan melihat segala macam bentuk perahu yang hilir mudik di sungai-sungai (perahu motor, perahu dengan mesin tempel, dan perahu tambangan), rakit-rakit kayu di pinggir sungai yang dipergunakan sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian, dan anak-anak kecil telanjang bulat yang bermain-main di sungai.

Penduduk Sumatera Selatan pada umumnya petani seperti penduduk dari daerah lain di Indonesia. Di berbagai tempat di lereng Bukit Barisan, di dataran tinggi dan tempat-tempat terpencil lainnya seperti daerah suku Anak-dalem, banyak penduduk masih bercocok tanah dengan teknik peladangan. Tetapi setelah perang Dunia I, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau tidak jauh dari daerah lebak, telah mulai bercocok tanam dengan teknik persawahan. Baik sistem perladangan maupun persawahan di daerah ini kecuali daerah transmigrasi Upang, diusahakan secara tradisional. Kebanyakan ladang-ladang mereka letaknya jauh dari dusun, dan untuk menentukan waktu pembukaan hutan untuk perladangan, biasanya penduduk setempat telah mempunyai perhitungan sendiri, sehingga waktu menanam padi bertepatan dengan permulaan musim penghujan. Mengenai cara mengerjakannya mula-mula dengan menebang pohon-pohon menjelang musim kemarau. Setelah selesai pekerjaan itu dibiarkan beberapa hari sampai kayu-kayu itu kering dan kemudian dibakar sambil dibersihkan dengan kapak (*parang*) dan cangkul. Apabila saatnya tiba untuk penanaman, maka dengan cara gotong royong (*bawe* menurut adat kebiasaan masyarakat MUBA) me-

7) WP. Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca compiled from Chinese Sources*, V.B.G. XXXIX, 1880, hal. 106.

reka menaburkan benih padi dengan alat pelobang yang disebut *tugal*. Di samping menaburkan benih padi, mereka juga menanam sayur-sayuran, cabe, ubi, pepaya dan lain-lain. Hasilnya cukup memadai dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam masa satu tahun. Kemudian setelah masyarakat di daerah ini mengenal cara menanam karet, maka setelah ladang tersebut tidak memungkinkan untuk ditanam padi kembali, karena kesuburan tanah dan produktifitasnya sudah mulai menurun, ladang tersebut ditanami pohon karet rakyat di daerah ini di samping adanya perkebunan karet yang diusahakan oleh bangsa Asing.

Di samping bercocok tanam di ladang/sawah dengan padi sebagai tanaman pokok, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di kota-kota besar giat dalam dunia perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas yang terpenting bagi masyarakat kota, bahkan pada jaman Kesultanan Palembang perdagangan lada di daerah ini telah memainkan peranan penting di samping perdagangan hasil hutan lainnya. Kesultanan Palembang sebagai kerajaan dagang yang berarti karena ekspor ladanya, karena lada memasuki perdagangan internasional dan lada itu pulalah yang menjadi sebab keruntuhannya. Rupa-rupanya suatu gejala umum di Indonesia pada waktu itu, ialah tanaman dagang untuk pasaran Eropa lah yang membesarkan keraton-keraton itu, tapi tanaman itu pulalah sebab utama yang meruntuhkannya.⁸⁾

Mata uang boleh dikatakan telah mereka kenal sejak dulu, malah pada saat ini mereka telah dapat mempergunakan bank sebagai tempat penyimpanan uang dan telah mengenal pula sistem pembayaran dengan menggunakan cek. Kemudian hasil lada ini cepat menurun, lebih-lebih setelah pemerintah kolonial Belanda menganjurkan kepada rakyat untuk menanam pohon karet. Masa akhir-akhir ini nampaknya hasil bumi yang banyak mendapat devisa bagi daerah ini ialah karet, terutama di daerah-daerah dataran rendah (kabupaten Mura, Muba, Liot dan Oku) dan kopi yang banyak dihasilkan oleh daerah pegunungan, seperti daerah Pagaralam dan sekitarnya. Bagi rakyat yang tinggal di daerah lebak atau rawa-rawa, hasil perdagangan mereka adalah ikan. Tetapi akhir-akhir ini produksi ikan sungai tidak memadai karena akibat penyalahgunaan stroom elctris telah banyak membunuh bibit-bibit ikan.

Di daerah Sumatera Selatan seperti halnya di daerah lain di Indonesia, kelompok kekerabatan terkecil adalah keluarga batih yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Sedangkan anak yang telah kawin membentuk lagi keluarga batih dan seterusnya. Tetapi oleh karena keadaan belum memungkinkan, maka kadang-kadang di dalam sebuah rumah terdapat dua keluarga batih yang masing-masing merupakan kesatuan ekonomis dalam hal mengerjakan ladang/sawah atau kebun. Setelah mereka mampu untuk ber-

8) Moh. Idwar Saleh, *Sejarah Banjarmasin*, KPPK, Balai Pendidikan Guru, Bandung, hal. 20.

diri sendiri dalam arti mendapatkan rumah pemberian dari orang tua atau membeli sendiri, mulailah memisahkan diri dan terbentuklah keluarga batih yang baru menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*). Kedudukan suami memegang peranan penting sebagai kepala keluarga, sedangkan si isteri masuk keluarga suami dan bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka. Sistem matriakhat bisa terjadi apabila orang tua tidak memiliki anak laki-laki, atau di beberapa daerah seperti Tanjungraja dan Lahat Pagaralam berlaku adat kebiasaan yang disebut *tunggu Tuban*, suatu kebiasaan yang turun temurun menetapkan anak perempuan tertua sebagai pewaris utama dan bertanggungjawab terhadap orang tuanya sebelum meninggal dunia.

Pada jaman sebelum Perang Dunia II, ruang gerak anak gadis sangatlah terbatas dan dilarang berpergian secara bebas tanpa ada pengawasan saudara laki-laki atau orang tuanya. Tetapi akhir-akhir ini tradisi itu mulai kendur dan dianggap sebagai hambatan untuk kemajuan, terutama bagi keluarga yang telah mengecap pendidikan umum.

Dalam hal mencari jodoh dalam kalangan masyarakat Sumatera Selatan akhir-akhir ini terdapat dua cara; pertama cara peminangan yang pada dasarnya bersumber dari pergaulan muda-mudi dan mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak, sedangkan cara yang ke dua adalah *melarai* tanpa direstui oleh orang tua si gadis. Perkawinan ideal di jaman sebelum Perang Dunia adalah perkawinan antara saudara sepupu atau ada kaitannya dengan keluarga, namun kebiasaan itu bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Ternyata tidak sedikit pemuda-pemuda kawin dengan gadis-gadis yang bukan keluarganya. Mengenai cara peminangan dalam proses pelaksanaan sampai terjadi ikatan perkawinan adalah sebagai berikut: Apabila keluarga si pemuda sudah berketetapan untuk melamar seorang gadis, secara informal pihak keluarga pemuda mengadakan hubungan dengan orang tua si gadis. Setelah lamaran itu diterima dengan baik, maka secara resmi diutuslah kepada keluarga si gadis, suatu utusan yang terdiri dari laki-laki dan wanita yang dianggap sudah berumur dengan seorang juru bicaranya. Biasanya juru bicara yang dimaksudkan itu adalah orang yang pandai bicara dan disegani oleh masyarakat setempat. Pertemuan kedua belah pihak yang disaksikan oleh kaum kerabat dan tetangga terdekat itu dikenal dengan istilah *ngetas janji*, dan pada pertemuan itu pulalah diputuskan mengenai maskawin, hari perkawinan, tempat perkawinan dan sumbangan biaya dari pihak laki-laki.

Seperti lazimnya masyarakat tradisional di negeri kita ini, masyarakat di daerah ini terdiri dari kelompok-kelompok: kelompok menurut suku, kepercayaan, pekerjaan, status kelahiran dan sebagainya. Dalam hal ini kita dapat membedakan antara masyarakat Palembang asli dengan masyarakat yang tinggal di daerah Uluan yang belum banyak mendapat pengaruh dari luar. Palembang sebagai pusat kerajaan tradisional, masyarakatnya lebih banyak seluk-beluknya daripada masyarakat modern sekarang ini.

Tetapi baik masyarakat di pusat kerajaan maupun di daerah Uluan, secara umum dapat dibagi atas dua golongan besar yaitu : golongan penguasa dan golongan yang diperintah. Di pusat kerajaan, Raja adalah sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh keluarganya sebagai pegawai Tinggi (*Sentana Manteri*) dan golongan Priyayi yang disebut Manteri biasa. Adapun golongan Priyayi terdiri dari: *Pangeran, Raden* dan *Mas Agus*. Selain dari pada itu terdapat golongan rakyat (*non elite*) yang jumlah jauh lebih besar dari golongan tersebut di atas seperti: *Kiyai Mas, Kiyai Agus* dan rakyat biasa (orang-orang *Miji*, Orang *Senan* dan orang-orang yang tergadai dirinya /budak belian).⁹⁾ Nampaknya gelar-gelar tersebut masih juga dipakai tetapi tidak lagi mempunyai arti seperti dulu. Stratifikasi sosial yang berdasarkan kelahiran ini nampaknya semakin lama semakin menciut artinya dalam proses perkembangan masyarakat di daerah ini, namun stratifikasi sosial yang baru yang condong untuk berkembang atas dasar tinggi rendahnya pangkat dalam sistem birokrasi kepegawaian, atau atas dasar pendidikan sekolah belum lagi mendapat wujud yang mantap.

Ditinjau dari keadaan iklim dan alamnya, potensi daerah ini untuk membangun ekonominya tidak hanya terletak dalam bidang pertanian saja, tetapi terutama juga dalam sektor perkebunan karet rakyat dan kelapa sawit. Hampir seluruh daerah dataran rendah dapat ditanami dengan pohon karet dan kelapa sawit. Walaupun demikian usaha perkebunan hanya dapat diandalkan untuk menghasilkan modal bagi pembangunan, apabila usaha ke arah itu dilakukan dengan teknologi modern dan bantuan subsidi dari Pemerintah dalam pembukaan atau rehabilitasi ladang-ladang karet rakyat yang tidak produktif lagi. Suatu hal yang menggembirakan mengenai daerah ini adalah fasilitas pendidikan formal, yang dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya sekolah-sekolah seperti: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah Menengah Kejuruan dan di kota Palembang terdapat dua Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Sriwijaya dan Institut Agama Islam Raden Fattah) serta beberapa Perguruan Tinggi Swasta (Muhammadiyah dan Yayasan Sakyakirti), yang sudah jauh lebih baik dari pada pendidikan dalam jaman penjajahan.

Namun demikian selain aspek positif dari kenyataan ini, dapat pula dihubungkan dengan masalah lain, yaitu sikap mental yang diwarisi dan gaya hidup masyarakat jajahan Belanda yang terlampau lama mempengaruhi kebudayaan di daerah ini, sehingga cita-cita orang tua mereka menjadikan anak-anaknya pegawai negeri, merupakan tujuan terakhir walaupun usaha untuk menjadi pegawai negeri akhir-akhir ini bukanlah suatu hal yang mudah.

9) J.L. van Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971, hal. 25-28.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAK

Pengetahuan kita tentang pendidikan Indonesia asli sebelum mendapat pengaruh dari dunia luar (India), tidak banyak kita ketahui dengan pasti. Tetapi apabila kita berpaling kepada beberapa suku bangsa Indonesia sendiri yang sampai sekarang ini masih hidup sederhana seperti suku Anak Dalem (Kubu) di daerah ini, kiranya berlaku apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Vloemans; bahwa pendidikan itu pemberian pengertian dan contoh-contoh secara langsung, justru karena manusia itu sendiri adalah makhluk budaya.

Apabila kita perhatikan pola dasar kehidupan suku bangsa yang masih hidup bersahaja, apakah mereka itu hidup mengembara atau berburu dan hidup terutama dari pertanian atau berternak, mempunyai pengaruh yang besar pula pada cara pendidikan yang diberikan. Masyarakat pedesaan di daerah ini yang hidup bercocok tanam dengan padi sebagai tanaman pokok, tentu sejak dari kecil anak-anak ikut dilatih melakukan pekerjaan di sawah atau ladang. Sekurang-kurangnya mereka telah mengenal beberapa alat yang diperlukan untuk mengerjakan sawah atau ladang. Demikian pula masyarakat yang tinggi di daerah lebak (sebelah menyebelah sungai Batanghari Sembilan atau pantai), diberi contoh oleh orang tuanya cara-cara menangkap ikan, diajar berenang, mengempang sungai dan membuat alat-alat yang berhubungan dengan penangkapan ikan seperti: bubu, jempirai, jala, pukut dan sebagainya. Oleh karena itu tujuan pendidikan yang diberikan tidak dengan sengaja itu merupakan pendidikan yang praktis, serbaguna dan efisien.

Sementara mereka masih hidup serba bersahaja, nampaknya pendidikan dalam lingkungan keluarga sudah dianggap memenuhi kebutuhan, di mana peranan ayah dan ibu sebagai pendidik memegang peranan penting. Ayah mengajarkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padanya kepada anak laki-laki, sedangkan ibu berbuat demikian pula terhadap anak-anak perempuan. Di samping orang tua sebagai pendidik, di dalam masyarakat seperti itu biasanya terdapat suatu golongan yang memiliki kecakapan istimewa, karena di samping memiliki pengetahuan duniawi juga memiliki pengetahuan maknawiah, yang lazim di daerah ini disebut *poyang-poyang* (kata itu berasal dari *empu* dan *hyang*). Poyang-Poyang ini kemudian sering disebut *Guru* atau *Kiyai* setelah daerah ini mendapat pengaruh Islam yang menjadi titik tumpu dan sebagai tempat bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib dan hubungan sesama manusia (adat istiadat).

Ketika munculnya Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan pantai di daerah ini, maka agama Budha dijadikan agama Negara, dan dalam perkembangannya kemudian menduduki tempat yang penting, tidak hanya dalam dunia pelayaran perdagangan, tapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan agama Budha di Asia Tenggara. Walaupun agama itu anti kasta, namun dalam perkembangannya hanyalah terbatas pada kalangan penitoni keraton saja dan tidak menyebar ke daerah Uluan. Dasar pendidikannya dititik beratkan pada ajaran agama

Budha, di samping ilmu kejuruan dan ketrampilan lainnya yang sejalan dengan kebijaksanaan yang dianut oleh keraton dagang tersebut. Apa yang pernah diberitakan oleh I-Tsing mengenai pusat studi agama Budha yang pernah ada di daerah ini, tentu tidak akan banyak berbeda dengan pusat pendidikan agama Budha di Nalanda, bahkan di Nalanda sendiri terdapat asrama untuk para siswa yang berasal dari Sriwijaya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya.

Kemudian menjelang runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan semakin longgarnya hubungan daerah ini dengan kerajaan Indonesia-Hindhu di Jawa, maka mulailah pendidikan diberikan oleh Ulama Guru (Kiyai) pada siswa-siswa dalam jumlah yang terbatas berdasarkan agama Islam. Agama Islam sebagai dasar ilmu pengetahuan yang dicitrakan kepada masyarakat melalui sistem pengajian, yang mula-mula pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran di rumah Ulama Guru (Kiyai) dan kemudian berlangsung di masjid atau langgar. Akhirnya pendidikan dan pengajaran Islam yang lebih lanjut dilaksanakan di pesantren dan kemudian di madrasah-madrasah.

Pendidikan Barat di daerah ini baru pertama kali dikenal pada akhir abad ke-19, yaitu dengan ditandai adanya usaha *Zending* di daerah Tanjung-sakti. Kemudian pada permulaan abad ke-20 yang dianggap sebagai awal pelaksanaan Politik Etika di daerah ini, dengan berdirinya sekolah Gubernemen yang lazim disebut "Sekolah Desa". Dalam rangka untuk menyebarkan bahasa Belanda di kalangan masyarakat tertentu, di kota-kota tertentu dibukalah sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda misalnya: HIS, HCS, MULO dan sebagainya. Sesuai dengan politik kolonial Belanda, pada dasarnya tujuan pendirian sekolah-sekolah tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga-tenaga terdidik untuk dipergunakan dalam instansi pemerintah atau perkebunan-perkebunan Asing sebagai jurutulis dengan gaji yang rendah.

Di samping adanya sekolah-sekolah negeri, terdapat juga di daerah ini sekolah-sekolah yang dikelola oleh perorangan atau badan swasta, baik yang bernafaskan agama maupun yang bersifat nasional. Mengenai sekolah-sekolah yang bernafaskan agama Islam, biasanya diusahakan oleh perorangan, organisasi Serikat Islam dan Muhammadiyah. Di samping itu terdapat pula di beberapa daerah, sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Perguruan Taman Siswa, dan sekolah-sekolah yang diasuh oleh Misi.

Setelah daerah ini diduduki oleh Jepang, maka semua sekolah Negeri, kecuali sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda atau guru-gurunya orang Belanda, dijadikan alat untuk menanamkan landasan ideologi *Hakko-Ichi-U*, yaitu mengajak bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang dalam rangka mencapai "Kemakmuran Bersama Asia Raya". Sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda dihapuskan sama sekali, sedangkan sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah ini pada waktu itu, praktis tidak dapat berkembang dan akhirnya bubar. Dengan semboyan "Indonesia-

Nippon sama-sama", maka semangat dan disiplin Jepang dipompakan di sekolah-sekolah dalam rangka persiapan lahir dan batin untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Suatu hal yang terjadi pada masa itu, adanya perubahan yang penting sekali artinya bagi perkembangan pendidikan dan pengajaran selanjutnya di Indonesia, yaitu terhapusnya diskriminasi di bidang pengajaran dan pemakaian bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa pengantar pada tiap jenis sekolah.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, timbulah perubahan di segala lapangan, dan perubahan itu tidak hanya terjadi dalam lapangan pemerintahan, tetapi juga terjadi dalam dunia pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu menyangkut landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun negara kita mengalami beberapa kali perubahan UUD, namun dasar dan falsafah Negara tidak mengalami perubahan, dan oleh karena itu Pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Mengenai tujuan pendidikan selalu disesuaikan dengan keadaan, yang pada mulanya ditekankan kepada penanaman semangat patriotisme. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 4/1950 dan Undang-undang No. 12 tahun 1954, tujuan pendidikan lebih ditekankan kepada pembentukan manusia susila yang cakap dan demokratis. Akhirnya sampai sekarang, tujuan pendidikan Nasional diperbaharui dengan keputusan Presiden RI No. 145/1965 dengan dikokohkan oleh Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai sistem persekolahan di Indonesia berlaku lima tingkat: Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak), Pendidikan Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Umum dan Kejuruan), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Umum dan Kejuruan) dan Perguruan Tinggi dalam bentuk Universitas, Institut, Akademi atau Sekolah Tinggi yang diatur oleh Undang-undang No. 22 tahun 1961. Sedangkan mengenai kesempatan belajar diatur oleh Undang-undang Pendidikan tahun 1950 pasal 17; bahwa setiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Mengenai sekolah-sekolah di daerah ini dalam kurun waktu penjajahan Belanda sampai pada awal Revolusi Fisik, baik jenis maupun jumlah sekolah sangat langka, jika dibandingkan dengan keadaan di Jawa.

Pada jaman kolonial Belanda tidak adanya demokratisasi dalam pendidikan dan terbatasnya sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah, mengingat biaya yang tersedia tidak mencukupi dan minat dari masyarakat sendiri kurang untuk memasuki sekolah-sekolah pemerintah sebagai akibat tradisi setempat.

Kemudian pada jaman Jepang, perkembangan sekolah-sekolah di daerah ini semakin menciut, bahkan banyak yang membubarkan diri atau dihapuskan oleh Jepang. Oleh sebab itu pada awal Revolusi Fisik, banyak pemuda-pemudi yang berasal dari daerah ini meneruskan sekolahnya ke Jawa, mengingat langkanya sekolah-sekolah di daerah ini dan ditinjau dari segi biaya lebih menguntungkan di Jawa. Tetapi setelah tahun enam puluhan dan seterusnya, mulai bertambah sekolah-sekolah didirikan oleh Pemerintah atau badan swasta, baik tingkat Sekolah Lanjutan Atas maupun tingkat Akademi atau Universitas. Dengan bertambahnya sekolah-sekolah tersebut di daerah ini, maka dari tahun ke tahun semakin berkuranglah pemuda-pemudi yang meneruskan pelajarannya ke Jawa.

BAB II PENDIDIKAN TRADISIONAL

A. PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDHA

Sebelum masyarakat di daerah ini menerima pengaruh kebudayaan Hindu, leluhur kita dalam melaksanakan tugas untuk mendidik anak-anaknya berlaku apa yang pernah dikatakan oleh Br. Vloemans, bahwa pendidikan itu berarti memberi pengertian dan contoh-contoh secara langsung, seperti yang berlaku di kalangan masyarakat suku Anak Dalem (suku Kubu) di daerah ini. Pendidikan hanya merupakan pewarisan kebiasaan yang turun-temurun dalam kelompok masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan alam sekitar mereka bertempat tinggal menetap. Tipe masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah dataran tinggi dan di sebelah menyebelah sungai Batanghari Sembilan¹⁾ pada dasarnya sama, yaitu teknik bercocok tanam di ladang atau sawah dengan padi sebagai tanaman pokok sambil berburu binatang atau menangkap ikan sebagai pekerjaan sampingan. Mereka yang tinggal di dataran rendah atau di pinggir sungai, di samping usaha pokok mengerjakan sawah yang tergantung pada alam sekali setahun, menangkap ikan dengan cara tradisional di sungai atau *lebak-lebung* dianggap sebagai mata pencaharian yang tidak kalah pentingnya dengan menanam padi di sawah. Oleh sebab itu pengetahuan mereka yang tinggal di daerah tersebut mengenai cara menangkap ikan jauh lebih berkembang dari pada mereka yang tinggal di dataran tinggi atau sebaliknya.

Apa yang dilakukan oleh orang tua dikerjakan atau dibiasakan pula pada anak-anaknya, dan sejak kecil anak-anak sudah diajak untuk mengikuti pekerjaan orang dewasa misalnya: berburu, menangkap ikan, berladang/bersawah, membuka hutan, membuat senjata, membuat perahu dan lain-lain bagi anak lelaki. Sedangkan bagi anak wanita diajarkan cara menganyam tikar membuat bakul/keranjang, memasak nasi dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan rumah tangga.

Kesemua pendidikan itu diberikan secara langsung. Demikian pula mengenai beberapa isyarat dalam bentuk suara, tanda-tanda khusus dan mimpi dijelaskan secara lisan kepada mereka dan lambat laun dapat dimengerti dan

1) Yang dimaksud Batanghari Sembilan: s. Kelingi, s. Bliti, s. Lakijan, s. Rawas, s. Rupit, s. Batanghari Leko, s. Lematang, s. Ogan dan s. Komering. Kesembilan anak sungai tersebut dianggap sebagai suatu latar belakang historis yang memegang peranan penting dalam proses penyebaran kekuasaan, kebudayaan dan ekonomi.

dihayati secara turun-temurun. Di samping beberapa isyarat yang tersebut di atas, tidak kurang pentingnya peranan *floklore* yang dikenal dengan nama *andai-andai*²⁾ di daerah ini. Andai-andai ini tidak hanya sebagai pelipur lara bagi yang mendengarkan, tetapi berfungsi juga sebagai alat pendidikan moral seperti yang terkandung dalam cerita *Si Pahit Lidah*, *Batubelah batubetangkup* dan sebagainya. Demikian pula mengenai andai-andai panjang (*jèmaran* dan *jelihiman*) yang disampaikan oleh pawang/dukun di malam hari dan didengarkan oleh orang banyak, merupakan suatu cara yang unik dalam kerangka pendidikan di daerah ini.

Apabila kita simpulkan mengenai penjelasan di atas, maka sebelum kedatangan kebudayaan Hindu, di daerah ini telah mengenal suatu sistem pendidikan tradisional yang erat hubungannya dengan cara hidup setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti: berladang/bersawah, berburu, menangkap ikan dan lain-lain. Partisipasi secara langsung, baik secara berkelompok atau perorangan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, merupakan suatu sistem yang telah berlaku di daerah ini dari abad ke abad dalam masyarakat pedesaan, di mana peranan orang tua atau pemuka rakyat setempat yang dikenal dengan nama Poyang menjadi titik tumpu sistem pendidikan dalam masyarakat tradisional sebelum daerah ini mendapat pengaruh kebudayaan Hindu/Budha.

Pada awal sejarah pendidikan di daerah ini telah dimulai dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga sendiri yang bertujuan supaya anak-anaknya di kelak kemudian hari dapat memegang kekuasaan dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki kecakapan istimewa, manusia yang bersifat gotong-royong, manusia yang menghormati poyang-poyang dan manusia yang taat kepada adat.³⁾

Oleh karena orang tua poyang-poyang yang menjadi pusat penyampaian pewarisan kebiasaan yang turun temurun, maka sistem pendidikan seperti ini dapat dianggap sebagai embrio bagi perkembangan pendidikan selanjutnya setelah mendapat pengaruh dari luar (Hindu/Budha dan Islam). Pemuka-pemuka rakyat (poyang-poyang) yang dianggap golongan terkemuka berdasarkan konsepsi kepemimpinan masyarakat tradisional yang berorientasi religio-magis, yang di beberapa daerah kabupaten dikenal dengan nama *jurai tuo*, pada

2). Kertas kerja Ma'moen Abdullah pada Seminar Folklore di Yogyakarta dengan judul: *Anda-anda sebagai cerita rakyat Sumsel*, Universitas Gajahmada, 1975; James Dana-djaja, "Guna Teater Rakyat bagi kehidupan masyarakat Indonesia," dalam *Berita Antropologi* Th. VII. No. 22 Juli 1975, Jakarta, hal. 46.

3) I. Djumhur, Drs. H. Dasaputra, *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu, Bandung, 1976, hal. 104-105.

umumnya mengenal pengetahuan, menulis dalam bentuk *aksara Ulu*.⁴⁾ Ada kemungkinan aksara tersebut sebagai sisa pendidikan nenek moyang kita atau sekurang-kurangnya masyarakat di daerah ini mengenal tulisan pada kurun waktu kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Namun demikian aksara Ulu yang belum banyak diteliti itu, nampaknya tidak semua orang dapat menuliskan dan mengetahui artinya, melainkan hanya terbatas pada *tua-tua dusun* atau orang-orang yang termasuk golongan tertentu (*jurai tuo*) secara turun temurun.

Pada umumnya bangsa Indonesia memasuki kurun sejarah setelah kebudayaan Hindu datang ke Nusantara dalam abad pertama atau kedua Masehi, dengan pengertian bahwa pengaruh kebudayaan itu hanya terbatas pada tempat-tempat yang tidak jauh letaknya dari urat nadi jalan dagang internasional via Selat Malaka. Jadi tidak mengherankan apabila daerah pantai timur Sumatera, khusus daerah pantai timur Sumatera bagian Selatan, telah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu pada awal Tarikh Masehi.⁵⁾ Kepala-kepala suku yang berkuasa pada waktu itu memperkembangkan kebudayaan asli sambil menciptakan hubungan internasional yang kuat dengan Asia. Untuk kepentingan mereka dalam dunia perdagangan internasional, tindakan ke arah organisasi yang lebih teratur terhadap keraton dan rakyat, maka dipanggillah pendukung-pendukung kebudayaan India ke Timur.

Investitur terhadap kepala-kepala suku tadi yang bersifat sakral legimitasi, menimbulkan kedatuan-kedatuan baru sebagai tempat golongan penguasa dan golongan birokrasi yang menentukan politik dan kebudayaan negara. Di antara kedatuan-kedatuan itu baru dikenal pada akhir abad ke-7 Masehi, di mana Kerajaan Sriwijaya yang pusat kuasanya terletak tidak jauh dari kota Palembang sekarang ini.⁶⁾ merupakan negara pantai yang berdasarkan konsepsi agama Budha.⁷⁾

-
- 4) Tulisan tangan yang lebih dikenal dengan nama "tulisan Ulu" ditulis pada kulit kayu ("karas"), tanduk dan bambu dapat disamakan dengan daun lontar di Bali sebagai pengganti kertas pada waktu itu, banyak terdapat di daerah LIOT yang sebagian besar tidak terpelihara.
 - 5) C. Nooteboom, *Sumatera dan Pelayaran di Samudra Hindia*, Bharatara, Jakarta, 1972, hal. 10-14; Prof. Dr. N. J. Krom, *Zaman Hindu*, PT. Pembangunan, Djakarta, 1954, hal 29.
 - 6) Kebanyakan para ahli menentukan lokasipusat kerajaan itu di pulau Sumatera, tetapi kenyataannya prasasti-prasasti sebagian besar diketemukan di daerah Sumatera bagian Selatan.
 - 7) Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1976 hal 23.

Awal penetrasi agama Budhà di daerah ini, nampaknya hanya terbatas pada kalangan penguasa atau golongan yang terdekat dengan penguasa, sedangkan pengaruhnya di daerah Uluuun belum begitu kelihatan. Mungkin sekali sulitnya hubungan antar kota pelabuhan dengan daerah-daerah Uluuun, menyebabkan penyebaran kebudayaan itu tidak begitu lancar karena satu-satunya hubungan pada waktu itu mempergunakan jalan sungai. Akibat keadaan alam di daerah ini, proses pembentukan rawa-rawa sampai ke muara Sungai, lebatnya hutan rimba yang dihuni oleh binatang buas, telah mempersulit hubungan antara daerah yang satu dengan yang lainnya dan proses perkembangan kebudayaan pun ke daerah-daerah Uluuun semakin lambat. Oleh sebab itu masyarakat pedesaan yang hidupnya bertani dengan padi sebagai tanaman pokok, masih tetap teguh memegang tradisi lama seperti penyembahan benda-benda sakti atau roh-roh nenek moyang. Salah satu faktor itu pulalah yang menyebabkan Islam mudah berkembang di daerah Uluuun, karena pengaruh Budhisme sangat tipis dan perkembangannya hanya terbatas pada golongan aristokrat saja.⁸⁾

Walaupun telah ada tanda-tanda agama Budha di daerah ini dengan diketemukannya patung Budha dengan corak Amarawati di bukit Siguntang, namun gambaran yang lengkap mengenai pendidikan dan ilmu pengetahuan didapatkan dari sumber-sumber Cina beberapa abad kemudian.

Salah seorang diantara musyafir-musyafir Cina yang pernah melakukan perjalanan ke India dan singgah di Sriwijaya adalah I Tsing. Sebelum sampai ke India ia singgah lebih dulu di Sriwijaya selama enam bulan untuk mempelajari gramatika bahasa Sanskerta dalam tahun 671 Masehi. Kemudian dalam perjalanan pulang ke negeri asalnya, dalam tahun 685 Masehi singgah lagi untuk menyalin dan menterjemahkan kita-kitab agama Budha. oleh karena tugas tersebut sangat berat dan memerlukan pembantu-pembantu khusus, maka ia pulang ke Kanton untuk menjemput empat orang pembantu dan kemudian dibawa ke Sriwijaya. Rupa-rupanya tidak hanya kitab-kitab yang berhubungan dengan agama Budha saja yang digarapkannya, tetapi juga menulis dua biografi musyafir-musyafir pendahulunya dan suatu karya tulis yang berbobot mengenai pelaksanaan agama Budha di India dan Semenanjung Malayu. Akhirnya hasil karya ilmiahnya itu dikirimkan ke Cina melalui utusan seorang ulama-musyafir pada tahun 692, sedangkan ia sendiri baru sempat pulang ke Kanton dalam tahun 695 Masehi.⁹⁾

Karya tulis I-Tsing yang menceritakan hal ikhwal orang-orang yang mendahului dia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dengan judul

8) Dra. Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Sejarah Pendidikan J. Yayasan 3-IP IKIP*, Yogyakarta, 1975, hal.8

9) Prof. Dr. N.J. Krom, *op.cit.* halaman 54-55

"Memoire sur les religieux eminents qui allerent chercher la Loi dans les pays d'occident" dan karya tulis lainnya yang telah disalin ke dalam bahasa Inggris dengan judul "A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelego," merupakan sumber penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri agama Budha yang berkembang pada waktu itu. Demikian pula mengenai fungsi Sriwijaya sebagai kerajaan pantai, telah menduduki tempat yang penting sebagai pusat ilmu pengetahuan agama Budha di Asia Tenggara, di mana Palembang sendiri kemudian menjadi pusat ziarah pemeluk-pemeluk agama Budha.¹⁰⁾

Para peziarah ini berdatangan dari berbagai penjuru terutama dari Cina, dan di samping itu dari India sendiri berdatangan pula para pendeta ke tempat ini dalam perjalanannya ke Jawa. Usaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Budha terus dikembangkan, lebih-lebih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa dan sesudahnya. Atas permintaan raja Balaputra Dewa kepada raja Dewapaladewa, maka didirikanlah wihara di Nalanda sebagai tempat penampungan bagi mahasiswa yang datang dari Sriwijaya atau dari daerah Timur lainnya. Kemudian dalam tahun 1005 raja pengganti Balaputra membangun sebuah candi Budha di Nagipattana dengan nama Cudamaniwarmanwiraha.¹¹⁾

Di dalam agama Budha sendiri perniagaan dapat sejalan dengan agama, karena cita-cita ke bodhisatwaan merupakan inti kehidupan rokhaniah dalam arti bahwa setiap individu harus berusaha dan berbuat demi keselamatan umat manusia, agar manusia itu sendiri mempunyai arti di dunia ini.¹²⁾ Perbuatan adalah dasar hidup mereka dan betapa sederhananya suatu pekerjaan, akan tetap dianggap mulia, sehingga pekerjaan berniaga adalah suatu hal yang diakui. Terkutuklah mereka yang tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dalam sejarah Cina abad ke 9 dan 10 Masehi, biara-biara sebagai tempat para pendeta agama Budha menjadi pusat kegiatan bank dan menjadi tempat pertemuan saudagar-saudagar asing.¹³⁾

Apa yang diberitakan oleh Fa-Hien yang pernah berkunjung ke India mengenai masa pemerintahan raja Candragupra II ± 375 Masehi, di mana suatu biara yang dapat menampung 1000 orang biarawan yang melakukan studi dan diskusi/seminar. Biara tersebut merupakan ashrama bagi mereka yang diperlengkapi dengan enam ruang sidang yang cukup luas, gedung bertingkat tiga dikelilingi oleh dinding tembok setinggi sepuluh meter dan tiga buah menara tinggi terpancang di kiri kanan bangunan tersebut.

10). Sartono Kartodirdjo. et al, *Dejarah Nasional Indonesia II*, Balai pustaka, Jakarta, 1977 halaman 53.

11) *Ibid.*, hal 57.

12). R. Moh. Ali, *Peranan bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*, Bhatara, Jakarta, 1963, hal 32

13) Dra. Sutari Imam Barndib, *op.cit.*, hal. 9

Keadaan bangunan dan sistem pendidikan yang berlaku pada waktu itu sedikit banyak berpengaruh dan berkembang di Sriwijaya pada waktu kerajaan itu mencapai puncak kebesarannya berdasarkan konsep agama Budha sebagai agama negara. Hal ini sesuai dengan berita musyafir I-Tsing yang pernah melakukan studi kelayakan di Sriwijaya, yang menggambarkan keadaan perkembangan agama Budha pada waktu itu dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang pernah dikunjungi oleh seorang mahaguru Dharmapala yang pernah memberikan kuliah di Universitas Nalanda. Di samping itu terdapat tujuh orang guru tetap yang memberikan pengajaran dan salah satu di antaranya ialah Shakyakirti yang mempunyai reputasi internasional. Dalam tahun 720 Masehi pusat kegiatan ilmu pengetahuan dikunjungi oleh Vajrabodi Amogavraja¹⁴⁾ dalam rangka menyebarkan agama Budha Mahayana di daerah selatan.

Yang menarik perhatian kita mengenai bahasa Melayu Kuna yang secara resmi dipakai di Kerajaan Sriwijaya, maka besar kemungkinan bahasa tersebut di samping bahasa Sanskerta dan Pali dipelajari juga oleh para musyafir atau mahaguru yang pernah memberikan pendidikan dan pengajaran di pusat kegiatan ilmu pengetahuan tersebut. Tetapi penting posisi dan fungsi kerajaan Sriwijaya sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan di samping pusat pelayaran perdagangan, banyak dikunjungi oleh musyafir ulama untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama atau yang ada sangkut pautnya dengan pelayaran perdagangan. Sebagai kerajaan pantai lambat laun menjadi kuat dan termasyhu dimana-mana, karena orientasinya pada pelayaran perdagangan dengan daerah-daerah seberang lautan, dan secara keseluruhan telah menguasai urat nadi pelayaran via Selat Malaka termasuk beberapa daerah di Semenanjung Malaya pada akhir abad ke-8 (\pm 775 Masehi).¹⁵⁾

Untuk melaksanakan perdagangan yang luas itu diperlukan sarana dan prasarana transportasi serta pegawai-pegawai yang dapat menjalankan semua kegiatan berhubungan dengan itu. Maka untuk ini diperlukan pendidikan atau keterampilan (menghitung laba-rugi, ilmu pelayaran, membuat perahu dan sebagainya), karena perdagangan itu sendiri meminta pendidikan yang praktis dan langsung dapat dipakai dalam perniagaan. Oleh sebab itu pada awal proses pengembangan pendidikan di dalam keraton dagang di mualai dengan ilmu-ilmu praktis yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan, dan kemudian menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual religius. Karena letak ibukotanya di pertengahan jalan dagang laut antara Cina-India, tidak mengherankan ibukota Sriwijaya tersebut telah menjadi pusat pertemuan-pertemuan saudagar-saudagar asing dan pendeta-pendeta dalam perjalanan dari Cina ke India atau sebaliknya, sehingga akhirnya menjadi pusat perdagangan dan pusat pengkajian agama Budha.

14) M.O. Parlung dan Tuanki Rao, *Ranjung Pengharapan Medan* 1964 hal. 576

15) Satyawati Suleman *Concise Ancient History of Indonesia* Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1977 hal. 18

Apabila kita mengakui dinasti Syailendra bagian dari keluarga raja-raja Sriwijaya, yang pada akhir abad ke-8 Masehi pernah meletakka titik tumpu kuasanya di daerah Jawa Tengah, maka bangunan-bangunan suci yang masih berdiri sekarang ini (borobudur, Mendut, Pawon) adalah hasil karya seni bangun dan seni pahat dalam kerangka arsitektur yang tidak ternilai. Pada salah satu dinding candi Borobudur dapat terlihat suatu lukisan yang menggambarkan sistem persekolahan pada waktu itu. Di tengah-tengah pendopo besar duduk seorang pendeta (Brahmana) yang dikelilingi oleh siswa-siswa yang sedang memegang buku untuk belajar membaca dan menulis. Siswa-siswa tinggal bersama dengan gurunya dalam satu asrama, di mana guru itu sendiri tidak menerima gaji karena hidupnya telah dijamin oleh siswanya sendiri. Dasar pendidikan tentunya dititik beratkan pada agama Budha di samping ilmu kejuruan lainnya, yang sejalan dengan politik yang dianut oleh keraton dagang untuk memperoleh laba yang besar. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa-masa sebelum dan sesudah perkembangan agama Budha di daerah ini telah teratur dengan baik, walaupun di san sini (daerah Uluan) terdapat sistem pendidikan yang berpusat pada orang tua (rumah tangga).

Pada abad-abad terakhir menjelang runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yang telah diawali oleh serbuan Cola dalam tahun 1024/1025 Masehi dan akhirnya dalam pertarungan perebutan antara keraton-keraton di Nusantara, yang pada taraf terakhir dimenangkan oleh Jawa sebagai kerajaan agraris-maritim,¹⁶⁾ nampaknya sistem pendidikan tidak lagi dijalankan secara besar-besaran seperti keadaan sebelumnya. Keadaan itu berlaku di Indonesia pada umumnya ketika menjelang runtuhnya kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu¹⁷⁾ dan munculnya kota-kota bandar yang bernafaskan Islam sebagai ideologi yang kuat. Pendidikan diberikan oleh Ulama Guru pada siswa-siswa dalam jumlah terbatas di tempat ibadat (mesjid) atau di rumah Ulama Guru itu sendiri. Ilmu yang diberikan tidak hanya bersifat spiritual religius, tetapi juga ilmu-ilmu yang bersifat praktis diajarkan kepada mereka, seperti ilmu bela diri (pencak), dukun patah, pertanian, pelayaran perdagangan, perikanan dan sebagainya. Namun ilmu-ilmu tersebut diberikan kepada mereka secara turun-temurun melalui jalur keturunan. Oleh sebab itu apa yang kita lihat pada masyarakat yang hidup di pedesaan sekarang ini, ilmu yang praktis itu tidak semua orang memilikinya melainkan hanya oleh suatu kelompok keluarga/daerah tertentu secara turun temurun.

Pengaruh kekuasaan Barat di daerah ini baru dimulai pada awal abad ke-19, meskipun pengaruh VOC telah dimulai sejak tahun 1722. Kemudian pen-

-
- 16) B. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies*, W. van Hoeft the Hagus Bandung, 1955, hal. 16
- 17) Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta, 1979 hal. 29

dudukan daerah ini secara riil baru diintensifkan pada tahun 1808, yaitu dalam rangka politik Daendels mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga Palembang sebagai pusat Kesultanan diduduki oleh pasukan Daendels yang berkekuatan 100 orang.¹⁸⁾ Baik bangsa Belanda maupun bangsa Inggris, nampaknya tidak memberikan pengaruh khusus kepada corak pendidikan di daerah ini, karena hubungan mereka itu hanya terbatas dalam dunia perdagangan.

Seperti telah kita ketahui, Inggris telah menduduki Bengkulu waktu itu, sedangkan antara Inggris dan Belanda sendiri bermusuhan. Dalam usaha untuk menguasai Palembang dan mengusir tentera pendudukan Daendels, Raffles pernah mengadakan kontak dengan Sultan (Makhmud Badaruddin II) dengan mengirimkan 80 pucuk senjata dan amunisi. Hubungan Kesultanan Palembang dengan bangsa Portugis di Malaka sampai pada akhir abad ke-16 selalu mengikuti kebijaksanaan Demak, yang telah mengambil alih peranan Malaka dalam menyebarkan agama Islam di daerah Nusantara. Serbuan Demak terhadap Malaka sejak tahun 1512-1513, 1535-1551 dan 1574¹⁹⁾; selalu mendapat bantuan dari Palembang, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada bangsa itu untuk berpengaruh di daerah ini. Dengan adanya persaingan antara Inggris di Bengkulu dengan Daendels untuk menguasai daerah ini sebagai penghasil lada dan timah, menyebabkan pengaruh Barat sangat minim dan perkembangan pendidikan tradisional tidak mengalami perubahan yang bersifat mendasar.

Sementara Inggris masih berkuasa di Bengkulu, sempat juga misi Jerman di bawah Zending memasuki daerah Tanjungsakti pada tahun 1860, dan oleh karena sesuatu hal tugas suci itu diserahkan kepada misi Katolik dalam tahun 1896,²⁰⁾ di bawah asuhan seorang pastor Pater J. van Meuts.²¹⁾ Oleh karena itu sempat juga mereka membuka sebuah Sekolah Desa (Volkschool) ti tahun dan Vervolgschool dua tahun di Simpangtiga Tanjungsakati, di Benting dan di Jokobelut di bawah asuhan P.J. nan Hoof dan kemudian dilanjutkan oleh Vanjenshein.

Setelah itu dibuka pula sebuah sekolah pertanian (*Landbouwschool*) yang lama belajar satu tahun.²²⁾ Dalam masyarakat setempat sekolah itu lebih dikenal dengan nama "Sekolah Minggu" karena kegiatannya pada hari Minggu saja di gereja. Mula-mula sekolah tersebut mendidik ± 30 orang murid dan kemudian menjadi 50 orang murid. Tetapi dalam tahun 1918 sekolah ter-

18) H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, W van Hoeve, Gravengage, Bandung, 1949, hal 305.

19) B.Schrieke, op.cit, hal 146; B.H.M. Vlekke, *Nusantara a history of Indonesia*, PT Seoeroengan, Jakarta, 1961 hal. 97.

20) Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia porpinsi Sumsel*, Jakarta, 1954 hal 706

21) Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), *Sejarah Gereja Katholik Indonesia* Arnaldus Ende-Flores, 1974 hal. 167.

22) Wawancara dengan Sdr. H. Jentamat dan Wasin T'sakti, 7-7-1980

sebut terpaksa ditutup karena tidak ada muridnya. Penyebaran agama Katholik dengan mempergunakan sarana pendidikan yang setingkat dengan pendidikan dasar pada akhir abad ke-19, hanya terbatas di daerah sekitar Tanjung-sakti dan tidak dapat menjangkau daerah yang lebih luas, karena mendapat tantangan hebat dari masyarakat setempat setelah masuknya Serikat Islam di daerah Pagaralam pada awal abad ke-20. Akhirnya setelah jatuhnya Kesultanan Palembang yang ditandai dengan dasingkannya Sultan Makhmud Badaruddin II ke tempat pembuangannya di Ternate, maka antara tahun 1848 - 1868 daerah Uluang demi satu berhasil dikuasai oleh pemerintah Belanda,²³⁾ dan kemudian mengambil alih segala harta benda termasuk milik gereja Katolik dengan lembaga pendidikannya.

B. PENGARUH AGAMA ISLAM

Kapan agama Islam masuk ke daerah ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun demikian karena letak geografis Indonesia dan daerah Sumatera Selatan pada khususnya berpapasan dengan garis Khatulistiwa, kunci dua Samudra dan jembatan antara daratan Asia Australia, merupakan pintu gerbang yang penting dan silang pertemuan antara pedagang-pedagang yang datang dari segala penjuru, sehingga daerah ini terbuka bagi migrasi bangsa-bangsa, penetrasi kebudayaan dan ekspansi politik ekonomi. Itulah sebabnya pulau Sumatera, termasuk daerah Sumatera Selatan, jauh lebih dulu berkenalan dengan Islam daripada daerah-daerah lain di Indonesia, apabila kita menganggap "jalan dagang dunia" via Selat Malaka sebagai perintis jalan kebudayaan bagi penetrasi Islam ke Timur.

Sebagai akibat perkembangan perdagangan internasional yang melalui jalan dagang tersebut, maka pada awal abad ke-8 Masehi Islam sudah sampai di daerah ini,²⁴⁾ yang dibawa oleh pedagang-pedagang asing seperti: Orang-orang Gujarat, Arab dan Parsi sebagai misionaris merangkap pedagang. Rupanya agama Islam pada waktu itu belum merupakan faktor politik yang dominan dan masih memerlukan waktu beberapa abad kemudian, karena Kerajaan Sriwijaya masih berkuasa penuh dan kemudian daerah ini di bawah pengaruh Majapahit. Tetapi ketika hubungan daerah ini dengan Majapahit semakin longgar, maka Palembang sebagai tanah asal Raden Fattah mulai berkembang menjadi pusat politik ekonomi dan kebudayaan, yang dianggap sebagai pusat tenaga ekspansi baru dengan Islam sebagai motor pendorong yang kuat di daerah ini. Kota Palembang yang terletak di sebelah menyebelah sungai Musi yang sekarang menjadi ibukota Propinsi Sumatera Selatan, dahulu diba-

23) J.L. van Sevenhoven, *Lukisan tentang ibukota Palembang*, Bharata, Jakarta, 1971, hal. 46

24) Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke-II, *Masuk dan Perkembangan Agama Islam di bumi Sriwijaya*, Plaju, 1974 hal. 23. Lihat dan bandingkan M.O. Parlung *op.cit.* hal 576.

ngun di suatu tempat yang tidak jauh dari Bukit Siguntang, suatu tempat yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan seksama, di mana lalu lintas perdagangan via anak sungai Batanghari Sembilan dapat dikuasai. Karenanya betapa penting anak-anak sungai itu sebagai jalur komunikasi dalam usaha menyebarkan agama Islam ke daerah Uluu.

Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini pada umumnya melalui dua jalur; jalur pertama melalui pedagang-pedagang asing Muslim yang tinggal di kota pelabuhan. Oleh karena kedudukan sosial ekonominya jauh lebih baik dan tingkah laku yang sopan, menyebabkan mereka berpengaruh di kalangan masyarakat. Apabila seorang pribumi terkemuka telah memeluk agama tersebut, maka rakyat kebanyakan akan dengan mudah terpenggil pula. Demikian pula peranan kepala keluarga sangat menentukan, karena apabila seorang ayah telah memeluk agama Islam, maka mau tidak mau anak isterinya pun akan mengikutinya pula. Jalur yang kedua ialah melalui para pedagang Sumatera Selatan sendiri yang banyak bepergian berdagang ke tempat lain, di mana agama itu sudah berkembang seperti di Perlak (passai) dan Malaka. Selama pergaulan dalam perdagangan itu mereka belajar agama Islam, dan ketika mereka kembali bukan saja barang dagangan yang dibawa, akan tetapi ajaran agama itu pun mereka kembangkan. Dalam rangka mengembangkan agama itu sasaran utama adalah anak-isterinya dan kemudian keluarga terdekat dan seterusnya. Pelajaran yang pertama antara lain mengucapkan *kalimah Sahadat*, cara melakukan Sholat dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dibacakan pada waktu Sholat. Kemudian apabila sudah dirasakan perlu untuk mengetahui/mempelajari lebih mendalam, maka harus pergi ke rumah Ulama Guru (Kiyai) atau mendatangkan sendiri Ulama Guru untuk memberikan pengajaran agama yang sangat terbatas di kalangan anak-isteri, keluarga terdekat dan tetangga. Oleh sebab itu sistem pendidikan pada abad-abad terakhir jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, tidak lagi dijalankan secara besar-besaran seperti keadaan sebelumnya.

Di samping dusun biasanya terdapat pemuka agama, yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat tumpuan ilmu gaib dan ilmu-ilmu lainnya yang bersifat spiritual religius. Sebagai pemuka agama yang memiliki fungsi ganda, memberikan doa pada waktu upacara dusun atau keluarga, menguburkan orang mati, menyembelih binatang menurut agama, dapat juga berfungsi sebagai "dukun" yang memberikan penyembuhan (*jampi-jampi*) segala macam penyakit.

Pengajian yang diberikan di rumah Ulama Guru merupakan pelopor pendidikan yang dilakukan di mesjid/langgar yang bersifat elementer,²⁵⁾

25) Menurut pengamatan penulis, ada beberapa daerah yang langsung mendirikan mesjid dan ada juga mendirikan langgar lebih dulu. Namun sistem pengajian di daerah ini dilakukan di rumah ulama Guru sebelum ada mesjid/langgar. Pengajian tersebut menyerupai sistem *Guru Kula*.

yaitu dimulai dengan mempelajari huruf Arab atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari kitab suci Al Qur'an. Cara memberikan pelajaran di rumah atau di mesjid/langgar jauh berbeda dengan cara mengajarkan di sekolah-sekolah modern. Ia tidak menganut sistem tertentu dan yang menjadi tujuan pokok pengajaran, yaitu agar murid-murid dapat membaca kitab suci tersebut sampai tamat sambil melagukan menurut irama tertentu.

Sistem pengajaran berlaku secara *hoofdelijk*, yaitu pelajaran diberikan orang per orang secara lisan dan menghadap Ulama Guru satu persatu, sedangkan murid-murid yang lain menunggu giliran sambil mendengarkan duduk bersila mengelilingi dengan menghadapi Guru. Apabila muridnya hanya terdiri dari beberapa orang, biasanya mereka duduk berhadapan sebelah kanan sambil mendengarkan pelajaran yang diberikan. Sementara mereka yang belum mendapatkan giliran membaca, murid-murid lainnya berlatih dengan suara yang keras, sehingga di tempat pengajian itu kedengaran suara yang bersimpang siur. Meskipun demikian guru yang sudah berpengalaman selalu siap melakukan koreksi terhadap suara yang bersimpang siur itu, dan dapat mengetahui mana yang salah dan kemudian diperbaikinya. Memang perbaikan-perbaikan itu perlu sekali, karena jika kata-kata serta kalimat-kalimat itu salah diucapkan, maka akan hilanglah nilai dan makna yang sebenarnya.

Pelajaran biasanya diberikan pada pagi hari setelah selesai sembahyang subuh atau pada malam hari sesudah sembahyang Maghrib yang memakan waktu ± dua jam. Mengenai lamanya belajar tidak ditentukan, tetapi kadang-kadang dapat juga selesai beberapa bulan dan umumnya memakan waktu satu tahun. Uang sekolah tidak dipungut, tetapi pada waktu anak dibawa/diserahkan kepada Ulama Guru ataukah di mesjid/langgar, biasanya orang tua si anak membawa suatu hadiah berupa benda *in natura* atau uang. Biasanya tidak hanya pada waktu itu saja orang tua si anak memberikan hadiah, namun sewaktu-waktu Ulama Guru menerima suatu bingkisan berupa ikan, buah-buahan dan hasil bumi lainnya dari orang tua si Murid,²⁶) sedangkan bagi mereka yang miskin anaknya juga mengikuti pelajaran tanpa memberikan sesuatu.

Setelah mereka menyelesaikan pelajarannya dalam arti tamat membaca Al Qur'an, maka diadakan upacara selamat (*khataman*) di rumah Guru atau di mesjid/langgar dengan mengundang makan bersama kerabat terdekat, tua-tua kampung dan teman-teman murid.

Semua biaya untuk keperluan tersebut dipikul bersama oleh orang tua murid yang bersangkutan. Betapa erat hubungan antara murid dengan Ulama Guru pada umumnya berlangsung terus dan tetap terpelihara dengan baik sampai Ulama Guru tersebut meninggal dunia, sekalipun murid itu sendiri

26) Wawancara dengan sdr. Syargawi Kepala Ibtida'iah Negeri Lumpatan 6 Desember 1980, wawancara dengan Bapak H. M. ... eks guru Ibtida'iah pada jaman pemerintahan Belanda.

telah melanjutkan pendidikan pada lembaga yang lebih tinggi. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pemberian sedekah tiap-tiap tahun kepada Gurunya sebagai suatu kewajiban moral. Di dalam masyarakat muslim pada umumnya terdapat kebiasaan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan yang sudah berumur tujuh tahun diwajibkan belajar mengaji Al Qur'an dan cara-cara melakukan sholat. Karena itu dapat kita katakan bahwa di mana terdapat masyarakat muslim di sana terdapat pengajaran Islam yang merupakan prototipe daripada Pesantren yang sebenarnya.²⁷⁾

Ulama Guru biasanya disebut *Kiyai* yang mendapatkan tempat tersendiri dalam masyarakat tradisional yang berdasarkan kesaktian (kharismatis) dan kehidupan keagamaan di daerah ini. Ia menghormati bukan saja oleh murid-muridnya, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Tradisi memberikan banyak contoh tentang kesekian dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama di Indonesia, baik pada jaman pra Islam maupun pada jaman sesudah masuknya agama Islam. Poyang-poyang atau kepala-kepala suku di daerah ini pada jaman pra Islam, dianggap sebagai manusia yang luar biasa lagi perkasa, karena di samping kebolehnya dalam pengetahuan maknawiyah juga memiliki kesaktian atau kharisma. Ia memiliki fungsi ganda dalam masyarakat, di samping mengatur warganya dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari, secara otomatis memimpin warganya dalam kehidupan kerohanian seperti: upacara pembukaan hutan untuk ladang, upacara sesudah panen, mengempang sungai/lebak-lebung dan sebagainya. Oleh sebab itu pada awal periode penyebaran agama Islam di daerah Uluan, pada muballigh yang lebih terkenal dengan panggilan Kiyai terpaksa mengikuti kondisi dan situasi di daerah tersebut demi untuk mempermudah pekerjaannya, karena masyarakat pedesaan masih dalam suasana tradisional-irasional yang diliputi oleh semangat religio-magis.²⁸⁾

Beberapa orang yang perlu dicatat karena berjasa menyebarkan agama Islam di daerah-daerah Uluan seperti di daerah Musi Banyuasin ialah Haji Hasan alias Haji Sepuh Jambi, Kiyai Marogan Haji Abdulhamid dan Abdulrahman yang lebih terkenal dengan nama Kiyai Delamat: di daerah Musi Rawas misalnya Mujang Jawe Gelar Mangkubumi, Kiyai Delamat; Pangeran Abuleman dan penghulu Haji Pidin; di daerah lematang Ilir Ogan Tengah antara lain Syeh Mahmud Said Ratu Syeh Alam Raja Kuasa Kute Talang Gumiling Ayek Lematang, Syeh Angkasa Ibrahim Human Ayek Lematang, Akhmad Sabirin Anom Suro, Raden Pallawa, Syeh Jalil, Ahmad Muhammad dan lain-lain; di daerah Lahat berpusat di Prodipo ialah Baharuddin Nurqadim alias Puyang

27) Prof. Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal 17-18; Dra. Sutari Imam Bernadib. *op.cit.*, hal 19

28) *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Proyek IDKD 1977/1978, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. hal. 124-125.

Awak; di daerah Bangka Belitung dikenal nama Tuan Sarah, Nukhada Sulaiman, Qori, Syeh Abubakar (Sayid Hasan) yang kesemuanya berasal dari Johor.²⁹⁾ Sedangkan penyiar agama Islam di daerah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu tercatat nama-nama: Tuan Umar Baginda Sari (Raden Amar), Sayid Akhmad, Sayid Hamimul Hamim, Khotib Jamal, Pangeran Mas., Tuan Syarif Ali, Tuan Murarob, Tuan Tanjung Idris Salam, Umpu Si Jadi Holau, Umpu di Padang, Syeh Muhammad Saman, Haji Juana, Kemas Jambi, Marto, Khotib, Haji Jamaluddin, Penghulu UMAR dan lain-lain.

Sejarah penyebaran agama Islam pada hari-hari pertama di daerah ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan sejarah hidup dan sejarah perjuangan Ulama Guru atau para Kiyai yang tersebut di atas. Para Kiyai tersebut dapat disamakan dengan para Wali di Jawa, yang sebagian besar dari mereka itu berasal dari negeri asing, bahkan asal-usulnya kadang-kadang tidak diketahui dengan jelas. Dapat diduga bahwa para Kiyai tersebut dalam menyebarkan agama Islam di kalangan umat, tidak dengan berpidato atau ceramah di muka umum seperti yang berlaku dengan penyiaran agama sekarang ini, tetapi dalam kelompok-kelompok yang terbatas dan kemudian diteruskan dari mulut ke mulut. Artinya di mana terdapat masyarakat Islam di sana mulai ada pengajaran Islam, yang mula-mula berlaku di kalangan keluarga sendiri atau di mesjid/langgar, dan detelah pengikut-pengikutnya bertambah banyak, maka terjadilah tabligh-tabligh yang diadakan di dalam suatu lembaga yang disebut pondok pesantren.

Lembaga pesantren yang pertama kalinya di daerah ini (daerah OKI dan OKU) adalah berlokasi di marga Madang Suku II atas usaha Haji Juana yang berasal dari Banten.³⁰⁾ Mereka tinggal dalam suatu pondok yang dapat dianggap sebagai ashrama, di mana mereka tidak hanya menerima pengajaran agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bercocok tanam dan pertukangan. Dalam tahun 1750 pesantren itu dibina oleh Kemas Jambi yang berasal dari Palembang dan kemudian diteruskan oleh Haji Jamaluddin yang berasal dari Martapura (Kalimantan).

Pendidikan atau cara memberikan pengajaran yang telah berlaku pada jaman sebelumnya dilanjutkan oleh mereka (Kiyai) sedemikian rupa, sehingga dari abad ke abad lembaga itu menjadi basis-gerak-agama dan tempat pembentukan kader yang tidak dapat diabaikan,³¹⁾ meskipun dalam beberapa hal banyak terdapat kekurangan pada sistem pendidikan dan pengajaran itu. Tetapi apabila dilihat dari sudut pendidikan agama, pondok pesantren pada umumnya sudah memberikan jasanya yang tidak ternilai harganya kepada ma-

29) Panitia Penyelenggara MTQ Pertamina se Indonesia ke-II/1974, *op.cit.*, halaman 27-35.

30) *Ibid.*, halaman 33

31) Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Balau Pustaka, Jakarta, 1948, halaman 49.

syarakat Islam, karena telah banyak mencetak santri-santri yang memiliki iman yang kuat sebagai akibat pengaruh dan kehidupan yang dicontohkan oleh gurunya dan suasana agama yang meliputi masyarakat pesantren sehari-harinya.³²⁾ Di samping itu pula lembaga tersebut telah memupuk persatuan yang berdasarkan agama Islam, karena tempat tersebut banyak dikunjungi oleh pemuda-pemuda dari daerah lain yang memiliki bahasa dan adat kebiasaan yang berbeda seperti Komereng, Kayuagung, Musi dan lain-lain.

Luas dan sempitnya bahan studi di pondok pesantren tidak sama, tetapi pada umumnya mereka itu (murid-murid) telah mendapatkan pendidikan elementer dari mesjid/langgar setempat.

Demikian pula mengenai lamanya belajar tidak sama, karena ada yang belajar hanya satu tahun dan ada pula yang belajar bertahun-tahun lamanya. Gambaran global pelajaran pada pesantren sehari-hari, kira-kira dapat dikemukakan sebagai berikut: biasanya sesudah sembahyang Subuh pelajaran pertama dimulai dan menjelang makan siang mereka berbakti untuk keperluan bersama, seperti membersihkan halaman, kebun, bersawah dan sebagainya. Setelah selesai makan siang mereka beristirahat sambil tidur-tiduran menghafal pelajaran yang telah diberikan, dan kemudian setelah sembahyang Maghrib dan Isya' pelajaran dimulai lagi. Pelajaran inti yang diberikan dalam proses belajar mengajar adalah mengenai dogma agama (*Usuhuddin*) yang meliputi dasar kepercayaan atau keyakinan Islam dan Ilmu Al Fikh yang meliputi:

1. Syahadat, suatu pernyataan yang harus diucapkan oleh setiap Muslim bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusanNya.
2. Melakukan Sholat lima waktu.
3. Membayar zakat kepada fakir miskin.
4. Berpuasa dalam bulan suci Ramadhan.
5. Menunaikan ibadah Haji bagi mereka yang mampu.³³⁾

Nampaknya pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh para Kiyai itu pada dasarnya hanyalah mengenai pokok-pokok agama dalam segala macam aspeknya. Oleh karena pendidikan agama Islam sebagai lanjutan dari sistem pengajian Al Qur'an di mesjid/langgar, maka pendidikan di pesantren pada umumnya dapat disebut "pengajian al Kitab," karena di situ dipelajari kitab-kitab Fikih, kitab Tafsir, kitab Tauhid, bahasa Arab dan lain-lain. Ilmu ilmu yang berhubungan dengan Hadits dan Al Qur'an dengan tafsir-tafsirnya, begitu pula mengenai ilmu al Kalam/Tauhid, termasuk pelajaran yang agak tinggi dan diberikan secara klasikal.

32) Dr. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*, Tintamas, Djakarta, 1964, halaman 17.

33) Dep. P & K, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta 1979, hal. 34. I Djumhur. Drs. Dansuparta, *op.cit.*, hal. 113; Drs. Abu Ahamadi, *Sejarah Pendidikan*, CV. Toha Putra, Semarang, 1979, hal 16.

Pengetahuan umum pada mulanya tidak atau jarang diajarkan di pesantren, tetapi dalam proses perluasan pengajian selanjutnya diajarkan juga, hanya penentuan corak-corak pengetahuan yang diberikan dalam lembaga itu sangat tergantung kepada keadaan Guru (Kiyai) dan kecakapannya.

Nampaknya pada masa-masa awal perkembangan lembaga itu, rencana pelajaran yang tertentu, sistematis dan pembagian kelas belum ada, sehingga tidak dapat dipastikan sesudah berapa tahunkah murid-murid itu harus dianggap sudah menamatkan pelajarannya. Demikian pula tidak ada peraturan khusus mengenai syarat penerimaan murid masuk, baik mengenai usia maupun mengenai kecakapannya. Hal tersebut memang tidak dipikirkan karena tujuan yang pertama daripada pesantren ialah menyiarkan agama Islam sambil beribadat.³⁴) Maka oleh sebab itu kita dapati murid-murid dari bermacam-macam usianya, ada yang masih muda tetapi ada pula yang sangat lanjut usianya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahkan pelajaran yang diberikan hanya mengenai pelajaran agama saja di samping penguasaan bahasa Arab secara pasif. Oleh karena tidak diberikan pengetahuan umum sebagai bekal bagi murid untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, maka dipandang dari sudut paedagogis penyelenggaraannya berat sebelah. Tetapi dilihat dari sudut pendidikan moral, lembaga pendidikan itu sudah memberikan jasanya yang tidak ternilai harganya kepada masyarakat Islam di daerah ini secara keseluruhan.

Sebelum pelajaran dimulai murid-murid diharuskan belajar sendiri (*muthala'ah*), sehingga dengan tidak disadari mereka telah didik belajar sendiri dan membahas sendiri langsung dari kitab yang dipelajari atau dengan kata lain mereka itu telah mengenal CBSA (cara belajar siswa aktif). Meskipun cara memberikan pengajaran dan pendidikan di pesantren pada umumnya sangat sederhana, tetapi nampak telah memiliki beberapa sistem yang tertentu, sistem mana yang disebut *sistem sorogan* dan *sistem Wetan*.³⁵) yang dimaksudkan sistem sorogan, murid satu demi satu menghadapi Guru untuk menerima pelajaran dengan menyorongkan kitabnya, sehingga dalam sejarah pendidikan sistem ini lebih mendekati sistem *hoofdelijk* (individual).

Sistem itu berlaku bagi murid-murid pada tingkat permulaan dan biasanya diberikan oleh murid yang telah tinggi tingkatannya (guru bantu). Sedangkan sistem wetan atau sering disebut *sistem halaqah* berlaku dalam cara memberikan pelajaran pada murid-murid yang telah lanjut pelajarannya, di mana mereka duduk mengelilingi gurunya sambil mendengarkan pelajaran yang diberikan. Pada sistem ini sifatnya agak lain, karena setiap kali dimulai dengan pelajaran yang baru, guru tidak memperdulikan apakah pelajaran yang

34) H. Abubakar, *Sejarah Masjid dan Alam Ibadah dalamnya*, Adil & Co, Jakarta, 1955, hal. 49.

35) Drs. Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah*, Penyelenggara Publikasi Pembaharuan pendidikan Pengajaran Islam, Yogyakarta, 1962, hal. 74.

telah lampau sudah dikuasai atau belum. Murid-murid belajar secara klasikal dan tiap kali mereka mendapatkan bahan pelajaran yang sama. Sistem ini disebut sistem *weton* yang berasal dari bahasa Jawa *wetu* yang berarti waktu, karena pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pesantren yang pernah ada di daerah ini, telah mendapat pengaruh dari pesantren di Jawa.

Lama belajar menurut sistem di atas tidak ditentukan menurut jam, tetapi berlangsung menurut ketentuan Guru (Kiyai) sendiri. Betapa besar pengaruh Kiyai kepada muridnya, baik pada waktu belajar maupun dalam keadaan sehari-hari memang tampaknya kurang bersifat demokratis, tetapi lebih menjurus ke arah hubungan yang lebih bersifat otoritair³⁶⁾ Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa Kiyai selain daripada memiliki pengetahuan agama yang cukup banyak, juga dianggap sebagai orang keramat dalam masyarakat tradisional yang belum banyak mendapatkan pengaruh dari luar. Oleh sebab itu penghargaan dan penghormatan masyarakat setempat dan murid-murid kepada Kiyai sama besarnya dengan penghargaan terhadap kaum Brahmana dalam masyarakat Hindu.³⁷⁾ Untuk menentukan tinggi rendahnya pelajaran seseorang murid dapat dilihat pada kitab yang sedang dipelajarinya, seperti mata pelajaran Ilmu Fikih, kitab yang terendah adalah *Fat-hul Qarib* dan yang tertinggi antara lain *'Al Mahalli*, sehingga seorang murid akan merasa bangga kalau sudah mempelajari kitab *'Al Mahalli*.

Lembaga pesantren di daerah ini pada masa sebelum dan sesudah kedatangan pengaruh Barat (Inggris dan Belanda) tidak banyak mengalami perubahan, namun dari tahun ke tahun selalu menyesuaikan dirinya menurut kehendak jaman, tetapi pada dasarnya tidak berubah tujuannya semula daripada tempat menyiarkan agama Islam dan membentuk kader-kader Guru yang berwatak Islam, dan kemudian mereka akan mengemban tugas suci untuk mengislamkan masyarakat di daerahnya. Kalaulah ada perubahan di sana-sini, adalah sebagai akibat banyak sedikitnya pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh orang-orang yang naik haji yang berasal dari daerah ini pada perempat abad ke-20.

Hubungan VOC Belanda hanya terbatas pada Sultan saja,³⁸⁾ sedangkan hubungan Portugis secara langsung dengan daerah ini sama sekali tidak ada, walaupun ada beberapa barang dagangannya jatuh ke tangan rakyat melalui pedagang Cina atau Arab. Di Sumatera Selatan orang-orang VOC hanya dapat tinggal pada suatu benteng yang terletak di sungai Aur berhadapan dengan benteng Kesultanan yang dipisahkan oleh sungai Musi. Mereka hanya berhu-

36) *Ibid.*, halaman 82.

37) Sutedjo Bradjanegara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Fasco, Jakarta, 1956, hal. 82.

38) Departemen Pendidikan Kebudayaan, *op. cit.*, halaman 42.

Hubungan dengan petugas istana dalam masalah perdagangan lada, di mana hubungan itu selalu tidak konsisten. Tetapi setelah Belanda dapat mengalahkan Sultan Makhmud Baharuddin II, maka pada akhir abad ke-19 mulailah pemerintah Hindia Belanda berorientasi ke daerah pedalaman, tanpa memperhatikan masalah pendidikan pribumi, karena pada dasarnya mereka tidak akan mencampuri soal-soal agama sesuai dengan kebijaksanaan politik pemerintah yang dikenal dengan *onthoudings politiek* (politik tidak campur tangan).³⁹⁾ Kemudian pada tahun 1882 pemerintah Hindia Belanda membentuk *Priesterraad* (Dewan Ulama) yang diberi tugas untuk mengawasi pengajaran agama di lembaga Pesantren, sehingga pengawasan terhadap pendidikan agama Islam di daerah ini telah membawa pengaruh yang tidak sedikit dalam proses perkembangan pendidikan tradisional. Ruang gerak bertambah sempit dan lembaga pendidikan agama itu sendiri tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya, lebih-lebih setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Goeroe Ordonnatie dalam tahun 1925 (Staatsblad No. 219) yang mengharuskan orang-orang yang akan memberi pengajaran untuk minta izin lebih dulu kepada Pemerintah.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai proses pembaharuan pendidikan Islam menuju kepada sistem pendidikan Islam modern, yaitu mengenai kedatangan bangsa Eropa di daerah ini mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan Islam secara keseluruhan, walaupun pada akhir abad ke-19 hubungan rohaniyah antara golongan Eropa di Indonesia dengan bangsa Indonesia sendiri sangat terbatas. Setelah dijalankan apa yang disebut "Politik Etika" pada tahun 1900,⁴⁰⁾ dan realisasinya di daerah ini baru pada permulaan abad ke-20, maka berangsur-angsur tambah meratalah pendidikan Belanda itu di kalangan atasan, di samping kemajuan-kemajuan yang pesat yang diperoleh oleh misi katolik dan zending Protestan dalam dunia pendidikan baik di dalam maupun di luar Jawa,⁴¹⁾ merupakan tantangan hebat bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam pada waktu itu. Menurut Drs. Amir Hamzah Wirjosekarto, nasib pesantren pada waktu itu sangat menyedihkan.⁴²⁾ Keadaannya terus mundur, membeku, tertinggal oleh kemajuan jaman. Sebab-sebabnya dapat dicari karena kedudukannya tersisih, aliran kebangkitan Islam telah dihalang-halangi masuk ke Indonesia dan sikap non koperasi pihak pesantren sendiri terhadap apa saja yang berbau Barat (Belanda) menyebabkan mereka ibarat katak di dalam tempurung.

Demikianlah keadaan lembaga pendidikan Islam dan masyarakatnya di daerah ini pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, sehingga tiap

39) Prof. Soeganda Poerbakawatja, *op.cit.*, halaman 16.

40) J.S. Furnivall, *Netherlands Indie, a Study of plural economy*, The Macmillan, New York, 1944, hal. 366.

41) *Ibid.*, halaman 380-381.

42) Drs. Amir Hamzah Wirjosekarto, *op.cit.*, hal. 42.

periode sejarah kebudayaan sesuatu bangsa, akan memaksa kepada golongan beragama untuk meninjau kembali isi dari kekayaan aqidah dan agamanya. dan begitulah sejarah kebudayaan dunia berjalan.... Kemunduran dan kefanatikan yang meliputi masyarakat Islam dan sikap "neutral" di bidang agama pada sekolah-sekolah pemerintah ketika itu, rehabilitasi Islam di Indonesia pada umumnya dan daerah Sumatera Selatan pada khususnya, mendapat manifestasinya dalam gerakan-gerakan Islam, di mana gerakan Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya (Serikat Islam) berangsur-angsur mendirikan madrasah-madrasah,⁴³⁾ sebagai akibat keadaan dan motif politik yang menguasainya dalam rangka pembaharuan lembaga-lembaga pendidikan Islam secara menyeluruh.

43) Dr. A. Mukti Ali, *op cit.* hal. 34

BAB III PENDIDIKAN BARAT

A. PENGARUH PORTUGIS DAN VOC

Pada Bab II telah disinggung mengenai pengaruh bangsa Portugis dan VOC di daerah ini sebelum abad ke-20. Namun perlu juga dijelaskan peranan kedua bangsa itu di daerah ini, untuk memperoleh gambaran konkrit sebagai bahan perbandingan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Apa yang telah kita ketahui, bahwa keinginan bangsa Portugis untuk menghancurkan potensi Islam di mana-mana adalah pelaksanaan idee Perang Salib, avonturisme prajurit-prajurit bangsawan dan nafsu monopoli¹⁾ untuk menguasai rute perdagangan Asia. Oleh sebab itu hegemoni atas lautan Indonesia dan penguasaan perdagangan di Asia Tenggara, adalah suatu tujuan utama menjadikan Indonesia sebagai "silang kehidupan" bagi bangsa Portugis. Perang Salib yang diimpor oleh armada Portugis ke perairan Asia dan Indonesia pada khususnya, merupakan tantangan hebat bagi pedagang-pedagang muslim, yang selama ini menguasai jalan dagang Asia via Selat Malaka. Ekspansi Portugis di perairan Asia Selatan dengan mempergunakan kekuatan militer dan teknik perang di laut terbuka,²⁾ dengan mudah menduduki Malaka dalam tahun 1511 sebagai pusat kegiatan pedagang-pedagang muslim pada waktu itu. Rupa-rupanya maksud Portugis untuk mematikan perdagangan Islam dengan menikam Malaka sebagai jantungnya, telah membawa akibat sebaliknya, yaitu dengan bangkitnya Aceh, Palembang dan Banten sebagai kota bandar yang berarti pada waktu itu.

Walaupun bangsa Portugis telah menanamkan kekuasaannya di Malaka selama 1¼ abad lebih, namun pengaruhnya terhadap daerah ini nampaknya tidak begitu jelas, karena Palembang sebagai kota bandar sampai akhir abad ke-16 selalu mengikuti kebijaksanaan Demak, yang telah mengambil alih peran Malaka dalam menjalankan politik konfrontasi terhadap bangsa tersebut.

1) B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies I*, Sumur, Bandung, 1960, halaman 37.
2) R. Moh. Ali, *Peranan bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*, Bhratara, Jakarta, 1963, hal. 71.

Ikut sertanya Palembang dalam menunjang ekspansi Demak ke Malaka sejak tahun 1512, 1513, 1535, 1551 dan 1574³⁾ telah memperkecil kesempatan bagi bangsa Portugis untuk menyebarkan pengaruhnya di daerah ini sebagai sumber lada, lebih-lebih setelah munculnya Inggris di Bengkulu dan VOC di Batavia. Persaingan antara bangsa Portugis dan VOC untuk memperoleh pengaruh di daerah ini, telah mengakhiri kekuasaan Portugis di Malaka dalam tahun 1641, dan mulailah hubungan dagang antara Kesultanan Palembang dengan VOC setelah perjanjian dagang ditanda-tangani pada tanggal 21 Juni 1941.⁴⁾

Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis di Malaka, maka mulailah pengaruh VOC dalam dunia perdagangan lada, yang hanya terbatas pada hubungan dagang dengan penguasa-penguasa Kesultanan Palembang saja. Walaupun hubungan antara VOC dengan Kesultanan Palembang secara formal sudah mulai, namun hubungan tersebut selalu tidak konsisten dan masing-masing pihak bertindak sendiri-sendiri, seperti yang terjadi dalam tahun 1655 VOC merampas 400 pikul lada milik orang Cina dan kemudian dalam tahun 1657 orang Palembang merampas beberapa buah kapal Belanda, membunuh 42 orang penumpang dan menawan 25 orang anak buah kapal tersebut.⁵⁾

B. KEADAAN PADA ABAD KE-19

Hubungan yang tidak stabil antara VOC dengan penguasa-penguasa Kesultanan sampai dibubarkannya VOC dalam tahun 1799 dan runtuhnya Kesultanan Palembang dalam tahun 1825 yang ditandai dengan dasingkannya Sultan Machmud Badharuddin II ke Ternate, merupakan latar belakang historis kekuasaan Belanda di daerah ini dan pengaruhnya masih terbatas pada tempat-tempat tertentu, di mana kekuatan Belanda dipusatkan pada loji Sungai Aur⁶⁾ yang terletak di pinggir Sungai Musi berhadapan dengan Benteng Kesultanan sekarang. Oleh karena pengaruhnya terbatas dalam kota Palembang saja, yang berarti belum dapat menjangkau daerah Uluan, maka sistem pendidikan tradisional masih tetap berpengaruh di kalangan masyarakat pedesaan sampai pada akhir abad ke-19.

3) B. Schrieke, *op.cit.*, hal. 233.

4) *Ibid.* hal. 62.

5) H.J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, W. van Hoeve's Gravenhage, Bandung, 1949, hal. 304.

6) Tim Perumus Diskusi, *Risalah Sejarah Perjuangan St. Machmud Badaruddin II*, Kotamadya Palembang, 1980, hal. 6.

Kegiatan Ulama Guru atau Kyayi semakin aktif menyebarkan agama Islam dengan melalui sistem pengajian di mesjid/langgar atau di rumah-rumah para Kiyai sendiri, terutama sekali dirasakan keadaan itu di daerah Pagaralam dan sekitarnya, setelah ada kegiatan *zending* yang berdomisili di Tanjungsakti dalam tahun 1860. Oleh karena sesuatu hal yang menghambat kegiatan *zending* tersebut, maka tugas tersebut dilanjutkan oleh misi Katolik dalam tahun 1896 di bawah asuhan seorang Pastor bernama J. van Metus.⁷⁾ Walaupun misi Katolik sudah memiliki basis di daerah tersebut pada akhir abad ke-19 dengan mendirikan sebuah gereja dan membuka beberapa sekolah namun pengaruhnya di daerah Sumatera Selatan secara keseluruhan tidak ada artinya sama sekali, jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang pernah diduduki Portugis di kepulauan Maluku. Dengan kata lain, pengaruh Barat (Belanda) di daerah ini hingga akhir abad ke-19 hanya terbatas di dalam dinding tembok (loji) sebagai tempat tinggal orang-orang Belanda di dalam kota Palembang. Pengaruh pendidikan Barat di daerah ini baru dapat dirasakan setelah adanya pelaksanaan Politik Etika pada awal abad ke-10, yaitu dengan adanya sekolah-sekolah desa (sekolah angka 3) di daerah pedalaman, dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda untuk mendapatkan tenaga jurutulis dengan upah yang murah/serta pengusaha Asing.

7) Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 3*, Arnoldus Ende-Flores, 1974, hal. 167.

BAB IV PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1. Pengaruh Politik Etika

Semenjak permulaan abad ke-20 di seluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaharuan, khususnya di bidang politik, ekonomi dan idiiil, dan demikian pula di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan pesat dan berkembang dengan cepat. Mereka membutuhkan pekerja-pekerja yang terdidik dan ahli. Selain itu penduduk Bumi-putera sendiri mulai bangkit dan menyadari dirinya. Namun secara menyeluruh bagi rakyat pada umumnya tidak dirasakan adanya perbaikan sosial. Di kalangan orang-orang Belanda sendiri timbul aliran-aliran untuk memberikan kepada penduduk asli bagian dan keuntungan yang diperoleh orang-orang Eropa (Belanda) selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini berpendapat bahwa pada orang-orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau faham ini dikenal sebagai Politik Etis (*Etische Politiek*).

Gagasan tersebut dicetuskan semula oleh Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya "Hutan Kehormatan" (*Eereschuld*). Politik Etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya via pendidikan secara Barat. Langkah politik baru itu menjadi lebih terkenal dengan slogannya Pendidikan, Irigasi dan Imigrasi. Oleh karena itu dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah yang berorientasi pada cara berpikir orang Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat Bumiputera, maka van Deventer menganjurkan pemberian pendidikan Barat kepada orang-orang golongan bawah atau rakyat biasa.

Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan, tetapi ia menganjurkan supaya rakyat biasa tidak diabaikan, dan oleh karena itu banyak didirikan sekolah-sekolah desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah, di samping sekolah-sekolah yang berorientasi Barat dan berbahasa pengantar bahasa Belanda.¹⁾ Sehu-

1) Departemen P dan K, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*, 1979, halaman 63.

bugan dengan "arah Etis" (*Etische koers*) yang menjadi dasar landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera, dan untuk itu bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
- b. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itu pulalah maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui dua jalur, di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga pendidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi, dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.²⁾

Berdirinya sekolah Desa (Sekolah angka Tiga) dapat dihubungkan dengan pasal 1 surat Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tertanggal 28 September 1892 Nomor 44 (Lembaran Negara 1893 Nomor 125) yang membagi sekolah Negeri Bumiputera di Hindia Belanda dalam dua katageori yaitu *sekolah kelas satu* dan *sekolah kelas dua*.³⁾ Sekolah Desa atau angka tiga diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera pada umumnya, sehingga rencana pelajarannya sangat sederhana (hanya sampai kelas tiga) dan lama pendidikannya tiga tahun saja. Itulah sebabnya disebut dengan istilah "sekolah angka tiga" atau lazim dikenal dengan nama "Sekolah Desa" (*Volksschool*) dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah.

Sesuai dengan tujuannya yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan tenaga terdidik bagi keperluan administrasi pemerintahan tingkat rendah (*marga*), maka jumlah sekolah yang dibuka waktu itu sangat terbatas dan hanya terdapat pada tingkat distrik atau marga saja. Baru pada tahun 1900 ada sekolah yang dikenal dengan *sekolah angka tiga* yang lama pendidikannya tiga tahun. Tetapi kemudian dalam perkembangan sekolah angka tiga tersebut ditambah dengan dua tahun lagi, yang dikenal dengan nama "Sekolah sambungan" (*Vervolgschool*) di ibukota marga saja, sedangkan sekolah angka tiga hanya dibuka di desa-desa yang dianggap perlu.

2. Pendidikan Sekolah Dasar

a. ELS (*Europesche Lagere School*)

Pendidikan bagi anak-anak pegawai Paimongpraja (*Binnenlands Bestuur Ambtenaren*) termasuk anak-anak Residen, Asisten Residen dan Kontrolleur.

2) *Ibid.*, halaman 63-64.

3) Departemen P dan K, Pendidikan di Indonesia 1900-1940, 1977, halaman 5-6.

Sekolah tersebut hanya terdapat di tempat penguasa-penguasa tersebut berdomisili, yang lama pendidikannya tujuh tahun. Menurut keterangan M.Z. Oemar (pensiunan pegawai Perwakilan Departemen P dan K Sumatera Selatan) dan M. Toha (Pensiunan PSK Dinas P dan K Kabupaten Lahat), bahwa ELS sudah ada sebelum HIS didirikan di daerah ini. Di kota Palembang hanya ada sebuah LES yang terletak di Jalan Gubah, yaitu yang sekarang ditempati SMP Negeri XIII, sedangkan di luar kota Palembang hanya terdapat di kota Lahat. Bekas gedung ELS di Lahat itu sekarang ditempati oleh Taman Kanak-kanak Persit.

b. HCS (Hollandsch Chinesche School)

Seperti halnya di Jawa, pemerintah Hindia Belanda tidak hanya memperhatikan pendidikan anak-anak Bumiputera, melainkan juga terhadap anak-anak Timur Asing, khususnya bangsa Cina. Untuk itu didirikanlah HCS dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda dan lama pendidikannya tujuh tahun. Menurut keterangan R.M. Akip, berdirinya HCS di Palembang tidak jauh berbeda waktunya dengan berdirinya HIS, yaitu pada tahun 1920. Di kota Palembang sendiri hanya terdapat sebuah HCS, yang pada tahun 1930 tercatat sebagai kepala sekolahnya Joannes Hendricus Antonius Wiederhoff.⁴⁾ Mengenai tempat sekolah itu menurut keterangan Pastor van Gisbergen SCJ berada di 7 Ulu Palembang. Di samping itu menurut keterangan Gazali Abbas BA (Kakandep P dan K LIOT), selain di Palembang sekolah semacam itu terdapat juga di Prabumulih, Muara Enim dan Tanjung Enim.

c. HIS (Hollandsch inlandsche School)

Sekolah ini adalah Sekolah Rendah untuk golongan penduduk keturunan Indonesia Asli (Bumiputera), yang lama pendidikannya tujuh tahun berbahasa pengantar bahasa Belanda. Berdirinya HIS di Keresidenan Palembang ada hubungannya dengan usaha pemerintah Belanda di daerah ini dalam perluasan pemakaian bahasa Belanda di kalangan penduduk Bumiputera, dan sesuai dengan surat Keputusan Ratu tertanggal 16 Pebruari 1914 No. 23 (Lembaran Negara 1914 Nomor 762).⁵⁾ Menurut keterangan Kailany (Pensiunan Perwakilan P dan K Sumsel), bahwa minat masyarakat agar anak-anaknya dapat diterima di HIS cukup besar, tetapi banyak hal yang membatasi minat tersebut. Rupa-rupanya hambatan-hambatan itu sesuai dengan surat rahasia Direktur PAK lama (MS. Koster) tertanggal 29 Oktober 1910 Nomor 235 yang menyatakan; penerimaan murid pada sekolah Bumiputera

4) Akte Notaris Yayasan Xaverius Palembang Nomor 11 tanggal 5 Mei 1930 (Notaris Christian Maathuis).

5) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 214.

kelas I (HIS) pertama-tama harus dipertimbangkan dahulu anak-anak dari orang bangsawan, terkemuka dan berada.⁶⁾ Karena itu yang dapat diterima sebagai murid HIS diutamakan anak-anak *pesirah, pembarap, demang* dan pegawai-pegawai pemerintah. Itu pun melalui seleksi yang cukup ketat.

Menurut keterangan MZ. Oemar HIS di kota Palembang baru didirikan pada tahun 1920, dan dalam perkembangannya ada dua buah HIS yaitu HIS I dan HIS II, yang keduanya berlokasi di jalan Kebun Duku. Berdirinya HIS di luar kota Palembang disebabkan adanya desakan masyarakat setempat, sehingga terpaksa pemerintah Belanda di daerah ini mendirikan HIS di Martapura, Baturaja, Muara Enim, Lahat dan Tanjungpandan (Belitung). Di Tobali (Bangka) pernah juga didirikan HIS, tetapi oleh karena beberapa hal terpaksa ditutup pada tahun. 1940.⁷⁾

Kaelany dan MZ. Oemar mengatakan, bahwa HIS Baturaja didirikan pada tahun 1938, dan merupakan salah satu HIS yang dipimpin oleh orang Bumiputera, yaitu Abdullah Nawawi dari sekian HIS yang kesemuanya dikepalai oleh orang Belanda, dan salah seorang gurunya disebut Nuroni Adil. Sedangkan HIS Lahat dikepalai oleh van Zijl dan sekolah ini berlokasi di jalan Talang Jawa yang sekarang ditempati SD Negeri No. 3.

d. Sekolah Kelas Dua

Sekolah ini merupakan sekolah rendah untuk Bumiputera, yang lama pendidikannya lima tahun berbahasa pengantar bahasa daerah. Menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad (Kepala Bidang PMU Kanwil Departemen P dan K Sumatera Selatan), sesuai dengan susunan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, dimana daerah ini dibagi atas *Afdeling, Onderafdeling, Distrik Onderdistrik, Marga dan Dusun*, maka di setiap *Onderafdeling* yang dikepalai oleh *Controleur* didirikan *Sekolah Kelas Dua*, kecuali di Gunung Megang yang bukan merupakan tempat kedudukan *Controleur*.

Dibukanya sekolah kelas dua di tempat tersebut, merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat setempat (Gunung Megang). Orang yang pernah menjadi kepala sekolah di sana adalah Adnan dan AR. Rachman. Sedangkan di kota Palembang yang terbagi dua oleh sungai Musi menjadi wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir, masing-masing ada sebuah sekolah kelas dua. Untuk seberang Ilir, sekolah tersebut terletak di jalan Segaran 11 Ilir Palembang dan sekarang ditempati oleh dua SD Negeri (SD No. 3 dan SD No. 39). Di seberang Ulu sekolah tersebut terletak di 8 Ulu. Tetapi menurut keterangan Kaelany, dalam perkembangan selanjutnya di wilayah Kotamadya Palembang terdapat lima buah sekolah kelas dua, yaitu terletak di 11 Ilir, Boom Baru, Bukit Kecil, Tangga Buntung dan 8 Ulu. Pada umumnya guru-guru sekolah kelas dua ini adalah lulusan *Normaal Cursus* di Palembang.

6) *Ibid.* halaman 169.

7) Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, 1954, halaman 629.

e. *Volksschool*

Kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputera didasarkan pada pokok pikiran tentang memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Perbedaan kehidupan dan penghidupan antara kota dan desa menjadikan pola perbedaan dan corak pendidikan yang diberikan. Penduduk desa membutuhkan pendidikan rakyat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan dari dan sesuai dengan penduduk desa. Karena itu pelajaran yang diberikan mempunyai arti yang penting bagi perjuangan hidupnya yaitu:

- 1) memperbaiki pengertian tentang pertanian dan perkebunan buah-buahan.
- 2) memberi pengertian sehat tentang peternakan.
- 3) mengembangkan ketrampilan dan rasa seni dalam mengerjakan kain dan bahan yang diketemukan di daerah di mana ia bertempat tinggal.⁸⁾

Menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad, sesuai dengan susunan pemerintah seperti tersebut di atas, Sekolah Desa (*Volksschool*) ini hanya terdapat di marga-marga dan dusun-dusun, dan dalam soal pembiayaannya adalah tanggungjawab marga setempat. Perlu diketahui bahwa pesirah di daerah ini yang merupakan penguasa tradisional, jauh lebih kaya dari pada seorang demang (wedana), karena ia mempunyai hak memungut pajak serta mengumpulkan hasil daerah yang langsung dikuasainya. Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap marga berusaha mendirikan sekolah-sekolah tersebut.

Senada dengan surat Direktur (MS Koster) kepada Gubernur Jenderal van Heutz tertanggal 23 Nopember 1908 Nomor 17036, yang tetap mempertahankan hidupnya sekolah-sekolah rakyat yang sederhana, meskipun di tiap wilayah *Controleur* ada sekolah kelas dua.⁹⁾ Sesuai dengan keterangan Drs. Ma'moen Abdullah (dosen Fakultas Keguruan UNSRI), bahwa *Volksschool* ini terus ada sampai akhir kekuasaan pemerintah Belanda dengan datangnya tentara pendudukan Jepang di daerah ini.

f. *Vervolg School*

Gagasan mendirikan sekolah *Vervolg* dalam rangka pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputera, didasarkan pada suatu pendapat bahwa tidaklah cukup hanya mengandalkan kepada perluasan Sekolah Desa 3 tahun saja, karena pengetahuan yang didapatkan sangat minim. Tipe sekolah ini hanya dapat diterima dalam kerangka fase pertama pemberantasan buta huruf, karena secara edukatif sangat kecil artinya. Pernyataan ini tidak mengimplikasikan untuk memperkecil nilai paedagogis sekolah desa, karena meski-

8) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 31.

9) *Ibid.*, halaman 115.

pun hasilnya kecil secara edukatif, namun mempunyai arti sosial yang penting. Tetapi sekolah Desa ini harus membuka pintu bagi tamatannya untuk memasuki sekolah rendah yang lebih sempurna. Jadi di samping perluasan sekolah desa, harus diadakan penyebaran sekolah *Vervolg* secara lebih luas. Untuk sementara diperkirakan perbandingan jumlah sekolah *Vervolg* dengan sekolah desa di luar Jawa dan Madura sebagai perbandingan 20:1. Penyebaran ini dikaitkan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.¹⁰⁾

Menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad, baik susunan pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan maupun penyebaran penduduknya berbeda dengan keadaan di Jawa. Sekolah *Vervolg* yang merupakan sekolah sambungan dari Sekolah Desa tiga tahun, yang terdiri dari kelas empat dan kelas lima, jumlahnya tidak banyak. Lain halnya dengan sekolah Desa yang pembiayaannya dipikul oleh marga. Sekolah *Vervolg* ini oleh pemerintah didirikan di ibukota marga pada umumnya. Baik *Volksschool* maupun *Vervolgschool* tenaga guru-gurunya dikenal sebagai guru bantu atau magang tamatan *Kweeschool* atau CVO (*Cursus Volks Onderwijzer*). Di kota Palembang tidak terdapat sekolah *Vervolg* karena pemerintah mendirikan sekolah kelas dua, yang lengkap dari kelas satu sampai kelas lima.

g. *Schakel School*

Dalam menanggapi kritik yang datang dari berbagai pihak terhadap sistem pendidikan rendah untuk orang Bumiputera, bahwa HIS walaupun dalam arti yang sebenarnya bukan sekolah ningrat, terutama disediakan untuk anak-anak dari kaum paling terkemuka dalam masyarakat Indonesia, dan bahwa anak-anak yang masuk di sekolah kelas dua, relatif mempunyai sedikit kemungkinan untuk melanjutkan belajar.

Kedua masalah tersebut telah dibahas dalam pidato pada 21 Juli 1918 di Dewan Rakyat mengenai keseluruhan politik pendidikan. Di dalam pidato itu diuraikan, bahwa ada kemungkinan untuk mengatasi kedua persoalan tersebut. Dalam usaha mencari perbaikan yang diadakan oleh Direktur Pendidikan dan Agama K.F. Greutzberg dalam pembicaraan dengan Inspektur Pendidikan HIS (Hellwig) mengenai kemungkinan mempersiapkan siswa-siswa yang sangat pandai dari kelas 4 atau 5 di sekolah kelas dua Bumiputera untuk melalui semacam sekolah peralihan dapat melanjutkan belajar di MULO (*Meer Uitgebreid Lage Onderwijs*). Sudah barang tentu di sekolah tipe baru ini harus diajarkan bahasa Belanda dengan intensif. Baik Dewan Hindia maupun Dewan Rakyat tidak berkeberatan dan ternyata gagasan K.F. Greutzberg tersebut di atas disetujui oleh pemerintah, sehingga dalam tahun 1921 dibuka sekolah peralihan yang pertama di Bandung dan Padangpanjang.¹¹⁾

10) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Buku II, *op.cit.*, hal. 303-304.

11) *Ibid.*, halaman 60-61.

Menurut keterangan Kaelany dan MZ Oemar, sekolah peralihan semacam ini di daerah ini hanya terdapat sebuah saja dan didirikan sekitar tahun 1930-an. Murid-muridnya berasal dari sekolah kelas dua yang telah menyelesaikan pelajaran di kelas tiga dengan melalui saringan yang ketat. Dengan kata lain murid-murid yang dapat diterima adalah mereka yang terpandai. Lama pendidikannya lima tahun dan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Mereka yang menyelesaikan pendidikan di sekolah peralihan ini dapat disamakan dengan murid-murid lulusan HIS dan dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya MULO. Sekolah peralihan (*Schakelschool*) ini meskipun hanya ada sebuah saja di daerah ini, tetapi jumlah muridnya tidak banyak dan rata-rata 30 orang murid pada tiap kelas. Di antara guru-gurunya ialah Sutan Takdir Alisyahbana, Saaduddin Djambek, M. Hutasoit dan MZ. Oemar. Sekolah yang terkenal dengan nama *Openbare Schakelschool* ini berlokasi di 15 Iir, yang sekarang ini ditempati oleh SD Negeri No. 2 dan No. 24.

3. Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan

a. MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)

Sekolah ini merupakan satu jenis sekolah lanjutan yang menurut sistem persekolahan Belanda digolongkan dalam Sekolah Dasar, yaitu Sekolah Dasar yang lebih luas, kelanjutan dari Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Lama pendidikannya antara tiga sampai empat tahun, di mana pertama kali didirikan pada tahun 1914 dan diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing.¹²⁾ Di daerah ini menurut keterangan Zainal Abidin Ahmad, hanya ada sebuah Mulo yang didirikan oleh Pemerintah sekitar tahun 1930-an. Gedungnya terletak di jalan Talang Semut Lama, yang sekarang ditempati SMP Negeri I Palembang. Jumlah kelas setelah dalam perkembangannya menjadi delapan kelas yang terbagi atas dua kelas persiapan (*voorklas*), dua kelas satu, satu kelas dua bagian A, 1 kelas dua bagian B, 1 kelas tiga bagian A dan 1 kelas tiga bagian B. Sekolah ini memperoleh siswanya dari tamatan dua buah HIS dan HCS yang ada di kota Palembang. Oleh karena melalui saringan yang cukup ketat, maka MULO tersebut tidak banyak siswanya, dan diperkirakan rata-rata per kelasnya \pm 30 orang, dan salah satu di antara guru-gurunya yang berkebangsaan Indonesia adalah R.H.A. Rani.

b. Sekolah Guru (*Kweekschool*)

Lembaga pendidikan keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke-19. Mula-mula yang mendirikan lembaga ini adalah kalangan-kalangan Zending dan Misi dalam bentuk kursus-kursus. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pada tahun 1851 di Surakarta, sedangkan sebelum itu pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama *Normaal Cursus* yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru Sekolah Dasar. Pada abad ke-20 sejalan dengan perkembangan

12) BP3K, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Balai Pustaka Jakarta 1976, hal. 38.

dan kemajuan di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pendidikan guru juga mengalami perubahan dan akhirnya terdapat tiga macam yaitu:

- 1) *Normaalschool*, sekolah guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan sekolah dasar lima tahun, berbahasa pengantar bahasa Melayu.
- 2) *Kweekschool*, sekolah guru empat tahun yang menerima lulusan sekolah dan berbahasa pengantar bahasa Belanda.
- 3) *Hollandsch Inlandsche Kweekschool*, sekolah guru enam tahun berbahasa pengantar bahasa Belanda untuk guru-guru HIS dan HCS.

Di samping sekolah tersebut di atas masih terdapat kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta terutama lembaga keagamaan. Lama kursus bervariasi antara dua sampai empat tahun dengan macam penamaan dan istilah.¹³⁾

Menurut keterangan MZ. Oemar, bahwa sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pemakaian bahasa Belanda di kalangan masyarakat Burniputera, maka pada tahun 1920 bersamaan waktu dengan dibukanya HIS di Palembang, di Lahat dibuka sebuah Sekolah Guru (*Kweekschool*) untuk menghasilkan tenaga pendidik bagi sekolah rendah. Sekolah tersebut kemudian dipindahkan ke Muara Enim, bahkan pada tahun 1927 terpaksa ditutup dan siswa-siswanya ditampung oleh *Kweekschool* Medan dan Bukittinggi. Seratus kemudian *Kweekschool* Medan ditutup juga, sehingga untuk seluruh Sumatera hanya tinggal sebuah *Kweekschool* yaitu di Bukittinggi. Penutupan *Kweekschool* di Lahat/Muara Enim itu (1927) kiranya dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembaharuan sekolah pendidikan guru untuk sekolah dasar dengan bahasa Belanda melalui organisasi *Kweekschool*. Akhirnya dari 12 *Kweekschool* Negeri lima buah diubah menjadi HIK (*Hollands Inlandse Kweekschool*) dan yang lainnya ditiadakan.¹⁴⁾

B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL

1. Motivasi

Dalam dua dasa warsa pertama abad ke-20, pendidikan dasar di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang sangat pesat. Demikian pesatnya seakan-akan pendidikan yang sudah berlangsung sebelumnya (pendidikan tradisional) belum banyak mempunyai arti. Oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beraneka ragam. Secara umum sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan atas golongan penduduk menurut keturunan

13) *Ibid.*, halaman 40.

14) Departemen P dan K, Buku II, *op.cit.*, hal. 99.

atau stratifikasi sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu.¹⁵⁾ Akan tetapi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak selalu memenuhi kebutuhan semua golongan dalam masyarakat. Pada umumnya pendidikan pemerintah hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang intelektual, yaitu mengenai berbagai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk dapat memajukan hidup dan penghidupannya dalam masyarakat, agar dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan kata lain bahwa pendidikan oleh pemerintah adalah netral, dalam arti tidak mencampuri urusan agama.¹⁶⁾ Oleh karena itu orang-orang yang menginginkan pendidikan agama bagi anak-anaknya mengadakan usaha khusus, yaitu mendirikan sekolah-sekolah di mana unsur agama mendapat tempatnya.

Meskipun oleh pihak golongan Islam yang sejak dulu sudah menyelenggarakan pendidikannya sendiri dalam bentuk pesantren atau madrasah-madrasah, secara teoritis tidak masuk dalam perhatian pemerintah Belanda, karena pemerintah dalam hal ini mengambil kebijaksanaan menjalankan apa yang disebut *onthoudings politiek* (politik tidak campur tangan). Tetapi dalam prakteknya, melalui Dewan Ulama, lembaga-lembaga pendidikan Islam selalu diawasi, lebih-lebih setelah tahun 1925 dengan dikeluarkannya *Goeroe Ordonnantie* (*Staatsblad* No. 219). Lain halnya dengan sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh golongan Katolik dan Kristen, atas dasar suatu peraturan subsidi diberi bantuan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya dengan syarat-syarat yang menjamin ketertiban umum dan mutu pendidikan.¹⁷⁾

Perasaan Nasional yang mulai berkembang di kalangan kaum terpelajar memandang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka ingin mengubah sistem pendidikan yang kurang tepat tersebut. Kesadaran berorganisasi dan tumbuhnya rasa nasionalisme yang murni, melahirkan perkembangan baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Mereka insyaf bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam program perjuangan, yaitu mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar itu pula maka lahirlah perguruan-perguruan yang bersifat nasional atau sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh perintis-perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah seperti itu yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan agama ialah:

- a. Sekolah-sekolah Serikat Islam
- b. Sekolah-sekolah Muhammadiyah

15) BP3K, *op.cit.*, hal. 37.

16) Prof. Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 206.

17) *Ibid.*, *Loc.cit.*

- c. Sumatera Thawalib di Padang Panjang
- d. Sekolah-sekolah Nahdhatul Ulama
- e. Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain-lain.¹⁸⁾

Sedangkan sekolah-sekolah yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan nasional ialah:

- a. Taman Siswa, yang bermula didirikan di Yogyakarta.
- b. Sekolah Serikat Rakyat di Semarang yang berhaluan Komunis.
- c. *Ksatrian Institut* yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker (Dr. Setiabudi Danudirdja) di Bandung.¹⁹⁾

2. Kelembagaan

a. Taman Siswa

Sebelum membicarakan Perguruan Taman Siswa cabang Palembang dan sekitarnya, perlu diungkapkan lebih dulu sejarah lahirnya lembaga itu di Yogyakarta, sebagai organisasi dan sistem pendidikan nasional Indonesia murni yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Mula-mula bernama "*Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa Jogyakarta*." Sistem pendidikannya berdasarkan atas kebudayaan nasional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Intelektualisme harus dijauhi dan dipraktekkan *sistem among*, yang menyokong kodrat anak-anak. Hal ini berarti tidak melalui perintah paksaan, tetapi dengan melalui tuntunan agar berkembang hidup lahir batin menurut kodratnya sendiri-sendiri dan terkenal dengan semboyan *tu wuri handayani*. Adapun sistem among itu mengemukakan dua dasar yaitu

- 1). *Kemerdekaan* sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin, hingga dapat hidup merdeka dalam arti dapat berdiri sendiri.
- 2). *Kodrat alam* sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.²⁰⁾

Meskipun pada saat berdirinya Taman Siswa baru dimulai dengan *Kindergarten* (TK) yang di kalangan Taman Siswa disebut *Taman Indria* dan Kursus Guru, tetapi karena dasar pendidikan tersebut telah berhasil menyentuh hati nurani bangsa Indonesia, maka Taman Siswa cepat meluas dan berkembang ke seluruh pelosok tanah air, sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu. Pemerintah Hindia Belanda sendiri merasa khawatir akan perkembangan lembaga itu yang begitu pesat, sehingga dalam tahun 1931 timbul pendapat di kalangan Pemerintah Hindia Belanda, bahwa jika pengajaran di sekolah-sekolah pemerintah tidak selekasnya diperbaharui, maka dalam

18) I Djumhur dan Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, CV Ilmu, Bandung, 1977, hal. 149.

19) *Ibid.*, *Loc. cit.*

20) Drs. Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, CV Toha Putera, Semarang, 1975, halaman 43-44.

waktu 10 tahun Taman Siswa akan menguasai seluruh bidang pendidikan dan pengajaran partikelir.²¹⁾

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, Pemerintah Hindia Belanda menciptakan sebagai sarana preventifnya, dengan dikeluarkan Ordonansi Pengawasan Pendidikan Partikelir yang tidak bersubsidi pada tanggal 1 Oktober 1932,²²⁾ yang dikenal dengan nama *Wilde Scholen Ordonnantie*. Meskipun mengalami banyak rintangan terutama dari pemerintah, namun dasar demokrasi yang lebih mengutamakan perluasan pendidikan secara horizontal daripada secara vertikal. Dengan kata lain lebih mendahulukan pendidikan untuk rakyat banyak daripada pendidikan untuk sebagian kecil rakyat (*the priveleged few*).²³⁾ Lagi pula tuntutan nasional yang senada dengan lahir dan berkembangnya nasionalisme menempatkan lembaga Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang dapat diterima di seluruh tanah air.

Perguruan Taman Siswa cabang Palembang didirikan pada tanggal 3 Juli 1932, di mana akte pendiriannya termasuk dalam Perguruan Taman Siswa Pusat (Yogyakarta) tanggal 1 September 1951 yang tercatat dalam daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 1953 Nomor. 03/1953/J.²⁴⁾ Berdirinya Taman Siswa di daerah ini untuk pertama kalinya dirintis oleh Ki Hanung (tokoh Taman Siswa Pusat), Bapak R.A. Nadjamudin dan Bapak Raden Mad (Kedua-duanya adalah putera daerah ini). Ternyata berdirinya perguruan ini mendapat simpati masyarakat, dan sebagai langkah pertama dibuka sebuah Sekolah Rendah berbahasa Belanda, yang dalam istilah Taman Siswa disebut *Taman Muda* yang sejajar dengan HIS. Sekolah ini pada mulanya berlokasi di sekitar Hotel Haji Nangling, jalan Cek Syeh sekarang. Pada umumnya murid-murid berasal dari mereka yang tidak dapat kesempatan mengikuti pendidikan yang diusahakan oleh Pemerintah. Guna manampung pendidikan lanjutannya, maka pada tahun 1938 didirikanlah MULO Taman Siswa (Taman Dewasa). Setelah pada tahun 1934 Taman Siswa mampu mendirikan gedung sendiri di kompleks Taman Siswa sekarang ini. Sangat disayangkan bahwa MULO Taman Siswa ini harus menghentikan kegiatannya setelah Jepang menduduki daerah ini.²⁵⁾

b. Serikat Islam

Perkembangan pendidikan di daerah ini sekitar tahun tiga puluhan boleh dikatakan masih ketinggalan bila dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Pada umumnya sekolah-sekolah yang ada diselenggarakan

21) *Ensklopedia Umum*, Yaysaan Kanisius, Jogyakarta, 1973, hal. 1287.

23) *Ibid.*, *loc.cit.*

23) Prof. Soegarda Poerbakawaja, *op.cit.*, hal. 219.

24) Wawancara dengan Bapak Bahtiar, Ketua Perguruan Taman Siswa cabang Palembang, 18 - 11 - 1980

25) Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, 1954 hal. 630.

oleh lembaga-lembaga keagamaan di samping sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Baru pada tahun 1920 pemerintah mendirikan HIS di daerah ini. Diantara sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh lembaga agama Islam ialah *Pendidikan Islam Air Itam* yang terletak di daerah Musi Ilir. Sekolah ini didirikan pada tahun 1937 oleh H.A. Hamid, dan pada tahun yang bersamaan Pendidikan Islam Air Itam berkembang sampai ke Sungai Rotan dan Ampat Petulai, Curup, yang kedua-duanya terletak di daerah LIOT sekarang.

Karena sekolah di Air Itam mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya dan dalam perkembangan kemudian menjadi lebih pesat, sekolah tersebut sengaja dikunjungi oleh de Boer sebagai Asisten Residen *Afdeling Palembang Ilir* untuk melihat dari dekat. De Boer beranggapan bahwa sekolah Air Itam itu akan menjadi lawan yang gigih terhadap pemerintah.

Pada tahun 1938 Pendidikan Islam di Air Itam menggabungkan diri dalam kegiatan politik Serikat Islam (PSII), sehingga semua sekolah yang didirikan berada dalam naungan Perguruan PSII. Hingga tahun 1940 di daerah cabang Air Itam terdapat lebih dari 10 buah sekolah PSII, dan di dusun Air Itam sendiri terdapat sebuah sekolah yang terdiri dari enam lokal dan pada tingkat-tingkat yang tertinggi diajarkan pula bahasa Inggris. Melihat pesatnya kemajuan sekolah-sekolah PSII, maka pada tahun 1941 pemerintah mendirikan *Shcakelschool* di Air Itam sebagai saingan, mengambil tempat di bawah kolong rumah seorang penduduk dengan dua orang guru dan 15-20 orang murid. Salah seorang diantara guru itu adalah H. Asnawi Mangkualam yang mengajar sampai sekolah itu ditutup segera setelah Jepang menduduki Sumatera Selatan pada tahun 1942.²⁶⁾

c. Muhammadiyah

Permulaan abad ke-20 merupakan lahirnya partai-partai dan organisasi-organisasi sebagai pengaurh kesadaran nasional. Sejalan dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan bersamaan dengan datangnya gelombang pembaharuan di bidang agama yang datang dari Mesir, Arab dan India, maka K.H.A. Dahlan yang telah mempelajari pembaharuan itu kemudian mendirikan organisasi yang disebut Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor pembaharuan dalam mengajarkan agama Islam di Indonesia. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 oleh K.H.A. Dahlan.

Perkumpulan ini bertujuan meluaskan dan mempertinggi pendidikan ajaran Islam secara modern serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam. Untuk mencapai tujuan itu Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah di bawah Majelis Pengajaran. Usaha-usaha lain ialah memperluas pengajaran-pengajian di bawah bimbingan Majelis Tabligh dan mendirikan panti-panti asuh-

26) Dinas Sosial Daerah Tk. I Sumsel, *Perintis Kemerdekaan Indonesia*, Palembang, 1978, halaman 20-22.

an, rumah sakit dan poliklinik di bawah PKU (Majelis Pembinaan Kesejahteraan dan Umat).²⁷⁾

Perkumpulan Muhammadiyah masuk ke daerah ini sekitar tahun 1928/1929, dan baru pada tahun 1932 dibentuk Daerah Muhammadiyah Lampung Palembang dengan Zainal Abidin Djambek sebagai Konsul yang kemudian digantikan oleh RZ. Fanani.²⁸⁾ Menurut keterangan Drs. M. Tusin Djamaludin bahwa pembawa Muhammadiyah ke Palembang antara lain:

- 1). Haji Ridwan yang berasal dari Kota Gede Yogyakarta yang datang di daerah ini sebagai pedagang batik sambil melakukan dakwah Islam. Dakwah yang disampaikannya itu dalam waktu singkat mendapatkan sambutan dari rekan-rekannya sesama pedagang di Pasar 16 Ilir. Mereka itu antara lain Haji Anang bin H. Saleh, Mgs. Ahmad, Haji Abdulhalim, Haji Muhammad, Abdulkarim, Abdulkasim dan Haji Djamal.
- 2). Rusli yang berasal dari Padang. Pegawai Kantor Pos Palembang, yang kemudian menggabungkan diri dalam acara pengajian yang diasuh oleh Haji Ridwan.
- 3). Raden Subono Purwowiyoto, seorang terpelajar lulusan *Klein Ambtenaar* Bogor, berasal dari Semarang dan tiba di Palembang pada tahun 1929 sebagai pegawai Kas Negara Palembang. Segera setelah kedatangan di Palembang ia menggabungkan diri dalam kelompok pengajian yang diasuh oleh Haji Ridwan. Sewaktu masih di Brebes (Jawa Tengah) ia telah berkenalan dengan organisasi tersebut, bahkan menjadi salah seorang pimpinan Muhammadiyah setempat.
- 4). Zainal Abidin Djambek, asal dari Padang bekerja pada BPM Plaju, yang juga menggabungkan diri dalam pengajian yang diasuh oleh H. Ridwan.²⁹⁾

Dengan adanya keempat tenaga pendatang tersebut, maka makin semaraklah pengajian yang mereka selenggarakan dan pesertanya pun makin bertambah. Setelah pengajian itu berjalan beberapa lama dan pengertian pesertanya terhadap tugas mereka sebagai Muslim dan sebagai anggota organisasi, maka mulailah untuk menggerakkan amal bakti serta usaha guna mengikuti kemajuan jaman, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan untuk itu terlebih dahulu mereka dirikan ranting dan cabang Muhammadiyah dalam kota Palembang, di mana hasil susunan pengurusnya mereka laporkan kepada Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta.³⁰⁾

Menurut keterangan Ibrahim Ja'far sebagai wakil Ketua Majelis Pendidikan Kotamadya Palembang, ranting Muhammadiyah yang mula-mula didiri-

27). I. Djumhur & Drs. H. Danasuparta, *op.cit.*, hal. 162-164.

28) K.H.A. Dahlan, *Zaman Penjajahan Belanda dan Riwayat mulai berdirinya serta Tenaga orang yang mendirikan*, hal. 33.

29) *Bulletin Muhammadiyah Sumatera Selatan*, No. 3 Maret 1980 hal. 5 - 7. 30).

30) *Ibid.*, *loc.cit.*

kan ialah ranting Talang Jawa, Seberang Ulu dan 24 Ilir. Ketiga ranting inilah yang kemudian menjadi cabang Muhammadiyah Palembang yang diresmikan pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1931 di Plaju berdiri cabang Muhammadiyah dengan ketuanya yang pertama Abdulmalik Sidik. Setelah itu berdiri pula cabang organisasi itu di Baturaja berkat usaha Kiyai Haji Bakri, dan demikianlah seterusnya ke daerah pedalaman.

Menurut keterangan Drs. M. Tusin Jamaluddin sebagai anggota pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, bahwa sekolah Muhammadiyah (Sekolah Dasar) resmi didirikan baru pada tahun 1932, yaitu: SD di 4 Ulu; SD di jalan Mayor Ruslan dan HIS di 24 Ilir Palembang. Empat tahun kemudian dibuka SD di Kertapati dan pada tahun 1938 didirikan HIS dan *Schakel School* di 4 Ulu Palembang. Demikian pula MULO Muhammadiyah didirikan pada waktu itu. Pada jaman Jepang, sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Muhammadiyah, pada umumnya ada kegiatan, kecuali yang berusaha bertahan ialah SD 4 Ulu, SD di jalan Mayor Ruslan, SD di Palju dan SD di Bukitkecil

Situasi Muhammadiyah di Sumatera Selatan digambarkan sebagai berikut:

"Menurut susunan zaman Belanda Konsul daerah Palembang itu memimpin dua daerah yaitu Palembang dan Lampung. Dan pernah juga dicoba memasukkan daerah Bangka dan Belitung. Nasib Muhammadiyah dalam daerah-daerah itu setelah Jepang masuk amat menyedihkan. Konsul daerah Palembang R.Z. Fanany tidak sanggup mempertahankan, sehingga Muhammadiyah daerah Palembang terpaksa dibubarkannya sendiri tidak berapa lama sesudah Jepang masuk sehingga selama pendudukan Balatentara Jepang hilanglah suara Muhammadiyah dari daerah itu. Pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di luar kota Palembang yang masih cinta kepada perserikatan tetap menjaga hak milik dan wakaf Muhammadiyah dan ada juga yang tetap melanjutkan amalnya walaupun nama Muhammadiyah tidak boleh disebut-sebut. Waktu saya datang ke Tanjung Enim di pertengahan bulan April 1944 saya dapati musholla Muhammadiyah masih tetap disembahyangi. Tiap-tiap habis jama'ah Magrib anggota Muhammadiyah masih tetap berkumpul habis sembahyang Isya' mengaji, berkursus dan lain-lain. Bangku-bangku sekolah tersusun di tepi mushollah. Ketika saya tanyai akan dipengapakan bangku-bangku sekolah itu karena sekolah sudah ditutup. Pengurusnya menjawab: disimpan baik-baik merunggu waktunya akan dipergunakan kembali. Itulah sebabnya maka saudara A. Malik Siddik pulang dari Palembang ke Bukit-tinggi."³¹⁾

d. Madrasah-madrasah di Sumatera Selatan

Menurut keterangan Haji Munir, seorang tokoh agama dari Kabupaten Muba dan Kiyai Haji Zainal Fikri (seorang Rektor IAIN Raden Fattah Pa-

31) K.H.A. Dahlan, *op.cit.*, hal. 81-82.

lembang), bahwa lembaga pendidikan sekolah agama di daerah ini pada umumnya diselenggarakan oleh orang-orang pribumi yang baru pulang menunaikan ibadah Haji. Oleh karena tingkat pengetahuan mereka tidak begitu mendalam mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Ilmu Al Fikh, maka yang diajarkan kepada murid-murid hanyalah berkisar pada cara membaca Al Qur'an saja dan peraturan-peraturan tentang sembahyang lima waktu.

Biasanya pendidikan dilakukan secara perorangan dengan biaya yang dipikul oleh murid-murid, sedangkan tempat pendidikan berada di bawah rumah (rumah-rumah tradisional di daerah ini adalah rumah panggung). Waktu belajar pun tidak tentu dan tidak teratur, mengingat kondisi rakyat setempat. Bahkan kadang-kadang ditutup sementara pada musim panen atau menabur bibit padi di sawah. Kemudian sekolah yang tidak teratur itu disempurnakan oleh orang-orang pribumi pula yang sengaja belajar di Mekkah beberapa tahun, kemudian pulang ke tanah air dan menyempurnakan sekolah-sekolah tradisional tersebut dalam bentuk madrasah. Pada umumnya madrasah-madrasah tersebut setingkat dengan Sekolah Rendah atau dikenal dengan nama *Ibtida'iah*. Hanya beberapa daerah saja yang dapat menyelenggarakan sekolah madrasah tingkat *Tsanawiyah* yaitu apabila terdapat beberapa orang Haji yang telah mendapat pelajaran di Mekkah yang dikenal dengan *Sekolah Darul Umm*. Orang-orang itu di daerah MUBA antara lain Haji Rasyid Siddiq dan Haji Amir Hamzah, sedangkan di daerah OKU ialah Kiyai Haji Zainal Fikri dan Kiyai Haji Daud Rusdy.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera Selatan ada yang dari jurusan Selatan (Jawa Barat), sehingga pendidikan Islam di daerah ini banyak mengikuti pendidikan Islam di Jawa. Demikian pula mengenai pondok pesantren atau madrasah-madrasah di daerah ini hampir sama sistemnya dan kitab-kitabnya yang dipakai di Jawa. Di antara sekian banyak pondok pesantren dan madrasah yang terkenal dan tertua di daerah ini :

- 1). Pondok Pesantren yang berlokasi di Marga Madang Suku II yang didirikan oleh Haji Juwana yang berasal dari Banten pada tahun 1656.
- 2). *Madrasah Al-Quranyah*, didirikan oleh Kiyai Haji Muhammad Yunus, kira-kira dalam tahun 1920 di Palembang, yang terdiri dari tingkat Ibtida'iah dan Tsanawiyah. Pada masa jayanya murid-muridnya pernah mencapai 400 orang dan guru-gurunya terdapat lima orang, yang sampai sekarang masih hidup.
- 3). *Sekolah Ahliah Dinyah*, didirikan oleh Kiyai Masagus Haji Nanag Misri pada tahun 1920 di Palembang, yang terdiri dari tingkat Ibtida'iah dan Tsanawiyah.
- 4). *Madrasah Narulfalah*, didirikan oleh Kiyai Haji Abubakar Al-Bastari pada tahun 1934 di Palembang dan terdiri dari; tingkat Ibtida'iah yang lama pendidikannya lima tahun, Tingkat Tsanawiyah lama pendidikannya tiga

tahun dan tingkat Alyah lama pelajarannya dua tahun. Pada masa jayanya pernah jumlah muridnya mencapai +600 orang.

5) *Madrasah Darul Furun*, didirikan oleh Kiyai Haji Ibrakhim pada tahun 1938 di Palembang, yang terdiri dari tingkat Ibtida'iyah dan tingkat Tsanawiyah.

Lain dari pada itu banyak lagi madrasah di daerah ini mulai dari kota-kota sampai ke dusun-dusun, seperti *Madrasah Salathyah, Dinyah, Tarbyah Islamiyah, Nurul Huda* dan lain-lain.³²⁾

e. Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung

Pesantren ini berlokasi di daerah OKI (Tanjung Batu) didirikan oleh Kiyai Haji Anwar bin Haji Kumpul pada tanggal 1 Nopember 1932 M. (2 Rajab 1351 H.). Latar belakang berdirinya pesantren ini, adanya dorongan masyarakat setempat yang menghendaki pendidikan Islam berbentuk sekolah dan dukungan dari pemerintah setempat. Sebagai tujuannya untuk mendidik dan membimbing serta membawa para santri, agar menjadi manusia muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh serta berakhlak mulia dan kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, berbakti terhadap agama, tanah air dan bangsa dengan jiwa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pondok Pesantren Nurul Islam ini merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan Islam yang dapat bertahan pada jaman Jepang.

f. Lembaga Pendidikan Katolik dan Kristen

1). Perguruan Katolik

Wilayah Propinsi Sumatera Selatan terdapat dua buah keuskupan, yaitu keuskupan Palembang dan Keuskupan Pangkal Pinang, yang masing-masing Keuskupan bekerja imam-imam yang berbeda ordonya. Ordo SCJ di wilayah Palembang dan Ordo SSCC di wilayah Pangkal Pinang. Dengan demikian berdirinya sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Katolik tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan Ordo-ordo tersebut.

a) Keuskupan Palembang (Perguruan Xaverius)

Imam-imam Ordo SCJ tiba di daerah ini pada bulan September 1924, di mana pos pertamanya di Tanjungsakti. Sebelum kedatangan mereka itu telah bekerja di tempat ini pastor Y. van Meurs S.J. sejak tahun 1887 dengan membuka sebuah sekolah di Tanjungsakti pada tanggal 1 September 1887 dengan dua ruang yang terpisah, sebuah di pastoran dan yang lain di rumah seorang bekas pekabar Injil (zendeling) Y.C. Kersten. Walaupun ada campur tangan Residen Langen mengenai sekolah tersebut pada tahun 1889, namun jalannya tidak lancar karena kekurangan murid yang diperlukan dalam arti

32) Prof. H. Mahmud Junus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1979, hal. 211-213.

hadir tiap-tiap hari.³³⁾ Pengalaman yang pahit dialami pula oleh pastor P.J. van Hoof, di mana pada tahun 1911 ia berusaha menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang pernah ada, sehingga tahun 1915-1916 membuka dua-tiga sekolah di Benteng dan Joko Bloot (Simpangtiga). Setelah suster-suster *Belaskasihan* tiba di sana, pada tahun 1917 sempat memberikan pelajaran jahit-menjahit dan kerajinan tangan.³⁴⁾

Di samping pos pertama di Tanjungsakti, pada tahun 1925 kota Palembang dijadikan pos kedua oleh S.C.J. untuk meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh Imam-imam S.J. dengan membuka sekolah-sekolah, yang dibina oleh mereka sendiri.

Untuk lebih memantapkan lembaga itu, maka dibentuklah suatu yayasan yang diberi nama *Yayasan Xaverius* dengan Akte Notaris Christian Maathuis pada tanggal 5 Mei 1930³⁵⁾ dengan susunan pengurusnya: Pastor J.J. van der Sangen sebagai Ketua, Pastor A. Hermelink sebagai Sekretaris, Nyonya Yda Maria Gerarda Wilhelmina van Peer sebagai bendahara, dan FPH van Alfen dengan JHA. Wiedenhoff sebagai anggota. Yang pada tahun 1926 bulan Maret mendirikan *Karya Melania* di Palembang, dan merupakan cabang dari Karya Melania di Nederland. Pada tahun itu juga didirikan sekolah Thersia, sebuah HIS yang sedianya di khususkan untuk anak-anak perempuan. Pada tahun 1927 suster-suster *Hati Kudus* mengambil alih sekolah tersebut yang terletak di belakang kantor Pengadilan lama (Lorong Landrad). Kemudian menyusul didirikan *Vervolgschool* di Lorong Pagaram, membuka ELS bagi anak-anak Eropa yang beragama Katolik dan sebuah TK.³⁶⁾

Menurut keterangan Nyonya Sudiropranoto (Pensiunan guru SD Xaverius Palembang), bahwa Karya Melania merupakan Sekolah Rakyat kelas II dipimpin oleh Ibu Rosa yang berlokasi di jalan Mayor Ruslan atau Bengkel Melati sekarang. Sedangkan Sekolah Theresia dalam prakteknya mengajar anak laki-laki dan perempuan, yang sebagian besar anak-anak itu berasal dari anak-anak Cina, Indo-Belanda dan anak-anak KNIL (*Koninklijke Nederlandsch Indische Leger*). Pada tahun 1933 sekolah ini terdiri dari kelas nol (0) sampai kelas tujuh, di mana sekolah tersebut dipimpin oleh Suster Martini yang dibantu oleh Tumeon dan Nyonya Soediropranoto. Pada bulan Agustus 1935 dibuka sekolah HCS dan setahun kemudian frater-frater *Bunda Hati Kudus* datang ke Palembang dan mengambil alih murid laki-laki dari sekolah Theresia. Setelah itu kedua sekolah tersebut digabungkan menjadi satu dalam tahun 1938 dengan nama *Andreas School*.³⁷⁾

33) G. Vriens S.J., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, Arnoldus, Ende, 1972, halaman 185-186.

34) *Ibid.*, halaman 168-169.

35) *Stichtingsbrief Xaverius Vreeniging*, no. 11, dd. 5 Mei 1930 (Notaris Christian Maathuis).

36) G. Vriens S.J. *op.cit.*, hal. 182.

37) *Ibid.*, *loc.cit.*

Sementara di Palembang para biarawan dan biarawati mendirikan berjenis-jenis sekolah, maka di kota Lahat dibuka Sekolah Dasar (HIS) pada tahun 1933 di bawah pimpinan pastor Hoogetoom S.C.J. dengan muridnya yang bermacam-macam bangsa dan usianya. Kemudian pada tahun 1936 sekolah itu diambil alih oleh suster-suster *Carolus Borromeus* di bawah pimpinan suster Cornelianne, yang sebelumnya telah mempunyai posnya di Bengkulu. Pada tahun 1938 sekolah ini berkembang di bawah pimpinan suster Laurentia dengan membangun sebuah kompleks sekolah di jalan Gumei, bahkan pada tahun 1939 telah dibuka sebuah MULO.³⁸⁾ Sekolah Katolik di Lahat ini akhirnya dikenal dengan nama *Sekolah Santo Yosef*.

b) Keuskupan Pangkal Pinang

Setelah kota Mentok diresmikan sebagai stasi dalam tahun 1925 dengan imamnya yang pertama pastor Meijer, dan kemudian tiba di sana delapan orang suster *Pemeliharaan Illahi* telah membuka sekolah Santa Maria pada tanggal 3 Nopember 1925, kecuali HCS dibuka pula Taman Kanak-kanak dengan 36 orang murid. Pada tahun 1927 telah diusahakan untuk membuka MULO tapi tak dapat bertahan lama.³⁹⁾ Demikian pula stasi Belinyu dibuka sebuah sekolah dengan asrama atau usaha pastor Zaat pada tanggal 5 Nopember 1929, yang kemudian diserahkan kepada beberapa orang suster pada tahun 1931. Oleh karena stasi Belinyu mengalami kemunduran, maka stasi Pangkal Pinang dibuka oleh pastor Bakker dengan membuka sekolah pada tahun 1931. Ketika Bruder-Bruder Dongen tiba di sana dalam tahun 1934, maka pengelola sekolah tersebut diserahkan pada mereka, sedangkan pastor Bakker akan mempersiapkan sekolah puteri. Akhirnya dalam tahun 1938 suster-suster yang dinanti-nantikan tiba di Pangkal Pinang dan langsung memimpin sekolah puteri tersebut. Pastor van Gelder yang tadinya menjadi guru pada sekolah tersebut mendapat tugas di Sungai Liat untuk membantu pastor di sana yang telah memulai kegiatannya pada tahun 1937. Menjelang masuknya Jepang di sana, sekolah puteri di Sungai Liat terdiri 3 kelas.⁴⁰⁾

2) Perguruan Methodist

Pusat gereja *Methodist* di Indonesia berada di Medan sejak tahun 1905, yang mengemban tugas gerejani, pendidikan dan sosial. Menurut keterangan SMH Panggabean MA (Kepala Sekolah Methodist I Palembang) bahwa sekolah Methodist di Palembang pertama kalinya didirikan oleh Solomon Pakianathan, seorang bangsa India dari Malaysia pada tahun 1908. Mula-mula sekolah ini bernama *Mission School* yang berlokasi di Lorong Basah. Pada mulanya setiap anak boleh memasuki sekolah ini, tapi kenyataannya yang tertarik ialah orang-orang Cina, India dan orang-orang yang mampu. Kemudian namanya

38) *Ibid.*, halaman 184-185.

39) *Ibid.*, halaman 254.

40) *Ibid.*, hal. 260-267.

diganti dengan *Methodist English School*, setelah memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Tengkuruk. Guru-gurunya adalah orang-orang Indonesia dan di antaranya A. Malik, sedangkan pimpinannya antara lain Albert Hamel dan John Wesley Day. Ketika Jepang menduduki daerah ini, sekolah ini ditutup seperti halnya sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Xaverius lainnya.

3) Perguruan Kristen

Sebagai usaha Gereja-gereja Kristen di Palembang, lahirlah ELS pada tahun 1938 di bawah naungan Yayasan *Vereeniging Voor Christelijk Onderwijs te Palembang* atau Perkumpulan pengajaran kristen di Palembang, yang didirikan pada tahun 1938 dengan Akte no. 88, Badan Hukum No. A43/25/-17. Sekolah ini berlokasi di Jalan Merdeka dan pendirinya van Bosch dengan van Ach. Nama sekolah tersebut dikenal dengan nama *Beatric School* yang menampung murid-murid campuran, dan setelah Jepang menduduki kota Palembang sekolah ini pun ditutup. Setelah Indonesia Merdeka sekolah ini dihidupkan kembali yang dikelola oleh HKBP, GPIB dan Siloan.

BAB V PENDIDIKAN JAMAN JEPANG

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH

Tujuan Jepang menduduki kepulauan Indonesia ialah untuk menguasai sumber bahan-mentah dan gudang tenaga manusia, yang sangat besar artinya bagi kelangsungan Perang Asia Timur Raya. Daerah Sumatera Selatan yang dipandang dari potensi perang adalah unsur yang sangat menentukan, karena merupakan penghasil bahan bakar yang cukup kaya, sehingga pada tanggal 14 Pebruari 1942 daerah ini diserbu dan diduduki oleh tentara Jepang. Mulai saat itu berakhir masa penjajahan bangsa Belanda dan mulailah era baru di daerah ini, yakni jaman pendudukan Militer Jepang yang berlangsung sampai tahun 1945.

Perkembangan ekonomi dan industri Jepang membutuhkan wilayah yang luas di samping sebagai daerah pasaran juga sebagai sumber bahan mentah, oleh karena itu perluasan daerah seakan-akan merupakan suatu keharusan yang mutlak. Rencana perluasan daerah itu melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan nama *Hakko-Ici-U* dalam rangka mendirikan "Kemakmuran Bersama Asia Raya" yang telah dipublikasikan sejak tahun 1940.¹⁾ Menurut rencana itu Jepang akan menjadi pusat suatu lingkungan pengaruh atas daerah-daerah: Mancuria, Daratan Cina, Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Thailand, Malaysia, Indocina dan Asia (Rusia). Jepang akan menjadi pusat industri presisi, sedangkan Mancuria akan dikembangkan menjadi daerah pertambangan industri berat dan industri kimia, dan Cina sendiri akan dikembangkan menjadi industri ringan dan tekstil.²⁾ Adapun daerah-daerah lainnya tetap merupakan sumber bahan mentah untuk mensuplai daerah-daerah industri tersebut. Rencana ekspansi Jepang serta konsep *Hakko-Ici-U* atau Kemakmuran Bersama Asia Raya itu, dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dan oleh kalangan militer, diterima serta disambut dengan hangat, karena menjanjikan prestise-prestise kepahlawanan dan pengabdian.

Dengan semboyan "Asia untuk bangsa Asia" dan ideologi *Hakko-Ici-U*, Jepang berhasil menguasai daerah yang berpenduduk empat ratus juta jiwa, yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% produksi timah

1) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan & Kebudayaan Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal. 25.

2) *Ibid.*, *loc. cit.*

dunia.³⁾ Indonesia sebagai sumber bahan mentah serta gudang tenaga manusia yang dapat diharapkan untuk menunjang pelaksanaan Perang Asia Timur Raya, merupakan sasaran yang perlu dibina sebaik-baiknya, oleh karena itu ideologi *Hakko-Ici-U* yang pada dasarnya merupakan alat tersembunyi ekspansi Jepang harus ditanamkan/dipompakan kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Sumatera Selatan khususnya.

Dalam melancarkan usaha tersebut di atas pemerintah militer Jepang membentuk/mengerahkan barisan propaganda, terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari daerah ini yang telah mendapat gemblengan langsung dari pemimpin-pemimpin Jepang, dengan didampingi oleh orang-orang Jepang sendiri. Barisan propaganda tersebut terkenal dengan nama *Sendenbu*, dan tugas utama yang dibebankan oleh Jepang kepadanya ialah menyebar luaskan ideologi *Hakko-Ici-U*, di samping itu ideologi baru tersebut harus dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.⁴⁾

Usaha untuk menyebar luaskan dan menanamkan ideologi baru tersebut melalui beberapa jalur, yakni melalui pegawai Negeri (Pamong Praja), para Alim-Ulama dan melalui jalur pendidikan (Guru-guru). Dalam rangka itulah para Demang, Pesirah, Alim-Ulama dan Guru-guru yang mewakili daerahnya masing-masing dikumpulkan di kota Palembang dalam beberapa bulan lamanya untuk digembleng, diberi latihan-latihan serta indoktrinasi tentang semangat Jepang. Mereka dibebani tugas sebagai penyebar luas ideologi tersebut dan sekaligus menanamkan perasaan anti Barat/Amerika kepada seluruh rakyat di daerah ini.

Untuk maksud tersebut diciptakan beberapa nyanyian, baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia, yang menggambarkan kejahatan bangsa-bangsa Eropa/Amerika karena telah memperbudak bangsa-bangsa Asia, dan oleh karena itu harus dienyahkan dari seluruh Asia. Dalam hal ini Jepanglah yang akan memimpin bangsa-bangsa Asia Dalam mengusir bangsa-bangsa penjajah tersebut. Nyanyian-nyanyian itu harus dihafalkan/dinyanyikan dengan penuh semangat oleh penduduk, terutama pegawai negeri dan pelajar, sehingga perasaan anti Barat meresap serta dihayati oleh anak-anak sekolah dan seluruh rakyat. Dengan usaha itu diharapkan rakyat di daerah ini akan bersimpati kepada Jepang sebaliknya membenci kaum Sekutu, dan dengan demikian seluruh rakyat mau memberikan bantuan secara maksimal dalam bentuk materi, tenaga dan jiwa mereka bagi pelaksanaan Perang Suci yang didengung-dengungkan oleh pemerintah militer Jepang.

3) *Ibid.*, halaman 30.

4) I. Djumhur, Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu, Bandung, Bandung Bogor, 1976, halaman 195.

Kedatangan bangsa Jepang di daerah ini mula-mula disambut dengan hangat oleh seluruh rakyat yang ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa Belanda, karena Jepang dianggap sebagai "juru selamat" yang telah dapat mengusir bangsa Bule dari bumi Indonesia. Dengan berbagai-bagai semboyan yang muluk-muluk seperti "Asia untuk Bangsa Asia," "Kemakmuran Bersama Asia Raya," "Dai Nippon Indonesia Sama-sama" serta "Bangsa Kulit Putih Musuh Asia," "Sekutu Musuh Kita" dan lain-lain, Jepang dapat memikat hati rakyat. Tetapi kemudian sikap rakyat berubah, karena ucapan dan semboyan-semboyan yang digembar-gemborkan itu tidak sesuai dengan perbuatan orang-orang Jepang itu sendiri. Rakyat menjadi ragu-ragu, gelisah dan ketakutan.

Akibat penyerbuan bangsa Jepang pada tanggal 14 Pebruari 1942, hampir semua kegiatan di segala bidang kehidupan masyarakat daerah ini terhenti untuk sementara. Sebagian besar penduduk daerah ini baik yang tinggal di kota Palembang, di kota-kota daerah pedalaman (Sekayu, Kayuagung, Baturaja, Lahat, Muara Enim dan lain-lain), maupun yang tinggal di dusun-dusun mengungsi ke dalam hutan atau ke talang-talang. Demikian juga kegiatan di lapangan pendidikan dan pengajaran ikut terhenti,⁵⁾ dan baru kira-kira pada bulan Agustus 1942 roda pendidikan berputar kembali, sekolah-sekolah mulai dibuka, meskipun mula-mula jumlah muridnya sangat sedikit karena keadaan belum stabil.

Sebagai hasil pengamatan dan wawancara-wawancara yang telah kami lakukan di beberapa daerah Kabupaten di Sumatera Selatan, ternyata situasi/kondisi pendidikan di daerah ini berbeda dengan apa yang terdapat di Jawa dan tempat lain di Indonesia. Rupa-rupanya sejak jaman kolonial Belanda, baik jumlah maupun jenis sekolah yang dibuka di daerah ini tidak banyak. Pada jaman Jepang keadaan pendidikan di daerah ini semakin menyedihkan, di mana sekolah-sekolah di jaman Belanda yang jumlahnya belum memadai oleh Jepang semakin dikurangi, karena pemerintah Militer Jepang hanya memberikan sedikit perhatiannya terhadap pendidikan di daerah ini jika dibandingkan dengan di Jawa. Sekolah-sekolah yang ada pada masa pendudukan tentara Jepang ialah yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang dan yang diselenggarakan oleh badan-badan Swasta seperti: Taman Siswa, Muhammadiyah dan lain-lain. Pada jaman Kolonial Belanda sekolah-sekolah Swasta yang terdapat di daerah ini ialah yang diselenggarakan oleh Taman Siswa, Muhammadiyah, *Methodist* (Zending), Katolik (Misi) dan Alim-Ulama setempat. Pada jaman Jepang sekolah-sekolah Zending dan Misi terpaksa ditutup, karena sekolah *Methodist* mempergunakan bahasa pengantarnya bahasa

5) Wawancara dengan RHA. Rani eks. Kepala Perwakilan P & K Sumatera Selatan, 22 Oktober 1977.

Inggris, sedangkan sekolah-sekolah Katolik guru-gurunya sebagian besar orang Belanda. Penutupan berbagai sekolah di masa pendudukan tentara Jepang di samping faktor tersebut di atas juga disebabkan oleh kebutuhan mereka akan bangunan-bangunan yang dipakai untuk asrama, bengkel, depot logistik dan lain-lain.⁶⁾ Sebagai akibat dari tindakan itu, maka jumlah sekolah di daerah ini menjadi semakin sedikit, dan boleh dikatakan keadaan pendidikan di Sumatera Selatan pada masa pendudukan tentara Jepang sangat rawan.

Sejalan dengan ideologi yang harus ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia, maka landasan idiil daripada pendidikan pada masa pendudukan tentara Jepang ialah *Hakko-Ici-U*, bangsa Jepang mengajak bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan mereka dalam rangka mencapai "Kemakmuran Bersama Asia Raya."⁷⁾ Semua kegiatan di sekolah-sekolah menunjukkan pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang dengan tidak mengindahkan pertumbuhan kepribadian dari anak didik. Pendek kata pendidikan pada waktu itu diliputi oleh suasana perang, karena baik nyanyian, semboyan maupun latihan fisik semuanya dihubungkan dengan persiapan lahir-batin guna menghadapi perang. Dengan semboyan Asia Timur Raya atas dasar Kemakmuran Bersama, maka semangat Jepang dimasukkan di sekolah-sekolah. Semua pelajar setiap pagi diharuskan mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan membentuk Indonesia Baru dalam rangka "Kemakmuran Bersama Asia Raya."

Adapun tujuan utama dari pendidikan pada masa itu ialah "memenangkan perang"; konkritnya ialah bahwa pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada kewajiban menyediakan tenaga-tenaga buruh kasar secara cuma-cuma atau *Romusha* yang di daerah ini terkenal dengan nama Badan Pembantu Pemerintah (BPP) alias kuli kerja sampai mati dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Pemuda-pemuda daerah ini dikerahkan untuk menjadi *Gyugun* dan *Heiho*⁸⁾

Walaupun pemerintah Militer Jepang memberikan sedikit perhatian terhadap pendidikan, namun hasilnya sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia di kemudian hari.

Pelajar-pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat serta ditanamkan disiplin yang tinggi kepada mereka. Di samping itu penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah, sehingga mendudukkan bahasa Indonesia pada tempat yang sangat penting, sedangkan pemakaian

6) Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, Jakarta, 1954, halaman 630.

7) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 25.

8) Kementerian Penerangan, *op.cit.*, hal. 630.

bahasa Belanda dilarang dan bahasa Jepang dijadikan bahasa kedua⁹⁾ sesudah bahasa Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang itu pula bahasa Indonesia berkembang dan dipermodern, sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah.

Sistem pengajaran yang dipakai pada masa itu adalah sistem sebelumnya dengan ditambah beberapa mata pelajaran baru, antara lain bahasa Jepang dan *Taiso* (gerak badan) ke dalam kurikulum.¹⁰⁾

Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar pada semua tingkat sekolah, sedangkan bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib.¹¹⁾ Bahasa Belanda pada waktu itu dilarang dalam korespondensi dan Pers maupun diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi sebaliknya pemakaian bahasa Jepang sebagai alat komunikasi baik dalam surat-menyurat maupun untuk Pers dianjurkan di samping bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai para pelajar diharuskan mengikuti upacara penaikan/pengibaran bendera Jepang dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*Kimigayo*), menghormat (*seikeirei*) kepada kaisar Jepang di Tokyo dan setelah itu melakukan *taiso* (gerak badan). Tetapi bagi lembaga pendidikan pesantren tidak diwajibkan, dan oleh karena itu ada beberapa madrasah di Sumatera Selatan diubah menjadi Pesantren misalnya: Madrasah yang dipimpin oleh Ki. H. Zainal Abidin Fikri (sekarang sebagai Rektor IAIN Rd. Fattah Palembang). Di samping itu para pelajar dari semua tingkat sekolah diwajibkan pula melakukan baris-berbaris, latihan kemiliteran, membersihkan gorong-gorong (got), kakus, membuat kebun di halaman sekolah untuk ditanami dengan tanaman yang menghasilkan bahan makanan seperti: jagung, ubi kayu, ketela rambat, sayur-mayur dan pohon jarak/kapas dan lain-lain. Sebagian besar waktu untuk belajar di dalam kelas dihabiskan untuk *Kinrohosi* (kerja bakti), dan hanya sebagian kecil saja untuk belajar dan oleh karena itu pengetahuan murid-murid pada masa pendudukan Jepang sangat minim dan kurang mendalam.

Buku-buku pelajaran boleh dikatakan langka, dan kalau ada tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sebagian besar dari para pelajar tidak memiliki buku, buku tulis serta alat-alat tulis lainnya pun sangat sukar didapat, dan tidak jarang buku tulis yang telah penuh dengan tulisan direndam dengan air untuk menghilangkan tintanya, kemudian dijemur dan jika telah kering dipakai lagi untuk menulis. Selain daripada itu sandang dan pangan sulit dicari. Semangat dan adat-istiadat Jepang atau nyanyian yang bertema semangat perang dan kutukan terhadap kaum Sekutu diajarkan di sekolah-sekolah, di

9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, halaman 30.

10) Wawancara dengan Bapak RHA. Rani, 22 Oktober 1977.

11) M.A. Azis, *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff The Hague, 1955, hal. 175.

samping menanamkan rasa hormat kepada guru-guru. Sehubungan dengan itu tiap pagi setelah masuk kelas, anak-anak berdiri dengan tertibnya dan memberikan salam kepada guru dengan mengucapkan "Sensei ohayo gozaimas" (Selamat pagi ibu/bapak Guru). Hal yang sama dilakukan juga pada siang/petang hari setelah pelajaran berakhir dengan mengucapkan "Sensei Konnichiwa" (Selamat Siang Ibu/Bapak Guru), terutama kebiasaan itu ditanamkan pada sekolah rendah (*Syoto-Koto Syogakko*).

Peraturan sekolah yang menunjukkan disiplin yang keras, ialah semua pelajar pria diwajibkan menggunduli kepala sampai licin, dan apabila peraturan itu dilanggar, maka pelajar yang tak patuh tersebut akan dihukum sehari penuh, yaitu dijemur di panas matahari. Yang paling berkesan dan agak mengerikan, ialah keharusan memberi hormat kepada serdadu-serdadu Jepang, terutama jika meliwati pos-pos penjagaan (piket), diharuskan berhenti lalu memberi hormat dengan menundukkan badan sampai 90 derajat. Jika hal itu dilanggar dan kebetulan dilihat oleh serdadu yang sedang piket, biasanya dipanggil dan ditempeleng.

1. Pendidikan Dasar

Sistem persekolahan pada jaman pendudukan Militer Jepang banyak mengalami perubahan, karena sistem penggolongan baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dihapuskan.¹²⁾ Dengan demikian terjadilah pengintegrasian terhadap bermacam-macam sekolah sejenis. Berbagai-bagai jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, baik yang mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, maupun yang mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti: ELS, HCS, HIS, *Schakelschool*, *Volkschool* dan *Vervolgschool* dilebur menjadi satu jenis Sekolah Rendah (S.D.), yakni sekolah Rakyat 6 tahun yang dalam bahasa Jepang disebut *Kokumin-Gakko*. Sejak jaman pendudukan Jepang sirnalah dualisme dalam pendidikan dan pengajaran di daerah ini,¹³⁾ karena pemerintah Militer Jepang hanya menyelenggarakan satu jenis Sekolah Rendah untuk semua golongan/penduduk/bangsa, dan hanya mempergunakan satu bahasa pengantar (bahasa Indonesia) serta lama masa pendidikannya enam tahun. Dalam hal ini tampak adanya pendemokrasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang merupakan perintis bagi masa mendatang.

Pada masa itu Sekolah Rakyat 6 tahun (*Kokumin-Gakko*) pada umumnya terdapat di kota yang pada jaman pemerintah kolonial Belanda memiliki sekolah HIS seperti: Palembang, Kayu Agung, Tanjungpura, Baturaja, Martapura, Muara Enim dan Lahat. Sedangkan di dusun-dusun di daerah Uluhan seperti Musi Ilir (sekarang MUBA), Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu,

12) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 41.

13) Drs. Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, CV. Toha Putera, Semarang, 1955, hal. 57.

Pagaralam, Lematang Iur Ogan Tengah, Musi Rawas dan lain-lainnya, sistem persekolahan jaman kolonial Belanda masih dilanjutkan. Di dusun-dusun di daerah pedalaman *Volkschool* dan *Vervolgschool* yang lama masa pendidikannya masing-masing tiga tahun dan dua tahun masih diteruskan, hanya namanya yang diubah dengan nama Jepang, yaitu *Syoto-Sugakko* (*Volkschool*) dan *Koto Sugakko* (*Vervolgschool*). Dalam rangka pelaksanaan politik Etika di daerah ini (kira-kira tahun 1911), pemerintah kolonial Belanda telah membuka sekolah Desa (*Volkschool*) yang dikenal dengan "Sekolah Angka Tiga" pada tiap-tiap dusun. Di samping itu untuk enam dusun atau tujuh dusun atau sampai 10 dusun dibuka hanya sebuah *Vervolgschool*.¹⁴⁾ Keadaan yang demikian itu dilanjutkan ketika pendudukan Jepang, kemungkinan karena belum memungkinkan untuk membuka Sekolah Rakyat 6 tahun di dusun-dusun di pedalaman.

Kemudian sistem lama itu berangsur-angsur ditinggalkan sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan *Vervolgschool* pada tempat-tempat tertentu dihapuskan dan diganti dengan Sekolah Rakyat 6 tahun. Pada desa-desa tertentu nampaknya Sekolah Desa (*Syoto-Sugakko*) masih diteruskan sampai pada awal revolusi fisik. Bagi mereka yang mau melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Rakyat 6 tahun dapat meneruskan di tempat yang telah memiliki Sekolah Rakyat tersebut dan langsung diterima di kelas empat. Apa yang telah disinggung di atas, bahwa jumlah sekolah di daerah ini sangat kurang, bahkan di jaman Jepang banyak ditutup karena gedungnya dibutuhkan untuk keperluan militer Jepang. Sebagai suatu gambaran mengenai jumlah sekolah di daerah ini; pada tahun 1944 di kota Palembang yang pada waktu itu merupakan ibukota Propinsi Sumatera bagian Selatan (meliputi Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung), hanyalah memiliki delapan buah Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*) yaitu: di Ladang Plaju, di daerah konsesi minyak Plaju di Kramasan, di Bukit Kecil, di Pugaran, sekolah puteri di Kebon Duku, di Sungai Aur 7 Ulu dan di Kertapati.¹⁵⁾

Mengenai kurikulum yang dipakai di sekolah Rakyat pada masa pendudukan Jepang ialah kurikulum pada jaman kolonial Belanda dengan menambah beberapa mata pelajaran antara lain: bahasa Jepang, tulisan Jepang (*Katagana*, *Hiragana* dan *Honzi*) *taiso*, sejarah dan adat istiadat Jepang. Sedangkan pelajaran ilmu bumi ditinjau dari sudut geopolitik.¹⁶⁾

Waktu yang dipergunakan untuk belajar di dalam kelas hanya sebagian kecil saja, karena sebagian besar dihabiskan untuk *kinrohoshi* dan untuk menghibur serdadu-serdadu Jepang dengan menyanyi dan menari. Buku pela-

14) Wawancara dengan Bapak RHA. Rani, eks Kepala Perwakilan P dan K Sumsel, 22 Oktober 1977.

15) Wawancara dengan Bapak RHA. Rani.

16) Prof. Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 33.

jaran yang dipakai pada waktu itu dan sangat populer ialah buku "Matahari Terbit", "Bunga Rampai" dan buku "Berhitung". Hampir semua Sekolah Rendah (SD) di daerah Sumatera Selatan di masa itu mempergunakan buku-buku tersebut sebagai buku pegangan. Istilah-istilah atau nama-nama Belanda yang terdapat di dalam buku itu ditutup dengan tinta hitam, sehingga tidak dapat dibaca oleh murid-murid.

Tokoh-tokoh pendidikan daerah ini pada jaman pendudukan Jepang antara lain ialah: R.H.A. Rani eks Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Sumatera Selatan, Sudiro eks Walikota Jakarta Raya, Abdul Malik SH bekas Wali-negara Sumatera Selatan, Abdullah Nawawi eks Kepala P dan K pada jaman Revolusi Fisik dan lain-lain.

2. Pendidikan Kejuruan

Jika di tempat-tempat lain seperti di Jawa, Bali dan lain-lainnya pemerintah Jepang membuka sekolah-sekolah Menengah Umum atau *Koto-Chu-Gakko* (SMP) dan *Syo:o-Chu-Gakko* (SMA), tidak demikian halnya di daerah Sumatera Selatan ini. Nampaknya Jepang tidak melihat kepentingan untuk membuka sekolah menengah umum di daerah ini, sehingga Sekolah Menengah Umum (MULO) yang pada jaman kolonial Belanda pernah didirikan di kota Palembang, baik yang berbahasa Belanda maupun yang berbahasa Melayu (*Inheemsche MULO* = MULO Bumi Putera) ditutup, dan demikian pula halnya dengan sekolah MULO yang diselenggarakan oleh Misi Katolik di Lahat juga dihapuskan.¹⁷⁾

Penutupan sekolah-sekolah tersebut di atas di samping disebabkan oleh faktor guru (guru-gurunya sebagian besar orang Belanda) dan kebutuhan militer Jepang akan gedung-gedung, kemungkinan besar tidak adanya keinginan atau desakan dari masyarakat sendiri pada waktu itu.¹⁸⁾ Hal ini dapat dihubungkan dengan kenyataan, bahwa sekolah-sekolah menengah swasta pun harus ditutup seperti: Taman Siswa (Taman Dewasa) dan Sekolah Menengah Muhammadiyah.

Meskipun Jepang meniadakan Sekolah Menengah Umum di daerah ini, namun mereka menaruh perhatian pada sekolah-sekolah kejuruan yang diselenggarakan dengan kepentingan Jepang sendiri. Sejalan dengan kepentingan Jepang, maka dibukalah beberapa sekolah kejuruan di kota Palembang dan Plaju seperti: Sekolah Guru, Sekolah Pegawai Negeri, Sekolah Keputrian yang murid-muridnya berasal dari puteri-puteri orang terkemuka/golongan Elite dan sekolah *Mizuho-Gakko-en*. Di Plaju yang pada waktu itu terpisah dari Palembang (Plaju di bawah kekuasaan Syonanto) dibuka Sekolah Teknik Minyak dengan nama *Minarai-Gakko* dan *Skyu-Kagyo-Gakko*.¹⁹⁾ Sekolah-

17) Wawancara dengan Kepala Bapperda Propinsi Sumsel bulan Oktober 1977, dan wawancara dengan Moh. Tohan Pensiunan PS. di Lahat 1979.

18) Kementerian Penerangan, *op.cit.*, hal. 630.

19) Wawancara dengan R.H.A. Rani, 22 Oktober 1977.

sekolah yang dibuka di Palembang yang disebut di atas, gedung sekolahnya di jalan Mailan (pusat pertokoan Mega Ria dan Gaya Baru Sekarang). Di samping itu di Palembang dibuka juga Sekolah Pertemuan, Sekolah Pemeliharaan Kapal terbang di Talang Betutu dan Sekolah Perkapalan di Pebam.²⁰⁾

Adapun Sekolah Guru yang dibuka pada jaman Jepang di daerah ini ada tiga macam yaitu: *Kyoing-Yosejo*, *Dai-Chibu-Sihang-Gakko* dan *Dai-Nibu-Sihang-Gakko*, yang lama masa pendidikannya masing-masing dua tahun, dua tahun dan satu tahun.²¹⁾ Mengenai sekolah *Kyoing-Yosejo* pada umumnya dibuka di daerah Uluan, di mana pada jaman kolonial Belanda pernah ada sekolah guru *Leergang* (C.V.O.). Baik *Leergang* pada jaman kolonial Belanda maupun *Kyoing-Yosejo* di jaman pendudukan militer Jepang sifatnya tidak berkesinambungan dalam arti, satu angkatan harus ditamatkan dulu dan kemudian baru dibuka lagi angkatan berikutnya. Tidak adanya kesinambungan pada sekolah tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, di samping untuk memenuhi kebutuhan akan guru di sekolah-sekolah desa, juga diperhitungkan faktor asrama karena murid-muridnya harus tinggal di dalam asrama, sedangkan daya tampung asrama pada waktu itu sangat terbatas.

Murid-murid yang diterima di *Dai-Nibu-Sihang-Gakko* berasal dari *Kyoing-Yosejo* (C.V.O.) dengan melalui ujian masuk dan kemudian berhak mengajar di *Kyoing-Yosejo*, sedangkan murid-murid yang diterima di *Dai-Chibu-Sihang-Gakko* berasal dari *Koto-Syogakko* (*Kokumin-Gakko*) dan setelah tamat mereka berhak mengajar di *Koto-Syogakko* atau *Kokumin-Gakko*. Sistem pengajaran di sekolah-sekolah guru pada jaman itu mempergunakan sistem pengajaran sekolah guru pada jaman kolonial Belanda, dengan menambah beberapa mata pelajaran baru, misalnya: bahasa Jepang, *taiso* (gerak badan), sejarah, adat istiadat dan huruf Jepang. Yang paling penting dalam proses belajar mengajar pada waktu itu, ditekankan kepada latihan fisik yang memiliki disiplin yang tinggi seperti melakukan *kinrohosi*, latihan militer dan setiap pagi mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dengan menghormat ke Tokyo dalam upacara penaikan bendera dan lain-lain.

Para pelajar diharuskan tinggal di asrama, makan dan pakaian ala kadarnya diberi oleh pemerintah Jepang tanpa membayar uang sekolah. Mereka diwajibkan berkebun dengan menanam ubi kayu, sayur-mayur, jagung, dan lain-lain untuk makanan mereka sendiri. Pendek kata para pelajar sekolah guru pada waktu itu dibina menjadi manusia Jepang, yang penuh semangat, disiplin dan ulet, hal mana sangat menguntungkan ketika Revolusi Fisik di daerah ini karena banyak di antara mereka itu menjadi anggota BKR, Lasykar Rakyat dan ada yang sampai sekarang menjabat perwira-perwira menengah dan tinggi dalam TNI.

20) Wawancara dengan Nawawi Gaffar (Purnawirawan), Oktober 1980.

21) Penulis sendiri menyaksikan sekolah tersebut dan diperkuat oleh Bapak Nawawi Gaffar bekas murid *Dai-Nibu-Sihang-Gakko*.

Mengenai sekolah *Dai-Chibu-Sihang-Gakko* dan *Dai-Nibu-Sihang-Gakko* kedua-duanya dibuka di kota Palembang, yang lama masa pendidikannya masing-masing dua tahun dan satu tahun. Sebenarnya kedua sekolah ini merupakan "satu keluarga" karena kepala sekolahnya dan gedungnya juga menjadi satu dan dipimpin oleh orang Jepang bernama *Sibata*. Guru-gurunya yang berasal dari bangsa kita antara lain Jahya Bahar (sekarang Kolonel Infanteri), Maliki Saleh (pegawai kantor Gubernur Sumsel sekarang), Achmad dan lain-lain. Mereka yang dapat diterima di *Dai-Chibu-Sihang-Gakko*, selain yang berasal dari *Koto-Syogakko* atau *Kokumin-Gakko*, juga mereka yang pernah menduduki HIS dan *Schakelschool* yang belum tamat. Bagi mereka yang telah menamatkan *Dai-Chibu-Sihang-Gakko* dan mendapatkan prestasi baik boleh meneruskan ke *Dai-Nibu-Sihang-Gakko*.²²⁾

B. PENDIDIKAN SWASTA

Yang dimaksud dengan pendidikan Swasta adalah pendidikan yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah,²³⁾ dan pendidikan itu sendiri sudah ada di segala jaman, kecuali dimasa pendudukan Jepang di daerah ini. Adapun yang dimaksudkan sekolah Negeri adalah lembaga pendidikan yang didirikan, dibiayai, diawasi dan dibina oleh Pemerintah, sedangkan sekolah Swasta sendiri adalah sekolah yang diusahakan oleh perorangan atau badan Swasta lainnya di bawah pengawasan Pemerintah. Sekolah Swasta yang mendapatkan bantuan atau subsidi dari Pemerintah disebut Sekolah subsidi atau Sekolah Berbantuan.²⁴⁾ Mengenai pendidikan Swasta pada jaman Kolonial Belanda dan sekarang ini, ada yang diselenggarakan oleh organisasi, misi/zending, yayasan dan lain-lain seperti: sekolah yang diorganisasi oleh Muhammadiyah, Xaverius, Methodist, Taman Siswa dan sebagainya.

Apa yang telah diuraikan di atas, bahwa pada masa pendudukan Jepang di daerah ini, secara praktis sekolah-sekolah yang dimaksudkan itu tidak berkembang atau ditutup sama sekali. Tidak hanya sekolah-sekolah Swasta yang ditutup atau tidak melakukan kegiatan pada waktu itu misalnya: Madrasah-madrasah, Perguruan Islam Air Item dan Yayasan Semarak Bengkulu serta HIS yang diawasi oleh *Locale-Raad* di Tanjungraja dan Kayuagung,²⁵⁾ tetapi juga sekolah-sekolah Pemerintah/Swasta yang berbahasa pengantar bahasa Belanda harus ditutup. Demikian pula sekolah-sekolah yang sebagian besar guru-gurunya orang Belanda harus ditutup pada waktu itu. Seperti yang telah kita ketahui hingga Jepang masuk dan menduduki daerah ini, sekolah Menengah Pertama yang disebut MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) milik Pemerintah Belanda hanyalah satu buah di Palembang dan lima buah milik

22) Wawancara dengan Bapak Nawawi Gaffar (Purnawirawan) Oktober 1980.

23) Prof. Sugarda Poerbakawatja, *op.cit.*, hal. 206

24) BP3K, *op.cit.*, hal. 151.

25) Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, hal. 629.

Swasta: sebuah milik Katolik di Lahat, sebuah milik Yayasan Semarak Bengkulu di Bengkulu dan tiga buah milik Taman Siswa (Palembang, Telukbetung dan Bengkulu), dan di samping itu ada pula sekolah Menengah Muhammadiyah.²⁶⁾

Berdasarkan jumlah sekolah Menengah di daerah ini sangat terbatas, maka tidak mengherankan bagi pemuda-pemuda yang akan meneruskan pelajarannya terpaksa pergi keluar daerah ini misalnya ke Jawa atau ke Bukit-tinggi. Terbatasnya sekolah Menengah di daerah ini pada waktu itu antara lain disebabkan; adanya peraturan yang dikenal dengan *Wilde Scholen Ordonnantie*, jumlah HIS sangat sedikit karena dibatasi, sukarnya untuk memasuki HIS Pemerintah karena berdasarkan status kelahiran dan kebanyakan orang tua lebih suka melanjutkan sekolah anaknya ke Jawa, karena masalah biaya lebih rendah.

Pada jaman pendudukan Jepang, baik sekolah Menengah Swasta maupun milik Pemerintah Belanda tidak melakukan kegiatan sama sekali dan bekas gedung-gedungnya dipergunakan Jepang untuk bengkel, asrama militer, gudang untuk barang logistik dan lain-lain. Nampaknya hanyalah Sekolah Guru yang sederajat dengan Sekolah Menengah saja yang dibuka, dan dalam kegiatannya selalu disesuaikan kebutuhan Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya.

26) *Ibid.*, hal. 628-630.

BAB VI PENDIDIKAN JAMAN INDONESIA MERDEKA

A. PENDAHULUAN

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa dan Negara yang Merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka bidang pendidikan mengalami perubahan dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

1. Landasan Idiil

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dasar dan filsafah Negara Indonesia adalah Pancasila, yang kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam periode tahun 1945-1950, negara kita masih harus menghadapi Belanda secara fisik, namun dasar dan filsafah Negara Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman.¹⁾

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada waktu itu pun harus diselaraskan dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang merdeka, maka tujuan juga mengalami perubahan. Tujuan pendidikan Indonesia secara umum dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 yang berbunyi: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-undang.

Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar tersebut, maka Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Mr. Soewandi) dengan Surat Keputusan No. 104/Bhg.0 tertanggal 1 Maret 1946 menunjuk Ki Hajar Dewantara untuk memimpin suatu Panitia Penyelidik Pendidikan, dan telah merumuskan tujuan pendidikan pada waktu itu, yaitu untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata

1) BP3K, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*, Departemen P dan K Jakarta, 1979, hal. 93-94.

lain tujuan pendidikan pada masa itu penekanannya pada penanaman semangat patriotisme.²⁾

Pada tahun 1950 tujuan Pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1950 mengenai dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Dalam Undang-undang No. 4/1950 Bab II pasal 3, tujuan pendidikan Nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung-jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.³⁾ Kemudian dalam tahun 1954 dikeluarkan Undang-undang No. 12 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, di mana undang-undang ini merupakan pemberlakuan kembali Undang-undang No. 4 tahun 1950 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan yang tercantum di dalamnya sama dengan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam Undang-undang tahun 1950. Demikian pula mengenai tujuan pendidikan yang tercantum dalam Bab II pasal 3 pada kedua Undang-undang tersebut adalah sama.⁴⁾

Sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah pengaruh Manipol-Usdek, yang telah menjadi haluan dalam kehidupan politik Indonesia dan juga dalam bidang kehidupan lainnya. Bidang pendidikan pun tak dapat luput dari pengaruh tersebut. Keputusan Presiden No. 145 tahun 1965 merumuskan tujuan pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan Manipol Usdek sebagai berikut: Tujuan pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Pra-Sekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang sosial, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu:

- a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Kebangsaan
- d. Kerakyatan
- e. Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol-Usdek.⁵⁾

Tujuan pendidikan yang digariskan oleh Manipol-Usdek ini tidak dapat bertahan lama, setelah meletus peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965. Masyarakat Indonesia mulai sadar dan tujuan pendidikan itu merupakan produk PKI dengan menggunakan Pancasila sebagai tameng. Dengan dikeluarkannya Kete-

2) *Ibid.*, hal. 95-96.

3) *Ibid.*, hal. 97-116.

4) *Ibid.*, hal. 116-117.

5) *Ibid.*, hal. 117-118.

tapan MPRS No. XXVII tahun 1966, maka keputusan Presiden No. 19 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tujuan Nasional Pendidikan Indonesia tahun 1966 dirumuskan dalam bentuk Ketetapan MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Ketetapan itu Bab II pasal 3; membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati ditekankan sebagai tujuan Nasional, karena sangat diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi Manipol-Usdek. Pemurnian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan untuk tegaknya Orde Baru.⁶⁾

Kemudian setelah itu pada tahun 1973 MPR hasil Pemilihan Umum mengeluarkan Ketetapan No. IV/MPR/1973 yang dikenal dengan nama Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung-jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung-jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai rumusan terakhir mengenai tujuan pendidikan ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menurut TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang di dalamnya memuat rumusan Tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

- (a) Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung-jawab atas pembangunan bangsa.

6) *Ibid.*, hal. 118.

- (b) Dalam rangka melakukan pendidikan Nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan pengkhayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (c) Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas, baik Negeri maupun Swasta.⁷⁾

Dari uraian di atas nampak bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 tujuan Nasional Pendidikan Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi politik pemerintah RI, berbeda dengan landasan idiil pendidikan kita yang tetap langgeng.

3. Sistem Persekolahan

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa bidang pendidikan setelah masa Kemerdekaan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, termasuk perubahan yang menyangkut sistem persekolahan. Pada jaman sebelum Kemerdekaan sistem Persekolahan didasarkan sistem golongan, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosial. Tetapi setelah Kemerdekaan sistem Persekolahan di Indonesia hanya mengenal tiga tingkat pendidikan:

- (a) Pendidikan Rendah, yang pada jaman revolusi Fisik disebut Sekolah Rakyat dan lama pendidikannya enam tahun.
- (b) Pendidikan Menengah, yang terbagi atas dua tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yang masing-masing lama pendidikannya tiga tahun. Tingkat Sekolah Menengah ini dibagi pula atas dua jenis sekolah yaitu: Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (c) Pendidikan Tinggi, kesempatan untuk meneruskan studi ke lembaga Pendidikan Tinggi terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat.⁸⁾ Sistem dan tujuan dari masing-masing tingkat pendidikan di atas diatur oleh Undang-undang No. 4 tahun 1950 Bab V pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan pengajaran Taman Kanak-kanak bermaksud memuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah Rendah.
 - b. Pendidikan dan pengajaran Rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan ke-

7) *Ibid.*, hal. 119

8) *Ibid.*, halaman 98.

padanya guna mengembangkan bakatnya dan kesukaannya masing-masing dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin.

- c. Pendidikan dan Pengajaran Menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat/atau mempersiapkan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
- d. Pendidikan dan pengajaran Tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.
- e. Pendidikan dan pengajaran Luar Biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya mereka dapat memiliki hidupnya lahir batin yang layak.⁹⁾

Sejak bulan Agustus 1950 penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Undang-undang Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 RI. dan berlaku bagi susunan Sekolah Negeri maupun Swasta untuk seluruh Indonesia. Susunan Sekolah tersebut adalah: Sekolah Rakyat 6 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 tahun. dan khusus bagi pendidikan guru selain SGB (4 tahun)¹⁰⁾ dan SGA (3 tahun) untuk Guru Sekolah Dasar. Di samping itu didirikan pula PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama), dan Kursus B I dan B II untuk guru Sekolah Lanjutan Atas. Kemudian dalam tahun 1954 didirikan lembaga Pendidikan Guru bertingkat Universitas yang pertama di Bandung dengan nama Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Tetapi kemudian berdasarkan kerja sama antara Departemen P dan K dengan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, pendidikan guru dimasukkan dalam lingkungan Universitas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai suatu lembaga yang mendidik calon Guru Sekolah Lanjutan.

Sekolah Guru A akhir-akhir ini dirubah menjadi SPG, lama pendidikannya 3 tahun untuk menjadi Guru Sekolah Dasar tetap diadakan, sedangkan Sekolah Guru B (4 tahun) dihapuskan sejak tahun 1961. Akhirnya dalam tahun 1963 FKIP dilebur menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP),

9) *Ibid.*, halaman 98-99.

10) Mula-mula di kota Palembang sendiri pada jaman *Recomba* berdiri *Normaal-school* dua tahun dan menjelang Pengakuan Kedaulatan dirubah menjadi SGB 4 tahun. Bagi mereka yang duduk di kelas III terakhir dapat diterima di SGA 3 tahun. Mereka yang mendapat ijazah SGA pada umumnya ditempatkan pada SMP/SGB di daerah.

yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Guru untuk Sekolah Lanjutan.

Sistem persekolahan di Indonesia dalam perkembangannya kemudian berlaku sistem lima tingkat yaitu:

- a. Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak 1 atau 2 tahun).
- b. Pendidikan Dasar 6 tahun.
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 tahun yang terbagi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) dan Sekolah Teknik (ST).
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 3 tahun yang terbagi menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Pendidikan Guru (SKP) dan lain-lain.
- e. Perguruan Tinggi 3 tahun Sarjana Muda, 5 atau 7 tahun sarjana. Lembaga ini dapat berbentuk Universitas, Institut, Akademi atau Sekolah Tinggi. Keempat tingkat yang meliputi TK, SD, SLTP, dan SLTA telah tercakup dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 Bab V, sedangkan mengenai Perguruan Tinggi diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1961.¹¹⁾

4. Kesempatan Belajar

Setelah Kemerdekaan sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarakat, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Demikian juga dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 Bab XI pasal 17 Mengatakan, bahwa tiap-tiap warga negara Republik mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Berdasarkan isi kedua undang-undang di atas, maka pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak baik untuk pendidikan rendah, menengah maupun pendidikan tinggi. Walaupun kesempatan belajar bagi setiap anak dari setiap golongan masyarakat adalah sama untuk memasuki sekolah tertentu, namun harus dibekali oleh prestasi belajar anak itu sendiri. Karenanya apabila prestasi belajar anak itu baik, maka kesempatan untuk belajar terbuka baginya. Tentu saja dalam hal ini biaya sekolah diperlukan, karena setiap tingkat pendidikan tertentu memerlukan biaya pendidikan, dan bagi anak yang berprestasi belajar yang baik, tetapi jaminan sosial ekonominya kurang, pemerintah mengusahakan pemberian beasiswa, walaupun dalam jumlah terbatas.

11) BP3K, *op.cit.*, halaman 126-127.

5. Kurikulum

Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran sebagaimana diuraikan di atas, adalah dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan Nasional. Perubahan mendasar itu tidak hanya mengenai landasan idiil, tujuan, sistem dan kesempatan belajar saja, tetapi juga menyangkut masalah kurikulum pada semua tingkat pendidikan. Kurikulum yang semua diorientasikan kepada kepentingan kolonial, kini diubah dan diselaraskan dengan kebutuhan bangsa yang merdeka, dan salah satu hasil Panitia tersebut bahwa setiap rencana pelajaran pada setiap tingkat pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan pikiran harus dikurangi
- b. Isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari
- c. Memberikan perhatian terhadap kesenian
- d. Pendidikan watak
- e. Pendidikan Jasmani
- f. Kewarganegaraan dan masyarakat.¹²⁾

Setelah Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4/1950 dikeluarkan, maka:

- a. Kurikulum Pendidikan Rendah ditujukan untuk menyiapkan anak memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin, serta mengembangkan bakat dan kekuasaannya.
- b. Kurikulum pendidikan Menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan Tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.
- c. Kurikulum pendidikan Tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajaran agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat, dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

Seperti kita ketahui kurikulum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan dalam usaha untuk mengembangkan/meningkatkan pendidikan, kurikulum telah sering mengalami perubahan yang dimaksudkan untuk menghasilkan warga negara yang sebaik-baiknya. Kurikulum yang pertama digunakan adalah Kurikulum 1950, kemudian berubah menjadi Kurikulum 1958 dan seterusnya disusun Kurikulum 1964 yang berlaku sejak tahun 1965. Kurikulum terakhir ini pun masih mengalami perubahan, karena pada tahun 1968 digunakan kurikulum baru yang mulai dilaksanakan tahun 1969 untuk SMP, SMA, SMEA, SKKP, SKKA, sedangkan untuk SMEP, SPG dilaksanakan pada tahun 1970.¹³⁾

12) *Ibid.*, halaman 105-108.

13) *Ibid.*, halaman 133.

Dalam rangka Pembangunan Nasional (PELITA) guna mencapai masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual, bidang pendidikan pun mendapat perhatian khusus dengan diadakan Pembaharuan Pendidikan. Dalam hubungan inilah dilakukan penyempurnaan Kurikulum melalui Proyek Pengembangan Kurikulum dan Metoda Mengajar (PKMM), yang telah berhasil menelurkan kurikulum baru yang telah dibakukan oleh Menteri P dan K menjadi Kurikulum 1974 untuk Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, dimana Kurikulum 1975 untuk SD, SMP, SMA, dan Kurikulum 1976 untuk sekolah Kejuruan seperti: SMEP, SMEA, SKKP, SKKA, ST STM, dan SPG. Kurikulum inilah yang pada umumnya dipakai di sekolah-sekolah tersebut di atas pada masa sekarang ini.¹⁴⁾

6. Pendidikan di Sumatera Selatan

Keadaan di daerah Sumatera Selatan umumnya dan Keresidenan Palembang khususnya sampai beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, masih dalam suasana revolusi dan semua perhatian serta pikiran dicurahkan sepenuhnya pada hal-hal yang langsung menyangkut pemindahan kekuasaan dari tangan pemerintah militer Jepang. Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah pada saat itu, pengambil-alihan kekuasaan pada umumnya berjalan dengan lancar tanpa insiden-insiden yang berarti.

Tetapi pada akhir tahun 1945, yaitu segera setelah Pemerintah Republik Indonesia mulai menjalankan roda pemerintahan di Karesidenan Palembang (8 Oktober 1945), maka tidak hanya organisasi-organisasi perjuangan yang mendapat perhatian, melainkan juga usaha di bidang pendidikan dan pengajaran tidak ketinggalan. Memang sangat dirasakan oleh tokoh-tokoh pendidikan daerah ini betapa perlunya lembaga pendidikan untuk masyarakat di daerah ini, lebih-lebih jika mengingat keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa pemerintah pendudukan militer Jepang, baik jenis maupun jumlahnya sangat sedikit. Pada jaman Kemerdekaan sekarang ini keadaannya harus berubah, rakyat harus dicerdaskan, diberi pendidikan dan pengajaran tanpa memandang golongan ataupun status sosial, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 ayat (1) dan (2).

Pada jaman sebelum Kemerdekaan sistem persekolahan didasarkan sistem golongan, baik golongan berdasarkan bangsa maupun status sosial. Mereka yang dapat diterima pada sekolah-sekolah seperti: HIS, MULO dan sejenisnya, hanyalah anak-anak bangsawan/priyayi (*Demang, Asisten Demang, Pesirah, Pembarap dan Kerio*) saja, sedangkan anak-anak rakyat biasa hanya dibolehkan masuk di sekolah Desa (*Volkschool*) yang dikenal dengan nama "Sekolah angka Tiga." Demikian pula untuk anak-anak keturunan Cina didirikan sekolah khusus yaitu HCS. Tetapi setelah Kemerdekaan keadaannya berubah dan sistem persekolahan di daerah ini mengenal tiga tingkat pendi-

14) Dikutip dari Diktat Penataran Instruktur Guru IPS-SLU di Malang, tanggal 4 Januari s.d. 9 Pebruari 1980.

dikan/persekolahan untuk semua golongan penduduk: (1) Pendidikan Rendah, (2) Pendidikan Menengah, (3) Pendidikan Tinggi. Sebagai akibat adanya kesempatan belajar yang diberikan kepada setiap anak, maka perkembangan murid dari ketiga tingkat sekolah tersebut dari tahun ke tahun bertambah terus, lebih-lebih setelah tahun 1950 yaitu terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI di daerah ini.

Kesempatan belajar yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap anak, telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat, yang dari tahun ke tahun jumlah anak yang sekolah semakin meningkat, sehingga memaksa pemuka-pemuka masyarakat/tokoh-tokoh Pendidikan dan Pemerintah setempat, melakukan usaha-usaha untuk dapat menampung hasrat dan keinginan belajar mereka dengan membuka pelbagai tingkat dan jenis sekolah yang akan kami uraikan satu persatu di bawah ini.

Rupa-rupanya akibat revolusi Kemerdekaan di daerah ini telah banyak membawa perubahan dan kemungkinan-kemungkinan dalam masyarakat, yang pada masa-masa sebelumnya tidak pernah menyentuh lapisan masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah. Dengan terbukanya kesempatan belajar bagi setiap orang tanpa melihat asal kelahiran dan statusnya dalam masyarakat, maka pada tahun enam puluhan golongan yang dulunya memegang dominasi di daerah ini mulai tergeser kedudukannya dan muncul golongan intelektual¹⁵⁾ yang pada umumnya berasal dari anak-anak petani dari Uluwu. Dengan lain perkataan, keadaan sosial pada masa-masa akhir Revolusi Fisik mulai cenderung ke arah stratifikasi-sosial yang lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan daripada statusnya dalam masyarakat berdasarkan kelahiran. Atas dasar itu pulalah terjadi suatu mobilitas vertikal dan horizontal di kalangan masyarakat, baik yang berasal dari daerah Uluwu maupun yang bertempat tinggal di kota-kota setelah tahun enam puluhan di daerah ini, lebih-lebih dengan terbukanya kesempatan bagi anak-anak dari semua lapisan masyarakat memasuki sekolah-sekolah yang lebih tinggi, sehingga tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, perusahaan Negara, pendidikan ABRI dan sebagainya.

B. PENDIDIKAN DASAR

1. Sekolah Dasar

Apa yang telah disebutkan di atas, bahwa sejak jaman Jepang berbagai jenis sekolah rendah sebagai warisan dari pemerintah kolonial Belanda dihapuskan dan diganti dengan satu jenis sekolah Rendah saja, yakni Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun, di samping masih adanya Sekolah Desa pada tempat-tempat tertentu. Berhubung dengan keadaan sekolah sebagai sisa jaman

15) Dr. M. Koentjaraningrat, *The Javanese of South-Central Java*, dalam G.P. Murdock (ed), *Social Structure of South East-Asia*, Chicago, 1960, hal. 90.

Jepang, maka pemerintah menghadapi tiga macam usaha yaitu: (a) Secara berangsur-angsur mengubah semua Sekolah Desa 3 tahun menjadi SR 6 tahun, (b) Memperbaiki tingkatan dan mutu pelajaran, yang sejak jaman Jepang sangat merosot keadaannya, (c) Menambah jumlah SR untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan dan pengajaran. Di samping menghadapi tiga macam usaha itu, pemerintah dihadapkan pula suatu tantangan, yakni kekurangan tenaga pengajar, gedung sekolah, alat-alat pelajaran dan perlengkapan-perengkapan lainnya.

Mengenai keadaan/perkembangan pendidikan Dasar (SR) pada periode tahun 1945-1950 tidak banyak yang dapat kami kemukakan pada laporan ini, karena langkanya data baik di kota Palembang sendiri apalagi di daerah-daerah Uluan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat situasi daerah ini pada awal revolusi Fisik, di mana pusat pemerintah RI selalu berpindah-pindah dari satu tempat/kota ke tempat lain (Palembang-Lahat-Lubuk Linggau-Curup dan akhirnya ke Bengkulu) dan sistem bumi hangus telah melanda daerah ini, agar supaya arsip-arsip/surat menyurat yang penting/rahasia tidak jatuh ke tangan musuh.

Tetapi yang jelas bahwa jumlah Sekolah Rakyat di daerah Sumatera Selatan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat sedikit. Dapat digambarkan betapa rawannya keadaan pendidikan di daerah ini, di mana di kota Palembang sendiri sebagai ibukota dari wilayah yang cukup luas ketika itu, hanya memiliki 10 buah Sekolah Rakyat Negeri saja.¹⁶⁾ Akan lebih menyedihkan lagi apabila meninjau keadaan pendidikan di daerah Uluan, terutama mengenai tenaga guru, gedung sekolah dan sarana-sarana lainnya, semuanya serba kurang.

Namun bagaimanapun juga tidak dapat disangkal, bahwa perkembangan/keadaan pendidikan Dasar di daerah ini setelah Proklamasi Kemerdekaan berangsur-angsur membaik, jumlah sekolah dan muridnya dari tahun ke tahun bertambah terus, lebih-lebih setelah tahun 1950. Jika dibanding dengan keadaan di tempat lain, terutama di Jawa mungkin daerah ini jauh ketinggalan, tetapi jika dibandingkan dengan keadaan pada jaman kolonial Belanda dan jaman Jepang, pendidikan Dasar di daerah ini menunjukkan suatu perkembangan yang cukup menggembirakan.

Oleh karena di daerah Uluan terutama di dusun-dusun Sekolah Rakyat 6 tahun belum memungkinkan untuk dibuka disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga sistem sekolah Desa (SR 3 tahun) masih terus dilanjutkan sampai masa-masa terakhir Revolusi Fisik. Tetapi setelah itu secara berangsur-angsur sistem ini ditinggalkan, sehingga kira-kira tahun 1954 Sekolah Desa pada umumnya di dusun-dusun sudah tidak ada lagi dan diganti dengan SR 6 tahun. Menyangkut masalah gedung dan tenaga guru merupakan masalah

16) Wawancara dengan Bapak. KHA. Rani, eks. Kepala P dan K Sumsel.

yang pelik dan urgen, yang harus segera ditanggulangi oleh Pemerintah setempat. Seperti telah disinggung di atas, daerah ini tidak mendapat warisan gedung-gedung sekolah yang memadai dari pemerintah kolonial Belanda, dan pada jaman revolusi Fisik banyak gedung yang dibumi-hanguskan atau dijadikan kantor, asrama tentara/lasykar pada waktu itu. Tidak kurang pentingnya faktor guru pun sangat menentukan dalam pembukaan suatu sekolah. Sebagai akibat dari sistem persekolahan pada jaman kolonial Belanda, daerah ini tidak memiliki banyak tenaga pengajar. Oleh karena itu kekurangan guru sangat dirasakan oleh daerah ini dalam mengimbangi kesempatan belajar yang telah diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan dalam menghadapi kedua masalah itu pemerintah mengambil kebijaksanaan sebagai berikut: (1) Balai-balai Marga yang keadaannya telah buruk dan tua untuk sementara dapat dipergunakan sebagai ruangan-ruangan kelas belajar, sementara Pemerintah belum sanggup membangun gedung sekolah yang baru. Di samping itu juga rumah-rumah partikelir/penduduk yang tidak ditempati, secara sukarela dipinjamkan atau disewakan kepada Pemerintah untuk dipergunakan sebagai bilik-bilik tempat belajar. Pada tahun 1953 di daerah Sumatera Selatan tercatat 636 Balai Marga dengan 1760 buah bilik dalam tiga macam kondisi: 266 sedang, 278 tua dan 94 tua betul. Selain itu terdapat juga rumah-rumah milik Pemerintah/Kementerian P dan K yang dipakai oleh Sekolah Rakyat dan dengan PP.65 tahun 1950 telah diserahkan kepada Daerah Propinsi Sumatera Selatan, yang berjumlah 202 buah rumah dengan 703 lokal dalam keadaan: 55 tua, 118 sedang dan 29 yang baru. Sedangkan rumah-rumah partikelir yang dipergunakan untuk Sekolah Rakyat Pemerintah berjumlah 519 buah dengan 1.393 buah bilik dalam keadaan: 293 tua, 118 sedang dan 38 yang baru.¹⁷⁾ Cara yang ditempuh oleh Pemerintah seperti yang digambarkan di atas rupa-rupanya belum dapat memenuhi kebutuhan yang semestinya, oleh karena itu terpaksa rumah-rumah atau balai-balai Marga yang sudah tua, rusak, lapuk dan hampir roboh, harus mengabdikan dari pagi sampai sore hari. Sekolah-sekolah Rakyat di daerah ini harus dibuka pada pagi dan sore hari secara bergilir. (2) Untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah mendirikan/menyelenggarakan pendidikan guru secara *crash-programe*, yang dikenal dengan nama "Kursus Pengajar untuk Krusus Pengantar Kewajiban Belajar" (KPKPKB). Tetapi dalam pelaksanaan KPKPKB ini mengalami kesulitan, dan sebelum sampai pada waktu yang ditargetkan oleh pemerintah, terpaksa dihapuskan/diintegrasikan ke SGB.

Kadaan yang buruk ini terutama menimpa daerah-daerah Uluan, bahkan sampai tahun enam puluhan kondisi gedung-gedung sekolah belum lagi memenuhi persyaratan yang dikehendaki. Setelah meletusnya G.30.S./PKI mulai adanya cahaya terang, karena bidang pendidikan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, lebih-lebih dengan adanya PELITA pertama,

17) Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, hal. 619.

PELITA kedua, PELITA ketiga dan seterusnya. Bagaimana perkembangan pendidikan Dasar di daerah ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Mulai tahun 1964 nama Sekolah Rakyat (SR) diubah menjadi Sekolah Dasar (SD), dan selanjutnya Sekolah Rakyat hendaknya dibaca "Sekolah Dasar" (SD).¹⁸⁾

TABEL I
Keadaan Sekolah Rakyat Negeri di daerah Sumsel
tahun 1951-1953

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1951/1952	1298	274295	4630
1952/1953	1333	254671	4695
1953/1954	1347	265389	4559

SUMBER: Kementerian Penerangan RI Propinsi Sumatera Selatan.

TABEL II
Keadaan Sekolah Dasar di Daerah Sumatera Selatan
Tahun 1969-1980

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1969/1970	1660	361085	8302
1970/1971	1668	316222	7087
1871/1972	1487	325938	7651
1972/1973	1523	333984	8143
9173/1974	1581	352953	11014
1974/1975	1599	359955	9153
1975/1976	1749	400465	10941
1976/1977	1840	405835	10884
1977/1978	1854	449086	12151
1978/1979	1983	478121	12518
1979/1980	2373	564534	15475

SUMBER: Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

18) I. Djumhur dan Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu Bandung, Bandung, 1976, halaman 210.

2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada jaman Kemerdekaan selain dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga dikelola oleh Departemen-departemen lainnya seperti: Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Agama dan lain-lain. Dalam Departemen Agama di Propinsi Sumatera Selatan terdapat Bidang Pendidikan Agama Islam yang mempunyai tugas untuk mengawasi, membina dan mengelola Pendidikan Agama Islam di daerah ini. Sekolah-sekolah yang dibawah oleh Departemen Agama (Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan) antara lain ialah *Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)*.

Seperti telah disinggung di atas bahwa lembaga Pendidikan madrasah yang didirikan dan dipelopori oleh Nizam-El-Mulk seorang Menteri dari dunia Arab pada abad ke-11, diperkenalkan pula dan kemudian berkembang di Indonesia. Kalau pada sistem Pesantren tidak terdapat standar antara satu dengan lain, maka pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 madrasah-madrasah mulai diperkenalkan pembagian menurut tingkat kemampuan dan prestasi murid, kelompok umur dan digunakannya metoda klasikal. Artinya seorang guru mengajar di hadapan banyak murid dalam satu kelas. Sistem dan metoda ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem Barat yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam sekolah-sekolah yang berjenjang dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi.¹⁹⁾ Setelah jangka waktu tertentu terhadap murid-murid diadakan evaluasi mengenai prestasi belajarnya, sehingga diperkenalkan siswa ujian untuk menentukan seseorang siswa naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak sebagai dasar dari penyelesaian suatu tingkat pendidikan tertentu.

Lembaga pendidikan madrasah di Indonesia berkembang di seluruh pelosok Tanah Air. Meskipun sebagian ada yang dipengaruhi oleh madrasah *Darul Uhm* dan *Shaulatyah* di Mekah, namun jelas sistem Barat pada jaman kolonial seperti HIS, MULO dan AMS sangat berpengaruh. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berorientasi pada Ilmu Pengetahuan Agama Islam, tetapi mata pelajaran Umum diberikan pula. Madrasah memelopori penggunaan huruf Latin di samping bahasa dan huruf Arab. Mula-mula sebagai bahasa pengantar dipergunakan bahasa daerah, kemudian bahasa Melayu dan akhirnya bahasa Indonesia. Madrasah yang dimaksudkan setingkat dengan Sekolah Dasar yang disebut *Madrasah Ibtidaiyah*.²⁰⁾

Setelah Kemerdekaan perkembangan madrasah Ibtidaiyah di daerah ini berkembang sangat pesat, dan pada saat ini tercatat lebih kurang 120 madrasah Ibtidaiyah, di antaranya terdapat 14 buah madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Hampir pada tiap Kabupaten/Kotamadya memiliki sekurang-kurangnya sebuah MIN yaitu: Kotamadya Palembang 2 buah, MUBA 1 buah, OKI 1 buah,

19) BP3K, *op.cit.*, halaman 166-167.

20) *Ibid.*, halaman 167.

LIOT 3 buah, Lahat 1 buah, OKU 3 buah, MURA 1 buah, Bangka 1 buah, Kotamadya Pangkal Pinang 1 buah, sedangkan Belitung belum lagi memiliki.

TABEL III
Rekapitulasi jumlah MIN dan Guru di Sumatera Selatan
Tahun ajaran 1979/1980

No.	Kabupaten/Kotamadya	Keadaan M.I.N.		
		Jumlah MIN	Guru Negeri	Guru Honor
1.	PALEMBANG	2	36	2
2.	MUBA	1	11	5
3.	OKI	1	8	0
4.	LIOT	3	24	4
5.	LAHAT	1	1	4
6.	OKU	3	26	0
7.	MURA	1	10	2
8.	BANGKA	1	6	2
9.	PK. PINANG	1	7	4
10.	BELITUNG	0	0	0
	J U M L A H	14	129	23

SUMBER : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan, Laporan Tahunan Bidang Pendidikan Agama 1979/1980.

DAFTAR PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DAERAH SUMSEL.

No.	NAMA	ALAMAT	S.K. MENTERI	
			Nomor	Tanggal
1.	Madrasah Ibt. Neg.	Payaraman Tanjung Batu	78/1967	20-7-1967
2.	s.d.a.	Tanjung Ranan (LIOT)	78/1967	20-7-1967
3.	s.d.a.	Lubuk Kupang (MURA)	78/1967	20-7-1967
4.	s.d.a.	Sumberejo (BANGKA)	79/1967	20-7-1967
5.	s.d.a.	Sungai Liat (BANGKA)	79/1967	20-7-1967
6.	s.d.a.	Pandan Agung (OKU)	8/1968	21-1-1968
7.	s.d.a.	Kertapati (Palembang)	50/1968	8-3-1968

8.	s.d.a.	Lumpatan (MUBA)	75/1968	17-4-1968
9.	s.d.a.	Gelombang Kikim (LIOT)	75/1968	17-4-1968
10.	s.d.a.	Taman Bungkok (LIOT)	20/1968	2-9-1968
11.	s.d.a.	Tg. Periuk Muara Enim	20/1968	2-9-1968
12.	s.d.a.	Ulu Danau (OKU)	20/1968	2-9-1968
13.	s.d.a.	Batu Putih (OKU)	20/1968	2-9-1968
14.	s.d.a.	Pajarbulan (LIOT)	20/1968	2-9-1968

SUMBER : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.

C. PENDIDIKAN MENENGAH

1. Sekolah Menengah Pertama

Apa yang telah kami saksikan di muka bahwa tokoh-tokoh pendidikan daerah ini merasakan betapa perlunya lembaga pendidikan untuk masyarakat Sumatera Selatan, terutama pendirian Sekolah Lanjutan/Sekolah Menengah Umum, mengingat selama penjajahan Belanda hanya sedikit manusia dari daerah ini yang dapat mengenyam pendidikan Menengah, bahkan di jaman Jepang sekolah Menengah Umum (*Chu-Gakko*) di daerah ini tidak dibuka sama sekali.

Keinginan untuk membuka Sekolah Lanjutan baru dapat direalisasikan pada tanggal 1 Pebruari 1946 di kota Palembang atas anjuran Dr. A.K. Gani.²¹⁾ Dalam tahap pertama didirikanlah tiga Sekolah Lanjutan tingkat Pertama yaitu: Sekolah Menengah Oemoem Pertama (SMOP) yang lazim dikenal dengan nama SMP, Sekolah Guru Menengah (SGM) dan Sekolah Kepandaian Puteri (SKP). Sebagai pimpinan SMP ialah R.H.A. Rani dengan dibantu oleh beberapa orang guru misalnya: Wahidin Abas Surapati, Sjahrizad Sjahab, R. Soewarno, Abdullah Bakri dan Nuroni Adil.²²⁾

Sekolah tersebut merupakan SMP yang pertama kalinya dibuka setelah Proklamasi Kemerdekaan, yang pada waktu itu memiliki murid sebanyak + 700 orang. Pada awal kegiatan sekolah tersebut banyak sekali mengalami kesulitan, terutama mengenai tempat (gedung) dan tenaga pengajar yang diperlukan. Berkat kerja sama dengan sekolah-sekolah agama seperti *Qur'aniyah*, maka kesulitan tempat belajar mulai dapat diatasi dan demikian pula mengenai tenaga pengajarnya semakin bertambah.

Di samping itu berkat kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak, berhasil membuat tiga buah lokal sebagai gedung SMP yang terletak di jalan Perambungan Palembang. Gedung inilah yang pertama kalinya dipakai sebagai tempat belajar baik pada waktu pagi maupun sore hari, walaupun pelajaran

21). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, hal. 631

22). Wawancara dengan R.H.A. Rani, 22 Oktober 1977

pada waktu itu tidak begitu teratur mengingat situasi keamanan dalam kota tidak stabil.

Adapun nafkah guru-guru SMP tersebut tergantung kepada pembayaran uang sekolah murid-murid, namun demikian sekolah ini tetap bertahan berkat kegigihan dan ketekunan pimpinan Sekolah dan pembantu-pembantunya seperti: R. Soewarso, Abdullah Bakri, Wahidin Abbas Surapati, Sjahrizad Sjahab, Nuroni Adil, Djuaryah Akib dan lain-lain. Mereka bersemboyan: "Berperang atau bertempur boleh saja, tetapi ilmu harus dicari dan anak-anak harus diberi pendidikan".

Pada waktu itu pasukan Sekutu yang diboncengi oleh NICA telah tiba di Palembang. Karena Komando Sekutu meminta kepada tentara RI untuk mengosongkan tempat-tempat yang dipakai untuk keperluan tentara di daerah sepanjang *Corridor*, yaitu: Talang Semut, Jalan Merdeka, Jalan Tengkuruk, Jalan Jenderal Sudirman, Rumah Sakit Charitas, maka Markas Tentara yang menempati gedung *Methodist English School* dipindahkan ke bekas gedung *Schakel School* di 15 Ilir. Dengan demikian SMP menempati gedung bekas Markas Tentara yang terletak berseberangan dengan Masjid Agung. Sedangkan asrama murid-murid SMP terletak di gedung sebaris dengan gedung OGEM (PLN) yang telah dibongkar, kira-kira di kaki jembatan Ampera sekarang.²³⁾

Tetapi pada umumnya murid-murid SMP yang tinggal di asrama tersebut di atas mengambil makanan ke asrama Sekolah Guru Menengah (SGM) yang terletak di gedung Gaya Baru di Jalan Mailan, karena asrama SGM tersebut merupakan "dapur umum" baik untuk siswa-siswa SGM sendiri maupun untuk siswa-siswa SMP, yang dipercayakan pelaksanaannya kepada Abdul Malik yang merangkap, di samping sebagai pimpinan SGM juga sebagai kepala dapur umum.²⁴⁾

Murid-murid SMP tersebut berasal dari kumpulan anak-anak yang terlantar pelajarannya selama masa pendudukan Jepang, ditambah dengan murid-murid baru tamatan dari Sekolah Rakyat pada jaman Jepang. Jadi mereka itu ada yang tamatan HIS, *Schakel School*, Sekolah Rakyat dari jaman Jepang, bahkan ada yang telah duduk di bangku MULO pada jaman kolonial Belanda. Sebagian besar mereka itu berasal dari daerah pedalaman (Uluḡan) yang berduyun-duyun datang ke kota Palembang untuk menuntut ilmu. Mereka itu berasal dari daerah MUBA, MURA, Curup, Lahat, LIOT, OKI, OKU dan lain-lain. Sejak tahun 1946—1949 Kepala Pendidikan dan Pengajaran RI di Sumatera Selatan adalah Abdullah Nawawi, yang pada masa evakuasi beliau ikut serta ke pedalaman. Sementara di dalam kota terbentuk negara Sumatera Selatan, pimpinan kepala Pengajaran dan Pendidikan dipegang oleh Moh.

23). Wawancara dengan R.H.A. Rani

24). Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

Rasjid. Setelah pemerintah RI kembali ke kota Palembang dan terbentuknya Negara Kesatuan RI 1950, berturut-turut pimpinan kantor Pendidikan dan Pengajaran yang kemudian berubah namanya menjadi Kantor Kepala Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, ialah: M. Yunus, R.H.A. Rani, Madyan, R.M. Akil, Drs. Morsidi, dan Drs. A.Musa (sampai sekarang).

Oleh karena situasi keamanan pada waktu itu, pertempuran terus menerus, hubungan antara daerah pedalaman dengan kota Palembang sangat sulit, sehingga para pelajar yang berasal dari Uluang sering tidak mendapat kiriman uang/beras dari orang tuanya, maka sebagian besar dari mereka itu memutuskan untuk pulang ke kampung masing-masing, sehingga jumlah yang tadi cukup banyak akhirnya tinggal sebagian saja. Di samping itu ada pula di antara mereka ikut aktif membantu perjuangan melawan NICA. Sebagai akibat *Pertempuran Lima Hari Lima Malam* di kota Palembang pada awal bulan Januari 1947 serta pengunduran pasukan/lasykar kita sejauh radius 20 Km ke luar kota dan pemindahan pusat Pemerintah RI ke Lahat, maka terpaksa sekolah tersebut (SMP) ditutup. Bersamaan dengan hijrahnya pasukan/lasykar kita dan pusat pemerintah RI ke daerah pedalaman, ikut pula para pelajar guna membantu perjuangan di daerah pedalaman, dan dengan ikut sertanya para pelajar berhijrah mendorong para pemimpin/tokoh pendidikan kita untuk membuka sekolah-sekolah Lanjutan di daerah-daerah pedalaman, agar mereka dapat meneruskan sekolahnya. Oleh sebab itu dibukalah Sekolah-sekolah Lanjutan Pertama (SMP) di Baturaja dan Pagaralam, dan beberapa bulan sesudah itu didirikan pula SMP di Manna (Bengkulu Selatan).²⁵⁾

Di Bangka dar. Belitung yang telah lebih dulu diduduki oleh tentara Belanda (Akhir Maret 1946), didirikan sekolah-sekolah Lanjutan misalnya di Pangkalpinang dibuka Sekolah Menengah dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, *Middelbare School* (MS) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan di Tanjung Pandan (Belitung) didirikan Sekolah Menengah (*Middelbare School*) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.²⁶⁾ Sementara itu di kota Palembang tindakan tentara Belanda semakin agresif, pada tanggal 21 Juli 1947 Aksi Militer yang pertama berkobar, Belanda merencanakan untuk menduduki/menguasai seluruh daerah pedalaman dan menghancurkan pusat Pemerintahan RI (Keresidenan Palembang) di Lahat. Hal itu memaksa Residen Abdul Rozak memindahkan pusat Pemerintahan RI dari Lahat ke Lubuk Linggau (23 Juli 1947), sebuah kota kecil di daerah pedalaman (sekarang ibu kota Kabupaten MURA). Pindahanya pusat Pemerintahan ke Lubuk Linggau, ikut serta pula para pemuda berhijrah ke sana. Hal itulah yang mendorong untuk membuka sekolah SMP di Lubuk Linggau, guna me-

25). Kementerian Penerangan RI *op.cit.*, hal. 632

26). *Ibid.*, *loc.cit.*

nampung pemuda-pemuda pelajar yang datang ke sana dari kota Palembang, Lahat, Tanjung Enim, dan sebagainya.²⁷⁾

Pada waktu itu hubungan dengan Jawa sangat sulit, sehingga kemungkinan bersekolah ke Jawa kecil sekali, sedangkan sekolah-sekolah lanjutan di kota Palembang telah ditutup, dan sekolah-sekolah lanjutan yang didirikan di daerah pedalaman jalannya tidak lancar/teratur, oleh karena itu banyak sekali pemuda/pemudi yang terlantar studinya. Di samping itu banyak pula di antara mereka yang bergabung dalam Tentara Nasional Indonesia Pelajar (TNIP) ikut aktif memanggul senjata bersama-sama TNI.

Tetapi pada bulan Agustus 1947 di kota Palembang, sesudah penutupan SMP yang telah disebutkan di atas, diusahakan kembali membuka SMP oleh R.H.A.Rani dan kawan-kawan, kali ini dengan nama SMO (Sekolah Menengah Oemoem). Meskipun kota Palembang telah diduduki oleh tentara Belanda, dan Belanda mengetahui kegiatan R.H.A.Rani dan kawan-kawan, tetapi mereka tidak menggangukannya, sehingga SMO dapat berdiri sampai dipindahkannya pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan dari kota Bengkulu ke kota Palembang dan dibubarkannya Negara Sumatera Selatan (1950).

Di samping itu tidak boleh dilupakan kegiatan Taman Siswa bagian Taman Dewasa (SMP) di bawah pimpinan Jasodipuro yang tetap berjalan, sehingga murid-muridnya dapat terus belajar. Sedangkan pemerintah pendudukan Belanda juga membuka sebuah sekolah *Middelbare School* yang di daerah ini dikenal dengan nama Sekolah Menengah Recomba (*Regerings Commissaris Bestuurs Aangelegenheden*) di bawah pimpinan Amir Hamzah. Guru-guru Sekolah Menengah Recomba antara lain: Hutabarat, Ibu Fatimah, Burhanuddin, Toruan, Junus Wajidun dan lain-lain. Gedung sekolahnya si SMP IV sekarang yang terletak di Jalan Dempo.²⁸⁾

Sementara itu pemerintah pendudukan Belanda juga mendirikan sebuah sekolah MULO guna menampung anak-anak serdadu KNIL, anak-anak Indo Belanda, dan juga anak-anak pejahat bangsa kita yang mau bekerja sama dengan Belanda dibolehkan memasuki sekolah MULO tersebut, yang berlokasi di Talang Semut (SMP Negeri I sekarang)²⁹⁾.

Tidak dapat disangkal bahwa hubungan antara SMO dan Taman Siswa di satu pihak dengan *Middelbare School* (SM Recomba) di lain pihak secara instansional tidak baik, namun lain halnya hubungan antara siswa-siswanya, mereka akrab satu sama lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya usaha pengibaran kembali bendera Merah Putih di halaman Taman Siswa, yang diprakarsai dan dihadiri oleh siswa-siswa dari ketiga sekolah tersebut pada akhir bulan Pebruari 1948. Perlu diketahui setelah Aksi Militer yang pertama, (1947) bendera Merah Putih tidak boleh lagi berkibar di kota Palembang.

27). *Ibid.*, *loc. cit.*

28). Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

29). Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

Apabila persetujuan Linggarjati dirobek-robek oleh Belanda secara sepihak dengan melancarkan Aksi Militer yang pertama, maka Perjanjian Reiville pun mengalami nasib yang sama dengan meletusnya Aksi Militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, yang mengakibatkan dua per tiga daerah Keresidenan Palembang diduduki oleh tentara Belanda. Oleh karena itu pusat Pemerintahan RI terpaksa dipindahkan lagi dari kota Lubuk Linggau ke Curup, dan semua kegiatan pendidikan terhenti, karena gedung-gedung sekolah banyak yang dibumi-hanguskan oleh tentara Belanda, seperti: gedung SMP di Pagar Alam, bekas gedung MULO di Bengkulu, gedung Semarak usaha "Semarak Bengkulu", dan lain-lainnya.

Dalam tahun 1949 keadaan pendidikan di daerah-daerah pedalaman mulai/berangsur-angsur membaik, muncul sekolah-sekolah lanjutan, baik yang diusahakan atas inisiatif Swasta, ada pula yang disokong oleh Pemerintah Negara Sumatera Selatan yang pada tanggal 1 Pebruari 1949 didirikan sebagai negara boneka Belanda. Di Baturaja, Lahat, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Curup, Bengkulu dan Tanjung Karang didirikan Sekolah Menengah (SMP).³⁰⁾

Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, pelajar-pelajar dari kekuasaan Republik yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia Pelajar (TNIP) tidak langsung dapat memasuki bangku sekolah, tetapi baru pada waktu pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan pindah dari Bengkulu ke kota Palembang (Maret 1950), mereka masuk ke kota Palembang bersama-sama dengan Pegawai Pemerintah Republik dan berusaha dapat duduk di bangku sekolah kembali.³¹⁾

Oleh karena pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan pindah ke kota Palembang, maka timbullah gelombang perpindahan yang besar di segala lapangan. Banyak pegawai Pemerintah yang kemudian memenuhi kota Palembang, tidak hanya datang dari Bengkulu, tetapi juga dari kota Lubuk Linggau. Dengan sendirinya para pelajar yang memang berasal dari daerah Palembang yang tadinya bersekolah di kota Palembang juga ikut pindah. Dengan adanya perpindahan secara besar-besaran itu, maka membawa akibat yang negatif dalam segi pendidikan bagi kota Bengkulu dan kota Lubuk Linggau. Bersamaan dengan pindahnya para pegawai Pemerintahan dan para pelajar ke kota Palembang, ikut pula para guru meninggalkan ke dua kota tersebut, sehingga terpaksa Sekolah Lanjutan Atas (SMA) di kota Bengkulu dan SMP di kota Lubuk Linggau kemudian ditutup, karena tidak ada tenaga pengajar.

Pada tahun 1950 SMO yang dipimpin oleh R.H.A.Rani dipecah menjadi dua, yaitu: SMP I dan SMP II. Dan pada bulan Maret 1950, yaitu pada saat pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan pindah ke kota Palembang, tercatat sebanyak 12 buah SMP milik Pemerintah di seluruh Sumatera Selatan (masih meliputi Jambi, Lampung dan Bengkulu). Tetapi pada tahun

30). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, hal. 632

31). *Ibid.*, halaman 633.

1951 jumlahnya berkurang menjadi 10 buah, karena seperti telah disebut di atas SMP di Lubuk Linggau ditutup sedangkan di Pangkal Pinang (Bangka) adanya penggabungan antara *Middelbare School* (MS) dan Sekolah Menengah (SM) menjadi satu SMP.³²⁾

Pada tahun 1952 jumlah SMP meningkat menjadi 14 buah, karena tercatat ada empat buah SMP yang baru didirikan, masing-masing: di Kayu Agung, Tanjung Enim, Kota Bumi, dan Palembang. Dengan demikian di kota Palembang sendiri pada tahun 1952 terdapat tiga buah SMP Negeri.³³⁾

Sesuai dengan keputusan Pemerintah RI (Kementerian P.P. dan K) di Yogyakarta, maka pada tahun 1950 didirikan Inspeksi SMP untuk seluruh daerah-daerah Propinsi di Indonesia. Untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan didirikan Inspeksi SMP di kota Palembang pada bulan Mei 1950 R.H.A.Rani sebagai Kepala.³⁴⁾ Untuk seluruh Indonesia diadakan 10 daerah Inspeksi SMP tersebut, yang merupakan suatu peningkatan jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, hanya ada satu Inspeksi MULO untuk seluruh wilayah Hindia Belanda.³⁵⁾

Jika dibandingkan dengan keadaan di Jawa nampaknya perkembangan pendidikan menengah di daerah ini sangat jauh ketinggalan. Propinsi Sumatera Selatan yang pada saat itu (tahun 1952) masih meliputi Jambi, Lampung, Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini, hanya memiliki 14 buah SMP milik Pemerintah.

Seperti halnya pendidikan dasar (Sekolah Rakyat), pendidikan menengah pun menghadapi masalah yang sama, yaitu gedung sekolah dan sarana lainnya. Selaras dengan perkembangannya dari masa penjajahan, maka ketika didirikan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) semenjak awal tahun 1946, yang pasti dimiliki hanyalah murid-murid belaka. Warisan gedung dari Pemerintah kolonial Belanda sangat kurang. Yang ada di daerah ini, baik di kota-kota maupun di pedalaman jumlahnya sangat sedikit, misalnya di kota Palembang hanya gedung-gedung HIS sebanyak empat buah (dua buah di Kebon Duku, sebuah di 15 Ilir, dan sebuah di Indrapura), dan sebuah gedung MULO, yang sekarang ini menjadi gedung SMP Negeri I. Sedangkan di daerah pedalaman Sumatera Selatan (yang sekarang) yang mempunyai sekolah HIS hanyalah Kayu Agung, Tanjung Raja, Baturaja, Martapura, Muara Enim, Lahat. Sampai tahun 1955 Pemerintah RI belum mendirikan gedung-gedung SMP di daerah ini.³⁶⁾

Bagaimana perkembangan/keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Propinsi Sumatera Selatan (masih meliputi Jambi, Lampung dan Bengkulu)

32). Wawancara dengan R.H.A.Rani, 22 Oktober 1977

33). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, hal. 633

34). Wawancara dengan R.H.A.Rani 22 Oktober 1977

35). Kementerian Penerangan, *op.cit.*, hal. 634

36). *Ibid.*, *loc.cit.*

sejak terbentuk kembali Negara Kesatuan RI sampai tahun 1953 dapat dilihat dari tabel di sebelah yang kami susun berdasarkan data Kementerian Penerangan RI tentang Propinsi Sumatera Selatan.

TABEL IV
Keadaan SMP Negeri di daerah Propinsi Sumsel
Tahun 1950 – 1953

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1950	12	1804	51
1951	10	2035	70
1952 – 1953	14	2374	109

SUMBER : Kementerian Penerangan RI Propinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan sistem persekolahan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan, di mana Pemerintah RI memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak dari seluruh alipisan masyarakat, untuk memasuki pendidikan Menengah asalkan dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pemerintah/Kementerian P.P. dan K terus berusaha untuk menambah jumlah SMP di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Propinsi Sumatera Selatan. Menurut pengamatan kami yang berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan maupun dari Kandep-Kandep Kabupaten/Kotamadya, sesudah tahun 1955 perkembangan pendidikan Menengah di daerah ini cukup menggembirakan. Bahkan setelah tahun enam puluhan pada tiap-tiap Kabupaten minimal terdapat sebuah SMP Negeri, dan setelah tahun 1966 hampir pada tiap-tiap Kecamatan telah didirikan sebuah SMP Negeri.

Walaupun secara kuantitatif SMP Negeri semakin lama semakin bertambah, tetapi tidak berarti jumlah yang telah ada itu dapat mengimbangi/ menampung anak-anak tamatan Sekolah Dasar, yang dari tahun ke tahun semakin banyak jumlahnya. Dengan lain perkataan, bahwa jumlah SMP Negeri yang telah dibuka oleh Pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan/ keinginan masyarakat daerah ini, bahkan sampai tahun 1980 ini jumlah SMP Negeri belum dapat menampung arus murid yang tamat dari Sekolah Dasar. Banyak orang tua yang merasa kecewa anaknya tidak dapat diterima di sekolah-sekolah Menengah pemerintah, dan oleh karena itu terpaksa anaknya dimasukkan ke sekolah-sekolah Swasta dengan konsekwensi biaya yang lebih besar, jika dibandingkan dengan sekolah Pemerintah. Di dalam kota

Palembang sampai dengan tahun 1980 terdapat 16 SMP Negeri, sedangkan di seluruh Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 70 buah SMP Negeri. Bagaimana perkembangan pendidikan Menengah (SMP) di daerah ini dari tahun 1966 sampai dengan 1980, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL V
Keadaan SMP Negeri di daerah Sumatera Selatan
Tahun 1966 – 1980

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1966	37	12668	305
1967	37	13038	316
1968	37	14251	357
1969	37	14289	377
1970	37	15454	388
1971	37	16063	395
1972	37	15038	400
1973	37	16780	424
1974	37	17211	477
1975	37	18542	441
1976	37	20169	599
1977	58	25474	677
1978	58	23839	1538
1979/1980	70	30162	1213

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

Seperti telah diketahui bahwa pendidikan di Indonesia pada jaman Kemerdekaan tidak hanya dikelola oleh Departemen Pendidik dan Kebudayaan saja, tetapi juga oleh Departemen-Departemen lain, antara lain ialah Departemen Agama RI. Sekolah-sekolah yang diasuh oleh Departemen Agama di daerah ini, yaitu dari tingkat pendidikan Dasar (SD) sampai dengan pendidikan tinggi. Yang setingkat dengan Sekolah Dasar disebut Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) telah diuraikan di depan, sedangkan yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) disebut Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN).

Menurut data dari laporan-laporan Kantor Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan Agama Islam yang kami pelajari,

bahwa madrasah-madrasah di daerah ini pada umumnya berstatus swasta, baru kemudian kira-kira tahun 1967 atas permohonan madrasah-madrasah bersangkutan kepada Menteri Agama RI mereka dinegerikan. Dan menurut Laporan Tahunan dari Bidang Pendidikan Agama Islam (1978-1980), hanya dua buah Kabupaten dari 10 buah Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang belum memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri, yaitu: Kabupaten MURA dan Kabupaten Bangka. Sedangkan 8 Kabupaten/Kotamadya lainnya minimal telah mempunyai sebuah MTsN. Untuk seluruh Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 16 buah Madrasah Tsanawiyah Negeri, yang pada umumnya baru pada tahun 1968 dinegerikan oleh Menteri Agama RI, antara lain :

- a. MTsN. Kotamadya Palembang, SK. No.8/1968 tanggal 20 Januari 1968.
- b. MTsN. Saka Tiga, OKI SK. No.74/1968 tanggal 17 April 1968.
- c. MTsN. Lumpatan, MUBA SK. No.76/1968 tanggal 7 April 1968.
- d. MTsN. Pajar Bulan, LIOT SK. No.201/1968 tanggal 2 September 1968.
- e. MTsN. Tanjung Periuk-LIOT SK. No.201/1968 tanggal 2 September 1968.
- f. MTsN. Bandar Agung-OKU SK. No.201/1968 tanggal 2 September 1968.
- g. MTsN. Kotanegara-OKU SK. No.201/1968 tanggal 2 September 1968.
- h. MTsN. Campang Tiga-OKU SK. No.201/1968 tanggal 2 September 1968.

TABEL VI
Kedaaan MTsN, Guru Negeri/Guru Honorair di Propinsi
Sumatera Selatan Tahun 1979/1980

No.	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah		
		MTsN	Guru Negeri	Guru Honorair
1.	Palembang	2	36	2
2.	MUBA	2	11	8
3.	OKI	2	29	8
4.	LIOT	3	24	5
5.	Lahat	1	15	8
6.	OKU	4	47	13
7.	Pangkal Pinang	1	5	8
8.	Belitung	1	7	4
9.	MURA	0	0	0
10.	Bangka	0	00	0
	J u m l a h	16	169	56

SUMBER : Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pada jaman Hindia Belanda di daerah Sumatera Selatan belum pernah didirikan suatu Sekolah Menengah Tingkat Atas, seperti: SMA, SGA, SMEA atau yang sederajat, yang pada jaman itu dinamai AMS, HIK, MHS, dan sebagainya. Seperti yang telah diketahui pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah untuk daerah ini sampai batas Sekolah Menengah Tingkat Pertama saja, yang pada waktu itu bernama MULO dan jumlahnya pun sangat sedikit. Apabila terdapat beberapa gelintir dari pemuda-pemuda daerah ini yang mengenyam pendidikan AMS, MOSVIA, HIK dan lain-lain pada jaman Hindia Belanda, umumnya mereka itu menerima pendidikannya di Jawa. Dan mereka itu adalah anak-anak dari golongan pejabat, seperti: Demang, Asisten Demang, Pesirah atau Kerio. Selaras dengan politik pemerintah kolonial Belanda, pendidikan tingkat menengah tersebut belum pernah menyentuh lapisan bawah masyarakat daerah ini yang merupakan golongan mayoritas.

Harus diakui bahwa perluasan pendidikan penduduk pribumi di daerah ini sangat lamban dan terlambat jika dibandingkan dengan perkembangan pendidikan di pulau Jawa, Padang, Tapanuli dan lain-lain, sebab di samping faktor kefanatikan masyarakat tradisional di daerah ini terhadap sekolah-sekolah pemerintah Belanda yang dianggap kafir, juga faktor demografis, yaitu tipisnya jumlah penduduk di daerah yang amat luas, sehingga dikawatirkan sekolah yang akan dibuka itu akan kekurangan murid atau tidak dikunjungi oleh anak-anak. Selain itu pemerintah kolonial Belanda sendiri, selalu mempertimbangkan masalah biaya dalam peningkatan/perbaikan pendidikan di daerah jajahan, karena biaya yang tersedia sangat terbatas. Pada jaman pemerintahan pendudukan Jepang keadaan pendidikan lebih menyedihkan, sekolah yang ada sebelumnya sebagian ditutup.

Revolusi Kemerdekaan membawa banyak kemungkinan dan perubahan tidak hanya di bidang politik/pemerintahan, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Dipelopori oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh pendidikan daerah ini, maka didirikanlah Sekolah-sekolah Lanjutan Pertama dan Lanjutan Atas (SMA) yang sebelumnya tidak pernah ada/dikenal oleh masyarakat daerah ini. Berdirinya SMA di Sumatera Selatan dimulai dari kota Bengkulu, beberapa bulan sesudah aksi militer yang pertama, yang pada waktu itu kota Bengkulu belum mendapat gangguan dari musuh. SMA tersebut mempunyai siswa sebanyak 20 orang, terdiri dari SMA. Bagian A dan SMA Bagian B.³⁷⁾

Tetapi SMA di kota Bengkulu ini tidak dapat bertahan lama, karena dengan dipindahkannya Pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan dari kota Bengkulu ke kota Palembang pada bulan Maret 1950, maka para pemimpin/pegawai Pemerintah RI, termasuk guru-guru SMA Bengkulu ikut hijrah ke Palembang. Oleh karena tidak ada tenaga pengajar akhirnya SMA di

37). *Ibid.*, halaman 632-639.

Bengkulu ditutup, sedangkan murid-muridnya pindah ke Palembang atau bersekolah ke Jawa.

Pada tanggal 10 Mei 1950 sesuai dengan tenaga pengajar yang ada, maka didirikanlah SMA Bagian B di kota Palembang. Murid-muridnya terdiri dari enam orang dari SMA Bengkulu yang telah ditutup, ditambah 22 orang murid dari SMO kelas IV yang dipimpin oleh RHA.Rani, yang mutunya dianggap sederajat dengan kelas I SMA. Sebagai pimpinan SMA ini ialah S.A.Sitohang, dan guru-guru lainnya RM.Akil, W.G.Lap, Ny. Gentil, Hasan Delais, Frater Monfort dan Nanguning.³⁸⁾

Mulai tanggal 1 Juli 1950 diadakan *screening* terhadap pelajar-pelajar SMA ini. Dari jumlah 28 orang murid hanya 14 orang dibolehkan duduk di SMA kelas II Bagian B, sedangkan selebihnya, sebagian masuk ke SGA kelas II, sebagian lagi masuk SMA Bagian A di Jawa, dan 4 orang memasuki sekolah kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Pertanian Atas di Bukittinggi.³⁹⁾ Dalam bulan itu juga penerimaan murid baru untuk kelas I sebanyak + 50 orang yang dibagi dalam dua kelas.

Ada pun gedung sekolahnya mula-mula di gedung SMO, kemudian pindah menumpang untuk beberapa bulan di gedung SGA yang terletak di Jalan Indrapura, dan selanjutnya pada bulan Oktober 1951 pindah lagi ke Sekolah Rakyat di Lorong Pagar Alam sampai tahun 1955. Murid-murid yang berasal dari SMA Bengkulu diasramakan di gedung/asrama SGB (*Normaalschool*) yang kemudian menjadi gedung SGA dan sekarang menjadi gedung SPG, Negeri. Pada bulan Maret 1951 terjadi pergantian pimpinan dari tangan S.A. Sitohang ke tangan B.M. Adnan yang sebelumnya bekerja pada Inspeksi SMP Pusat dari Kementerian P.P. dan K.⁴⁰⁾

Pada bulan Juni 1952 SMA/B ini mempunyai murid di kelas tertinggi sebanyak 12 orang, yang ikut ujian penghabisan dalam bulan itu dan hanya lulus sebanyak tujuh orang. Dari tujuh orang itu, tiga orang meneruskan pelajarannya ke Sekolah Dokter Tinggi, dan masing-masing seorang ke Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Kursus PTT dan Kursus Imigrasi.⁴¹⁾ Dalam hubungan ini B.M. Adnan menyatakan, bahwa melihat hasil yang dicapai, yaitu lebih dari 50% yang lulus ujian penghabisan, maka SMA Negeri di Palembang ini telah menarik perhatian umum terutama kalangan murid-murid SMA di tempat lain. Ternyata dalam tahun 1933, 11 orang dari 25 orang murid yang duduk di kelas tertinggi berasal dari SMA di Jawa.

Pada ujian penghabisan dalam bulan Juli 1953, yang lulus dari jumlah 25 orang, lulus sebanyak 17 orang atau 60%. Ternyata yang lulus itu, 11 orang dari 14 orang yang sejak kelas satu belajar di SMA/B Palembang,

38). *Ibid.*, halaman 639

39). *Ibid.*, *loc.cit.*

40). *Ibid.* *loc.cit.*

41). *Ibid.*, halaman 640.

sedangkan siswa yang pindah dari SMA dari Jawa 11 orang yang mengikuti pelajaran di SMA Negeri Palembang mulai di kelas III, di antaranya lulus 6 orang. Guru-guru SMA/B Negeri terdiri dari: RM. Akil, N. Patimah, J.E.C.J. Gentil, R.M.Kuparman, R. Adikusumo, Drs. Tanya, M.B. Portier dan B.M. Adnan (Direktur).⁴²⁾

Pada tahun ajaran 1953/1954 tercatat jumlah murid SMA/B sebanyak 147 orang, yang terdiri dari : kelas I A sebanyak 38 orang, kelas I B sebanyak 36 orang, kelas II sebanyak 39 orang, dan kelas III sebanyak 34 orang. Nampak di sini adanya suatu peningkatan jumlah murid, meskipun perkembangan dari tahun ke tahun tidak seperti apa yang diharapkan. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini dapat dihubungkan dengan kondisi SMA/B Negeri itu sendiri. Tahun-tahun permulaan berdirinya SMA/B Negeri Palembang banyak menghadapi kesulitan antara lain :

- a. Masalah gedung seperti yang dilukiskan di atas, sehingga secara psikologis kurang menguntungkan, murid-murid SMA merasa kurang mendapat penghargaan dari Pemerintah/masyarakat, sehingga mereka merasa rendah diri.
- b. Kekurangan tenaga pengajar. disebabkan standar hidup sangat tinggi di daerah ini dan tidak adanya perumahan bagi guru-guru, sehingga guru-guru dari luar Sumatera Selatan enggan pindah ke Palembang.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, maka putra/putri daerah ini pada waktu itu lebih senang pergi bersekolah ke pulau Jawa, karena di Jawa biaya hidup jauh lebih rendah dari biaya di Palembang.

Sesudah tahun 1955 mulailah ada cahaya terang dalam perkembangan SMA Negeri di daerah ini. Gedung bertingkat tiga dibangun di Bukit Besar yang pada awal tahun 1957 telah siap untuk ditempati, sehingga sejak tahun 1957 tidak lagi menumpang ke sana ke mari. SMA Negeri Palembang diperluas dengan membuka SMA Bagian A dan Bagian C, yaitu SMA/B sebagai SMA Negeri I, sedangkan SMA dan SMA/C sebagai SMA Negeri II. Tetapi kedua SMA tersebut pimpinannya tetap satu, yaitu B.M. Adnan, dan gedungnya pun masih menjadi satu ialah gedung SMA di Bukit Besar atau Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, yang sekarang menjadi gedung SMA Negeri I.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 yang antara lain berbunyi: "untuk sekolah lanjutan dan pendidikan tinggi dibiayai oleh Kementerian P dan K, selain itu pembiayaan gedung-gedung sekolah perlengkapannya dipikul oleh daerah,"⁴³⁾ maka biaya pembangunan gedung SMA Negeri Palembang merupakan hasil swadaya daerah yang pada waktu itu mengadakan perdagangan barter dengan luar negeri. Dapat dikatakan bahwa SMA Negeri I merupakan cikal bakal dari semua SMA Negeri yang ada di Sumatera Selatan (Palembang) sekarang ini.

42). *Ibid.*, *loc. cit.*

43). *BP3K*, *op. cit.*, halaman 140.

Perluasan SMA Negeri di daerah Sumatera Selatan, baik di kota Palembang sendiri maupun di daerah-daerah pedalaman, tidak dapat dipisahkan dengan kebijaksanaan Pemerintah, kerja sama antara Departemen P dan K dengan Departemen Perguruan Tinggi dalam menanggulangi kekurangan tenaga pengajar untuk Sekolah Lanjutan Atas, dengan Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), sementara lembaga-lembaga pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (BI, BII, PTPG) belum memenuhi kebutuhan. Para mahasiswa PTM disebar ke SMA, SGA, SMEA dan sekolah-sekolah yang sederajat di seluruh Indonesia, termasuk Propinsi Sumatera Selatan. Di samping itu pada tahun 1957 itu juga para lulusan B.I. dan lulusan Sarjana Muda PTPG telah memasuki kota Palembang, siap untuk ditempatkan di SMA/B negeri dan SMA/A.C atau SMA Negeri I dan SMA Negeri II.

Untuk menampung para guru SMA Negeri tersebut, kepada mereka diberi prioritas untuk tinggal di hotel-hotel di kota Palembang berdasarkan ijin hotel yang mereka peroleh dari Pemerintah Pusat. Hotel-hotel yang menampung guru-guru tersebut antara lain: Hotel Sekati di Talang Semut, Hotel Musi di Jalan Merdeka, Hotel Sumatera di Jalan Mayor Ruslan, Hotel Sindanglaya di Jalan Kapten A. Rivai yang sekarang telah dibongkar dan di atas reruntuhannya dibangun Hotel Sanjaya, dan Hotel Riau di Jalan Dempo. Pembayaran hotel-hotel tersebut sebagian dibebankan kepada guru-guru dengan memotong 60% dari gaji mereka dan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Sesudah tahun enam puluhan hampir semua Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki SMA Negeri, sedangkan di kota Palembang sendiri berdiri pula SMA Negeri III dan disusul dengan SMA Negeri IV, yang pada mulanya keduanya merupakan filial dari SMA Negeri I dan SMA Negeri II. Pada tahun 1980 di kota Palembang terdapat lima buah SMA Negeri. Bagaimana perkembangan SMA Negeri di Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel di sebelah.

TABEL VII
Kedaaan SMA Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 – 1980

TAHUN	JUMLAH		
	SEKOLAH	MURID	GURU
1966	16	3729	146
1967	17	4668	146
1968	17	4595	146
1969	17	4926	144
1970	17	4915	153
1971	14	4320	138
1972	14	4498	145
1973	15	4843	151
1974	15	5053	177
1975	15	5917	204
1976	15	6389	229
1977	17	7347	230
1978	18	7794	390
1979/1980	20	9946	275

SUMBER: Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Di samping Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan juga mengasuh Madrasah Aliyah, yang menurut Laporan Tahunan 1979-1980 dari Bidang Pendidikan Agama di seluruh Propinsi Sumatera Selatan sebanyak sembilan buah Madrasah Aliyah Negeri.

Dari 10 buah Kabupaten/Kotamadya tiga buah yang belum mempunyai Madrasah Aliyah Negeri, yaitu: Bangka, Pangkal Pinang dan Belitung. Madrasah Aliyah ini pun pada umumnya mula-mula berstatus swasta, yang kemudian diberi status negeri dengan permohonan yang bersangkutan, yang hampir bersamaan waktunya dengan pengertian Madrasah Tsanawiyah Madrasah-madrasah tersebut antara lain:

a. M.A.N. Saka Tiga – OKI dengan SK. No. 168/1968 tanggal 17 April 1968.

- b. M.A.N. Campang Tiga OKU dengan SK. No. 201/1968 tanggal 2 September 1968.
- c. M.A.N. Kotamadya Palembang dengan SK. No. 168/1970 tanggal 4 Agustus 1970.

TABEL VIII
Kedaaan MAN, Guru Negeri/Guru Honorair di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1979-1980

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah		
		MAN	Guru Negeri	Guru Honorair
1.	Palembang	2	24	16
2.	MUBA	1	1	12
3.	OKI	1	20	7
4.	LIOT	1	8	7
5.	Lahat	1	9	3
6.	OKU	2	16	3
7.	MURA	1	1	12
	Jumlah	9	79	60

SUMBER: Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.

D. PENDIDIKAN KEJURUAN

1. Pendidikan Guru

Oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah ini pernah didirikan beberapa sekolah guru untuk tenaga pengajar sekolah rendah, seperti: *Kweekschool* di Lahat (1920), *Normaalcursus* di kota Palembang, dan *Leergang* (CVO) di daerah-daerah *onderafdeling*, yang lama masa pendidikannya masing-masing, 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Tetapi *Kweekschool* setelah dipindahkan dari Lahat ke Muara Enim kemudian dihapuskan (1927), karena dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai sarang berkembangnya pendidikan modern dan pemupukan rasa kebangsaan.⁴⁴) Demikian juga *Normaalcursus*, setelah dianggap cukup banyak menghasilkan tenaga guru ditutup, sedangkan *Leergang* (CVO) dibiarkan hidup sampai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di daerah ini, dan pada jaman pendudukan Jepang diganti namanya

44) Wawancara dengan Abdul Malik, SH, Oktober 1977

menjadi *Kyoing-Yosejo*. Di samping itu pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan sistem "magang," dan mereka yang magang di sekolah rendah, setelah dua tahun dibolehkan mengikuti ujian *Kweckeling* dan jika mereka lulus barulah diakui secara syah sebagai guru.⁴⁵⁾

Pada jaman pendudukan Jepang, selain *Kyoing-Yosejo*, dibuka juga *Dai-Chibu-Sihang-Gakko* dan *Dai-Nibu-Sihang-Gakko* seperti diuraikan di muka. Warisan sistem pendidikan yang kita terima dari kedua penjajah itu, menyebabkan daerah ini sangat kekurangan tenaga pengajar yang sangat dirasakan pada jaman kemerdekaan oleh masyarakat daerah ini pada umumnya dan kementerian PPK khususnya. Oleh karena itulah tokoh-tokoh pendidikan daerah ini merasa perlu untuk mendirikan sekolah-sekolah guru di samping sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersamaan dengan dibukanya SMOP pada tanggal 1 Pebruari 1946 di kota Palembang didirikan juga Sekolah Guru Menengah (SGM) yang dipimpin oleh Abdul Malik (ex Walinegara Negara Sumatera Selatan). Jumlah muridnya pada mula didirikan sebanyak ± 200 orang.⁴⁶⁾ yang terdiri dari 2/3 putra dan 1/3 putri. Mereka itu pada umumnya berasal dari daerah Uluan seperti MUBA, MURA, OKI, OKU, Lahat dan LIOT, yang pada jaman Jepang terlantar studinya, ditambah dengan murid-murid yang tamat Sekolah Rakyat pada jaman Jepang.

Hampir semua siswa SGM tersebut tinggal di asrama dengan cuma-cuma, dan mereka tidak diwajibkan membayar uang sekolah. Yang putra asramanya di Gedung Gaya Baru sekarang yang terletak di Jalan Mailan, sedangkan yang putri di gedung sebelahnya yang pada tahun 1975 dibongkar dan di atasnya didirikan gedung/pertokoan Megah Ria sekarang. Tempat belajar menjadi satu dengan asrama putri, karena gedung tersebut terdiri dari 12 lokal (bertingkat). Sebelum dibongkar dipergunakan oleh SMP Negeri VIII.

Oleh karena tingkat pengetahuan serta kecerdasan para siswa SMA itu tidak sama, mereka itu ada yang tamat HIS, *Schakelschool*, Sekolah Rakyat jaman Jepang, ada yang telah duduk di bangku MULO, maka pada bulan Juni/Juli 1946 diadakan *screening*. Yang setingkat pengetahuan dan kecerdasannya lebih tinggi dimasukkan di kelas II, sedangkan yang tingkat pengetahuan serta kecerdasannya lebih rendah didudukkan di kelas I, sehingga pada bulan Agustus 1946, tahun ajaran baru, SGM ini terdiri dari dua kelas II dan empat kelas I.⁴⁷⁾ Jika dibandingkan dengan SMOP kondisi SGM lebih baik, pelajarannya lebih lancar/teratur, jumlah tenaga pengajarnya pun lebih banyak, oleh karena itu tidak jarang guru-guru SGM merangkap di SMOP.

45) Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, halaman 650.

46) *Ibid.*, halaman 631

47) Keterangan dari Drs. Ma'moen Abd.

Adapun guru-guru SGM antara lain ialah: Abdul Malik (Kepala), Nuroni Adil, Junus Wadjidun, Panhar dan lain-lainnya, sedangkan sebagai Kepala Tata Usaha ialah Ansor Bakir. Mula-mula tampak sekali semangat belajar siswa-siswa SGM ini sangat besar, namun SGM ini pun tidak dapat bertahan lama seperti halnya SMOP.

Kepergian tentara Sekutu meninggalkan kota Palembang (24 Oktober 1946) memberi peluang bagi Belanda untuk menanamkan kembali kekuasaannya di daerah ini, yang mendapat tantangan/perlawanan sengit dari seluruh rakyat. Tindakan Belanda yang semakin agresif, menyebabkan situasi keamanan semakin buruk; kehidupan sangat sulit, hubungan antara kota Palembang dengan daerah pedalaman terputus, kegiatan pendidikan tidak lancar/teratur, sehingga banyak yang tidak tahan menghadapi situasi mengundurkan diri. Oleh karena itu pada akhir tahun 1946, siswa yang pada mulanya diperkirakan berjumlah ± 1000 orang (SGM, SMOP, SKP) hanya tinggal ± sebanyak 400 orang saja.⁴⁸⁾ Dan kemudian sebagai akibat Pertempuran Lima Hari Lima Malam di kota Palembang pada awal Januari 1947, Sekolah Guru Menengah (SGM) ini pun terpaksa ditutup bersama-sama dengan SMOP dan SKP. Tetapi setelah pusat Pemerintahan Keresidenan Palembang dipindahkan ke daerah pedalaman, dan di pedalaman didirikan sekolah-sekolah lanjutan, maka di Manna (Bengkulu Selatan) didirikan juga Sekolah Guru di samping SMP.⁴⁹⁾

Setelah di kota Palembang dibentuk Negara Sumatera Selatan pada tanggal 1 Februari 1949, di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, oleh Pemerintah Negara boneka Belanda tersebut didirikan sekolah-sekolah guru, yaitu *Normaalschool* di kota Palembang di bawah pimpinan Nuzuar Alamsyah (kemudian menjadi Direktur SGA Palembang), dan Sekolah Guru Negeri atau dikenal dengan OVVO (*Opleiding Voór Volks Onderwijzer*) yang lama pendidikannya masing-masing dua tahun.

Sekolah Guru Negeri atau OVVO itu didirikan di kota Palembang, Kayu Agung, Baturaja, Muara Enim, masing-masing sebuah, sedangkan di Pangkal Pinang (Bangka) dan Manggar (Belitung) masing-masing juga sebuah yang didirikan oleh Pemerintah di sana. Di samping itu di kota Palembang pernah juga didirikan kursus *Normaal* yang lama pendidikannya enam bulan, diikuti oleh bekas murid-murid SGM, mulo dan *Inheemsche MULO* dan lain-lainnya. Kursus *Normaal* ini telah menghasilkan guru sejumlah dua kali angkatan. Rombongan pertama sebagian besar meneruskan pelajarannya dengan mengikuti kursus SGA yang diadakan di kota Palembang. Sedangkan *Normaal School* yang baru berjalan dua tahun belum sempat menghasilkan guru, karena pada tahun 1950 setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan, dilebur menjadi SGB.

48) Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, halaman 632

49) *Ibid.*, loc. cit.

a. Sekolah Guru Atas (SGA)/SPG

Beberapa bulan sesudah dibukanya SMA Negeri (Mei 1950) di kota Palembang didirikan pula Sekolah Guru Atas (SGA), tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 1950, yang dipimpin oleh Nuzuar Alamsyah bekas pimpinan *Normaalschool*. Siswa yang mula-mula dari SGA ini tidak lebih dari 10 orang, yang berasal dari anak-anak SMA/B yang terkena *screening*, dan murid-murid tamatan SMP (SMO). Bahkan tahun ajaran berikutnya murid SGB yang telah mengikuti kuartal terakhir di kelas III dan mendapat prestasi baik/mendapat ranking, dapat diterima di kelas SGA. Lama pendidikan SGA 3 tahun, dan sebelum tahun ajaran 1956-1957 mereka yang tamat dari SGA semua mendapat tempat mengajar di SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Usaha itu bersifat sementara, karena Pemerintah menghendaki agar pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat atau SD, diserahkan kepada tenaga pengajar yang berijazah SGA (Sekolah Guru 6 tahun). Hal ini sudah dapat dilaksanakan sedikit demi sedikit sejak tahun ajaran 1956-1957. Diharapkan agar paling lambat pada tahun 1961, kekurangan akan tenaga di Sekolah Rakyat itu dapat diisi sepenuhnya, sehingga semua anak yang berumur antara 6-12 tahun mendapat kesempatan belajar di SR (SD). Apabila hal itu tercapai, maka selesailah sudah tugas yang harus dilaksanakan oleh SGB sebagai tempat mendidik calon-calon guru Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar. Dan untuk selanjutnya SGA-lah yang akan mendidiknya. Mulai tahun 1964 nama SGA diubah menjadi SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dan untuk selanjutnya SGA dibaca SPG.⁵⁰⁾

Pada mulanya SGA menempati gedung SMP Negeri VI sekarang, tetapi kemudian pindah ke gedung SPG yang sekarang terletak di Jalan Indrapura. Bagi siswa/siswa SGA Negeri ini disediakan asrama putra/putri, yang terletak dalam kompleks gedung itu, terutama diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari daerah pedalaman. Animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah guru tersebut mula-mula sedang-sedang saja.

Seperti telah diketahui pada tahun lima puluhan kepada pelajar-pelajar sekolah lanjutan kejuruan dan kursus-kursus yang sederajat, oleh Pemerintah diberi tunjangan "ikatan dinas" yang berlaku semenjak tahun 1950 sampai tahun 1958.⁵¹⁾ Tunjangan ikatan dinas ini dimaksudkan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya tenaga kejuruan dan dapat mengikat mereka supaya dalam waktu yang tertentu dapat menyumbangkan tenaga kepada Pemerintah. Demikian pula halnya dengan pelajar-pelajar SGA semenjak tahun 1950 diberi tunjangan ikatan dinas, untuk menarik perhatian/minat masyarakat terhadap sekolah guru, dengan penghargaan agar Pemerintah mendapat tenaga guru sebanyak mungkin guna mengatasi masalah kekurangan guru pada waktu itu. Dalam peraturan tentang pemberian ikatan dinas kepada

50) I. Djumhur dan Drs. H. Danasuparta, *op. cit.*, hal 211.

51) Wawancara dengan H.M. Pulungan (bekas Kepala SGA) 20-1-1981.

pelajar-pelajar SGA tersebut, tercantum pasal-pasal yang mengikat antara dua pihak. Pihak pertama adalah Kepala Sekolah yang bertindak atas nama Menteri PPK yang memberi tunjangan, dan pihak kedua adalah si pelajar yang menerima tunjangan. Pemberian ikatan dinas ini di samping untuk memperoleh tenaga guru sebanyak-banyaknya bagi Pemerintah, juga guna memberikan pertolongan dan kelonggaran bagi anak-anak yang kurang mampu tetapi kemauannya keras untuk dapat melanjutkan pelajarannya. Perlu diingat bahwa tunjangan ikatan dinas yang diterima oleh para pelajar ketika itu memang mencukupi kebutuhannya. Sebagai akibat dari adanya tunjangan ikatan dinas ini, animo masyarakat terhadap SGA meningkat. Tetapi pada tahun 1958 ketika tunjangan ikatan dinas untuk SGA dihapuskan, ternyata animo masyarakat menurun, lebih-lebih karena tamatan SGA harus mengajar di Sekolah Rakyat, animo masyarakat terhadap SGA semakin menurun.⁵²⁾

Kemungkinan besar menurunnya animo masyarakat terhadap Sekolah Guru Atas yang telah diubah menjadi SPG ada hubungan dengan tidak adanya pengangkatan pegawai baru sejak tahun 1968. Setelah adanya pengangkatan guru-guru baru melalui prosedur Inpres sejak tahun 1973, animo masyarakat daerah ini untuk memasuki SPG mulai meningkat. Namun pada akhir-akhir ini menurut pengamatan kami ada kecenderungan pada instansi-instansi yang mengelola masalah pengangkatan guru-guru Inpres tersebut mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, yang akibatnya kurang menguntungkan jika ditinjau dari segi paedagogis. Hal tersebut dapat kita hubungkan apa yang pernah dilontarkan oleh Presiden Soeharto mengenai Komersialisasi Jabatan.

Untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di daerah-daerah wilayah Propinsi Sumatera Selatan, maka dibukalah SGA di Lahat pada tanggal 1 September tahun 1959, di Pangkal Pinang pada tanggal 1 Agustus 1964. Sesudah itu tidak ada lagi penambahan SPG, sehingga sampai saat ini untuk Propinsi Sumatera Selatan hanya terdapat empat buah SPG Negeri.⁵³⁾ Perlu diketahui bahwa SPG yang memiliki asrama hanyalah SPG Negeri di Palembang dan SPG Negeri di Lahat. Asrama SPG Negeri di kota Palembang dapat menampung ± 100 orang murid, terutama yang dari daerah dan duduk di kelas III diberi prioritas.

Satu hal yang menarik perhatian kami ialah perbandingan jumlah antara murid laki-laki dan murid perempuan di SGA/SPG, yang pada akhir-akhir ini sangat menyolok. Sejak sekolah ini didirikan sampai kira-kira tahun 1960, jumlah siswa laki-laki lebih banyak. Tetapi pada tahun enam puluhan perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan *fifty-fifty*, sedangkan di atas tahun enam puluhan sampai sekarang ini, perbandingan jumlah murid laki-laki

52) Wawancara dengan H.M. Pulungan.

53) Wawancara dengan M. Hatta Somi. Kep. Bidang Pendidikan Dasar dan Guru, tanggal 19 Januari 1981.

dan perempuan, yaitu 1 : 10. Nampaknya anak laki-laki enggan memasuki SPG, dan sekolah guru ini lebih banyak menarik perhatian/minat perempuan. Mengapa SPG lebih banyak dimasuki atau didominasi oleh anak-anak/murid perempuan. Menurut H.M. Pulungan bekas Direktur SPG Negeri Palembang, bahwa hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor tradisi masyarakat daerah ini yang masih berpegang pada anggapan, bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi yang memakan waktu lama, supaya jangan sampai menjadi gadis tua.
2. Faktor biaya/ekonomis: SPG yang lama pendidikannya hanya tiga tahun tidak akan memakan biaya sebanyak yang harus dikeluarkan jika masuk ke sekolah lanjutan atas umum, yang setelah tamat seyogyanya melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dengan memasuki SPG, setelah tamat dapat diangkat menjadi guru.

Pimpinan SGA/SPG Negeri Palembang adalah sebagai berikut:

1. Nuzuar Alamsyah tahun 1950-1960.
2. Sujitno Hadiatmodjo tahun 1960-1965.
3. H.M. Pulungan tahun 1965-1975.
4. Siti Rukmini Subronto tahun 1975-sekarang.⁵⁴⁾

TABEL IX
Keadaan SPG Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966-1980

TAHUN	JUMLAH		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	5	629	17
1967/1968	5	690	18
1968/1969	5	701	18
1969/1970	5	815	26
1970/1971	5	1061	28
1971/1972	5	1061	28
1972/1973	4	1054	31
1973/1974	4	1007	31
1974/1975	4	1118	34
1975/1976	4	1352	30
1976/1977	4	1494	38
1977/1978	4	1891	43
1978/1979	4	2065	124
1979/1980	4	2374	89

SUMBER: Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

54) Wawancara dengan H.M. Pulungan 19-1-1981

b. Sekolah Guru B (SG 4 tahun)/SGB Negeri

Bersamaan dengan dibukanya SGA Negeri di kota Palembang pada tanggal 1 Agustus 1950 didirikan pula Sekolah Guru B atau SGB Negeri (Sekolah Guru 4 tahun). Jumlah murid SGB Negeri ini angkatan pertama sebanyak 413 orang, yang umumnya berasal dari murid-murid OVVO dan *Normaal-school* yang telah dilebur dan dibolehkan duduk di kelas dua atau kelas tiga. Sedangkan murid kelas satu murid baru, berasal dari Sekolah Rakyat yang lulus dalam ujian masuk ke SLTP. Pada dasarnya pelajaran empat tahun itu sama dengan tiga tahun pelajaran umum (SMP), ditambah satu tahun pelajaran kejuruan (guru). Dari kelas III SGB kuartal terakhir dengan seleksi, murid-murid yang berprestasi baik dapat melanjutkan pelajaran ke SGA.

Pada mulanya SGB Negeri ini menempati gedung SPG Negeri yang sekarang, sedangkan SGA Negeri/SPG (sekarang) menempati gedung SMP Negeri VI sekarang. Tetapi direktur SGB Negeri dan SGA Negeri masih dirangkap oleh Nuzuar Alamsyah, baru pada tanggal 1 Desember 1950 diadakan pemisahan, sebagai direktur SGB Negeri ialah Soemardi A. Prawira, dan SGA Negeri tetap dibawah pimpinan Nuzuar Alamsyah. Dan mulai tanggal 1 Juli 1951 gedung SGB Negeri ditempati oleh SGA Negeri (SPG Negeri sekarang) di jalan Indrapura, dan SGB Negeri menempati gedung yang tadinya ditempati oleh SGA Negeri, yaitu gedung SMP Negeri VI.

Pada bulan Mei 1952 untuk SGB Negeri didirikan sebuah asrama putra dan dapat dipakai secara darurat sejak tanggal 1 Desember 1952. Sedangkan untuk murid SGB Negeri putri tetap tinggal di asrama di Jalan Indrapura di asrama SGA Negeri, karena jumlah siswa SGA Negeri sedikit, dan kedua gedung tersebut (SGB Negeri dan SGA Negeri) letaknya berdekatan. Kedua sekolah guru ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan, karena menurut sejarahnya pembina/pimpinannya dan juga guru-gurunya sama.

Pada tahun pertama dibuka SGB Negeri hanya mempunyai 6 orang guru yaitu: Nuzuar Alamsyah (pimpinan), Soemardi A. Prawira, Hasan Delais, Saleh, Junus Wadjidun, dan W.G. Lap (orang Belanda). Mereka ini harus mengajar pada 11 kelas, yaitu: 3 buah kelas I, 5 buah kelas II, 2 buah kelas III dan sebuah kelas IV. Pada akhir tahun ajaran 1950/1951 SGB Negeri ini untuk pertama kalinya menamatkan muridnya, dari 28 orang yang mengikuti ujian penghabisan 23 orang yang lulus yaitu sama dengan 81%.⁵⁵) Bagaimana perkembangan SGB Negeri di daerah Sumatera Selatan sejak berdiri (1950) sampai tahun 1953 dapat dilihat dari tabel yang kami susun.

55) Kementerian Penerangan RI. *op. cit.*, hal. 651

Seperti telah diuraikan di muka bahwa pada tahun limapuluhan kepada pelajar-pelajar sekolah lanjutan kejuruan dan kursus-kursus yang sederajat, oleh pemerintah diberi tunjangan ikatan dinas yang berlaku sejak tahun 1950. Hal sama berlaku pula bagi siswa/siswi SGB Negeri Palembang ini, dengan pengharapan agar Pemerintah memperoleh tenaga guru sebanyak mungkin untuk daerah ini, sehingga masalah kekurangan guru Sekolah Rakyat dapat diatasi.

Sesuai dengan Keputusan Kementerian P.P. dan K, bahwa sejak tanggal 1 Juli 1953 semua K.P.K.P.K.B. (Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar) dijadikan SGB, maka jumlah SGB Negeri juga ditambah untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan, yaitu menjadi empat buah. Selain di kota Palembang, berdasarkan Keputusan tersebut di atas didirikanlah SGB Negeri di Manggar (Belitung), di Curup (Bengkulu) dan di Tanjung Karang (Lampung), masing-masing sebuah.⁵⁶⁾

Setelah tugas yang harus dilaksanakan oleh SGB Negeri sebagai tempat mendidik calon-calon guru Sekolah Rakyat atau SD oleh Pemerintah dianggap telah selesai, maka tugas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada SGA/SPG Negeri, dan semua SGB Negeri diintegrasikan ke SGA Negeri sejak tahun 1961.⁵⁷⁾ Demikian juga halnya dengan SGB Negeri di daerah Sumatera Selatan, maka tamatlah riwayat SGB Negeri di daerah ini.

TABEL X
Perkembangan SGB Negeri di Kota Palembang
Tahun 1950-1953

Tahun	Jumlah Murid	Kelas				Jumlah		
		I	II	III	IV	Guru	Peserta Ujian	Lulus
1950/1951	413	3	5	2	1	6	28	23-81%
1951/1952	406	3	4	3	3	19	58	42-72%
1952/1953	396	3	3	4	3	15	70	50-71%

Sumber: Kementerian Penerangan RI, Propinsi Sumatera Selatan.

c. K.P.K.P.K.B. di Sumatera Selatan

Sesuai dengan politik Pemerintah RI dalam rangka "Pemberantasan Buta Huruf" di seluruh Indonesia, dan mengingat kurangnya tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat, maka Pemerintah RI cq Kementerian P.P. dan K menganggap perlu mengadakan pendidikan guru yang lebih singkat. Dalam

56) *Ibid.*, *loc. cit.*

57) I. Djumhur dan Drs. H. Danasuparta. *op. cit.*, hal. 211

hubungan ini mulai tanggal 1 Agustus 1950 Pemerintah RI cq Kementerian P.P. dan K menyelenggarakan satu jenis pendidikan guru secara istimewa, semacam *crash-programe*, yang dinamakan "Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar" (KPKPKB). Tujuannya yang terutama ialah mendidik calon-calon guru yang cukup banyak dalam waktu 10 tahun mulai tahun 1950-1960, sehingga pada tahun 1960 Pemerintah dapat melaksanakan "Undang-Undang Kewajiban Belajar" di seluruh Indonesia.⁵⁸⁾

Sehubungan dengan politik Pemerintah itulah di daerah Propinsi Sumatera Selatan didirikan KPKPKB, pada umumnya di tiap Kewedanan/Marga, di mana terdapat Sekolah Rakyat 6 tahun. Di wilayah Propinsi Sumatera Selatan pada akhir tahun ajaran 1951/1952 tercatat 103 buah KPKPKB.⁵⁹⁾

Kursus ini ditempatkan pada Sekolah Rakyat 6 tahun, yang mempunyai paling sedikit tiga orang guru yang berijazah *Normaalschool* dan *Kweek-school*, dan programnya terdiri dari:

1. Pendidikan secara lisan selama dua tahun, dan
2. Pendidikan secara tertulis selama dua tahun dengan penjelasan lisan tiap triwulan selama dua minggu.

Pendidikan untuk dua tahun pertama diserahkan kepada guru-guru Sekolah Rakyat yang berijazah *Normaalschool/Kweekschool* yang terpilih, dan untuk dua tahun berikutnya diserahkan kepada guru-guru Sekolah Lanjutan diakhiri dengan ujian Persamaan SGB. Jadi pelaksanaan Kursus ini diselingi antara belajar dan mengajar selama empat tahun.

Syarat untuk masuk KPKPKB ini ialah ijazah Sekolah Rakyat 6 tahun dan lulus dalam ujian ke SLTP, uang sekolah tidak dipungut dan semua pengikut diharuskan menanda-tangani perjanjian ikatan dinas. Sesudah mengikuti pendidikan selama dua tahun yang pertama, para pengikut/siswa diuji, yang lulus diangkat sebagai calon guru pada Kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KPKB) atau lebih dikenal nama "Kursus Pemberantasan Buta Huruf" di daerah ini. Pada calon guru tersebut di samping memberikan pelajaran pada KPKB, diharuskan pula meneruskan pelajarannya selama dua tahun lagi, sehingga mereka dapat menempuh ujian Persamaan SGB.

Ternyata dalam pelaksanaan KPKPKB ini banyak mendatangkan kesulitan-kesulitan, baik dari pengikut-pengikut kursus maupun dari para guru KPKPKB itu sendiri. Menurut pendapat para guru KPKPKB, bahwa pada umumnya tingkat pengetahuan murid/pengikut yang telah duduk di kelas III pada angkatan pertama, adalah sama dengan tingkat pengetahuan murid SMP kelas I, bahkan beberapa mata pelajaran lebih rendah. Sedangkan para pengikut mengeluh, bahwa sekolah tempat bekerja mereka kebanyakan dipimpin oleh guru yang berijazah CVO dan yang sederajat, yang pengetahuannya

58) *Ibid.*, halaman 216.

59) Kementerian Penerangan Ri. *op. cit.*, hal. 619

pada umumnya tidak cukup untuk menerangkan hal-hal yang sulit kepada murid-murid A III (kelas III). Oleh karena itu dari pihak pengikut/murid sendiri memajukan usul sebagai berikut: "agar dapat belajar terus, jangan lagi mengajar seperti sekarang, dan kalau itu tidak dapat dipenuhi agar mereka diangkat saja menjadi guru yang disamakan dengan CVO (guru dua tahun) sesuai dengan perjanjian kepada mereka."⁶⁰)

Jadi singkatnya, baik di pihak guru lebih-lebih di pihak murid tidak merasakan hasil yang diharapkan dari diadakannya KPKPKB tersebut. Keadaan yang demikian itu menyebabkan kursus tersebut mendapat perhatian dari masyarakat, terutama masyarakat guru (PGRI), maka pada permulaan tahun ajaran 1953/1954 atas usul PGRI, KPKPKB dinyatakan sebagai SGB. Seperti telah disebutkan diatas, bahwa dengan diintegrasikannya KPKPKB tersebut ke SGB, maka jumlah SGB di daerah ini bertambah.

d. Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP)

Untuk mengisi kebutuhan tenaga guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang dirasakan masih sangat kurang, maka oleh Pemerintah RI cq Kementerian P.P dan K pada tahun 1953 dibukalah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan itu di kota Palembang pada tahun ajaran 1954/1955 dibuka PGSLP, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada pimpinan SGA Negeri, Nuzuar Alamsyah, oleh karena itu kegiatan belajarnya diadakan/dilakukan di SGA Negeri Palembang dan guru-gurunya sebagian besar terdiri dari guru-guru SGA Negeri ditambah dengan guru-guru SLTA yang terdapat di kota Palembang disesuaikan dengan jurusannya.

Maksud/tujuan dibukanya PGSLP di daerah Sumatera Selatan ini, di samping untuk mengisi kebutuhan tenaga guru, terutama untuk meningkatkan dan menstabilkan kedudukan guru-guru SMP Negeri yang berijazah SGA yang sebenarnya diprogramkan untuk mengajar di Sekolah Rakyat (SD). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya PGSLP di daerah ini, mula-mula diprioritaskan bagi guru-guru SMP Negeri di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tugas belajar. Sejak tahun 1954/1955 itu guru-guru SMP Negeri di daerah-daerah berebutan mohon tugas belajar ke kota Palembang, sehingga dalam prakteknya disamping menguntungkan bagi guru-guru itu sendiri, sebaliknya menimbulkan hal-hal yang negatif bagi daerah-daerah itu sendiri, karena dengan adanya kesempatan tugas belajar bagi guru-guru SMP Negeri, SMP Negeri di daerah-daerah terjadi kevakuman.

Menurut H.M. Pulungan bekas direktur SGA Negeri/SPG Negeri yang merangkap sebagai pimpinan PGSLP, bahwa lama pendidikan PGSLP ini

60) *Ibid.*, halaman 621-622

mula-mula selama 20 bulan yang berlaku sampai tahun 1968. Kemudian sejak tahun 1968 sampai 1976 lama pendidikannya menjadi satu tahun. Dikatakannya pula bahwa mula-mula siswa-siswanya terdiri dari guru-guru SMP Negeri tugas belajar yang berijazah SGA Negeri, dan baru sejak tahun 1967 dibuka bagi siswa bebas, maksudnya pemuda-pemuda yang berijazah SLTA yang belum bekerja (dari SMA Negeri, SMEA Negeri, STM Negeri, SGKP Negeri dan SPG). Bahkan pernah pula diberi kesempatan kepada guru-guru yang berijazah PGAA Negeri, tetapi hal itu hanya berjalan dalam dua kali angkatan, karena hal ini mendapat protes besar dari pihak Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan. Gara-gara kasus tersebut H.M. Pulungan dipanggil Pemerintah Pusat (Kem. PPK), karena Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan melaporkannya ke Pusat, bahwa guru-guru tamatan PGAA Negeri tersebut yang belajar di PGSLP, setelah mereka tamat keluar dari Departemen Agama dan masuk ke lingkungan Departemen P dan K.

Oleh karena teguran dari Pemerintah Pusat tersebut sesudah tahun 1968 guru-guru yang berijazah PGAA Negeri tidak lagi diterima di PGSLP. Tetapi kebijaksanaan pimpinan PGSLP yang tidak memberi kesempatan lagi kepada guru-guru yang berijazah PGAA Negeri mendapat protes pula dari masyarakat daerah ini, namun demikian guru-guru yang berijazah PGAA Negeri tetap tidak diterima di PGSLP.

Dari uraian di atas, jelas bahwa animo masyarakat pada umumnya, guru-guru khusus sangat besar terhadap PGSLP, hal mana dapat dihubungkan dengan banyak jurusan yang dibuka dan jumlah siswa pada tiap-tiap jurusan, yang rata-rata sebanyak 40 orang, kecuali jurusan Menggambar.

PGSLP di kota Palembang terdiri dari tujuh Jurusan, yaitu:

1. Jurusan Bahasa Indonesia dengan kode A.1
2. Jurusan Bahasa Inggris dengan kode A.2
3. Jurusan Ilmu Pasti dengan kode B.1
4. Jurusan Sejarah dengan kode C.1
5. Jurusan Ilmu Bumi dengan kode C.2
6. Jurusan Ilmu Hayat dengan kode H.
7. Jurusan Menggambar dengan kode M.

Dari jurusan-jurusan yang dibuka itu menurut H.M. Pulungan, yang paling laris ialah jurusan C.1 dan C.2, karena keduanya memiliki kelas paralel, terutama sejarah yang paling sering terdiri dari dua kelas paralel. Jurusan yang paling kering ialah jurusan Menggambar. Seperti telah disinggung di atas, sebagai tenaga pengajar PGSLP di samping tenaga pengajar SGA Negeri juga diambil dari guru-guru SMA Negeri, SMEA Negeri, STM Negeri, dan kemudian dosen-dosen Fkg. Unsri.

Untuk mengatasi kekosongan guru-guru SMP Negeri di daerah-daerah sebagai akibat adanya tugas belajar ke PGSLP, maka diambil kebijaksanaan oleh pimpinan PGSLP/Perwakilan P.P. dan K Sumatera Selatan untuk mem-

buka PGSLP filial di daerah-daerah, dengan demikian akan mengurangi guru yang pindah ke kota Palembang. Sehubungan dengan kebijaksanaan itu, maka di Pangkal Pinang (Bangka) pada tahun 1967 dibuka PGSLP filial Sejarah (C.1) dan Ilmu Pasti (B.1) untuk daerah Bangka/Belitung. Kepala PGSLP di Pangkal Pinang itu ialah Drs. Mashud Sulaiman, sedangkan guru-guru dari guru-guru SLTA yang ada di sana. PGSLP di Pangkal Pinang berjalan sampai empat angkatan dan sejak tahun 1971 ditutup.⁶¹⁾

Selain PGSLP filial di Pangkal Pinang, pada tahun 1967 itu juga dibuka PGSLP filial Sejarah di Kayu Agung dan di Pagar Alam (Kabupaten Lahat). Baik PGSLP filial di Kayu Agung maupun PGSLP filial di Pagar Alam berlangsung sampai tiga angkatan (1967 s/d 1969) dan pada tahun 1970 keduanya ditutup. Adapun guru-guru PGSLP filial di daerah-daerah tersebut diambil dari guru-guru SLTA yang ada di daerahnya masing-masing. Pimpinan PGSLP filial di Pagar Alam ialah Umar B.A., sedangkan pimpinan PGSLP filial di Kayu Agung ialah M. Ali Hanafiah, Direktur SMEA Kayu Agung dan pembinaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kayu Agung OKI. Siswa rata-rata dari PGSLP di ketiga daerah tersebut di atas tiap-tiap angkatan sebanyak \pm 40 orang.

Menurut H.M. Pulungan bahwa PGSLP Palembang sejak berdiri sampai tahun 1976, rata-rata tiap tahun menamatkan \pm 200 orang siswa, yang berarti PGSLP di Palembang telah memberikan andil yang sangat besar dalam menghasilkan guru-guru SLTP untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam sejarah pendidikan di daerah ini setelah Kemerdekaan. Tetapi untuk menghilangkan dualisme dalam LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), maka PGSLP mulai tahun 1976 diintegrasikan ke dalam *crash program*, namun di daerah-daerah yang masih membutuhkan/menganggap perlu PGSLP tetap dilanjutkan, misalnya saja DKI Jaya.

Untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) PGSLP sejak tahun 1976 telah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya baru pada tahun 1978 muncul *Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama yang Disempurnakan* (PGSLP yang Disempurnakan). Dalam pelaksanaan PGSLP yang Disempurnakan ini terdapat kerjasama antara Kanwil Departemen P dan K dengan Unsri/Fkg. PGSLP yang Disempurnakan untuk daerah ini hanya menghasilkan satu angkatan.

Seperti telah diketahui bahwa pimpinan PGSLP di Palembang dirangkap oleh Direktur SGA Negeri/SPG Negeri/SPG Negeri di Palembang, yang secara berturut-turut ialah sebagai berikut:

1. Nuzuar Alamsyah (1954-1960)
2. Soejitno Hadiatmodjo (1960-1965)
3. H.M. Pulungan (1965-1975)
4. Siti Rukmini Subronto (1975-1976).

61) Wawancara dengan H.M. Pulungan, 20-1-1981

Bagaimana perkembangan jumlah murid PGSLP dari tahun 1966 sampai dengan 1976 akan kami laporkan di sini berdasarkan data yang kami kutip dari Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan seperti di bawah ini:

Tahun 1966 jumlah siswa	91 orang
Tahun 1967 jumlah siswa	157 orang
Tahun 1968 jumlah siswa	208 orang
Tahun 1969 jumlah siswa	623 orang
Tahun 1970 jumlah siswa	361 orang
Tahun 1971 jumlah siswa	365 orang
Tahun 1972 jumlah siswa	207 orang
Tahun 1973 jumlah siswa	341 orang
Tahun 1974 jumlah siswa	118 orang
Tahun 1975 jumlah siswa	339 orang
Tahun 1976 jumlah siswa	344 orang

e. PGSLP yang Disempurnakan dan Program D₁ dan D₂

Seperti telah disinggung di atas untuk menghilangkan dualisme dalam LPTK, maka mulai tahun 1976 PGSLP (Gaya Lama) mulai diintegrasikan ke dalam *crash program*. Dan sejak tahun 1976 itu muncullah PGSLP yang Disempurnakan yang merupakan dari Sub Proyek PGSLP (*crash program*).⁶²⁾ Tetapi untuk daerah ini PGSLP yang Disempurnakan itu baru dilaksanakan/dibuka pada tahun 1978 yang untuk daerah lain barangkali sudah merupakan tahun/angkatan ke-3. Dalam pengelolaan PGSLP yang Disempurnakan ini terdapat kerjasama antara Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan dengan Unsri/Fkg, yaitu dalam penerimaan/testing masuk, penempatan/pengangkatan, administrasi/ikatan dinas, semua dilaksanakan bersama-sama.

Menurut Drs. Zainal Abidin Gaffar, pimpinan PGSLP yang Disempurnakan, bahwa animo masyarakat cukup besar terhadap Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama yang Disempurnakan ini. Mungkin hal ini disebabkan adanya pengangkatan langsung dan adanya ikatan dinas, karena pada dewasa ini di daerah Sumatera Selatan untuk diangkat menjadi pegawai negeri khususnya guru sangat sulit. Lamanya pendidikan PGSLP yang Disempurnakan ini satu tahun, dan Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) hanya menghasilkan satu angkatan saja (1978-1979).

Bidang Studi yang dilaksanaknkan di kota Palembang, yaitu:

1. Bidang Studi Bahasa Indonesia
2. Bidang Studi Bahasa Inggris
3. Bidang Studi Matematika
4. Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam

62) Wawancara dengan Drs. Zainal Abidin Gaffar, 22-1-1981.

5. Bidang Studi Bimbingan dan Penyuluhan.

Sedangkan Bidang Studi Keterampilan Teknik dan Keterampilan Jasa dalam pelaksanaannya dititipkan di Semarang.

Pada tahun 1979 PGSLP yang Disempurnakan dihapuskan dan digantikan oleh Program D₁ (Diploma I) sebuah proyek dari P2 DK (Proyek Pendidikan Diploma Kependidikan), yang pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada Unsri/Fkg. Adapun bidang studi Program D₁ yang dibuka di daerah ini ialah:

1. Bidang Studi Bahasa Indonesia
2. Bidang Studi Bahasa Inggris
3. Bidang Studi Matematika
4. Bidang Studi Keterampilan Teknik
5. Bidang Studi Keterampilan Jasa.⁶³⁾

Pimpinan Program D₁ ini ialah Drs. Zainal Abidin Gaffar (dosen Fkg).

Pada tahun 1980 P2DK diubah menjadi P3DK (Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan), maka di samping Program D₁ juga diadakan Program D₂. Jika Program D₁ lama pendidikannya selama satu tahun, tetapi D₂ lama pendidikannya dua tahun dan keduanya diprogramkan untuk tenaga pengajar di SLTP. Baik PGSLP yang disempurnakan, Program D₁ maupun Program D₂, ketiga-tiga mendapat tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah, hanya bedanya pada Program D₂ baru diberikan kepada siswa pada tahun kedua (kelas 2). Direktur Program D₁ dan D₂ (P3DK) ini ialah Drs. Mahyuddin KR (dosen Fkg) dan bidang studi yang dibuka di Palembang ialah:

Program D₁ (P3DK):

1. Bahasa Indonesia
2. Matematika
3. Ilmu Pengetahuan Alam

Program D₂ (P3DK):

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Matematika dan (4) IPA.

f. Sekolah Guru Olah Raga Palembang (SGO)

Oleh karena sangat dirasakan kurangnya tenaga guru Olah Raga, dulu disebut pendidikan jasmani, untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1958 di kota Palembang didirikan Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), yang disponsori oleh Soetarto. Sebagai Kepala Sekolah SGPD yang pertama ialah Soetarto, tetapi hanya selama setahun, oleh karena itu jabatan Kepala Sekolah diserahkan kepada Sonny Andarsoemarto (Drs. Sonny Andarsoemarto). Drs. Sonny Andarsoemarto menjadi Direktur Sekolah Pendidikan Djasmani ini sampai berubah menjadi SMOA (Sekolah Menengah Olah Raga Atas dari tahun 1960 s/d tahun 1969).⁶⁴⁾

63) Wawancara dengan Drs. Zainal Abidin Gaffar, 22-1-1981.

64) Wawancara dengan Soetarmo BA. 30.12-1980.

Tujuan dibukanya SGPD ini menurut Soetarmo BA, seorang guru pada sekolah tersebut, ialah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pendidikan jasmani bagi SLTP. Tetapi karena kondisi pendidikan kita pada dewasa ini, maka mereka yang tamat dari SGPD ini banyak yang diangkat menjadi guru SLTA. Adapun syarat untuk masuk ke sekolah ini ialah ijazah SLTP Negeri, tetapi pada umumnya di daerah ini yang masuk ke SGPD ialah mereka yang berijazah SGB yang mendapat prestasi baik. Animo masyarakat daerah ini terhadap SGPD mula-mula cukup baik, dan lama pendidikannya empat tahun. Sedangkan gedungnya mula-mula di gedung SMP Negeri IV di Jalan Duku Palembang. SGPD ini dibawah naungan Direktorat Jenderal Olah Raga (Dit. JORA).

Tahun 1963 merupakan masa transisi, karena pada waktu itu disamping SGPD dibuka pula SMOA (Sekolah Menengah Olah Raga Atas) yang lama pendidikannya tiga tahun, yang bertujuan untuk menggantikan SGPD. Sementara SMOA telah berdiri, siswa-siswa SGPD yang duduk di kelas II, kelas III dan kelas IV ditamatkan, sehingga akhirnya SGPD tidak mempunyai murid lagi dan sepenuhnya digantikan oleh SMOA (1963-1978/1979).

Tujuan SMOA ialah:

1. Dipersiapkan untuk melanjutkan ke STO
2. Kader prestasi (Oleharagawan)
3. Pembina Dasar/Guru

Pada tahun 1966 SMOA pindah dari Jalan Duku ke gedung bekas milik Cina di Jalan Sudirman (Km 3½) Palembang, yaitu di belakang SMA Negeri III. Sebagai Direktur SMOA telah digantikan oleh Drs. Poerwadi sejak tahun 1970-1975, dan pada tahun 1975 Drs. Poerwadi digantikan oleh Drs. Matdjari Murah sampai sekarang ini.

Pada tahun 1977 di samping SMOA dibuka pula Sekolah Guru Olah Raga (SGO) yang bertujuan untuk menggantikan SMOA. Seperti halnya siswa-siswi SGPD, murid-murid SMOA yang duduk di kelas tertinggi juga diselesaikan sampai habis, dan baru pada tahun 1978/1979 semua murid SMOA telah tamat studinya. Adapun tujuan dibukanya SGO, yaitu seperti SGPD, untuk dipersiapkan menjadi guru olah-raga, hanya bedanya jika SGPD sebagai guru SLTP, SGO untuk guru SD. Tetapi bagi mereka yang mendapat prestasi baik dapat melanjutkan ke FKIK di Jakarta atau tempat lain.⁶⁵⁾

Meskipun SGO ini hanya memiliki lima buah lokal kelas, tetapi karena sekolah ini sebagian pelajarannya dilakukan di lapangan, maka ia dapat memiliki tujuh buah kelas yang semua belajar pada pagi hari, yang memakai lokal secara bergantian. Jumlah siswa SGO pada tahun 1980 ini sebanyak 245 orang yang terdiri dari tujuh kelas. Perbandingan murid laki-laki dan perempuan ialah, sebagai 4 : 1. Syarat untuk masuk ke SGO ini ialah mereka yang berijazah SMP Negeri dan Tsanawiyah Negeri. Sekolah Guru Olah Raga ini

65) Wawancara dengan Soetarmo BA, 30-12-1980.

sekarang dibawah Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Tenaga pengajar SGO ini ada sebanyak 14 orang guru tetap dan empat orang guru tidak tetap. Dari 14 orang tetap tersebut tujuh orang di antaranya dari STO, sedangkan yang tujuh orang lainnya memiliki ijazah Fkg dan FIP Universitas Sriwijaya Palembang. Direktur sekolah ini, Drs. Matdjari Murah berasal dari STO, yang Soetarmo BA dari FIP.

Unsri yang sejak tahun-tahun permulaan SGPD didirikan telah mengajar di sekolah ini. Untuk mengetahui perincian jumlah kelas dan jumlah murid dari SGO di kota Palembang, yang merupakan Sekolah Guru Olah-Raga di Propinsi Sumatera Selatan, akan kami laporkan di sini yang kami kutip dari papan pada sekolah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kelas I A jumlah murid sebanyak 40 orang
2. Kelas I B jumlah murid sebanyak 32 orang
3. Kelas I C jumlah murid sebanyak 39 orang
4. Kelas II A jumlah murid sebanyak 36 orang
5. Kelas II B jumlah murid sebanyak 37 orang
6. Kelas III A jumlah murid sebanyak 31 orang
7. Kelas III B jumlah murid sebanyak 30 orang

g. Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP)/SMKK

Pada tahun 1957 di kota Palembang dengan disponsori oleh "Yayasan Batanghari Sembilan" yang diketuai oleh R.A.H.Rani telah didirikan sebuah Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) yang berstatus swasta. Sebagai Kepala Sekolah SGKP swasta ini diangkat guru-guru SKP Negeri Palembang, yaitu: Ny. Sumihar yang kemudian digantikan oleh Ny. Marwiah yang masing-masing menjabat sebagai direktris SGKP swasta ini selama satu tahun, yaitu sampai tahun 1959.⁶⁶⁾

Pada tahun 1959 atas permohonan dari pihak "Yayasan Batanghari Sembilan" sendiri, SGKP tersebut dinegerikan dan sebagai Direktrisnya diangkat Tati Soedarti yang menjabat sebagai pimpinan SGKP Negeri tersebut juga selama setahun. Pada tahun 1960 Tati Soedarti digantikan oleh Gan Tjiap Nio yang menjabat sebagai Direktris sekolah tersebut untuk kurun waktu yang cukup lama. Baru pada tahun 1975 ketika Ibu Gan Tjiap Nio mencapai masa pensiun (MPP), ia digantikan oleh Ny. Kartini Erwan yang menjabat sebagai pimpinan sekolah ini sampai saat sekarang ini, yang pada kenyataannya nama SGKP telah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi SMKK (Sekolah Menengah Ketrampilan Keluarga).⁶⁷⁾

66). Wawancara dengan Ny. Nurtjahya, Karyawan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan Bidang PMK, tanggal 12-12-1960.

67). Wawancara dengan Ny. Nurtjahya, 12-12-1980.

Dalam perjalanan sejarahnya SGKP Negeri di Palembang ini telah banyak mengalami perubahan. Ketika masih bernama Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) sampai tahun 1968, lama pendidikannya empat tahun, sedangkan tujuannya ialah untuk mempersiapkan tenaga pengajar bagi Sekolah Kepandaian Putri (SKP). Sekolah Guru Kepandaian Putri di Palembang terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Bagian A/Bagian Masak/Rumah Tangga, dan
2. Bagian B/Bagian Menjahit.

Pada tahun 1968 Sekolah Guru Kepandaian Putri tersebut mengalami perubahan, namanya diganti menjadi Sekolah Ketrampilan Keluarga Atas (SKKA). Sehubungan dengan perubahan tersebut, SKP pun berubah menjadi SKKP (Sekolah Ketrampilan Keluarga Pertama). Lama pendidikannya juga mengalami perubahan, yaitu tidak lagi empat tahun tetapi berubah menjadi tiga tahun. Adapun tujuan dari SKKA ini, yaitu :

- 1) Di satu pihak masih dipersiapkan untuk menjadi guru SKKP.
- 2) Di lain pihak dipersiapkan untuk ketrampilan, yaitu lulusannya di samping menjadi guru diharapkan juga untuk dapat berwiraswasta atau bekerja pada rumah-rumah Sakit atau Hotel-hotel. (bagian dapur/gizi).
- 3) Oleh karena pada struktur programnya masih terdapat program akademis, maka bagi tamatan SKKA yang memperoleh prestasi baik/mendapat ranking pada ujian akhir, dibolehkan melanjutkan pelajaran ke pendidikan yang lebih tinggi yang relevan, misalnya ke Akademi Ketrampilan Wanita (AKWA) atau ke IKIP Jurusan Home Economics dan lain-lain.

SKKA ini seperti juga SGKP juga mempunyai dua bagian/jurusan.

Pada tahun 1977 Sekolah Ketrampilan Keluarga Atas (SKKA) berubah pula menjadi Sekolah Menengah Ketrampilan Keluarga (SMKK), lama pendidikannya tetap tiga tahun. SMKK ini betul-betul dikhususkan untuk ketrampilan, yaitu murid-muridnya dipersiapkan untuk berwiraswasta. Lulusan SMKK tidak disalurkan untuk menjadi guru, hal mana sangat erat hubungannya dengan diintegrasikannya/dihapuskannya SKKP secara berangsur-angsur sejak tahun 1975. Jika SKKA mempersiapkan siswanya untuk menjadi guru, berwiraswasta memungkinkan untuk melanjutkan studi, tetapi SMKK hanya mempersiapkan wanita yang trampil dalam bidangnya. SMKK ini terdiri dari tiga Bagian/Jurusan, yaitu :

1. Bagian/jurusan Boga atau Makanan
2. Bagian/jurusan Busana atau Pakaian
3. Bagian/jurusan Graha atau Rumah Tangga.⁶⁸⁾

Rupa-rupanya animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah-sekolah kejuruan pada umumnya, SMKK pada khususnya boleh dikatakan agak kurang jika dibandingkan dengan animo masyarakat terhadap sekolah menengah

68). Diambil dari Laporan Bidang PMK Kanwil Dep. P dan K SumSel.

umum seperti SMP dan SMA. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini mereka yang bersal dari sekolah kejuruan SMKK, STM, SPG, PGA dan lain-lain) sangat sulit untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu menurut pengamatan kami daya serap SMKK khususnya sangat minim, sedangkan fasilitas yang diberikan nampaknya cukup besar, gedungnya besar bertingkat dan baru, sarana lainnya nampak mencukupi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Untuk Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1980/1981 ini hanya terdapat tiga buah SMKK Negeri yaitu :

1. SMKK Negeri di Palembang yang tadinya bernama SKKA, dengan SK Menteri No. 0290/C/1976 tertanggal 9-12-1976.
2. SMKK Negeri di Baturaja, yang merupakan peningkatan dari SKKP menjadi SMKK berdasarkan SK Menteri No. 0191/0/1979 tertanggal 3-9-1979.
3. SMKK Negeri di Lubuk Linggau yang juga merupakan peningkatan dari SKKP menjadi SMKK pada tahun 1979 berdasarkan SK Menteri No. 0191/0/1979 tertanggal 3-9-1979.⁶⁹⁾

SMKK Negeri di kota Palembang memiliki bagian/jurusan yang paling lengkap, yakni: Boga, Busana dan Rumah Tangga (Graha), sedangkan SMKK Negeri di Baturaja hanya memiliki bagian/jurusan Boga (Makanan), dan SMKK Negeri di Lubuk Linggau memiliki dua buah bagian/jurusan, yakni Boga dan Busana (Pakaian). Lulusan dari SMKK Negeri ini sebagian ada yang berwiraswasta dan sebagian lagi bekerja pada hotel-hotel dan pada rumah-rumah Sakit di bagian gizi/dapur.⁷⁰⁾

69). Diambil dari laporan Bidang PMK Kanwil Dep. P dan K Sumael

70). Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni, 11-12-1980.

TABEL XI
Keadaan SKKA Negeri/SMKK Negeri di Sumatera Selatan
Tahun 1966-1678/1979

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1966	1	55	16
1967	1	131	18
1968	1	161	21
1969	1	244	29
1970	1	275	29
1971	1	283	11
1972	1	258	18
1973	1	316	20
1974	1	321	17
1975	1	376	15
1976	1	341	19
1977	1	304	21
1978/1979	1	259	31

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

h. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGA Negeri)

Pada tahun 1957 di kota Palembang dibuka sebuah sekolah Pendidikan Guru Agama Atas Negeri yang lama pendidikannya dua tahun dengan kepala sekolahnya yang pertama ialah Kyai Haji Gani Sindang. PGAA Negeri ini berlokasi di Balayudha menumpang di gedung Muhammadiyah Balayudha Km 4½ Palembang. Siswa-siswa PGAA Negeri ini mendapat tunjangan ikatan dinas dari Departemen Agama RI. Untuk Propinsi Sumatera Selatan yang meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi dan Palembang, PGAA Negeri hanya terdapat di kota Palembang. Sedangkan di Tanjung Karang sendiri terdapat sekolah Pendidikan Guru Pertama Negeri, yang lama pendidikannya empat tahun. Setelah di bawah pimpinan kepala sekolahnya yang ke-2, Kyai Azis Hadiwijaya (1959-1962) PGAA Negeri diubah menjadi PGA Negeri 6 tahun.

Pada tahun 1964 PGA Negeri 6 tahun pindah ke Lorok Pakjo atau Jalan Inspektur Marzuki, yaitu gedung milik sendiri, lengkap dengan asrama siswa-siswi serta perumahan guru/karyawannya. Dan pada tahun 1968 siswa-siswi PGA Negeri 6 tahun ini tidak lagi menerima tunjangan ikatan dinas, karena Pemerintah tidak mengangkat pegawai-pegawai baru pada waktu itu. Tetapi meskipun tidak ada ikatan dinas lagi PGA Negeri ini masih

dibanjiri oleh siswa-siswa, karena tugas PGA Negeri ini tidak hanya mencetak pegawai negeri saja tetapi juga manusia yang dibutuhkan masyarakat daerah

ini umumnya dan keluarga khususnya. Oleh sebab itu animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah PGA Negeri ini lebih besar jika dibandingkan dengan animo masyarakat terhadap SPG Negeri pada waktu itu. PGA Negeri dibanjiri oleh calon-calon siswa dari seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan.⁷¹⁾

Sejak tahun 1978 PGA Negeri 6 tahun di Palembang diubah menjadi PGA Negeri 3 tahun berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 48 tahun 1978 : Pasal 1 ayat 1 PGA Negeri untuk mengajar Agama pada Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Taman Kanak-kanak. Ayat 2 : Pendidikan di PGA Negeri berlangsung tiga tahun dengan menggunakan sistem kelas dan menerapkan sistem semester. Mereka yang diterima dari Tsanawiyah Negeri dan yang sederajat. Untuk Propinsi Sumatera Selatan terdapat tiga buah PGA Negeri, yaitu: di Palembang, di Lahat dan di Pangkal Pinang. Sejak tahun 1978 tidak ada lagi PGA Swasta di daerah ini.⁷²⁾

PGA negeri tiga tahun di Palembang mempunyai empat *Takhasus* (spesialisasi) :

- 1) Takhasus A, yaitu untuk guru Agama pada Sekolah Dasar.
- 2) Takhasus B₁, yaitu guru IPS/Bahasa Indonesia/Agama pada MIN/MAS.
- 3) Takhasus B₂, yaitu untuk guru Matematika/IPA dan MIN/MAS.
- 4) Takhasus C, yaitu untuk guru Agama pada Taman Kanak-kanak, tetapi bisa juga untuk guru Agama di Sekolah Dasar.

Mereka itu dispesialisasikan di kelas II, sedangkan kurikulum yang dipakai oleh PGA Negeri 3 tahun ini ialah Kurikulum 1978 dari Departemen Agama RI, yang terdiri dari 30% pelajaran Agama dan 70% pelajaran umum. Sedangkan PGA Negeri 6 tahun Kurikulum terdiri 60% pelajaran Agama dan 40% pelajaran umum.⁷³⁾

Akhir-akhir ini banyak di antara tamatan PGA Negeri daerah ini tidak meneruskan ke Institut Agama Islam Negeri tetapi ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di bawah naungan Departemen P dan K. Menurut perkiraan mereka yang menyimpang ke Perguruan Negeri/Swasta (Dep. P dan K) mencapai 70%. Menurut Drs. H.Murzal, Direktur PGA Negeri Palembang, hal ini disebabkan karena *policy* dari Departemen Agama RI sendiri yang tidak memberikan tempat yang pasti kepada mereka, baik yang dari PGA Negeri

71). Wawancara dengan Drs. H.Murzal H.M. Taher, Direktur PGA Negeri Palembang, tanggal 20-1-1981.

72). Wawancara dengan Drs. H.Murzal H.M. Taher, 20-1-1981

73). s.d.a.

maupun dari IAIN. Oleh karena itu mereka menyimpang dari induknya, justru Departemen P dan K lebih memberikan perhatian/memberikan wadah yang pasti.

TABEL XII
Keadaan PGA Negeri di Palembang 1967–1980

TAHUN	JUMLAH	
	MURID	GURU
1967	758	34
1968	754	39
1969	1086	47
1970	1143	52
1971	1065	53
1972	1157	52
1973	1074	52
1974	1160	55
1975	687	45
1976	562	44
1977	551	38
1978	615	40
1979	497	31
1980	501	38

SUMBER : PGA Negeri Palembang.

Tahun 1975 sampai tahun 1978 merupakan masa peralihan, oleh karena itu jumlah murid tahun 1975 sampai tahun 1978 yang dihitung hanya dari kelas IV, V dan VI saja, sedang kelas I, II, dan III sudah mulai dipisahkan menjadi Tsanawiyah Negeri yang masih berlokasi di gedung PGA. Negeri Palembang. Sedangkan pada tahun 1980/1981 PGA Negeri Palembang memiliki 14 kelas, yaitu yang terdiri dari :

Kelas I sebanyak 4 kelas

Kelas II sebanyak 4 kelas

Kelas III sebanyak 6 kelas

Jumlah murid rata-rata tiap-tiap kelas ialah 36 orang, dan perbandingan antara murid putra dan putri ialah 2 : 3. Sejak tahun 1979 semua siswa diharus-

kan tinggal di asrama PGA Negeri. Dan menurut peraturan dari Departemen Agama RI sejak tahun 1979, PGA Negeri Palembang hanya boleh menerima murid sebanyak 100 orang. Guru-guru PGA Negeri pada umumnya berasal dari Institut Agama Islam Negeri.

i. Kursus Persamaan SGB dan KGA/KPG Negeri

Pada tanggal 1 Desember 1951 di kota Palembang didirikan Kursus Persamaan SGB yang lama pendidikannya dua tahun. Adapun tujuan/maksud didirikannya Kursus Persamaan SGB tersebut ialah untuk meningkatkan pengetahuan serta menstabilkan/memantapkan kedudukan guru-guru Sekolah Rakyat/Sekolah Dasar yang belum memiliki ijazah SGB di Propinsi Sumatera Selatan. Pengikut dari pada Kursus Persamaan SGB di kota Palembang terdiri dari pada umumnya guru-guru Sekolah Rakyat yang berijazah OVVO/Leergang yang berasal dari seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaannya diserahkan kepada guru-guru SGB, oleh karena itu guru-guru serta tempat belajarnya menjadi satu dengan SGB. Animo masyarakat khususnya masyarakat guru cukup besar terhadap Kursus tersebut yang untuk pertama kalinya memiliki dua buah kelas, yaitu kelas pagi untuk guru SR yang mengajar pada sore hari dan kelas sore bagi guru SR yang mengajar waktu pagi. Oleh karena dibukanya Kursus Persamaan SGB tersebut banyak guru SR di daerah Uluang yang minta pindah ke kota Palembang dengan alasan untuk mengikuti Kursus, sebab jika mereka tamat akan mendapat penghargaan yang sama dengan mereka yang memiliki ijazah SGB 4 tahun.⁷⁴⁾

Menurut H.M. Pulungan meskipun SGB Negeri diintegrasikan ke dalam SGA Negeri, namun Kursus Persamaan SGB masih ada, karena di daerah ini masih dibutuhkan. Kursus Persamaan SGB ini tadinya memang dibawah oleh Kabin (Kantor Pembinaan) Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan, tetapi pada kira-kira tahun 1970 ditangani langsung oleh BPG Bandung yang rupa-rupanya dilaksanakan secara tertulis. Di daerah masih ada pengikutnya, tetapi karena ditangani oleh BPG Bandung di Kanwil tidak ada datanya.

Di samping Kursus Persamaan Lisan SGB tersebut di atas di kota Palembang pada tahun 1954 dibuka juga KGA (Lisan) yang pelaksanaannya diserahkan kepada SGA Negeri di Kota Palembang. Oleh karena itu guru-guru dan tempat belajarnya juga menjadi satu dengan SGA Negeri Palembang. Tujuan dibukanya KGA negeri ini ialah untuk meningkatkan dan memantapkan kedudukan guru-guru Sekolah Rakyat yang belum memiliki ijazah SGA Negeri, pada waktu itu umumnya yang berijazah SGB Negeri. Animo dari pada Kursus KGA ini pun cukup besar dari masyarakat daerah ini terutama tentunya masyarakat guru. Pengikutnya berasal dari seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang mendapat ijin belajar dari belajar ke kota Palembang dan

74). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, halaman 651.

harus mengajar di Sekolah Rakyat di kota Palembang. Dalam perkembangannya kemudian dengan diubahnya SGA Negeri menjadi SPG Negeri KGA Negeri pun berubah namanya menjadi KPG Negeri. Mula-mula pengikut dari KGA Negeri/KPG Negeri ini adalah mereka yang memiliki ijazah SGB Negeri atau Kursus Persamaan SGB, namun dalam perkembangan selanjutnya terutama dengan adanya peraturan Pemerintah bahwa mereka yang menjadi guru harus memiliki ijazah guru. Peraturan Pemerintah tersebut untuk daerah ini membawa akibat banyak guru-guru yang tidak memiliki ijazah guru dan hanya mempunyai ijazah non guru (SMA Negeri, SMEA Negeri, STM Negeri dan lain-lain yang sederajat) harus berusaha mencari ijazah/memiliki ijazah guru. Oleh karena itu kira-kira sejak tahun tujuh puluhan ke atas KPG Negeri tidak hanya menarik perhatian guru-guru yang berijazah SGB/Persamaan SGB tetapi juga mereka yang telah menjadi guru tetapi hanya memiliki ijazah non guru. Untuk memberi kesempatan kepada mereka yang belum memiliki ijazah guru tetapi telah bekerja sebagai guru, maka Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membuka 3 paket, yaitu :

1. Paket A : diperuntukkan bagi guru-guru yang hanya berijazah SLTP non guru. Lama pendidikannya tiga tahun. Tetapi untuk Paket A ini di Palembang belum berani membuka.
2. Paket B : diperuntukkan bagi guru-guru yang berijazah SGB dan Persamaan SGB, yang lama pendidikannya ialah dua tahun. Untuk Palembang baru Paket B inilah yang dibuka untuk sementara ini.
3. Paket C : diperuntukkan bagi guru-guru yang berijazah SLTA non guru, lamanya hanya satu tahun. Untuk Paket C ini pun Palembang belum membuka. Dan diperkirakan pengikutnya tidak banyak jika dibuka, karena mereka lebih senang memilih Program Diploma.

Oleh karena di daerah ini (Palembang) belum dibuka ketiga Paket tersebut di atas, dan baru membuka Paket B saja.⁷⁵⁾

Untuk seluruh Propinsi Sumatera Selatan hanya memiliki sebuah KPG Negeri, yaitu di kota Palembang. Pada dewasa ini pengikutnya terdiri dari dua macam: Pertama, orang yang mendapat ijin belajar, yang pada umumnya berasal dari guru-guru di daerah Uluang yang dikirim oleh Kandep-Kandep untuk belajar di Palembang di samping mengajar dan setelah menamatkan Kursusnya harus kembali ke daerah (Kabupaten). Yang kedua ialah siswa/pengikut bebas, yaitu orang mendaftar sendiri. KPG Negeri di Palembang mempunyai empat kelas, yaitu :

Tingkat I2 kelas

Tingkat II 2 kelas.

Rata-rata jumlah pengikutnya dalam satu kelas sebanyak + 40 orang, dan memakai sistem semester.⁷⁶⁾

75). Wawancara dengan H.M. Pulungan, 26-1-1981

76). *Ibid.*

Animo terhadap KPG Negeri ini pada dewasa ini masih besar, dan pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan SPG Negeri Palembang, yaitu Ibu Siti Rukmini Subronto. Sedangkan Kursus guru lainnya dikoordinasi oleh BPG Bandung.

2. Pendidikan Ketrampilan Keluarga

Seperti telah diketahui bahwa pada jaman pemerintahan kolonial Belanda di kota Palembang pernah didirikan dua macam sekolah kepandaian putri atas inisiatif partikelir, yaitu pada tahun 1938 dengan diketuai oleh Ny. Ir. Ibrahim didirikan *Nijverheidschool* dengan dua kelas di bawah pimpinan Nona Rosna, dan pada tahun 1941 dibuka pula *Mevrouw de Jonge School*. Kedua sekolah ini bertahan hanya beberapa tahun saja dan dengan meletusnya Perang Pasifik, maka keduanya terpaksa ditutup. Beda kedua sekolah tersebut hanya dalam penerimaan murid-muridnya, yakni pada *Nijverheidschool* yang diterima ialah anak-anak yang telah tamat pada HIS, sedangkan pada sekolah *Mevrouw de Jonge School* yang diterima ialah anak-anak dari *Meisjes School* yang lama pendidikannya lima tahun.⁷⁷⁾

Setelah Proklamasi Kemerdekaan seperti telah kami singgung di muka dikota Palembang bersamaan dengan dibukanya MSOP dan SGM, pada 1 Pebruari 1946 didirikan pula sekolah kerajinan dengan nama Sekolah Kepandaian Putri (SKP) di bawah pimpinan Ibu Masnun. Seperti juga SMOP dan SGM, sebagai akibat Pertempuran Lima Hari Lima Malam SKP ini pun ditutup. Tetapi kemudian pada jaman *Recomba* (Pemerintahan Federal) di kota Palembang didirikan Sekolah Kepandaian Gadis (SKG) yang dipimpin oleh Zuster Prudentia dari misi Roma Katolik. Sekolah ini dibagi dalam dua bagian, yaitu: satu bagian memakai bahasa pengantar bahasa Belanda dan yang satunya memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Oleh karena Zuster Prudentia pada tahun 1949 meletakkan jabatan sebagai pimpinan digantikan oleh Ibu Hakim. Mula-mula sekolah ini berlokasi di Jalan Merdeka di depan Rumah Sakit Mata sekarang, baru pada tahun 1950 pindah ke Talang Semut dekat Gereja Ayam, yang sekarang menjadi SMP Negeri XIII.⁷⁸⁾

Pada tahun 1950 *Sekolah Kepandaian Gadis* diambil-alih oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, namanya diganti menjadi *Sekolah Kepandaian Putri* (SKP) dan dipimpin oleh Ny. Supadio. Lama pendidikannya tiga tahun, dan pada tahun 1950 SKP Negeri mempunyai tiga kelas I dan sebuah kelas II. Pada tahun 1952 untuk pertama kali SKP Negeri ini menamatkan 33 orang siswinya dari 40 orang yang mengikuti ujian. Meskipun ada tamatan SKP Negeri tersebut meneruskan ke SGTK, SGKP dan sekolah Bidan, namun pada umumnya mereka mengalami kesulitan untuk meneruskan pelajaran ke sekolah yang lebih tinggi, di samping di kota Palembang belum

77). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, halaman 654-655.

78). Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni, 11-12-1980.

ada sekolah yang relevan yang lebih tinggi pada waktu itu, mereka tidak mendapat penghargaan yang sama dengan sekolah yang sederajat yang sama lama pendidikannya, misalnya SMP. Kenyataannya untuk masuk ke sekolah-sekolah SGKP, SGTk atau Bidan dan lain-lain lebih diutamakan/diusukai anak-anak yang tamat dari SMP Negeri. Pada tanggal 1 Juli 1952 pimpinan SKP Negeri digantikan oleh Ibu Aswarini.⁷⁹⁾

Pada tahun ajaran 1953/1954 SKP Negeri mengalami perubahan, yaitu lama pendidikannya dibagi menjadi dua macam : (a). yang lama pendidikannya dua tahun, (b). yang lama pendidikannya empat tahun. Yang lama pendidikannya dua tahun menerima murid yang tidak lulus ujian, tetapi masih mempunyai angka 15-16 (untuk Bahasa Indonesia, Berhitung, dan Pengetahuan Umum). Pada bagian murid-murid diberi pelajaran praktek rumah tangga dan beberapa pengetahuan umum. Kepada mereka yang telah menyelesaikan pendidikan selama dua tahun tidak diberi ijazah, tetapi hanya menerima surat keterangan saja, karena tujuan pendidikan yang dua tahun itu, yaitu :

- a. Memberi kesempatan kepada gadis-gadis yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke SKP yang empat tahun atau ke SMP.
- b. Mencegah pengangguran gadis-gadis dan perkawinan anak-anak.
- c. Mendidik gadis-gadis menjadi Warga-Negara yang berguna.
- d. Dapat mempergunakan kepandaian itu untuk mencari nafkah.

SKP yang empat tahun, menerima murid-murid yang lulus ujian masuk ke SLTP. Bagian ini dipecah menjadi dua lagi, yaitu dua tahun di kelas persiapan dan dua tahun lagi ke bagian kejuruan. Di kelas persiapan murid-murid diberi pelajaran kerumah tangga dan pengetahuan umum, dan setelah jika mereka cakap dapat memilih untuk masuk ke salah satu kejuruan seperti :

- A. Kejuruan Memasak
- B. Kejuruan Menjahit pakaian
- C. Kejuruan Memimpin Rumah-tangga
- D. Kejuruan Membuat/kerajinan tangan
- E. Kejuruan Menenun dan Menganyam
- F. Kejuruan Menghias dan Membuat barang
- G. Kelas Persiapan untuk dapat melanjutkan pendidikan SGB, SKP, SGKP, Sekolah Bidan dan Sekolah Jururawat.⁸⁰⁾

Dari tujuh macam kejuruan tersebut di atas, hanya yang (G) yang dibuka di kota Palembang, mengingat kurangnya tenaga pengajar dan alat-alat yang diperlukan. Di samping itu harus diperhatikan minat dari masyarakat, karena menurut instruksi Inspeksi Pendidikan Wanita dari Kem. PPK, bahwa suatu kejuruan dapat dibuka jika murid yang ingin masuk minimal

79). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, halaman 655.

80). *Ibid.* halaman 656-657.

15 orang. Di daerah Sumatera Selatan pada tahun lima puluhan itu terdapat tiga buah SKP Negeri masing-masing sebuah: di kota Palembang, di Tanjung Karang dan di Pangkal Pinang (Bangka).

Seperti halnya sekolah-sekolah lanjutan lainnya yang terdapat di daerah ini, SKP ini pun menghadapi beberapa kesulitan antara lain: masalah kekurangan tenaga guru, perumahan bagi guru-guru, masalah gedung sekolah dan masalah psikologis. Kurangnya perhatian pemerintah/masyarakat terhadap SKP ini serta kelanjutannya bagi anak-anak yang telah tamat dari sekolah ini, sehingga orang tua murid lebih suka meneruskan anak mereka ke SMP, karena nanti lebih mudah melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Di samping hal tersebut di atas, lama pendidikan yang empat tahun dirasakan sangat merugikan, sedangkan SMP hanya membutuhkan waktu tiga tahun dengan penghargaan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan efek yang kurang baik bagi perkembangan SKP di daerah ini.

Dalam perkembangan selanjutnya SKP meluas ke seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan pada tahun 1966 daerah ini telah memiliki tujuh buah SKP Negeri, yaitu: (1). di kota Palembang, (2). di Lahat, (3). di Pangkal Pinang, (4). di Tanjung Pandan, (5). Tanjung Enim, (6). di Baturaja, dan (7) di Lubuk Linggau. Perlu diketahui bahwa KSP Negeri yang terdapat di daerah Kabupaten pada umumnya sebelum memperoleh status negeri terlebih dulu berstatus swasta.⁸¹⁾

Pada tahun 1968 nama SKP diubah menjadi Sekolah Ketrampilan Keluarga Pertama (SKKP), kemungkinan perubahan nama ini ada hubungannya dengan perubahan nama SGKP menjadi SKKA pada tahun 1968 itu juga. Dan lama pendidikannya baik SKKP maupun SKKA selama tiga tahun tidak seperti SKP dan SGKP yang lama pendidikannya empat tahun.⁸²⁾

Seperti halnya sekolah-sekolah kejuruan tingkat pertama lainnya misalnya SMEP, SKKP pun kemudian tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman/kebutuhan masyarakat, oleh karena itu tidak perlu dipertahankan atau diadakan, yang dapat dilakukan dengan dua cara/jalan :

- a. Dengan mengintegrasikan ke dalam SMP, dan
- b. Dengan meningkatkannya menjadi SMKK.

Sehubungan dengan itulah maka SKKP Negeri di seluruh Propinsi Sumatera secara bertahap diintegrasikan atau ditingkatkan. Sejak tahun ajaran 1975/1976 SKKP Negeri di kota Palembang diintegrasikan menjadi SMP Negeri XIII, dengan menyelesaikan studi anak-anak SKP Negeri yang duduk di kelas II dan kelas III. Hal ini secara bertahap diikuti oleh SKKP Negeri di daerah Kabupaten, kecuali SKKP Negeri di Baturaja dan di Lubuk Ling-

81). Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni, 16-12-1980.

82). Wawancara dengan Baharuddin, Karyawan Kanwil Dep. P dan K Prop. Sumatera Selatan Bidang PMK, tanggal 16-12-1980.

gau⁸³ masih tetap/dipertahankan, karena masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Baru pada tahun 1979 keduanya ditingkatkan menjadi SMKK Negeri Baturaja dan SMKK Negeri Lubuk Linggau berdasarkan SK Menteri yang tanggal dan nomornya sama, yaitu SK. No.0191/0/1979 tanggal 3-9-1979, seperti telah dikemukakan di muka (lihat SMKK. Negeri).

Dengan demikian pada tahun 1980/1981 Sekolah Ketrampilan Keluarga Pertama (SKKP) sudah tidak ada lagi di daerah Propinsi Sumatera Selatan. Bagaimana perkembangan SKP Negeri/SKKP Negeri di seluruh Propinsi Sumatera Selatan dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1979 dapat dilihat dari tabel yang kami kutip dari Kanwil P dan K Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan keadaan sebelum datanya tidak ada.

TABEL XIII
Keadaan SKKP Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966-1980

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1966	7	776	71
1967	7	850	72
1968	7	806	79
1969	7	958	79
1970	7	973	66
1971	7	726	61
1972	7	861	51
1973	7	798	48
1974	7	971	54
1975	7	1073	51
1976	7	1220	51
1977	3	464	6
1978/1979	3	233	16
1979/1980	2	97	12
1980	0	0	0

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Prop. Sum.Sel.

83). Wawancara dengan Ny. Tjikaju Soemarni.

3. Pendidikan Perekonomian

a. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri (SMEP. Neg.)

Pada jaman pemerintahan kolonial Belanda di kota Palembang pernah dibuka KHS (*Klein Handelschool*) yang lama pendidikan dua tahun, yang mempunyai tujuan untuk mendidik anak-anak agar mereka dapat berdiri sendiri dalam lapangan perekonomian. Pada jaman Jepang sekolah dagang (KHS) ini ditutup seperti juga sekolah-sekolah lanjutan lainnya. Tetapi setelah kemerdekaan, yaitu setelah Pemerintah mendapat penjelasan bahwa masyarakat daerah ini juga membutuhkan Sekolah Menengah ekonomi Pertama dibuka kembali. Mula-mula SMEP akan dibuka dalam tahun 1950, tetapi mengalami kegagalan, karena orang yang akan mengepalai sekolah tersebut tidak jadi datang dan kemudian orang lain yang ditetapkan untuk menjadi Kepala SMEP itu. Kepala SMEP itu hanya sanggup tinggal di kota Palembang hanya + 15 hari, dengan alasan standar hidup di daerah ini terlalu tinggi.⁸⁴⁾

Akhirnya oleh Inspeksi Pusat Pengajaran Ekonomi diminta agar Madian yang pada waktu itu sedang menjabat Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Kota-besar Palembang, untuk menjadi kepala sekolah dari SMEP tersebut. Setelah ada kesediaan dari Madian, maka pada bulan Agustus 1951 diresmikanlah berdirinya SMEP Negeri berdasarkan SK. No.8380/B tanggal 1-10-1951, dengan murid pertama berjumlah 44 orang untuk kelas I, sedangkan gurunya ketika itu baru Madian sendiri. Sebulan kemudian datang seorang guru lagi dan pada bulan Oktober 1951 ditambah pula kelas satu lagi dengan murid 18 orang, sehingga jumlah murid dalam tahun 1951 itu 62 orang yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas IA dan kelas IB. Sejalan dengan ditambahnya jumlah kelas, maka pada bulan Nopember 1951 ditambah pula dua orang guru, lagi. Ketiga-tiga guru baru tersebut tamatan dari SMEA Negeri (dua orang) dan tamatan SMA/C (1 orang).⁸⁵⁾

Menurut Madian SMEP tidak menghadapi masalah kekurangan tenaga pengajar seperti sekolah-sekolah lanjutan lainnya di daerah ini, karena Inspeksi Pusat Pengajar Ekonomi di Jakarta dapat menghasilkan guru sendiri, yang dilaksanakan di SMEA dan oleh B I Ekonomi. Kesulitan yang dihadapi hanyalah masalah gedung sekolah. Tempat belajarnya masih menumpang di gedung SMP Negeri I di Talang Semut, dan baru pada bulan Desember 1952 pindah ke Jalan Pagar Alam (sekarang Jalan Mayor Ruslan), yaitu ke gedung SMEP Negeri I yang sekarang menjadi SMP Negeri XIV.

Pada penerimaan murid tahun 1952 dan tahun 1953 nampak adanya peningkatan, yaitu 60 orang (1952) dan 72 orang (1953) untuk dua kelas. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari masyarakat daerah

84). Kementerian Penerangan RI. *op.cit.*, hal. 646-648.

85). *Ibid.*, halaman 648.

ini terhadap SMP. Nampaknya pada tahun-tahun permulaan didirikan perkembangan SMEP di kota Palembang ini cukup memuaskan, animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah kejuruan ini cukup besar, sehingga dari tahun ke tahun jumlah pendaftar semakin bertambah. Hal ini berjalan sampai kira-kira tahun 1956, sebab waktu itu anak-anak lulusan SMEP mudah mencari pekerjaan (di bank, kantor, perusahaan swasta), langsung terjun ke masyarakat menjadi pengusaha kecil. Sebelum PGPN 1955 anak yang lulus SMEP bila bekerja pada Pemerintah diangkat dalam golongan IIIA/b, sedangkan dari SMP hanya dalam golongan IIIA. Di samping itu ketika itu alat-alat untuk praktek sangat diperhatikan/dipenuhi oleh Pemerintah.⁸⁶⁾

Oleh karena kekurangan lokal untuk kelas, maka dalam penerimaan murid baru pada tahun ajaran 1953/1954 terpaksa SMEP Negeri harus belajar pada pagi dan petang harinya. Sebenarnya gedung SMEP tersebut kurang memenuhi syarat untuk sekolah kejuruan seperti SMEP yang membutuhkan banyak lokal, karena harus ada lokal untuk praktek, untuk toko dan untuk gudang barang dagangan anak-anak. Perkembangan SMEP Negeri di kota Palembang diikuti dengan meluasnya ke daerah-daerah Kabupaten di seluruh Propinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun ajaran 1953/1954 dibuka SMEP di Baturaja (Kab. OKU), Muara Enim (Kab. LIOT), Kayu Agung (Kab. OKI) dan Lahat. Pada tahun ajaran 1956/1957 didirikan SMEP di Pangkal Pinang (Bangka), pada tahun ajaran 1957/1958 didirikan SMEP di Lubuk Linggau (Kab. MURA), pada tahun ajaran 1958/1959 didirikan SMEP di Tanjung Pandan (Belitung), pada tahun ajaran 1959/1960 didirikan SMEP Negeri II di kota Palembang yang lokasi di Seberang Ulu. Dan pada tahun 1966 didirikan SMEP di Sekayu, yang merupakan SMEP yang termuda di Propinsi Sumatera Selatan.⁸⁷⁾ Perlu diketahui bahwa pada umumnya SMEP yang terdapat di daerah Kabupaten-Kabupaten tersebut di atas sebelum dinegerikan adalah berstatus Swasta.

Kurikulum SMEP dari tahun 1950—1968 sama dengan kurikulum SMP ditambah dengan mata pelajaran khusus, sedangkan kurikulum SMEP tahun 1968—1973 berbeda dengan kurikulum SMP, tetapi kurikulum SMEP 1973—1976 sama dengan kurikulum SMEP tahun 1950. Sesudah tahun 1956 animo masyarakat terhadap sekolah kejuruan ini agak menurun, mereka segan memasukkan anaknya ke SMEP. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, bahwa mereka yang lulusan SMEP sulit untuk melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan untuk terjun ke masyarakat masih terlalu muda. Untuk menjadi buruh, umur mereka belum me-

86). Wawancara dengan Drs. Moch. Dai Sulaiman bekas direktur SMP Negeri I, sekarang direktur SMP Negeri XIV, 11-12-1980.

87). Wawancara dengan Drs. Moh. Dai Sulaiman, 11-12-1980.

menuhi syarat, karena menurut Undang-Undang Perburuan harus umur 18 tahun ke atas.⁸⁸⁾ Faktor-faktor inilah barangkali yang menyebabkan Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengintegrasikan/meningkatkan sekolah-sekolah kejuruan menengah pertama ke dalam SMP atau ke SMA.

Pada tahun 1975 keluar Peraturan Pemerintah untuk mengintegrasikan sekolah-sekolah kejuruan menengah pertama ke SMP, kecuali di daerah-daerah yang masih dibutuhkan. Dalam konteks itulah SMEP Negeri di daerah Propinsi Sumatera Selatan kecuali SMEP Negeri di Baturaja, berintegrasi ke SMP Negeri, dengan menyelesaikan studi anak-anak yang duduk di kelas II dan kelas III, yang berakhir sampai tahun 1977. Adapun SMEP Negeri I di kota Palembang menjadi SMP Negeri XIV, dan SMEP Negeri II menjadi SMP Negeri XV. Sedangkan SMEP di Baturaja masih berdiri sampai tahun 1979, dan baru pada tahun 1980 menjadi SMP Negeri.⁸⁹⁾

Menurut Drs. Moch. Dai Sulaiman, bekas Kepala SMEP Negeri I Palembang orang-orang yang pernah menjadi Kepala SMEP Negeri I Palembang adalah sebagai berikut : Madian (1951-1959), Amir Mukminin (1959 - 1961), Drs. Sukma Rahim (1961-1966), Drs. Ali Latief (1966-1970), Ibu Rohani Herman (1970-1974). Drs. Moch. Dai Sulaiman (1974 sampai sekarang setelah diintegrasikan menjadi SMP Negeri XIV). Guru-guru SMEP Negeri I pada umumnya berijazah SMEA Negeri, PGSLP, BI Ekonomi, Sarjana Muda Jurusan Ekonomi.

TABEL XIV
Keadaan SMEP Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1979

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Murid	Guru
1966/1967	12	1845	110
1967/1968	12	1677	112
1968/1969	13	1929	111
1969/1970	13	2070	121
1970/1971	13	2085	116
1971/1972	10	1624	86
1972/1973	10	1619	97
1973/1974	10	2153	90
1974/1975	10	2242	101

88). Wawancara dengan Drs. Moch. Dai Sulaiman, 11-12-1980.

89). Wawancara dengan Baharuddin, 12-12-1980.

1975/1976	10	2512	80
1976/1977	10	2591	116
1977/1978	1	311	17
1978/1979	1	250	17
1979/1980	0	0	0

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Prop. Sum.Sel.

b. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri (SMEA Neg.)

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang diasuh berturut-turut oleh Sub Direktorat Ekonomi, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai sekolah kejuruan pertumbuhan dan perkembangannya selalu disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan jaman, terutama pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Namun sekolah kejuruan ini mula-mula Sekolah Ekonomi Menengah (SEM) atau Sekolah Dagang Menengah (SDM), kemudian setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan RI (1950) menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) sampai sekarang.⁹⁰⁾

Dengan disponsori oleh Drs. S.W. Tanya, pada tahun 1952 di kota Palembang dibuka Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri (SMEA Neg). Gedungnya mula-mula masih menjadi satu dengan gedung SMEP Negeri di Jalan Mayor Ruslan, yang sekarang menjadi gedung SMP Negeri XIV. Kemudian pindah ke gedung SMEA Negeri I yang sekarang ini yang terletak di Lorong Kapten atau Jalan Letnan Jaimas Palembang. Direktur SMEA Negeri I yang pertama ialah Drs. S.W. Tanya. Sesudah itu SMEA Negeri I dipimpin secara berturut-turut oleh : Drs. Kasim Ali, Drs. Suradjiman, Darwis, Sarwoko, Drs. A.Siahaan, Mubakir, Drs. Burhanuddin Senaris.⁹¹⁾

Sebelum tahun 1960 SMEA belum diadakan pembagian jurusan, oleh karena itu SMEA dikatakan merupakan saudara kembar dari SMA/C. Baru pada tahun 1960 diadakan penjurusan, yaitu: Tata Buku, Koperasi, Tata Usaha, yang kemudian berubah menjadi jurusan Tata Buku, Tata Perusahaan dan Tata Usaha. Pada tahun 1968 pembagian jurusan berubah lagi menjadi : Tata Buku, Tata Niaga, dan Kesekretariatan. Dalam perkembangan selanjutnya dalam Kurikulum 1973, pembagian jurusan tidak lagi dimulai dari kelas I akan tetapi dimulai dari awal kelas III, dan jurusan Kesekretariatan diubah

90). Wawancara dengan Drs. Moch. Dai Sulaiman, 12-12-1980.

91). Wawancara dengan Drs. A. Siahaan (bekas Direktur SMEA. Neg. I), 16-12-1980.

namanya menjadi Tata Usaha kembali. Dengan adanya pembagian menjadi jurusan-jurusan, maka SMEA betul-betul terarah.

Menurut almanak 1960. Jawatan Pendidikan Kejuruan, tujuan Instiusional SMEA adalah sebagai berikut: (1). menyiapkan tenaga-tenaga yang cakap mempunyai inisiatif dan bekal keahlian untuk berusaha sendiri dalam lapisan pelbagai cabang usaha pertengahan. (2). menyiapkan tenaga-tenaga ahli administrasi menengah yang diperlukan bagi usaha pembangunan baik di kantor-kantor Pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan partikelir. Selanjutnya dikatakan bahwa para lulusannya mempunyai kemungkinan :

- a. Mempunyai dan memimpin perusahaan sendiri.
- b. Bekerja pada perusahaan-perusahaan perdagangan, kantor-kantor Pemerintah bagian pembukuan dan administrasi, sebagai guru pada KDPN.
- c. Meneruskan pelajaran ke Fakultas Ekonomi dengan saringan.
- d. Ke Kursus-kursus B.I jurusan Perniagaan, Ekonomi, dan Administrasi.

Kurikulum SMEA selalu mengalami perubahan, karena selalu harus diselaraskan dengan situasi dan tuntutan jaman, kurikulum yang mula-mula dipakai ialah kurikulum 1950 kemudian kurikulum 1960 kurikulum 1965 kurikulum 1968 dan sekarang kurikulum 1976. Nampaknya untuk daerah ini SMEA cukup mendapat perhatian dari masyarakat (meski tidak sebesar SMA), sehingga dalam perkembangannya jumlahnya semakin bertambah, tidak diselenggarakan oleh Pemerintah tetapi juga oleh badan-badan swasta. Pada umumnya SMEA Negeri yang terdapat di daerah Kabupaten sebelum mendapat status negeri terlebih dahulu berstatus swasta.

Di kota Palembang pada tahun ajaran 1959/1960 dengan disponsori oleh Moh. Yunus (sekarang Drs. Moh. Yunus) didirikan SMEA Negeri II, yang mula-mula berlokasi di SMEA Negeri I di Jalan Jaimas dan belajar pada petang hari. Kemudian pada tahun 1962 pindah ke Jalan Jaksa Agung R. Suprpto. Direktornya yang pertama ialah Drs. Moh. Yunus (1960-1966), kemudian digantikan oleh Drs. Sukma Rahim (1966-1971), selanjutnya digantikan oleh Drs. Buhanuddin Senaris (1971-1980), dan pada tahun 1980 digantikan oleh E.M. Katamsi. SMEA Negeri II ini seperti juga SMEA Negeri I memiliki tiga jurusan, yaitu: Tata Buku, Tata Niaga, dan Tata Usaha. Di seluruh Propinsi Sumatera Selatan terdapat delapan buah SMEA Negeri, yaitu dua buah di Kotamadya Palembang, dan masing-masing sebuah di Muara Enim (1964), Lahat (1967). Pangkal Pinang (1967). Kayu Agung (1968), Lubuk Linggau (1972), dan Baturaja (1979). Sedangkan Kabupaten yang belum memiliki SMEA Negeri ialah: Sekayu (MUBA), Belitung, dan Bangka.⁹²⁾

SMEA Negeri I dan SMEA Negeri II berdasarkan SK Menteri Nomor: 090/0/1979 tanggal 26-5-1979 ditingkatkan menjadi SMEA Negeri Pembina. Adapun SMEA Negeri di Baturaja merupakan peningkatannya dari SMEP

92). Wawancara dengan Drs. A. Siahaan, 12-12-1980.

Negeri menjadi SMEA Negeri berdasarkan SK Menteri No. 0191/0/1979 tanggal 3-9-1979, dan hanya mempunyai dua jurusan, yaitu: Tata Buku dan Tata Niaga. SMEA Negeri Muara Enim didirikan berdasarkan SK. Menteri NO.309/B3/Kej/64 tanggal 25-7-64, yang juga hanya memiliki dua jurusan, yaitu: Tata Buku dan Tata Usaha SMEA Negeri Lubuk Linggau didirikan berdasarkan SK. Menteri No.105/C/1973 tanggal 3-2-1973, yang juga mempunyai dua jurusan, yaitu: Tata Buku dan Tata Niaga SMEA Negeri Kayu Agung didirikan berdasarkan SK. Menteri No.176/UKK.3/1968 tanggal 8-5-68, juga memiliki dua jurusan, yaitu: Tata Buku dan Tata Usaha SMEA Negeri Pangkal Pinang didirikan berdasarkan SK Menteri No.72/B3/Kej/1967 tanggal 25-3-1967, yang mempunyai tiga jurusan, yaitu: Tata Usaha, Tata Buku dan Tata Niaga SMEA Negeri Lahat didirikan berdasarkan SK. Menteri Nomor: 71/B3/Kej/1967 tanggal 25-3-1967.⁹³⁾

TABEL XV
Keadaan SMEA Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966 - 1980

TAHUN	JUMLAH		
	SEKOLAH	MURID	GURU
1966/1967	3	1041	24
1967/1968	6	1616	28
1968/1969	1	1584	47
1969/1970	1	1460	50
1970/1971	6	1813	41
1971/1972	7	1725	42
1972/1973	7	1894	61
1973/1974	7	1931	57
1974/1975	7	1866	71
1975/1976	7	2069	60
1976/1977	7	2497	89
1977/1978	7	2864	99
1978/1979	8	2947	134
1979/1980	8	2906	98

SUMBER : Kanwil Dep. P dan K Prop. Sum.Sel. Bidang PMK

93). Kanwil Dep. P dan K Prop. Sum.Sel. Bidang PMK.

4. Pendidikan Teknik dan Kejuruan lainnya

a. Sekolah Teknik Negeri (ST. Neg.)

Ketika kota Palembang diduduki oleh tentara Belanda, oleh Pemerintah *Recomba* pada bulan Agustus 1948 didirikan sebuah *Ambachtschool* atau Sekolah Teknik Pertama, yang mula-mula terdiri dari dua kelas dengan 63 orang murid, yaitu satu kelas dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan yang satu kelas lagi dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Gurunya terdiri dari lima orang, yaitu: T. van Hoevelaak (kepala), P.E. Siebert, Hutagalung, G.A. Suntoko dan Tamsir. Gedungnya mula-mula di asrama putri SGA Negeri di Jalan Indrapura, tetapi pada bulan September 1949 pindah ke Jalan Dempo. Di samping itu sungai Liat (Bangka) pada tahun 1949 juga didirikan Sekolah Teknik Pertama (*Ambachtschool*), di Bengkulu dan Tanjung Karang didirikan Sekolah Teknik Pertama (STP), masing-masing pada bulan Nopember 1951 dan Agustus 1952. Lama pendidikan STP ini adalah dua tahun.⁹⁴⁾

STP di Palembang mula-mula hanya membuka bagian besi, dan baru pada tahun ajaran 1949/1950 dibuka bagian kayu, dan pada tahun ajaran itu jumlah muridnya meningkat menjadi 202 orang, terdiri dari dua kelas II dan empat kelas I. Pada akhir tahun ajaran 1949/1950 untuk pertama kali menamatkan 30 orang murid bagian besi, dan pada tahun ajaran 1950/1951 tamat pula 30 orang bagian besi. Pada bulan Agustus 1951 kepala STP digantikan oleh A.J. Frietman dan kemudian oleh J. Peeters. Anak-anak STP yang telah tamat banyak di antaranya yang meneruskan pelajarannya ke Jawa, karena pada waktu itu di Sumatera Selatan belum ada ST yang merupakan lanjutan dari STP. Baru tahun 1953 berdasarkan SK. Menteri No. 10/tak terbaca/1953 tanggal 27-2-1953 di kota Palembang didirikan sebuah ST Negeri bagian Mesin dan Bangunan. (Sipil) sebagai lanjutan STP. Pendirian ST Negeri ini disponsori oleh guru-guru STP antara lain A.J. Frietman kepala STP Negeri Palembang.

Beberapa bulan kemudian didirikan pula ST Negeri di Tanjung Enim berdasarkan SK. Menteri No.3237/B/53 tanggal 14-7-1953, yang terdiri dari bagian Mesin dan Listrik. Pada tahun 1956 di daerah Sumatera Selatan dibuka pula tiga buah ST. Negeri, yaitu: di Sungai Liat (Bangka) berdasarkan SK. Menteri No.4361/B3/Kej/56 tanggal 25-8-56, dan 2 buah di kota Palembang masing-masing berdasarkan SK. Menteri No.4361/B3/1956 tanggal 28-8-56 dan SK.Menteri No. 4361/BIII/1956 tanggal 28-8-56. Dengan demikian di kota Palembang terdapat 3 buah ST Negeri : ST. Negeri I, ST. Negeri II dan ST. Negeri III.⁹⁵⁾ Di samping itu didirikan pula ST. Negeri di Lahat, di Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan berdasarkan SK. Menteri

94). Kementerian Penerangan RI, op.cit., halaman 643-644

95). Kanwil Departemen P dan K. Bidang PMK.

Nomor: 294/Kep.Dirpt/26/68 tanggal 9-4-68 yang terdiri dari bagian Sipil, Listrik, Mesin, sehingga pada tahun 1966 tercatat daerah Propinsi Sumatera Selatan memiliki delapan buah ST Negeri.

Pada tahun 1975/1976 seperti juga sekolah menengah ke juruan pertama lainnya, maka dua buah ST Negeri diintegrasikan ke SMP Negeri, yaitu: ST Negeri Lahat dan ST Negeri Pangkal Pinang, tetapi anak-anak yang duduk di kelas II dan kelas III diselesaikan studinya, sehingga pada tahun 1977 di daerah Sumatera Selatan tinggal enam buah ST Negeri yang masih dipertahankan hanya dua buah lokasinya dinindahkan yaitu: ST Negeri I dipindahkan ke Tanjung Raja (OKI) dan ST Negeri II dipindahkan ke Gumawang-Belitung (OKU), ST Negeri II tetap di Palembang, ST Negeri Sungai Liat, ST Negeri di Tanjung Enim, ST Negeri di Tanjung Pandan.⁹⁶⁾

TABEL XVI
Keadaan ST Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966-1980

TAHUN	JUMLAH		
	SEKOLAH	MURID	GURU
1966/1967	8	3282	106
1967/1968	8	3455	109
1968/1969	8	3507	121
1969/1970	8	3930	124
1970/1971	8	3951	133
1971/1972	8	3485	102
1972/1973	8	3455	104
1973/1974	8	3723	104
1974/1975	8	3680	94
1975/1976	8	4029	109
1976/1977	8	4017	131
1977/1978	6	2474	104
1978/1979	6	2911	103
1979/1980	6	2564	124

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

96). Wawancara dengan R. Manalu, Karyawan Kanwil Dep. P dan K 16-12-1980

b. Sekolah Menengah Pendidikan Sosial (SMPS)

Pada tahun limapuluh di kota Palembang didirikan Sekolah Hakim dan Djaksa (SHD), yang lama pendidikannya tiga tahun, di bawah naungan Departemen Kehakiman. Sekolah ini mula-mula berlokasi di gedung SMEA Negeri I di Jalan Jaimas, kemudian baru pindah ke Seberang Ulu, yang ketika itu SHD telah berubah nama menjadi Sekolah Panitra Pengadilan, yang lama pendidikannya masih tiga tahun. Sekolah ini masih di bawah asuhan Departemen Kehakiman.⁹⁷⁾

Pada tahun 1968 Sekolah Panitra Pengadilan ini diambil alih oleh Departemen P dan K, oleh karena itu tidak lagi bernama Sekolah Panitra Pengadilan tetapi diubah menjadi Sekolah Pendidikan Sosial Atas (SPSA), tempat belajarnya masih di Seberang Ulu bekas sekolah Cina. Kemudian namanya berubah lagi menjadi Sekolah Menengah Pendidikan Sosial berdasarkan SK. Menteri Nomor: 404/UKK/3/68 tanggal 30-12-1968.⁹⁸⁾ Jika pada SPSA belum mempunyai jurusan tetapi pada SMPS (Sekolah Menengah Pendidikan Sosial) telah diadakan pembagian jurusan, yaitu :

- 1). Jurusan Pelayanan Sosial (PS)
- 2). Jurusan Pelayanan Masyarakat (PM).

Lama masa pendidikan SMPS ini ialah empat tahun, sedangkan SPSA lamanya hanya tiga tahun. Pada tahun 1980 SMPS sebagai Sekolah Menengah Pendidikan Sosial satu-satunya di Propinsi Sumatera Selatan, mempunyai delapan kelas, yaitu: kelas I terdiri dari dua kelas, kelas II dua kelas, kelas III dua kelas, kelas IV dua kelas. Adapun jumlah murid rata-rata tiap-tiap kelas lebih kurang sebanyak 30 orang. Dan jumlah seluruhnya + 250 orang. Diraktornya ialah Drs. Abdul Muin Zulia.⁹⁹⁾ Kurikulum yang dipergunakan pada SMPS di Palembang ialah Kurikulum 1976. Pada tahun 1976 SMPS pindah dari Seberang Ulu ke Lorok Pakjo No. 881 Palembang. Guru-guru SMPS ini kebanyakan berijazah Sarjana Muda Fakultas Ilmu Pendidikan. Lulusan SMPS disalurkan ke Panti-panti Sosial dan Lembaga Pemasaryatan.

c. Sekolah Menengah Parmasi (SMF)

Sangat dirasakan betapa langkanya tenaga Apoteker di daerah Sumatera Selatan ini pada tahun limapuluh. Hal inilah yang mendorong didirikannya sebuah Sekolah Asisten Apoteker (SAA) di kota Palembang pada tahun 1955 yang disponsori oleh Drs. Bouman sebagai kepala Sekolah SAA yang pertama. Oleh karena belum memiliki gedung sendiri, terpaksa tempat belajarnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang-kadang di Direktorat Farmasi yang terletak di Jalan Kenanga (di belakang Kodam) kadang-kadang di Apotek Kinol di Jalan Jenderal Sudirman kadang-kadang di RSUP

97). Wawancara dengan Baharuddin, 11-12-1980.

98). Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

99). Wawancara dengan Baharuddin, 11-12-1980.

Palembang. Akhirnya pada tahun 1980 baru berhasil mempunyai gedung sendiri terletak di Jalan Bukit Darat Palembang, sehingga siswa-siswanya tidak perlu lagi selalu berpindah-pindah.

Sekolah Asisten Apoteker ini mula-mula hanya mempunyai tiga orang tenaga pengajar, yaitu: Drs. Bouman (sebagai pendiri dan Kepala Sekolah) Drs. Tabrani Basri, dan Gan Tju Hok (sekarang bernama Drs. Sutikno). Pada tahun 1957 siswa-siswa SAA ini untuk pertama kalinya mengikuti ujian akhir, berhasil lulus 10 orang. Lama pendidikan SAA ini ialah tiga tahun.

Dalam perjalanan sejarahnya Sekolah Asisten Apoteker ini telah mengalami perubahan-perubahan nama, yaitu dari Asisten Apoteker (SAA) menjadi Sekolah Pengatur Obat (SPO) dan akhirnya sampai sekarang menjadi Sekolah Menengah Farmasi (SMF). Sekolah ini dikelola oleh Departemen Kesehatan dan untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan hanya terdapat sebuah, yaitu di Kotamadya Palembang. Siswa SMF pada tahun 1980 tercatat sebagai berikut: kelas I sebanyak 41 orang, kelas II 26 orang dan kelas III sebanyak 21 orang. Jadi jumlah seluruhnya sebanyak 88 orang. Sedangkan jumlah tenaga pengajarnya pada tahun 1980 ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari enam orang guru tetap dan sembilan orang lainnya adalah tenaga tidak tetap.¹⁰⁰⁾

Menurut Eddy Utomo, Kepala Bagian Pendidikan SMP ini Sekolah Menengah Farmasi dipimpin berturut-turut oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:

- 1). Drs. Bouman (Pendiri)
- 2). Drs. Ko King Tik
- 3). Drs. Umar Farok
- 4). Drs. Hasrul Buyung
- 5). Drs. Maulana Affandi (Kep. Direktorat Farmasi)
- 6). Drs. H. Fahrudin (Pemilik Apotek Pribumi).

d. Sekolah Bidan, SPR dan SPK

Pada tanggal 1-10-1957 di kota Palembang dibuka Sekolah Bidan yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Pusat Palembang, Kepala Sekolah dan guru. Faktor yang mendorong dirikannya Sekolah Bidan di daerah ini ialah sangat kurangnya tenaga Bidan untuk Propinsi Sumatera Selatan. Sekolah Bidan ini berada di bawah naungan Departemen Kesehatan RI. Dan sebagai pimpinan Pengawas Sekolah Bidan ialah Dr. E. Wanne, Kepala RSUP Palembang. Angkatan pertama (1957) berjumlah delapan orang. Adapun syarat-syarat untuk masuk Sekolah Bidan ini ialah: ijazah SMP Negeri dengan angka-angka baik dan merupakan jatah daerah, umur minimal 17 tahun dan maksimal 20 tahun. Lama pendidikannya tiga tahun dan siswa-siswa Bidan ini menerima tunjangan ikatan dinas tiga tahun, dan tinggal di asrama. Guru-guru dari Sekolah Bidan ini ialah terdiri dari bidan-bidan yang telah berpengalaman yang te-

100) Wawancara dengan Eddy Utomo, Kep. Bag. Pendidikan SMF, 2-12-1980.

lah mendapat pendidikan selama enam bulan lamanya di Bandung, yaitu pada Sekolah Guru Bidan.¹⁰¹⁾

Ikatan dinas dari siswa-siswa Bidan di Palembang ini berupa asrama plus pendidikan gratis, di samping itu sejak tahun 1960-1963 mendapat uang saku, mula-mula sebanyak Rp.180,- kemudian berubah menjadi Rp.300,- tetapi sejak tahun 1964 tidak menerima uang saku, asrama harus membayar sebanyak Rp.1000,- dengan 10 kg beras dan untuk biaya pendidikan harus membayar sebanyak Rp.65,- yang oleh Sekolah harus disetor ke KBN. Dengan demikian sejak tahun 1964 para siswa Bidan tidak lagi menerima tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah.

Menurut Zuster Christine bekas seorang guru bidan dan kini menjadi tenaga pengajar pada SPK, bahwa sejak tanggal 1 Januari tahun 1977 Sekolah Bidan di Palembang ditutup atau dilebur ke dalam Sekolah Perawat Kesehatan (SPK).

e. Sekolah Pengatur Rawat (SPR)

Bersamaan waktunya dengan berdirinya Sekolah Bidan, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1957 dibuka juga di kota Palembang sebuah Sekolah Pengatur Rawat (SPR). Sebagai pimpinan Sekolah ini (SPR) ialah dr. Edwar Oemar, dan sebagai Pimpinan Pengawas Pendidikan ialah dr. E.Wanna berdasarkan SK. Menteri Kesehatan RI No. 186/UM/PM/Pend/1958 tanggal 22 September 1958. Menurut Br. H.A.Madjid Sr, pimpinan Harian/pelaksana SPR, bahwa jumlah pelajar sekolah ini ketika pertama kali dibuka hanya sebanyak 20 orang² sedangkan yang diterima sebanyak sembilan orang, tetapi semakin lama animo masyarakat daerah ini terhadap sekolah SPR ini semakin lama semakin meningkat, hal mana dapat kami hubungkan dengan data yang berhasil kami peroleh dari sekolah tersebut, seperti di bawah ini.

Tahun	Pelamar	Tahun	Pelamar
1957	20	1966	-
1958	20	1967	145
1959	25	1968	150
1960	30	1969	160
1961	30	1970	210
1962	37	1971	174
1963	35	1972	230
1964	85	1973	270
1965	100	1974	256

101) Wawancara dengan Zr. Christine, 22-1-1981

Pada tahun 1975 dan tahun 1976 SPR tidak menerima murid baru dan bersamaan dengan dileburnya Sekolah Bidan ke dalam SPK, maka pada tanggal 1 Januari 1977 SPR di Palembang tersebut juga dilebur atau dihapuskan.

Menurut Br. H.A.Madjid Sr, Sekolah Pengatur Rawat sejak berdirinya sampai tahun 1969 telah menerima murid sebanyak 397 orang, sedangkan siswa yang telah lulus sampai dilebur sebanyak 119 orang. Dan jumlah tenaga pengajar pada SPR berjumlah sebanyak 26 orang. Seperti halnya Sekolah Bidan Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ini pun menerima tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah cq Kementerian Kesehatan, dan para siswanya juga diharuskan tinggal di asrama. Lama pendidikannya juga tiga tahun.

f. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)

Pada tahun 1976 sebagai pengganti dari Sekolah Bidan Sekolah Pengatur Rawat, dibukalah Sekolah Perawat Kesehatan berdasarkan SK. Nomor: 346/Pend/1976/Ka Kanwil tanggal 2 Pebruari 1976, Landasan pemikiran ialah: untuk merealisasi pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh pada lapisan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam GBHN, Pelita II dan instruksi Presiden tentang pengembangan Puskesmas.

Menurut Zuster Christine seorang guru pada Sekolah Perawat Kesehatan ini, bahwa dengan didirikannya SPK yang merupakan pengganti dari kedua sekolah yang pernah ada, yaitu Sekolah Bidan dan SPR diharapkan akan dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang berpendidikan/trampil dalam kebidanan dan sekaligus dalam perawatan kesehatan masyarakat, yang tujuan terutama akan disebarakan ke Puskesmas-Puskesmas di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

Sebagai pimpinan SPK yang pertama ialah dr. Sumarman (1976-1981) dan baru pada akhir bulan Januari 1981 ini digantikan oleh dr. Juliar Maratulis. Oleh karena dua sekolah terdahulu tidak menerima murid baru sebab akan ditutup, maka pada penerimaan siswa SPK baru tahun 1976, jumlah pelamarnya cukup banyak, yaitu sebanyak 560 orang, yang barangkali memegang rekor dalam sejarah sekolah kesehatan di daerah ini. Sedangkan menurut instruksi dari pusat SPK hanya boleh menerims siswa sebanyak 30 orang, tetapi atas kebijaksanaan pimpinan Pengawas SPK di daerah ini telah diterima sebanyak 60 orang siswa. Alasan/pertimbangannya karena kedua sekolah terdahulu (Bidan dan SPR) telah sejak tahun 1974 tidak menerima siswa baru. Semua siswa/siswi SPK ini diwajibkan tinggal di asrama dan mereka menerima tunjangan ikatan dinas dari Pemerintah.

Seperti Sekolah Bidan dan SPR, SPK ini pun lama pendidikannya adalah tiga tahun, dan perbandingan antara siswa dan siswi adalah sebagai 1 : 4. Sejak bulan Desember 1980 siswa/siswi SPK ini diwajibkan membayar IPP (Iuran Pembinaan Pendidikan) sebanyak Rp.3000,- sebanyak Rp.65,- masuk ke KBN. Jumlah tenaga Pengajar SPK sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 14 orang tenaga tidak tetap dan 11 orang guru tetap. SPK telah dua kali

meluluskan murid, yaitu tahun 1979 sebanyak 51 orang, dan tahun 1980 sebanyak 90 orang. Menurut data yang kami peroleh dari SPK, peminat dari sekolah ini cukup besar, sedangkan jumlah yang diterima hanya sedikit, yaitu: Pelamar tahun 1978 sebanyak 157 yang diterima hanya sebanyak 31 orang pelamar tahun 1979 sebanyak 237 orang yang diterima hanya sebanyak 36 orang pelamar tahun 1980 sebanyak 306 orang, yang diterima hanya sebanyak 40 orang.

Adapun jadwal SPK di daerah ini adalah sebagai berikut: dua hari ke masyarakat (*Public Health*) plus belajar, empat hari ke Puskesmas/ke Rumah Sakit plus belajar. Adapun daerah Binaan SPK (*Public Health*) terpilih dari Kampung 20 Ilir/I.II Kecamatan Ilir Timur I Palembang.

Angkatan I membina	1001 k.k. = 5934 jiwa
Angkatan I membina	514 k.k. = 2758 jiwa
Angkatan III membina	417 k.k. = 2149 jiwa
Angkatan IV membina	184 k.k. = 3865 jiwa
Angkatan V membina	339 k.k. = 1990 jiwa. ¹⁰²⁾

Seluruhnya berjumlah 2455 k.k. sama dengan 16696 jiwa.

Syarat untuk masuk ke SPK seperti juga halnya ke Sekolah Bidan dan ke Sekolah Pengatur Rawat ialah ijazah SMP Negeri dan berumur minimal 16 tahun maksimal 21 tahun. Adapun tempat belajar dari iswa/siswi SPK belajar ialah di Aula RSUP Palembang dan di Asrama SPK Putri yang terletak di dekat RSUP Palembang.

g. Sekolah Teknologi Menengah Negeri (STM Negeri)

Menurut R. Manalu, Karyawan Kanwil Departemen P dan K Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Propinsi Sumatera Selatan, bahwa pada tahun 1959 di kota Palembang didirikan sebuah Sekolah Teknologi Menengah Negeri berdasarkan SK Menteri Nomor: 1290/B3/Kej/1959 tanggal 12-10-1959 dengan disponsori oleh guru-guru ST Negeri Palembang. Adapun faktor-faktor yang mendorong didirikannya STM tersebut ialah karena belum adanya sekolah tersebut di daerah ini, dan disamping itu semakin banyak anak-anak daerah ini yang lulus dari ST Negeri yang tidak sanggup untuk melanjutkan studinya ke Jawa atau ke tempat lain, sehingga dengan dibuka STM Negeri di daerah ini akan dapat menampung mereka yang dari ST yang berminat melanjutkan. Lama pendidikannya ialah tiga tahun. STM ini kemudian menjadi STM Negeri I, karena dibukanya STM yang lain di kota Palembang.

Pada tahun 1965 di kota Palembang didirikan pula STM Instruktur berdasarkan SK. Menteri No. 113/Dirpt/BI/65 tanggal 26-8-1965. STM Instruktur ini berlokasi di Jalan Mayor Ruslan satu kompleks dengan ST Negeri I. Maksud/tujuan dibukanya STM Instruktur ini ialah untuk mencetak guru-guru ST di seluruh Propinsi Sumatera Selatan. Tetapi setelah kebutuhan akan

102) Wawancara dengan Br. H.A. Madjid Sr. 25-1-1981.

guru-guru ST dianggap cukup dan dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk mengintegrasikan/meningkatkan ST Negeri menjadi STM Negeri, maka STM Instruktur ini diubah menjadi STM Negeri Umum (non guru). Dengan demikian STM Negeri di kota Palembang dengan nama STM Negeri I dan STM Negeri II. Diubahnya STM Instruktur menjadi STM Negeri II (non guru) berdasarkan SK. Menteri No. A02/Set/08/1975 tanggal 2-1-1975.¹⁰³⁾

Di samping itu menurut R. Manalu, pada tahun 1965 di kota Lahat didirikan pula sebuah STM Negeri berdasarkan SK. Menteri No. 130/Dirpt/BI/65 tanggal 30-9-1965. Dan pada tahun 1968 di Pangkal Pinang dibuka pula sebuah STM Negeri berdasarkan SK. Menteri No. D011/Set Dirpt/68 tanggal 31-7-1968. Sedangkan di kota Lubuk Linggau pada tahun 1979 telah dinegerikan pula sebuah STM yang tadinya berstatus swasta yang telah didirikan sejak tahun 1964, yang berdasarkan SK Menteri No. 0190/0/1979 tanggal 3-9-1979 telah sah memperoleh status negeri. Dengan demikian pada tahun 1979 di seluruh Propinsi Sumatera Selatan telah terdapat lima buah STM Negeri.

STM Negeri di daerah ini mempergunakan dua macam kurikulum, yaitu Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1976. Yang mempergunakan Kurikulum 1964 di daerah ini hanyalah STM Negeri Lubuk Linggau, sedangkan yang lainnya memakai Kurikulum 1976.

Perbedaan pokok pada kedua kurikulum tersebut ialah pada pembagian jurusannya, yaitu sebagai berikut:

Jurusan pada Kurikulum 1964

- (1) Jurusan Mesin
- (2) Jurusan Listrik
- (3) Jurusan Bangunan
- (4) Jurusan Kimia
- (5) Jurusan Tambang

Jurusan pada Kurikulum 1976

- (1) Jurusan Mesin Produksi
- (2) Jurusan Otomotif
- (3) Jurusan Listrik
- (4) Jurusan Bangunan

STM Negeri yang memakai Kurikulum 1976 yang memiliki jurusan yang paling lengkap ialah STM Negeri I di Palembang, sedangkan yang lainnya seperti STM Negeri di Lahat hanya mempunyai tiga buah jurusan: Bangunan, Mesin Produksi, dan Listrik, STM Negeri di Pangkal Pinang memiliki 3 jurusan: Bangunan, Listrik dan Mesin Produksi, STM Negeri II Palembang juga memiliki tiga buah jurusan saja: Bangunan, Listrik dan Mesin Produksi.¹⁰⁴⁾

Menurut Drs. Soetrisno Wp. Kepala Sub Bidang Kurikulum PMK Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan, pada tahun 1980 STM Negeri I dibawah pimpinan oleh Drs. Syarofah Jafri, STM Negeri II dipimpin

103) Kanwil Dep. P dan K Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan

104) Kanwil Dep. P dan K Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan

oleh Drs. Suparmo Syamsuddin, STM Negeri Lahat dipimpin oleh M. Hasjick Mastjik, STM Negeri Lubuk Linggau dipimpin oleh Drs. Rusli Sani dan STM Negeri Pangkal Pinang dipimpin oleh Achmad Yunus, BE. Dikatakannya pula bahwa di kota Palembang telah terdapat BLPT (Balai Latihan Pendidikan Teknik) yang berlokasi di Jalan Basuki Rachmad Kotamadya Palembang.

TABEL XVII
Keadaan STM Negeri di Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 1966–1980

Tahun	Jumlah		
	Sekolah	Guru	Murid
1966/1967	3	995	49
1967/1968	3	1011	69
1968/1969	4	1391	69
1969/1970	4	1391	72
1970/1971	4	1406	72
1971/1972	4	2130	49
1972/1973	4	3248	50
1973/1974	4	3323	52
1974/1975	4	3391	56
1975/1976	4	3794	52
1976/1977	4	4199	78
1977/1978	4	4154	96
1978/1979	4	3414	157
1979/1980	5	3233	139

SUMBER: Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

h. SPP, SPMA Negeri Palembang (Sembawa)

Menurut Drs. A. Moeis Bakry, Kepala Bagian Pengajaran SPP. SPMA. Negeri Palembang yang berlokasi di Sembawa, bahwa pada tahun 1950-an di daerah Sumatera Selatan ini sangat dirasakan kurangnya kader-kader/tenaga pertanian yang terdidik/trampil dari yang berpendidikan rendah apalagi yang berpendidikan menengah dan tinggi. Hal ini mendorong Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan yang dikepalai oleh Umbuh Alwie pada tahun 1952 mendirikan Sekolah Pertanian Rendah (SPR) di Muara Enim dan Curup, Sekolah Usaha Tani (SUT) di Pekalongan (Lampung Tengah) di Haji Mena (Lampung Selatan) di Petaling (Bangka), untuk mengisi lowongan Manteri-manteri Tani. Sedangkan mengenai kebutuhan tenaga menengah oleh Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, telah dicantumkan dalam rencana lima tahun yang disusun pada awal tahun 1954 agar di Sumatera Se-

latannya dapat didirikan Sekolah Pertanian Atas. Hal mana mendapat tanggapan yang positif dari Pusat Jawatan Pertanian di Jakarta, dan direncanakan untuk Sumatera Selatan akan didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas dalam tahun 1956.

Dalam hal ini Umbuh Alwie, Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sumatera Selatan, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan, Winarno Danuatmodjo. Rupa-rupanya kedua orang tokoh tersebut tidak sabar menunggu realisasi dari rencana dibukanya SPMA di daerah ini. Oleh karena itu setelah mereka berdua pulang dari menghadiri peresmian pembukaan Fakultas Pertanian di Payakumbuh (Sumatera Barat) pada awal tahun 1955, mereka mengundang tokoh-tokoh Pemerintahan/masyarakat/pendidikan daerah ini untuk suatu pertemuan dalam rangka merealisasi rencana tersebut di atas pada tanggal 4-2-1955. Dalam pertemuan itu telah berhasil dibentuk suatu Panitia Pendirian SPMA di daerah ini. Susunan Panitia tersebut adalah sebagai berikut:

Pelindung	:	R. Winarno Danuatmodjo, Gubernur Sumatera Selatan Bambang Utojo, Pangtina TT. II
Penasehat	:	Abdul Rozak, Residen Palembang
Ketua	:	M.A. Hanafiah, DPD seksi PP dan K
Wakil Ketua	:	Mgs. A. Rachman
Sekretaris	:	Tje'mat M. Jusuf
Bendahara	:	R. Moh. Ali
Bag. Penerangan	:	Sutadji
kep. Bag. Sarana fisik	:	Ir. Tjung Fat Kiong. ¹⁰⁵⁾

Berkat usaha/jerih payah dari Panitia tersebut, maka pada tanggal 15 September 1955 didirikanlah sebuah Sekolah Menengah Pertanian Atas di Palembang, dan pilihan lokasi jatuh pada desa Sembawa yang memang sangat tepat untuk membuka Sekolah Pertanian, karena di sekitarnya terdapat banyak perkebunan rakyat dan perkebunan Pemerintah. Sembawa terletak pada Km. 29, yang sebenarnya telah masuk dalam Kabupaten MUBA. SPMA tersebut baru diresmikan pada tanggal 17 Nopember 1955. Sekolah Pertanian Menengah Atas ini memiliki areal tanah seluas 115 ha, dengan 10 buah kebun dan 10 kompleks, lengkap dengan asrama siswa, perumahan tenaga pengajar/karyawan non guru. Di samping itu SPMA ini mempunyai fasilitas-fasilitas yang lengkap (olahraga, kepramukaan, tempat praktek).

Lama pendidikan SPMA ialah tiga tahun, tetapi pada tahun 1968-1969 dicoba menjadi empat tahun, dan pada tahun 1970 kembali lagi menjadi tiga tahun. Bagi para siswa/siswi disediakan asrama. Syarat untuk masuk

105) Wawancara dengan Drs. A. Moeis Bakry, tanggal 17-1-1981.

sekolah kejuruan ini ialah ijazah SMP Negeri dengan nilai pelajaran non sosial (eksakta) rata-rata enam ke atas (ini baru tahap pendaftaran). Kemudian mereka harus mengikuti testing masuk, yang meliputi: PMP, Matematika, IPA, dan Psikotest. SPMA Rayin Palembang ini mula-mula meliputi lima daerah (1968 s/d 1978), yaitu: Palembang (Sumatera Selatan), Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Kerinci. Tetapi sejak tahun 1979 terjadi perubahan, Rayon Palembang tidak lagi meliputi lima daerah, tetapi hanya meliputi: Palembang, Bengkulu dan Lampung. Di Lampung dan Bengkulu terdapat SPMA. Daerah yang berstatus Negeri – di Bengkulu dibina/dibiayai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Lampung oleh Dinas Pertanian.

Menurut Drs. A. Moeis Bakry, pada tahun 1975 khusus dalam lingkungan Departemen Pertanian muncul suatu nama/istilah SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan). Muncul/lahirnya SPP ini berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 480/Kpts/Um/12/ 1975 tanggal 8-12-1975, untuk menggantikan nama Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), yang harus disesuaikan dengan situasi politik Pemerintah RI (Pelita). Adapun tujuan SPP ialah mendidik lulusan menjadi warganegara yang baik dan tenaga kerja tingkat menengah yang trampil dalam bidang pertanian.

Pada tahun 1976 SPMA Palembang menjadi SPP, SPMA Palembang, dan sejak itu pada sekolah kejuruan pertanian ini mulai diterapkan kurikulum "Polypalen," yaitu kurikulum yang merupakan peleburan (fusi) dari kurikulum sekolah kejuruan dalam lingkungan Departemen Pertanian, yaitu SPMA, Sekolah Peternakan, dan Sekolah Perikanan. Kurikulum ini (*polypalen*) dipakai bersama-sama oleh ketiga sekolah tersebut, hanya penekanannya yang berbeda. SPP, SPMA memberi tekanan pada mata pelajaran yang menyangkut pertanian, sedangkan SPP Perikanan, dan SPP Peternakan memberikan tekanan pada pelajaran menyangkut perikanan, dan peternakan.¹⁰⁶)

Menurut Drs. A. Moeis Bakry, anak-anak lulusan SMP Negeri yang mendapat ranking 1 diterima tanpa testing. Menurut peraturan dari Pusat jumlah siswa yang harus diterima sebanyak 60 orang, tetapi SPP SPMA Palembang pada tahun 1980 menerima 90 orang, sedangkan tahun-tahun sebelumnya rata-rata 80 orang. SPP, SPMA Palembang mempunyai 6 kelas, yang terdiri dari: kelas I ... 2 kelas, kelas II ... 2 kelas, kelas III ... 3 kelas. Para siswa/siswi sejak tahun 1978 diwajibkan tinggal di dalam asrama atas biaya sendiri terdiri dari yang Rp 1.000,- dan beras 15 kg. Di samping itu mereka diwajibkan membayar Sumbangan Pendidikan Rp 3.000,-. Jumlah tenaga pengajar pada tahun 1980/1981 sebanyak 10 orang, sedangkan Kepala Sekolah sejak berdirinya SPMA sampai sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) Safoean (1955–1960)
- 2) Bahrin Somad (1960- 1962)
- 3) Ir. Bakru Hamid (1962- 1963)

106) Wawancara dengan Drs. Moeis Bakry, 17-1-1981.

- 4) Ir. Salim Sophian (1963--1976)
 5) Ir. Moch. Sobirin (1976--1981)

TABEL XVIII
Kedaaan Murid SPMA Neg/SPP SPMA Negeri Palembang
Tahun 1965--1981

TAHUN	KELAS				JUMLAH
	I	II	III	IV	
1965	39	11	29	--	79
1966	41	33	39	--	113
1967	--	30	23	--	--
1968	21	--	24	21	66
1969	40	13	--	24	--
1970	88	33	9	--	130
1971	84	68	27	--	179
1972	83	70	54	--	207
1973	82	77	71	--	230
1974	77	74	70	--	221
1975	82	73	71	--	226
1976	84	80	69	--	233
1977	84	81	67	--	232
1979	83	77	77	--	237
1980/1981	90	79	77	--	236

SUMBER: SPP SPMA Negeri Palembang

5. Kursus-Kursus Pegawai Negeri

a. Kursus Dagang Pertengahan Negeri (KDPN)

Atas permintaan para pegawai negeri agar di kota Palembang dibuka suatu kursus dagang, maka pada tanggal 1 Januari 1952 didirikanlah sebuah "Middenstand-cursus," yang murid-muridnya/pengikutnya terdiri dari para pegawai-pegawai negeri dari hampir seluruh Jawatan Pemerintahan di kota Palembang, termasuk pula mereka dari Polisi dan Tentara. Muridnya mula-mula sebanyak 80 orang yang terdiri dari 2 kelas, dan belajarnya pada sore hari dari pukul 16.25 -- 20.00. Kemudian namanya diubah menjadi Kursus Dagang Pertengahan Negeri (KDPN). Tahun berikutnya siswanya telah berjumlah 110 orang, yang terdiri dari 2 kelas II, 3 kelas I, dengan gurunya berjumlah 8 orang.¹⁰⁷⁾ Bagaimana perkembangan selanjutnya kurang diketahui, dan sekarang ini Kursus Dagang Pertengahan sudah tidak ada lagi di daerah ini.

107) Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, halaman 649.

b. Kursus Pegawai Administrasi (KPA)

Pada tahun 1955 di kota Palembang dibuka pula sebuah Kursus Pegawai Administrasi yang diikuti oleh pegawai-pegawai negeri yang berijazah Sekolah Dasar. Animo masyarakat khususnya pegawai negeri cukup besar terhadap kursus tersebut. Kursus tersebut didirikan berdasarkan SK No. 3085/Sek 7/a tanggal 1-9-1955.¹⁰⁸) dan tempat belajarnya ialah di Kebon Duku No. 24 di gedung SMP Negeri II, pada sore hari. Menurut Drs. Zainin Wahab, dosen Fkg Unsri yang banyak mengetahui tentang hal ini, bahwa sponsor pendirian kursus tersebut ialah W.A. Simanjuntak. Sedangkan Kepala KPA Negeri Palembang sekarang adalah T.B. Tambunan. Di Lubuk Linggau juga pernah didirikan Kursus Pegawai Administrasi Negeri tetapi sekarang telah ditutup.

c. Kursus Pegawai Administrasi Atas Negeri (KPAA Negeri)

Menurut Drs. Zainin Wahab seorang dosen Fakultas Keguruan Unsri, yang juga sebagai tenaga pengajar pada kursus ini, pada tahun 1960 di kota Palembang didirikan Kursus Pegawai Administrasi Atas, yang disponsori oleh Drs. Jan Dahari. Syarat untuk mengikuti kursus ini ialah mereka yang berijazah SMP Negeri/KPA Negeri, dan lama pendidikannya mula-mula 3 tahun, tetapi sekarang 2 tahun. Lokasi/tempat belajar ialah di SMEA Negeri I di Jalan Letnan Jaimas Palembang. Kepala KPAA Negeri Palembang pada saat ini ialah A. Halim Kaluran, BA. Di kota Lubuk Linggau (MURA) juga pernah didirikan KPAA Negeri, tetapi sekarang telah ditutup.

d. Kursus Karyawan Perusahaan Negeri (KKP Negeri)

Menurut Drs. Zainin Wahab pada tahun 1963 di kota Palembang dibuka pula Kursus Karyawan Perusahaan Negeri, yang sebenarnya merupakan pemecahan dari KPA tersebut di atas. Lokasinya juga di Kebon Duku. Seperti halnya KPA, KKP Negeri ini diikuti oleh pegawai-pegawai negeri yang berijazah SD.

e. Kursus Karyawan Perusahaan Atas Negeri (KKPA Negeri)

Pada tahun 1965 di kota Palembang didirikan pula Kursus Karyawan Perusahaan Atas Negeri. Menurut Drs. Zainin Wahab berdirinya KKP Negeri dan KKPA Negeri adalah ulah orang-orang PKI untuk menyaingi KPA N dan KPAA Negeri. Berdirinya KKPA Negeri berdasarkan SK No. 462/B3/Kej/65 tanggal 11-8-1965. Syarat untuk mengikuti KKPA Negeri ini ialah ijazah SMP Negeri/KKP Negeri/KPA Negeri. Kepala KKPA Negeri sekarang ini ialah C. Parapat, SH. Tempat belajarnya juga di Kebon Duku Palembang.

108) Kanwil Departemen P dan K Prop. Sum. Sel. Bidang PMK.

E. PENDIDIKAN TINGGI

1. Universitas Sriwijaya

Sejarah Universitas Sriwijaya mempunyai hubungan erat dengan sejarah Perguruan Tinggi Syakhyakirti yang mulai sejak bulan Agustus 1952. Sebelumnya atas inisiatif Kantor Urusan Pemuda yang dikepalai oleh A.S. Sumadi, di kota Palembang pada tahun 1946 telah didirikan sebuah *Volks-Universiteit* atau Panti Pengetahuan Umum, yang diikuti oleh ± 200 orang. Dosen-dosennya terdiri dari para pemimpin Pemerintahan/Jawatan seperti: dr. M. Isa, dr. AK. Gani, Mr. A. Sidik, A. S. Sumadi, Nungtijk AR, dr. A. Hakim, Ir. Ibrahim, . S. Josodipuro, K.H. Masjhur Azhari, dr. Ibnu Sutowo, Abdul Malik.¹⁰⁹) Sebagai akibat Pertempuran Lima Hari Lima Malam di kota Palembang pada awal Januari 1947, Panti Pengetahuan Umum tersebut ditutup. Tetapi pada tahun 1948 di kota Lubuk Linggau, yang pada waktu itu menjadi ibukota Karesidenan Palembang, didirikan pula Panti Pengetahuan Umum dan dosen-dosennya ialah orang-orang yang memberi kuliah di Palembang dulu yang sebagian ikut pindah ke pedalaman. Namun usaha ini pun kandas dengan pindahnya pusat Pemerintahan RI ke Curup sebagai akibat Aksi Militer ke-II.

Setelah pengakuan kedaulatan, lebih-lebih setelah terbentuk kembali Negara Kesatuan, para pemuka masyarakat/tokoh-tokoh pendidikan daerah ini semakin menyadari betapa pentingnya suatu perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Keinginan untuk memiliki perguruan tinggi semakin besar, mengingat propinsi-propinsi lain di Indonesia sebagian besar telah mendirikan perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun atas inisiatif swasta. Di samping itu potensi ekonomi daerah ini memungkinkan berdirinya sebuah perguruan tinggi. Ditinjau dari segi historis daerah ini pernah memiliki sebuah perguruan tinggi yang terkenal di kawasan Asia Tenggara, di mana musafir-musafir asing (Cina) memperdalam ilmunya sebelum mereka berkunjung ke India.

Dalam hubungan itulah, maka pada tanggal 17 Agustus 1952 beberapa orang tokoh masyarakat/pendidikan daerah ini mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan ini, di antaranya: dr. M. Isa (Gubernur Sumatera Selatan), Liem Tjong Hien, SH (Pengacara dan Ketua P5), A.S. Sumadi (Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Selatan), M.L. Tobing (Kepala Tata Usaha/Kepala Bagian Pewar-taan Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Selatan), Abdul Rozak (Residen Palembang), dr. A. Hakim (Ketua Yayasan Syakhyakirti), R.A. Rani (Kepala Perwakilan PPK Propinsi Sumatera Selatan) dan R. Nawawi (Sekretaris Daerah Kota Praja Palembang) Sebagai hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 1 April 1953 terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti dengan

109) Kementerian Penerangan RI. *op. cit.*, halaman 659-660.

pengurusnya: dr. A. Hakim, M.L. Tobing, dan Liem Tjong Hien, SH. Untuk keperluan pendirian Yayasan tersebut, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti menghadap notaris Palembang, Ch. Masthius. Modal pertama Yayasan Rp 10.000,- yang diterima dari P5 (Perkumpulan Perusahaan Penggilingan Para Palembang) melalui Presiden Soekarno. Pada tanggal 31 Oktober 1953 peresmian pembukaan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Syakhyakirti yang diketuai oleh Drs. S.W. Tanya, dengan jumlah mahasiswa 166 orang, semuanya tingkat Persiapan. Tempat kuliah masih menumpang mula-mula di Gubernurnan kemudian pindah ke gedung DPR SS, karena belum mempunyai gedung.¹¹⁰⁾

Pada tanggal 1 Maret 1956 diadakan penanda tanganan naskah perjanjian afiliasi antara Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Syakhyakirti Palembang dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia oleh Drs. A.W. Tanya dan Prof. Dr. Sumitro Djohadikusumo. Dengan surat Presiden Universitas Indonesia No. 101/14/51 tanggal 21 Maret 1957, Fakultas Ekonomi Syakhyakirti diakui sama tingkatnya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, baik mengenai nilai ujian maupun gelar dan ijazahnya. Hal mana dipertegas/dikuatkan oleh surat Biro Koordinator Perguruan Tinggi Kementerian PPK No. 124492/BKPT/D tanggal 10 Nopember 1958, yang menyatakan ijazah Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Syakhyakirti tingkat sarjana muda diakui sama dengan ijazah Universitas Negeri.¹¹¹⁾

Pada tanggal 31 Oktober 1957 Perguruan Tinggi Syakhyakirti membuka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yang diresmikan pada tanggal 1 Nopember 1957, dan diketuai oleh Malikuswari Mochtar, SH, dengan jumlah mahasiswa 178 orang. Pada bulan Desember 1959 Peperda mengirim delegasi untuk menghadap Menteri PPK untuk membicarakan masalah penegerian Perguruan Tinggi Syakhyakirti, yang kemudian disusul pula dengan surat No. B-0069/SPP/60 tanggal 16 Januari ditujukan kepada Menteri PPK perihal Universitas untuk Sumatera Selatan. Sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat, dalam persiapan penegerian Perguruan Tinggi Syakhyakirti, maka dibentuk Dewan Kurator (23 Juni 1960) dan persiapan untuk membuka Fakultas Teknik oleh sebuah Panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. Hazairin, SH dan Sekretarisnya R.A. Rani (13 Pebruari 1960). Pada tanggal 1 Oktober 1960 Fakultas Teknik berdiri, tetapi peresmiannya bersamaan dengan Universitas Sriwijaya.¹¹²⁾

Pada tanggal 25 Juni 1960 sebuah delegasi terdiri dari dua rombongan menghadap Pemerintah Pusat. Rombongan pertama menghadap Presiden Soekarno, terdiri dari dr. AK Gani (Ketua Dewan Kurator), Kol. Harun Sohar

110) M. Amantjak dan Mochtar Effendy, *Menyambut Peresmian Universitas Negeri Sriwijaya*, Panitia Peresmian Unsri, Palembang, 1960 hal. 19-20.

111) *Buku Petunjuk Universitas Sriwijaya*, Palembang, 1978, hal. 2-3.

112) Dep. P dan K Universitas Sriwijaya, Palembang, 1980, hal. 16

(Ketua Peperda), Ahmad Bastari (Gubernur Sumatera Selatan), rombongan kedua terdiri dari R.A. Rani (Ketua Persiapan Universitas Negeri), Drs. M.A.A Nawawi (Wakil Ketua Panitia), Drs. Sjafran Sjamsuddin (Sekretaris Panitia) dan Lettu Mochtar Effendy, menghadap Menteri PPK. Pada tanggal 29 Oktober 1960 Perguruan Tinggi Syakhyakirti dinegerikan dengan nama Universitas Sriwijaya berdasarkan Piagam Pendirian dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, Lembaran Negara No. 135 tahun 1960 tertanggal 29 Oktober 1960, dan bersamaan dengan itu telah terdapat Fakultas Ekonomi, Hukum dan Teknik. Dua hari kemudian peletakan batu pertama gedung Universitas Sriwijaya dan tanggal 3 Nopember 1960 Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Universitas Sriwijaya di Palembang, sehingga dengan demikian Propinsi Sumatera Selatan mempunyai Universitas Negeri.¹¹³⁾

Pada tanggal 7 Juli 1960 pembentukan Panitia Persiapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang diketuai oleh R.A. Rani dan Sekretarisnya Amran Halim. Dengan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 6/1961 tanggal 13 Juni 1961 disahkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Palembang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan terhitung 1 Juli 1961 tergabung dalam Universitas Sriwijaya. Setelah itu Unsri membuka dua buah Fakultas lagi, yaitu: Fakultas Kedokteran (1 Oktober 1962) berdasarkan SK Menteri PTIP No. 688/A/1962 dengan drg. M. Isa sebagai Dekannya dan Fakultas Pertanian (17 Agustus 1963) berdasarkan Sk. Menteri PTIP No. 108/1963 tanggal 20 September 1963, masing-masing diresmikan oleh Sekjen Dep. PPK Prof. Dr. Soemantri Hardjoprakoso dan Menteri PTIP Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwijaya.¹¹⁴⁾

Pada tanggal 3 Januari 1963 FKIP Universitas Sriwijaya dilebur menjadi IKIP Bandung Cabang Palembang dengan SK Presiden No. 1 tahun 1963 tanggal 1 Januari 1963. Tetapi kemudian diintegrasikan kembali ke dalam Unsri menjadi dua Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan berdasarkan SK Menteri PTIP No. 161/1967 yang disempurnakan dengan SK No. 1/1968.¹¹⁵⁾ Dewasa ini Universitas Sriwijaya memiliki tujuh Fakultas, dua buah Lembaga, dan sebuah Badan Perencana Universitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakultas Ekonomi
- 2) Fakultas Hukum
- 3) Fakultas Teknik
- 4) Fakultas Kedokteran
- 5) Fakultas Pertanian
- 6) Fakultas Keguruan
- 7) Fakultas Ilmu Pendidikan

113) Buku Petunjuk Universitas Sriwijaya, hal. 1-4

114) *Ibid.*, halaman 4.

115) *Ibid.*, halaman 5-6.

8) Lembaga Bahasa

9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Universitas Sriwijaya juga mempunyai Fakultas Cabang, Extension, dan Fakultas Sore, terdiri dari:

- a. Fakultas Hukum/Pengetahuan Masyarakat dan Fakultas Ekonomi Cabang Lampung, berdirinya berdasarkan Keputusan Presiden Universitas Sriwijaya No. D-40-7-1961 tertanggal 14 Pebruari 1961, dan memisahkan diri dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1963.
- b. Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Cabang Bangka, berdirinya pada tahun 1976 berdasarkan SK. Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 4263/A/II/1965 tanggal 25 Nopember 1965 yo SK Menteri PTIP No. 272/tahun 1965 tertanggal 29 Nopember 1965.
- c. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sore: berasal dari Fakultas Extension yang didirikan berdasarkan SK Menteri No. 77/Dirjend/PT yo SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 1645/B/IV/1967 tertanggal 25 Juli 1967, yang berlaku surut terhitung tanggal 1 Pebruari 1967. Dengan dikeluarkannya SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 405/A/II/1969 tertanggal 1 Maret 1969, maka Fakultas Hukum Extension tersebut diubah menjadi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sore.
- d. Berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 1026/A/II/1968 tertanggal 22 Mei 1968, maka pada tanggal 1 Juli 1968 dibuka Fakultas Hukum Cabang Curup.
- e. Berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 2372/A/II/1968, maka dibuka Fkg-FIP Cabang kuliah Lahat pada tanggal 2 Nopember 1968.
- f. Berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 1026/A/II/1968, maka pada tanggal 6 Juli 1968 dibuka cabang Kuliah Fakultas Hukum di Kayu Agung dan di Tanjung Pandan.
- g. Pada tahun 1968 dibuka Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan kuliah Sore.
- h. Pada tahun 1970, dengan SK Rektor Unsri No. 722/A/II/1970 tertanggal 31 Maret 1970, Fkg. dan FIP diperluas lagi dengan mengakui IKIP Muara Enim, sebagai Fkg-FIP Cabang Kuliah Muara Enim.¹¹⁶⁾
- i. Fakultas Ekonomi Extension dan PAAP:
 - 1) Fakultas Ekonomi Extension berdiri tahun 1965 berdasarkan SK Menteri PTIP No. 263/Tahun 1965 tertanggal 22 Nopember 1965.
 - 2) PAAP berdiri tahun 1976 merupakan peleburan dari AAN berdasarkan Instruksi Ditjend. PT Dep. P dan K tanggal 3-5-1976 No. 0489/Set/1976.
- j. PAT: pada Fakultas Teknik terdapat mahasiswa kuliah sore, yaitu PAT yang merupakan peleburan dari ATN berdasarkan Instruksi Dirjend. PT Dep. P dan K No. 0489/Set/1976 tertanggal 3-5-1976.

116) *Ibid.*, halaman 5-116

Mengingat efektivitas dari butir-butir (a) sampai (j) tersebut di atas, maka akan ditinjau kembali mengingat keputusan Presiden RI No. 42/tahun 1972 yo Instruksi Presiden No. 18/1978.¹¹⁷⁾

Jumlah Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Jumlah mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya dalam tahun Akademis 1979/1980 adalah 8054 orang dengan perincian sebagai berikut:

Fakultas Ekonomi Pagi dan Sore	= 1372 orang
Fakultas Ekonomi Bangka dan PAAP	= 391 orang
Fakultas Hukum Pagi dan Sore dan Bangka	= 1379 orang
Fakultas Teknik dan PAT	= 1891 orang
Fakultas Kedokteran	= 474 orang
Fakultas Pertanian	= 400 orang
Fkg Pagi dan Sore	= 1280 orang
FIP Pagi dan Sore	= 642 orang
Program D ₁	= 225 orang
Jumlah	= 8054 orang. ¹¹⁸⁾

Lulusan (Output)

Sejak berdirinya Universitas Sriwijaya sampai sekarang meluluskan Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap, yaitu dari tahun 1963 s/d 1980 sebagai berikut:

Sarjana Muda 1227 orang dan Sarjana Lengkap 1385 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Alumni Sarjana Muda:
 - Fakultas Keguruan = 755 orang
 - Fakultas Ilmu Pendidikan = 472 orang
- b. Alumni Sarjana Lengkap:
 - Fakultas Ekonomi = 332 orang
 - Fakultas Hukum = 304 orang
 - Fakultas Teknik = 159 orang
 - Fakultas Kedokteran = 332 orang
 - Fakultas Pertanian = 96 orang
 - Fakultas Keguruan = 97 orang
 - Fakultas Ilmu Pendidikan = 65 orang.¹¹⁹⁾

117) Dep. P dan K Universitas Sriwijaya, *op. cit.*, hal. 19.

118) *Ibid.*, halaman 8-9

119) *Ibid.*, halaman 9.

TABEL XIX
Keadaan Tenaga Pengajar Universitas Sriwijaya 1980

Fakultas	Tetap Gol. III/a ke atas	Tetap Gol. IIb keatas	T. Tetap III/a keatas	T. Tetap 12/a ke atas
F. Ekonomi	59	64	53	60
F. Hukum	39	40	22	29
F. Teknik	41	42	38	145
F. Kedok.	150	157	14	190
F. Pertanian	52	62	46	55
Fkg	73	83	53	59
FIP	39	50	27	106
Jumlah	462	502	260	677

SUMBER: Universitas Sriwijaya

Pimpinan/Rektorium Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

- a. 1960—1964
 - Presiden : drg. M. Isa
 - Sekretaris : Drs. Sjafran Sjamsuddin
- b. 1964 Maret
 - Rektor : drg. M. Isa
 - 1966
 - PR I : Drs. Sjafran Sjamsuddin
 - PR II : dr. A. Agus
 - PR III : Ir. Alting Panji Indra
- c. April 1966
 - s/d Agustus 1966
 - Ketua Pre-sidium : Amir Datuk Palinggih, SH
 - Anggota : Amrah Muslimin, SH
 - dr. K.A. Sjamsuddin
 - dr. Mustafa Abubakar
 - Drs. Usman Gani
- d. 1966—1967
 - Pejabat
 - Rektor : dr. Noesmir
 - PR I : dr. K.A. Sjamsuddin
 - PR II : Amrah Muslimin, SH
 - PR III : dr. Mustafa Abubakar
 - dr. A. Katim Thado.
- e. 1968—1973
 - Rektor : H. Djuaini Mukti, MA
 - PR I : dr. K.H.O. Gajahbata
 - PR II : Amrah Muslimin, SH
 - PR III : dr. K.A. Sjamsuddin

f. 1973–1978	Rektor	: Prof. H. Djuaini Mukti, MA
	Sekretaris	: Drs. Lipurnaim
g. 1978 s/d se- karang	Rektor	: Drs. Sjafran Sjamsuddin
	PR I	: Ir. Bakry Hamid
	PR II	: Drs. M. Basir Kimin
	PR III	: dr. Mungguna Sasmitapura. ¹²⁰⁾

Dekan-dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut:

Dekan Fak. Ekonomi	: Drs. Amiruddin
Dekan Fak. Hukum	: Toto Kasiha, SH
Dekan Fak. Teknik	: Ir. Machmud Hasjim, MME
Dekan Fak. Kedokteran	: dr. A. Agus
Dekan Fak. Pertanian	: Ir. A. Rasyid Hanafiah
Dekan Fak. Keguruan	: Drs. Zainal Abidin Gaffar
Dekan Fak. Ilmu Pendidikan	: Drs. Ichtiar, MED.

Kampus Universitas Sriwijaya

Kampus Unsri terletak di Bukit Besar atau Jalan Jaksa Agung R. Suprpto. Luas tanah lokasi Unsri 300 Ha, dan yang telah dikuasai baru seluas 32 Ha. Dalam rangka pengembangan peningkatan produktivitas Unsri, maka pada tanggal 13 Nopember 1978 telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Senat Universitas Sriwijaya untuk memindahkan lokasi kampus UNSRI, karena di Kampus yang sekarang tidak memungkinkan untuk menambah sarana fisik. Perlu diketahui bahwa Fakultas-fakultas dalam lingkungan Unsri belum berada dalam lingkungan satu kampus. Di dalam kampus UNSRI terdapat mesjid, perumahan dosen, lapangan olahraga/sepakbola, lapangan tenis, asrama mahasiswa, poliklinik, kantor pos, mess.

Perpustakaan

Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya merupakan satu unit perpustakaan Fakultas dan Lembaga dalam lingkungan UNSRI. Perpustakaan Pusat terletak di dalam kampus UNSRI dan menempati sebagian dari ruangan Aula, sementara menunggu gedung Perpustakaan yang baru yang sedang dibangun yang terletak di dalam kampus UNSRI. Sampai tahun 1980 mempunyai buku buah. Sebagai Kepala Perpustakaan sekarang ialah Dra. Chusaimah Diem.

Lembaga Bahasa

Lembaga Penelitian dan Pengajaran Bahasa Universitas Sriwijaya (selanjutnya disebut Lembaga Bahasa UNSRI) didirikan pada tanggal 1 Agustus

¹²⁰⁾ *Ibid.*, halaman 1–2

1970. Lembaga Bahasa UNSRI adalah suatu badan otonom setingkat fakultas dengan tugas-tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian dalam bidang bahasa. Adapun Direktornya yang sekarang Drs. Zukarnain Mustafa.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Perguruan Tinggi dengan Tridharmanya berkewajiban memberikan dharma kepada masyarakat berdasarkan amal ilmiah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan melakukan kegiatan penelitian dalam usaha memelihara dan memajukan/mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada mulanya pengelolaan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada Universitas Sriwijaya berada di bawah wewenang PR I dan PR III. Baru kemudian sesuai dengan struktur organisasi UNSRI yang baru dan meningkatkan kegiatan dibentuk suatu Lembaga pada pertengahan tahun 1968. Pejabat Ketua LPPM UNSRI sekarang ialah Ir. Bochari Rachman, MSc, sedangkan sebelumnya Drs. Usman G sebagai Direktornya 1978–1980.

Laboratory School

Menyadari betapa pentingnya *Laboratory School* bagi Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan UNSRI, maka pada tahun 1968 didirikan SMA Fkg-FIP UNSRI, dan pada tahun 1975 dibuka pula SMP dan STK. SMA-nya dikelola oleh Fakultas Keguruan, sedangkan SMP dan STK dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan.

Program D₁ dan D₂ (lihat pada laporan di muka).

2. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah

Untuk mengungkapkan sejarah berdiri/perkembangan IAIN Raden Fatah, tidak dapat terlepas dari dua buah Yayasan Islam di Sumatera Selatan, yang mempunyai andil besar dalam kehadiran sebuah Lembaga Pendidikan Islam tinggi di daerah ini. Pada tahun 1958 di kota Palembang telah berdiri sebuah Yayasan Perguruan Islam Tinggi dengan Akte Notaris Nomor 49 tertanggal 16 Januari 1958 yang diketuai oleh Kyai H. Rasjid Sidik dan sebagai Sekretarisnya ialah Husin Abdul Muin (sekarang Drs. Husin Abdul Muin). Yayasan Perguruan Islam Tinggi ini membuka sebuah Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat, dengan tempat kuliah di sebuah gedung pinjaman dari Yayasan Pembangunan Islam (ex Kantor Masyumi), yang sekarang menjadi Kantor Partai Persatuan Pembangunan, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 901 Palembang¹²¹)

121) Panitia Dasawarsa IAIN Raden Fatah, *Sepuluh Tahun IAIN Raden Fatah Palembang*, Palembang, 1975, hal. 29.

Pada tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat ini dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Palembang Cabang dari IAIN Jogjakarta (sekarang bernama IAIN Sunan Kalijaga). Sebagai Dekan IAIN Palembang ini, K.H. Abubakar Bastari (25 Mei 1961 s/d Juli 1962), sedangkan sebagai Presiden Al-Jami'ah ialah Prof. R.H.A Sunaryo, SH yang berdomisili di Jogjakarta. Tetapi sejak tanggal 1 Agustus 1963 IAIN Cabang Palembang ini berganti induk, menjadi Cabang IAIN Ciputat Jakarta (sekarang IAIN Syarif Hidayatullah). Sebagai Dekan ialah Prof. K.H. Ibrahim Husin (sejak tahun 1962), dan sebagai Rektor IAIN Ciputat Jakarta, Prof. Drs. Soenarja. Perlu diketahui bahwa bersamaan dengan dinegerikannya Fakultas Syari'ah Palembang ini (1961) diresmikan pula pendirian Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah Palembang dengan Direktorium pertama Drs. Ahmad Zaidan Jauhari.¹²²⁾

Di samping Yayasan Perguruan Islam Tinggi tersebut di atas di kota Palembang didirikan pula sebuah Yayasan Taqwa Sumatera Selatan pada tahun 1963 yang diketuai oleh Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry dan pada tahun itu juga telah mendirikan Fakultas Tarbiyah di Palembang dengan Let Kol. Drs. Hasbullah Bakry sebagai Dekan, M. Isa Sarul, MA sebagai wakil Dekan. Drs. Hasanuddin sebagai Sekretaris, dan Jauhari BA sebagai Kepala Kantor.

Berdirinya Fakultas-fakultas Agama Islam di kota Palembang sangat besar pengaruhnya terhadap umat Islam di daerah pedalaman, seperti Curup, Lahat dan lain-lain. Dalam waktu yang hampir bersamaan (1963), atas desakan dari sebagian besar umat Islam terutama pemuka-pemuka masyarakat Islam di Curup, maka oleh Yayasan Taqwa Sumatera Selatan Cabang Curup, didirikanlah Fakultas Ushuluddin Curup yang dipimpin oleh Drs. Ahmad Zaidan Jauhari sebagai Dekan dan Drs. Djamaan Nur sebagai Wakil Dekan. Pada tahun 1964 dengan SK Menteri Agama RI Nomor: 86 tahun 1964 Fakultas Ushuluddin Curup ini dinegerikan, dan berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 87 tahun 1964 menjadi bagian dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah.¹²³⁾

Demikian pula di Lahat atas prakarsa para pemuka Islam daerah itu dan dengan dukungan Pemda Lahat, pada tahun 1964, yaitu sebelum lahirnya IAIN Raden Fatah di kota Palembang, didirikan Fakultas Ushuluddin di Lahat yang berstatus swasta dengan Drs. Kafrawi Rahim (Sekda Kabupaten Lahat) sebagai Dekan, Drs. A. Rasyid Ismail sebagai Wakil Dekan. Kemudian dengan SK Menteri Agama RI No. 196 tahun 1968 tertanggal 20 Mei 1968, Fakultas Ushuluddin dari Yayasan Taqwa Lhat dinegerikan dengan nama Fakultas Ushuluddin IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden

122) *Ibid.*, loc.cit.

123) *Ibid.*, halaman 73-79.

Fatah cabang Lahat. Sebagai Dekan ialah Drs. M. Yamin Maris, sebagai Wakil Dekan merangkap Sekretaris ialah Drs. Saleh Bina.¹²⁴⁾

Pada tahun 1964, berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: 87 tahun 1964 tertanggal 13 Nopember 1964 diresmikanlah berdirinya Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Raden Fatah, sebagai IAIN yang menempati urutan keempat di Indonesia yang pada tahun 1964 berjumlah 14 buah. Upacara peresmian pembukaannya diadakan di gedung DPRD Propinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai Palembang oleh Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri selaku Menteri Agama RI. Pada saat peresmiannya IAIN Raden Fatah mengasuh lima buah Fakultas dan sebuah Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah, yaitu:

- a. Fakultas Syari'ah di Palembang
- b. Fakultas Tarbiyah di Palembang
- c. Fakultas Ushuluddin di Curup
- d. Fakultas Syari'ah di Jambi
- e. Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang
- f. Sekolah Persiapan IAIN Al-Jami'ah di Palembang.¹²⁵⁾

Tetapi mulai bulan Juli tahun 1967 Fakultas Syari'ah di Jambi melepaskan hubungan administratif dari IAIN Raden Fatah dengan diresmikannya IAIN Sultan Thaha Syaifuddin untuk wilayah Propinsi Jambi. Begitu pula halnya dengan Fakultas Tarbiyah di Tanjung Karang yang melepaskan diri dari IAIN Raden Fatah, karena diresmikannya IAIN Raden Intan di Propinsi Lampung. Meskipun dua Fakultas tersebut melepaskan diri dari IAIN Raden Fatah, namun muncul pula tiga buah Fakultas baru di pangkuannya.

- a. Fakultas Ushuluddin Lahat yang telah disebut di muka.
- b. Fakultas Ushuluddin di Palembang, yang didirikan pada tahun 1967 di bawah naungan Yayasan Taqwa Sumatera Selatan, dan pada tahun 1968 dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 126 tahun 1968 dan menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.
- c. Fakultas Syari'ah di Bengkulu didirikan pada tahun 1965 di bawah naungan Yayasan Taqwa Sumatera Selatan di Bengkulu, kemudian dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 161 tahun 1970 tertanggal 30 September 1970 dan menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.¹²⁶⁾

Lembaga Research dan Survey

Lembaga Ilmiah pada suatu Perguruan Tinggi adalah merupakan unit organisasi yang sangat penting dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan pengabdian Perguruan Tinggi dalam masyarakat (Tri Dharma Perguruan

124) *Ibid.*, halaman 79

125) *Ibid.*, halaman 30

126) *Ibid.*, halaman 79-91

Tinggi). Dalam hubungan itulah, atas instruksi Rektor IAIN Raden Fatah No. 1 tahun 1969 dikeluarkan SK Rektor No. II tahun 1969 yang untuk pertama kalinya membentuk Lembaga-lembaga: (a) Lembaga Ilmiah, (b) Lembaga Dakwah, (c) Lembaga Penerbitan, yang dengan SK Rektor IAIN Raden Fatah No. III Tahun 1970 disederhanakan menjadi Lembaga Ilmiah dan Lembaga Penerbitan. Kemudian berkenaan dengan keluarnya SK Menteri Agama RI No. 105 Tahun 1974 tentang IAIN, maka Lembaga Ilmiah dan Penerbitan diganti dengan nama Lembaga Research dan Survey IAIN Raden Fatah.¹²⁷⁾

Sekolah Persiapan IAIN Raden Fatah

Di samping Fakultas-fakultas serta *Lembaga Research dan Survey* tersebut di atas, IAIN Raden Fatah juga mengasuh Sekolah-sekolah Persiapan, sampai tahun 1975 terdapat 7 buah Sekolah Persiapan dan sebuah Inspektorat Sekolah Persiapan, yaitu:

- 1) Sekolah Persiapan IAIN di Palembang didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 97 Tahun 1963 yang mempunyai daya surut sampai 1 September 1961.
- 2) Sekolah Persiapan IAIN di Curup, dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 87 Tahun 1968 tanggal 23 April 1968. Sebelum dinegerikan sekolah ini merupakan SLA Swasta yang didirikan pada tahun 1963 di bawah naungan Yayasan Taqwa Sumatera Selatan Perwakilan Curup.
- 3) Sekolah Persiapan IAIN Lahat, dinegerikan dengan SK Menteri Agama RI No. 109 Tahun 1968 tanggal 20 Mei Tahun 1968. Sebelum dinegerikan sekolah ini merupakan SLA Swasta yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Islam di Lahat. Pada tahun 1972 lokasi sekolah ini dipindahkan ke Pagar Alam dengan SK Rektor IAIN Raden Fatah No. IV Tahun 1972 tanggal 5 April 1972. karena situasi daerah Lahat sulit untuk Perkembangan Lembaga Pendidikan ini.
- 4) Sekolah Persiapan IAIN Muara Enim, didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 125 Tahun 1968 tanggal 15 Juni 1968.
- 5) Sekolah Persiapan IAIN Kayu Agung, yang dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 257 Tahun 1968 tanggal 30 Nopember 1968.
- 6) Sekolah Persiapan IAIN Baturaja, didirikan pada tahun 1967 atas usaha swasta. Sekolah ini dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 127 Tahun 1969 tanggal 7-10-1969, tunduk di bawah IAIN Raden Fatah.

127) *Ibid.*, halaman 59--60.

- 7) Sekolah Persiapan IAIN Lubuk Linggau, dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 215 Tahun 1970 tanggal 14-9-1970. Sesudah itu tak pernah lagi dibuka sekolah baru.¹²⁸⁾

Inspektorat Sekolah Persiapan

Inspektorat Sekolah Persiapan IAIN Raden Fatah dibentuk oleh Rektor IAIN Raden Fatah dengan SK Rektor IAIN Raden Fatah No. III Tahun 1968 tanggal 1-2-1968 dengan Drs. R.S. Poesponegoro (Wakil Rektor II) sebagai Pejabat Sementara Inspektur (1 Pebruari s/d 16 Mei 1968). Pada saat pembentukannya ini Sekolah Persiapan IAIN Raden Fatah baru ada sebuah, yaitu Sekolah Persiapan Palembang.

Lembaga Bahasa

Lembaga Bahasa pada suatu Perguruan Tinggi tidak kurang pentingnya, oleh karena itu berdasarkan SK Rektor IAIN Raden Fatah No. XV Tahun 1975, IAIN Raden Fatah mendirikan sebuah Lembaga Bahasa, yang diperkuat dengan SK Dirjen Bimas Islam No. Kep/B.V/237/1976 tanggal 19-11-1976.

Perpustakaan

Perpustakaan IAIN Raden Fatah sejak diresmikan sampai tahun 1979 memiliki buku-buku ilmiah sebanyak 12.643 buah dengan pengunjung pada tahun 1980 rata-rata setiap bulan 800 orang mahasiswa dari Fakultas Induk. Adapun gedung perpustakaan IAIN Raden Fatah dibangun dengan biaya Pelita Nasional tahun 1977/1978 dengan luas 350 M². Buku-buku di perpustakaan itu terdiri dari buku pelajaran agama Islam, pelajaran umum dan buku-buku sosial budaya.¹²⁹⁾

Kampus IAIN Raden Fatah

Pada saat IAIN Raden Fatah diresmikan belum memiliki kampus. Tempat kuliah dari kedua Fakultas Induk yang di Palembang masih terpisah pada gedung pinjaman. Demikian juga Fakultas-fakultas yang terdapat di daerah pedalaman kuliah di gedung pinjaman. Baru pada tahun 1966, berdasarkan SK Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No. 0/151/1966 tanggal 4 Juni 1966, sesuai dengan Keputusan Pepselrada Sumatera Bagian Selatan tanggal 10 Mei 1966, IAIN Raden Fatah mendapat Kampus berstatus hak pakai dengan luas areal menurut situasi peta bulan Agustus 1974 dari Kadaster Palembang adalah 335.000 M², statusnya milik Pemerintah RI, yang mulai ditempati

128) *Ibid.*, halaman 92-108

129) Ketua Senat/Rektor IAIN Raden Fatah, *Laporan Pada Peringatan Hari Jadi ke-XV IAIN Raden Fatah dan Wisuda ke-V*, Bengkulu, 1979, hal 9 12.

pada tanggal 13 Juni 1966. Di dalam Kampus tersebut terdapat:

- (1) Gedung Kuliah empat buah: untuk Fakultas Syari'ah– Ushuluddin Tarbiyah – Sekolah Persiapan, serta Aula/ruang kuliah besar.
- (2) Perumahan dosen/karyawan, terdiri dari: lima buah kopel (ex Cina), empat buah rumah kelas 7, yang dibangun atas biaya Pelita Regional merupakan bantuan Gubernur Sumatera Selatan berupa tiga buah bedeng yang ditempati 14 Kepala Keluarga dan sebuah rumah tipe B seluas 120 M² untuk dosen Bantuan.
- (3) Asrama mahasiswa, yang baru dibangun pada 4 Juni 1966 untuk menampung mahasiswa/mahasiswi/pelajar Sekolah Persiapan, asrama putri dapat menampung 200 orang, asrama putra 100 orang.
- (4) Perkantoran/Lembaga Bahasa: Kantor Pusat berlantai 2 dengan luas 600 M², yang dibangun atas dana Pelita I 1977/1978. Sedangkan kantor-kantor Fakultas Induk dan Lembaga Bahasa menempati gedung bekas milik Cina terdiri dari delapan lokal yang luasnya 8 x 65 m.
- (5) Gedung Perpustakaan, yang dibangun dengan biaya Pelita tahun 1977/1978, dengan luas 350 M².
- (6) Mesjid DARUL MUTTAQIEM, yang dibangun atas biaya Pelita I dan diresmikan pemakaiannya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 1975 oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- (7) Aula IAIN yang lama digunakan untuk Taman Kanak-kanak Purwanita IAIN Raden Fatah.¹³⁰⁾

Rektor IAIN Raden Fatah

- 1) Prof. K.H. Ibrahim Husen (13 Nopember 1964 s/d 24 September 1965)
- 2) K.H. Ahmad Syajari (24 September 1965 s/d 31 Maret 1966)
- 3) Brigjen Inf. H. Abu Yasid Bustomi (31 Maret 1966 s/d 19 Juni 1967)
- 4) Rof. K.H. Zainal Abidin Fikry (19 Juni 1967 s/d 8 September 1972)
- 5) K.H.M. Isa Sarul, MA (8 September 1972 sampai tahun 1977)
- 6) Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry (tahun 1977 sampai sekarang).

Tenaga Dosen/Ass Dosen (Tenaga Edukatif) tahun 1980

Dari lima Fakultas dan sebuah Lembaga Bahasa IAIN Raden Fatah dewasa ini mempunyai tenaga edukatif sebagai berikut:

Dosen/Ass. Dosen Tetap	67 orang
Dosen/Ass. Dosen Tidak Tetap	112 orang

130) *Ibid.*, hal. 11–12

Guru Besar Tetap	1 orang
Guru Besar Tidak Tetap	8 orang
	<hr/>
Jumlah	188 orang

Tenaga Administrasi tahun 1980

Dewasa ini IAIN Raden Fatah mempunyai 170 orang tenaga administrasi yang terdiri dari:

Golongan I	63 orang
Golongan II	81 orang
Golongan III	26 orang
	<hr/>
Jumlah	170 orang. ¹³¹⁾

Dalam laporan Rektor tahun 1979 dan tahun 1980 "Dalam Memperingati Hari Jadi ke-XV dan Wisuda ke-V dan "Dalam Memperingati Hari Jadi ke XVI dan Wisuda ke VI IAIN Raden Fatah," IAIN Raden Fatah pada saat ini mengasuh lima buah Fakultas, yaitu tiga buah Fakultas Induk dan dua buah Fakultas Cabang. Jumlah mahasiswa dari kelima Fakultas tersebut pada tahun 1979 sebanyak 1019 orang, dan pada tahun 1980 sebanyak 1103 orang.

TABEL XX
Jumlah mahasiswa IAIN Raden Fatah tahun 1979-1980

Nomor	Fakultas	Tahun	
		1979	1980
1.	Syari'ah Palembang	382	374
2.	Tarbiyah Palembang	311	348
3.	Ushuluddin Palembang	142	165
4.	Ushuluddin Curup	68	67
5.	Syari'ah Bengkulu	166	149

SUMBER: IAIN Raden Fatah Palembang

131) Rektor IAIN Raden Fatah, *Laporan Wisuda Peringatan Hari Jadi ke XVI dan Wisuda ke VI*, Palembang, 1980, hal. 10.

TABEL XXI
Jumlah Alumni Sarjana Lengkap IAIN Raden Fatah 1971–1980

Fakultas	Tahun			Jumlah	
	1971	1978	1979		1980
Syari'ah Palembang	56		40	28	124
Tarbiyah Palembang	27		6	28	61
Ushuluddin Palembang	25		9	6	40
Ushuluddin Curup	4			—	4
Jumlah	112		55	62	229

SUMBER: IAIN Raden Fatah Palembang

Menurut Laporan Ketua Senat tahun 1979 tersebut di atas alumni Sarjana Muda tahun 1979 sebanyak 97 orang dengan perincian sebagai berikut:

Fakultas Syari'ah Palembang	30 orang
Fakultas Tarbiyah Palembang	23 orang
Fakultas Ushuluddin Palembang	8 orang
Fakultas Ushuluddin Curup	18 orang
Fakultas Syari'ah Bengkulu	18 orang
Jumlah	97 orang

Dikatakan pula dalam laporan tersebut, sampai tahun 1979 (1962–1979) IAIN Raden Fatah telah menghasilkan Sarjana Muda sebanyak 1202 orang.

3. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)

Pada tanggal 1 Juni 1965 di Kotamadya Palembang didirikan sebuah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1965 tanggal 15 Mei 1965. Adapun latar belakang yang mendorong pendiriannya ialah untuk membentuk kader-kader Pimpinan Pemerintahan Tingkat Menengah guna memenuhi kebutuhan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Bengkulu.¹³²⁾

132). Wawancara dengan Drs. Idrus Achmad, Direktur APDN 22–11–1980.

Jumlah mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Palembang ini mula-mula sebanyak 80 orang, yang terdiri dari :
Tingkat I berijazah SMA Negeri sebanyak 40 orang
Tingkat II, berijazah KDC sebanyak 40 orang
Sedangkan jumlah tenaga pengajar (dosen) sebanyak 12 orang, yang terdiri dari dua orang dosen tetap dan 10 orang dosen tidak Tetap. Gedung tempat kuliah APDN Palembang ini terletak di Jalan Pendawa 2 Ilir Palembang, yaitu milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang sebelumnya dipergunakan untuk tempat Kursus Dinas (KDC) dan Kursus Keuangan Daerah (KKD).

Pada tahun 1980 ini jumlah mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Palembang sebanyak 83 orang, yang terdiri dari :
Tingkat II sebanyak 27 orang
Tingkat III sebanyak 56 orang
Adapun jumlah tenaga pengajarnya sebanyak 20 orang, yang terdiri dari empat orang dosen tetap dan 16 orang dosen tidak tetap. Direktur APDN Palembang yang sekarang ialah Drs. Idrus Achmad. Kurikulum yang diterapkan pada APDN Palembang ini ialah Kurikulum APDN Palembang tahun 1980. Menurut Drs. Idrus Achmad lama pendidikan APDN Palembang ini ialah tiga tahun.

4. Akademi Administrasi Niaga Negeri (AANN)

Pada tanggal 1 Oktober 1964 dengan disponsori oleh Yayasan Panca Palembang bersama-sama Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, berdirilah Akademi Administrasi Niaga Yayasan Pancasila Palembang di kota Palembang. Jumlah mahasiswa mula-mula sebanyak 379 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 27 orang, yang terdiri dari para Sarjana yang berdomisili di kota Palembang yang semuanya berstatus tenaga tidak tetap.¹³³⁾

Dengan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan kepada Menteri P dan K, maka AAN Yayasan Pancasila Palembang terhitung sejak tanggal 1 Januari 1965 telah menjadi Akademi Administrasi Niaga Negeri berdasarkan SK. Menteri P dan K No.85/B3/Kedj tertanggal 19 Pebruari 1965 dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dengan memiliki dua Jurusan, yakni Kesekretariatan dan Akonting. Pada tanggal 17 Mei 1965 Menteri P dan K Ny. Hartati Marzuki datang meresmikan berdirinya AAN. Negeri di Palembang.

Oleh karena mahasiswa AAN Negeri di seluruh Indonesia menginginkan agar pengurusan dan pembinaan AAN Negeri diserahkan kepada Dir.Jen.

133). Drs. H.Mochtar Abubakar dan Drs. Mansur Rahman, *Memorandum Akhir Tugas dan Laporan Phasing Out AAN, Negeri Palembang*. 1977/1978, hal. 1-2-

Perguruan Tinggi, keinginan mana disalurkan melalui Ikatan Mahasiswa AAN seluruh Indonesia, yang telah mengadakan Mukernas sebanyak tiga kali untuk tujuan tersebut. Hasilnya ialah diterimanya kehendak mereka oleh Menteri P dan K yaitu pembinaan AAN. Negeri ditempatkan di bawah Dir.Jen. Perguruan Tinggi dan akan dilaksanakan secara bertahap. Mulai Januari 1969 AAN. Negeri sepenuhnya di bawah Dir.Jen. Perguruan Tinggi berdasarkan SK. Menteri P dan K RI No.01/69 tertanggal 23 Januari 1969.¹³⁴⁾

Untuk meningkatkan mutu AAN. Negeri sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi, Menteri P dan K RI dengan SK No.0189/1970 tanggal 13-10-1970, menetapkan persyaratan minimal bagi AAN Negeri di Indonesia, Status, Kurikulum, Staf Pengajar dan Perlengkapan material. Dengan sendirinya AAN yang ada tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan minimal sesuai dengan ketentuan tersebut di atas akan dihapuskan. Sehubungan dengan maksud itulah Menteri P dan K menginstruksikan kepada para Koordinator Perguruan Tinggi setempat untuk mengadakan peninjauan serta melaporkan hasilnya. Untuk AAN Negeri Palembang yang di bawah oleh Koordinator Perguruan Tinggi Jakarta Raya telah ditetapkan "Tim Ahli Peninjauan AAN. Negeri dalam lingkungan Koperti Jakarta Raya" dengan SK No.37/tahun 1970 tanggal 19-9-1970. Sebagai hasil peninjauan Tim tersebut, maka dengan SK Menteri P dan K No.0250/1970 tanggal 31-12-1970, ditetapkan AAN. Negeri yang diberi hak hidup dan tetap di bawah lingkungan Dep. P dan K ada sebanyak 11 buah, termasuk AAN. Negeri Palembang.¹³⁵⁾

Untuk menertibkan Perguruan Tinggi Kedinasan dan sekaligus menyempurnakan pembinaan lembaga Perguruan Tinggi Negeri, maka dengan SK. Presiden RI No. 34/1972 tertanggal 18-4-1972, bahwa Menteri P dan K bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Untuk ini Dir.Jen. Pendidikan Dep. P dan K dalam Raker para Direktur AAN. Negeri seluruh Indonesia tanggal 11 Agustus 1972 di Cibogo menyatakan, untuk tahap pertama akan dilaksanakan pengintegrasian Perguruan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen P dan K lebih dulu (AAN, ATA, ABA), dan setelah itu baru Perguruan Tinggi Kedinasan di luar Dep. P dan K.

Sebagai tindak lanjut pernyataan Dir.Jen. Pendidikan di atas, keluarlah :

- a. SK Dir.Jen. Pendidikan Dep. P dan K No.21/Set/Kep/1972 tertanggal 11-10-1972 tentang Integrasi Perguruan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Dep. P dan K yang meliputi: proses dan prosedur pengambil alihan AAN, dan mulai tahun 1973 tidak menerima mahasiswa baru.

134). *Ibid.*, hal. 4

135). *Ibid.*, hal. 5

- b. Pedoman pelaksanaan pengambil alihan diatur oleh Koordinator Pelaksanaan Pimpinan Harian Bidang Sarana Akademis Dir.Jen. Pendidikan Dep. P dan K tanggal 15-11-1974 sebagai berikut ;
- 1) Pelaksanaan pengambil alihan AAN dan ATN harus sudah selesai pada akhir tahun kuliah 1975.
 - 2) Penyaluran tenaga-tenaga tetap AAN Negeri an ATn akan dilaksanakan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan hasil rapat antar Fakultas Ekonomi, Konsersium Science dan Teknologi serta Dir. Pendidikan Tinggi pada tanggal 6 dan 7 Mei 1974.
- c. Program diploma Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) beserta kurikulum dan silabusnya akan segera ditetapkan bersama dengan Konsersium Science dan Teknologi serta Sub Konsersium Ilmu Ekonomi.
- d. Persiapan pelaksanaan program PPAP dan PAT harus sudah selesai selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1974.
- e. Penerimaan mahasiswa baru program PPAP untuk tahun kuliah 1975 dan seterusnya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri yang bersangkutan dengan persyaratan-persyaratan yang akan ditetapkan bersama dengan pimpinan AAN Negeri setelah kurikulum dan silabus tersebut pada c) selesai disusun.

Sebelum pengambil alihan dilaksanakan, turunkah SK Menteri Nomor: 44328/C/1/1975 tanggal 13-10-1975, tentang penunjukkan *Caretaker* Ketua dan Sekretaris pada AAN. Negeri Palembang. Sedangkan serah terima jabatan dari Direktur kepada *Caretaker* Ketua AAN. Negeri Palembang baru dilaksanakan pada tanggal 1 April 1976, yaitu dari Drs. Mansur Rahman (Direktur AAN negeri Palembang) kepada Drs. Mochtar Abubakar sesuai dengan Surat Kawat Dir. Pembinaan Sarana Akademis. Dan pada tanggal 3 April 1976 telah dilaksanakan pula serah terima dari Sekretaris AAN Negeri Palembang dari Drs. Arsuad Adam kepada *Caretaker* Sekretaris Drs. Mansur Rahman.¹³⁶⁾ Dengan demikian berakhirlah AAN Negeri Palembang setelah dilebur menjadi PAAP dan diintegrasikan ke dalam Fakultas Ekonomi UNSRI.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya *Caretaker* Ketua dan Sekretaris berusaha agar: 1). Penyelesaian studi mahasiswa sedapat mungkin diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 2). Penyaluran pegawai, baik administratif maupun edukatif, tidak sampai merugikan mereka dan pengusulan pegawai harian/honorer yang telah berjasa untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri. Sebagian besar mereka disalurkan ke UNSRI, dan terhitung mulai tanggal 1 April 1977 menjadi pegawai UNSRI. 3). Penyaluran inventaris diselenggarakan dengan secermat-cermatnya.¹³⁷⁾

136). *Ibid.*, halaman 30-51

137). *Ibid.*, halaman 30-32

Gedung/tempat kuliah.

Sejak berdiri sampai pengambil alihan, AAN Negeri Palembang tidak pernah memiliki gedung sendiri, sehingga selalu memakai gedung pinjaman, telah beberapa kali berpindah-pindah dari pinjaman yang satu ke yang lain. Pada mulanya berdiri dari berstatus swasta sampai berstatus Negeri AAN Palembang ini kuliah di SMEA Negeri I pada sore hari. Kemudian sejak tanggal 4 Juni 1966 pindah ke gedung ex SKOMDAK VI Sumatera Selatan di Jalan Merdeka, kuliah masih dilakukan pada sore hari. Akhirnya karena gedung SKOMDAK VI akan dibongkar, dengan izin Gubernur Sumatera Selatan tanggal 19 Januari 1976 No. 1/1/9/1976 AAN. Negeri Palembang menempati gedung ex Kim "Sahabat" di kompleks Sriwijaya Fair, yang sebenarnya telah ditempati sejak tanggal 15-9-1975.

Alumni AAN Negeri Palembang.

Menurut Drs. Zainin Wahab seorang dosen pada AAN Negeri Palembang dan sekarang menjadi dosen Fkg-UNSRI, AAN Negeri Palembang telah menghasilkan 678 orang sarjana Muda dengan perincian sebagai berikut :

Jurusan Akonting sebanyak 288 orang

Jurusan Kesekretariatan sebanyak 325 orang

Jurusan Perbankan sebanyak 65 orang

Lulusan yang pertama ialah pada tahun 1967 dan yang terakhir ialah pada tahun 1977, sedangkan jurusan Perbankan hanya memuluskan dua angkatan.

TABEL XXII
Perkembangan Jumlah Mahasiswa AAN Negeri Palembang
Tahun 1965-1976

TAHUN	JUMLAH		KETERANGAN
	Smt I	Smt II	
1965	379	318	Sistem Semester Diterima Smt II 146 orang.
1966	326	281	Sistem Tk. Kur. tetap Smt-diterima 121 orang
1967	328	291	Diterima 115 orang
1968	417	369	Diterima 191 orang.
1969	478	486	Diterima 193 orang.
1970	337	337	Tidak menerima mahasiswa baru.
1971	496	496	Diterima 271 orang. Mulai Program mayor dan minor.
1972	565	565	Diterima 228 orang.

1973	265	265	Tidak menerima mahasiswa baru.
1974	349	349	Diterima 146 orang
1975	101	101	Tidak menerima mahasiswa baru.
1976	99	99	

SUMBER : Memorandum Akhir Tugas dan Laporan Phasing-Out AAN Negeri Plg.

Pimpinan (Direktur/Caretaker) AAN Negeri Palembang.

Di dalam Memorandum Akhir Tugas dan Laporan Phasing-Out AAN Negeri Palembang disebutkan personalia pimpinan AAN Negeri Palembang sebagai berikut :

- 1). Drs. A.L.Syamsuddin, Direktur (1-1-1965 - 1-7-1966)
- 2). Drs. Mansur Rahman, Direktur (1-7-1966 - 1-4-1976)
- 3). Drs. Mochtar Abubakar, Caretaker (1-4-1976 - 1-4-1977)

5. Akademi Teknologi Negeri (ATN/PAT)

Pada bulan September 1965 di kota Palembang telah didirikan sebuah Kursus Dinas Pendidikan Teknologi (KDPT) yang disponsori oleh Drs. Abdullah. Mahasiswa mula-mula berjumlah 120 orang yang terdiri dari tiga jurusan, yaitu: jurusan Mesin, jurusan Elektro, dan jurusan Sipil (Bangunan). Maksud dari pada pendirian KDPT ini ialah untuk meningkatkan mutu tenaga guru Teknik di daerah ini. Tenaga pengajarnya mula-mula terdiri dari 12 orang, sedangkan tempat kuliahnya yang pertama ialah di gedung ST Negeri di Jalan Pagar Alam atau Jalan Mayor Ruslan Palembang.¹³⁸⁾

Pada bulan Januari 1967 Kursus Dinas Pendidikan Teknologi Palembang ini berubah menjadi Akademi Pendidikan Teknologi Negeri (APT) dan tempat kuliahnya sejak tahun 1967 itu pindah ke bekas SEKOMDAK di Jalan Merdeka di sebelah Kantor Pos Besar. Baik Kursus Dinas Pendidikan Teknologi (September 1965 - Januari 1967) maupun Akademi Pendidikan Teknologi Negeri (Januari 1967 - Januari 1970) berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.¹³⁹⁾

Pada bulan Januari 1970 Akademi Pendidikan Teknologi Negeri berubah pula menjadi Akademi Teknologi Negeri (ATN). Pada tahun 1974 Akademi Teknologi Negeri ini dilebur menjadi Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) dan PAT sendiri diintegrasikan ke dalam Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang. Tetapi mahasiswa ATN Tk. II dan Tk. III harus diselesaikan studinya, dan pada tahun 1976 barulah ATN habis. Tempat kuliah sejak tahun 1975 pindah ke Kampus Sriwijaya Fair Palembang. Baik Akademi

138). Wawancara dengan Drs. Abdullah ex dosen ATN (yang disalurkan ke Fkg-UNSRI Palembang), 5 Desember 1980.

139). Wawancara dengan M. Ali (Bag. Pengajaran), 6 Desember 1980.

Teknologi Negeri maupun Pendidikan Ahli Teknologi berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengisi kekurangan serta menyempurnakan mutu pendidikan teknik.
- b. Memberi kesempatan kepada para lulusan STM untuk memperdalam ilmu pengetahuan bidang keteknikannya dalam tingkat Akademis.
- c. Mendidik tenaga-tenaga pelaksana tingkat Akademis, yang langsung dapat bekerja pada masyarakat dengan tidak mengabaikan mutu keilmuannya.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, bertujuan untuk mendidik, membina mahasiswa-mahasiswa, terutama ditujukan pada segi praktis, dengan maksud supaya: 1). Lulusan PAT dapat mengisi kekurangan-kekurangan tenaga kerja antara tenaga sarjana dengan tenaga menengah, 2). Lulusan PAT dapat langsung menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat dan Negara.¹⁴⁰⁾

Lama pendidikan Pendidikan Ahli Teknologi ini ialah tiga tahun yang terbagi menjadi enam semester. Penghargaan resmi bagi mahasiswa yang lulus ujian Sarjana Muda Lengkap, diberi hak untuk menggunakan sebutan "Ahli Teknologi" dan dalam bidang kepegawaian dimasukkan dalam golongan gaji Bakaloreat seperti tersebut dalam PGPS 1968.

PAT Fakultas Teknik UNSRI terdiri dari tiga jurusan: Jurusan Mesin, Jurusan Electro, dan Jurusan Sipil, dan PAT ini diasuh oleh tenaga-tenaga yang berasal dari Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya dan tenaga-tenaga dalam lingkungan Kotamadya Palembang, yang pada 1978 berjumlah 41 dosen dan 23 orang asisten dosen.

6. Akademi Perawat (AKPER) Jurusan Umum

Pada tahun 1968 di Kotamadya Palembang didirikan sebuah Akademi Perawat (AKPER) Jurusan Umum berdasarkan SK. Menteri Kesehatan RI No. 73/PEND tanggal 12 Desember 1967. Adapun latar belakang dibukanya Akademi Perawat ini ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Jumlah mahasiswa mula-mula sebanyak 50 orang, sedangkan tenaga pengajarnya ialah diperbantukan dari Departemen Kesehatan RI c.q. Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Kesehatan Republik Indonesia), yaitu: pada tahun 1968 sebanyak 15 orang, dan pada tahun 1969 sebanyak 24 orang.¹⁴¹⁾

Gedung tempat kuliah Akademi Perawat Palembang ini ialah di Jalan Merdeka No. 10A, yang merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan RI, yaitu berupa dua buah lokal tempat kuliah dan sebuah Kantor Sekretariat

140). Buku petunjuk PAT Fakultas Teknik UNSRI, Palembang, 1987, halaman 1-3.

141). Wawancara dengan Cipto Utomo Rambil Bagi. Pengajaran, Desember 1980.

Pendidikan. Adapun tempat praktek dari Mahasiswa Akademi Perawat Palembang ini ialah di Rumah Sakit dr. A.K. Gani Palembang, yang oleh masyarakat daerah ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Benteng, di Rumah Sakit PN. Pertamina Plaju, di Puskesmas Kotamadya Palembang, di Balai Lab. Tk. I Palembang. Sedangkan K.K.N. (Kerja Lapangan) dilakukan di Rumah Sakit-Rumah Sakit di kabupaten dan di Puskesmas di Kecamatan

Kurikulum Akademi Perawat (AKPER) ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan c.q. Pusdiklat Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut :

Tingkat I terdiri dari 24 mata kuliah

Tingkat II terdiri dari 25 mata kuliah

Tingkat III terdiri dari 11 mata kuliah

Sebagai direktur Akademi Perawat Palembang yang pertama ialah dr. H. Mustafa Abubakar, yang menjabat sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1980. Pada bulan Agustus tahun 1980 digantikan oleh Drs. H. Agustjik sampai sekarang. Dalam perkembangannya sampai sekarang Akademi Perawat Jurusan Umum Palembang ini memiliki empat buah lokal tempat kuliah, asrama putra dan asrama putri, yang merupakan bantuan dari Pemda. Propinsi Sumatera Selatan. Di samping itu Akademi Perawat Palembang ini telah pula memiliki sebuah Perpustakaan. Jumlah tenaga pengajar (dosen) pada saat ini sebanyak 62 orang yang terdiri dari 12 dosen tetap, dan 50 orang dosen Luar Biasa (tenaga honorer).¹⁴²⁾

TABEL XXIII

Jumlah Mahasiswa AKPER Palembang Tahun 1980/1981

TINGKAT	WANITA	PRIA	JUMLAH	KETERANGAN
I	49	13	62	
II	29	10	39	
III	20	9	29	Junior
III	46	12	58	Senior
Jumlah	144	44	188	

SUMBER : Kantor Sekretariat Akademi Perawat Palembang.

142). Wawancara dengan Citp Utomo Ramli, Bs.C. Desember 1980.

TABEL XXIV
Jumlah Alumni Akademi Perawat Palembang 1972-1980

TAHUN	ANGKATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1972	I	9	7	16
1973	II	11	17	28
1974	III	20	18	38
1975	IV	21	20	41
1976	V	24	23	47
1977	VI	15	25	40
1978	VII	32	43	75
1979	VIII	20	47	67
1980	IX	16	46	62
JUMLAH		168	246	414

SUMBER : Kantor Sekretariat Akademi Perawat Palembang.

7. Akademi Koperasi (AKOP)

Pada tahun enam puluhan Pemerintah Orde Lama sedang giat menggalakkan Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, yang baru saja dicangkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 -- ekonomi terpimpin mulai diterapkan, di zaman koperasi sebagai alat penyalur. Pemerintah sendiri pada saat itu aktif menggiatkan koperasi dengan rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (Penasbede) tahun 1961-1969, seperti dibentuknya "Badan Penggerak Koperasi" (Bapangkop), "Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia" (KOKSI) dan "Tim Penerangan Koperasi" (TRK). Departemen Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) sendiri telah mendirikan sekolah Koperasi, yaitu Sekolah Koperasi Menengah Atas (SKOPMA) dan Akademi Koperasi (AKOP).¹⁴³⁾

Sehubungan dengan itu di kota Palembang pada 1965 didirikan Akademi Koperasi Negeri, di bawah naungan Dirjen Transkopemada. Lama pendidikannya tiga tahun, dan tempat kuliahnya ialah di Jalan Kapten A. Rivai

143). Wawancara dengan Drs. Dai Sulaiman, 16-12-1980.

Palembang. Sebagai Direktur Akademi Koperasi Negeri Palembang ialah Drs. Hamdan Zainuri dan sebagai Sekretarisnya ialah Drs. Samsul Bahari Muda. Isi dari tiap-tiap Tingkat dari AKOP ini sekitar 40 orang. Adapun tenaga pengajarnya antara lain; Drs. Hamdan Zainuri, Drs. Samsul Bahari Muda, Drs. Sahuddin Azis, Drs. Ibrahim HS, Drs. Ayub Akbar, Drs. Burhanuddin Kosmos, Drs. Sturisno, Drs. Poerwadi, Syarkowi Sirod, SH.¹⁴⁴)

Pada tahun 1968 pembinaan/pengelolaan Akademi Koperasi ini diambil alih oleh Departemen Dalam Negeri. Dan sejak tahun 1970 status negerinya tidak tegas, karena Departemen Dalam Negeri menggiatkan Akademi Koperasi hanya di Jakarta, sehingga Akademi Koperasi bersifat Nasional dan berpusat di Jakarta. Sejak tahun 1972 boleh dikatakan kegiatan Akademi Koperasi di Palembang terhenti dan sekarang ini Akademi Koperasi tinggal namanya saja, karena bekas lokasi AKOP tersebut terkenal dengan nama Lorong AKOP.¹⁴⁵)

8. Kursus B.I Bahasa Inggris

Untuk mengisi kekurangan tenaga guru bahasa Inggris di SLTA di daerah ini, maka pada tahun 1958 di kota Palembang telah didirikan Kursus B.I Bahasa Inggris yang disponsori oleh Amran Halim (sekarang Prof.Dr. Amran Halim). Jumlah pengikut/mahasiswanya sebanyak 28 orang, dan tempat kuliahnya ialah di Jalan Guru-guru Kebon Duku Palembang, paginya untuk Sekolah Dasar. Sebagai pimpinannya ialah Ibu Djuairiah Akip (yang pada tahun 1962 mengikuti kuliah di FKIP Rawamangun Jakarta Jurusan Bahasa Inggris). Adapun tenaga pengajar dari Kursus B.I ini antara lain ialah: Ibu Djuairiah Akip sendiri, Amran Halim, Wahyu Utomo dan lain-lain.

Dari 28 orang mahasiswa B.I yang mengikuti ujian, yang lulus sebanyak 15 orang yaitu pada tahun 1960. Penguji-pengujinya sebagian didatangkan dari Jakarta. Tetapi setelah meluluskan satu angkatan pada tahun 1961 Kursus B.I. ini diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Sriwijaya Palembang.¹⁴⁶)

F. PENDIDIKAN NON FORMAL

Di samping pendidikan formal yang telah dilaporkan melalui tulisan di muka, Pemerintah RI c.q. Departemen P dan K juga menyelenggarakan pendidikan non formal. Menurut laporan Kandep P dan K Kotamadya Pa-

144). Wawancara dengan Wahab Nangutih, BS.c, karyawan Fkg. 7-12-1980,

145). Wawancara dengan Drs. Ibrahim HS, dosen Fkg dan AKOP, 7-12-1980.

146). Wawancara dengan Ny. Asmah, Karyawan Kanwil Dep. P dan K Bidang Pendidikan Menengah Umum Plg. 10-12-1980.

lembang melalui daftar kursus-kursus PLSM (Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat) yang terdaftar ialah sebagai berikut :

1. Teknologi Kerumah-tangga	38 buah
2. Olah raga	1 buah
3. Teknik	10 buah
4. Administrasi dan Niaga	24 buah
5. Bahasa	35 buah
6. Khusus	4 buah

Jumlah = 102 buah

Di daerah-daerah Kabupaten di daerah Propinsi Sumatera Selatan pada umumnya Departemen P dan K c.q. Kandep-kandep P dan K juga menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk kursus-kursus melalui Proyek Penmas (Pendidikan Masyarakat), misal di Kabupaten Lahat yang berhasil kami rekam sebagai berikut :

1. Ketrampilan Pemotretan (dari memoto s.d. mencuci dan menenai alat).
2. Ketrampilan Perbengkelan sepeda motor -- dari mengenal alat-alat sampai dengan bongkar pasang.
3. Ketrampilan memangkas rambut.
4. Pendidikan kesejahteraan Keluarga (PKK).
5. Kursus membuat dekorasi (tata ruang dan merangkai janur).
6. Kursus Ketrampilan membuat jala/jaring.
7. Kursus Pertukangan Kayu.
8. Kursus Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (dulu PBH).
9. Kursus Kelompok Pembina Pendidikan Dasar (Sekolah Guru Buta Huruf)
10. Kursus Kelompok Belajar Pembina Kesejahteraan Keluarga (Sekolah Guru untuk ibu-ibu).¹⁴⁷⁾

G. PENDIDIKAN SWASTA

Apa yang kita lihat pada jaman pendudukan Jepang terhapusnya dualisme dalam dunia pendidikan dan pengajaran, dan semua sekolah di daerah ini adalah sekolah negeri. Dibutuhkan atau tidaknya sekolah-sekolah Swasta tergantung daripada penguasa yang sedang memerintah. Dalam alam kemerdekaan Indonesia dan sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 yang kemudian ditegaskan pada pasal 31 serta hasil laporan Panitia Penyelidikan Pengajaran tahun 1946, maka adanya pendidikan Swasta merupakan keharusan. Sebagai tindak lanjut daripada isi UUD 1945 dan laporan Panitia tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 me-

147). Wawancara dengan Bapak Arsyad Yakin, Kasi Masorda Kandep P dan K Kabupaten Lahat, tanggal 23-9-1980.

ngenai sekolah partikelir ditetapkan dalam Bab IX pasal 13 dan pasal 14. Pada pasal 13 menyebutkan : (1) Atas dasar kebebasan tiap-tiap warganegara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan luasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah partikelir, dan (2) Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah tersebut ditetapkan dalam Undang-undang. Demikian pula isi pasal 14 menyebutkan : (1) Sekolah-sekolah partikelir yang memenuhi syarat dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaannya, dan (2) syarat-syarat tersebut pada ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴⁸⁾

Kesempatan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 4 tahun 1950 itu, telah dipergunakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga ada yang mendirikan sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai kepada tingkat Perguruan Tinggi. Atas dasar kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah itu, maka di daerah bermunculanlah lembaga-lembaga pendidikan Swasta seperti jamur di musim hujan. Sebelum kita membicarakan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu kiranya dibicarakan lebih dulu beberapa lembaga Pendidikan Swasta yang giat dalam dunia pendidikan di daerah ini sebagai berikut :

a. Perguruan Taman Siswa

Pada jaman pendudukan Jepang Perguruan Taman Siswa dibekukan dan tidak ada kegiatan sama sekali, dan baru dibuka kembali setelah Indonesia Merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bachtiar sebagai Ketua dan Pembimbing Taman Siswa Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu: Sejak tahun 1942 hingga sekarang perguruan Taman Siswa cabang Palembang berlokasi di sekitar Lapangan Hatta di depan Gereja Batak. Dewasa ini telah memiliki Taman Indriya (TK), Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP) dan Taman Maadya (SMA). Adapun Taman Madya didirikan pada tanggal 22 April 1955 dengan tokoh-tokohnya: Ki Hanif DK, R.M. Akil, Drs. Wan Ahmad dan Drs. Amancik.

Mengenai jumlah murid Taman Siswa di segala tingkat yang berlokasi di depan Lapangan Hatta berjumlah seluruhnya 1926 orang, Taman Siswa cabang Sungai Gerong (TK dan Taman Muda) berjumlah 1459 orang, Taman Siswa cabang Sungai Buah (Taman Muda) berjumlah 392 orang, Taman Siswa cabang Prabumulih (Taman Muda, Taman Dewasa dan Taman Madya) berjumlah 529 orang, Taman Siswa cabang Lahat (Taman Muda dan Taman Dewasa) berjumlah 534 orang, Taman Siswa cabang Pagaram (SD dan SMP) berjumlah 333 orang, Taman Siswa cabang Curup dengan tingkat SD dan SMP berjumlah 286 orang. Kemudian persiapan Taman Siswa cabang Sungai Dua jumlah muridnya 51 orang dan persiapan Taman Siswa di Benakat (SMP)

148). Prof. Soegarda Purbakawatja, *op.cit.*, hal. 208.

berjumlah 53 orang. Taman Siswa cabang Telukbetung (Lampung) yang memiliki semua tingkat dengan jumlah muridnya 2084 orang dan akhirnya Taman Siswa yang berlokasi di Tanjungkarang (SD, SMP dan Sekolah Teknik Menengah Atas) jumlah muridnya 235 orang, sehingga jumlah murid keseluruhannya adalah + 7888 orang.

Di samping Taman Siswa dengan segala cabangnya yang tersebut di atas ada pula Perguruan Taman Siswa di Pendopo. Perguruan ini pada umumnya dibiayai dengan sistem *Zelf bedruiping* atau membiayai diri sendiri, yang diperoleh dari bantuan wali murid, bekas murid, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta dan dari Pemerintah. Mengenai gaji para pamong dan karyawan pernah mengikuti peraturan gaji PGPS/1968, tetapi sejak bulan Agustus 1980 ditentukan oleh Taman Siswa setempat. Murid-murid membayar uang sekolah (SPP) tidak ditentukan menurut pendapatan orang tua, dan nyatanya perguruan tersebut dapat menambah gedung-gedung tempat belajar sebagai hasil sumbangan dari para dermawan, orang-orang yang simpatisan dan bekas-bekas murid Taman Siswa yang sekarang menduduki posisi penting.

b. Yayasan Xaverius Keuskupan Palembang

Menurut penjelasan Drs. Bandiman, sekolah-sekolah Xaverius di daerah ini pada umumnya dan di kota Palembang pada khususnya, pada jaman pendudukan Jepang ditutup sama sekali, karena sebagian besar guru-gurunya warga negara Belanda. Para Pastor dan pater-pater/suster pada waktu itu ditawan (diinternir). Kemudian setelah tahun 1947 barulah sekolah-sekolah yang dikelola oleh Misi dihidupkan kembali dengan peralatan (sarana) yang ada dan berdasarkan Akte Yayasan tertanggal 20 Nopember 1948. Dalam Akter tersebut tercantum nama-nama sebagai berikut: Pastor Wilhelmus Lorentius Cornelis Joeren sebagai Ketua Yayasan; Isaak Soediro sebagai Sekretaris; Lodewijk Leonard Tjia sebagai Bendaharawan, dan anggota-anggotanya Tjiu Tjeng Hok, Frater Leonardus Fransiscus Johannes Nienhuis dan lain-lain. Dengan susunan pengurus yang baru ini, Yayasan mulai mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sekolah-sekolah lanjutan seperti: SMP, SKP, SMA, dan SPG di dalam kota Palembang sendiri maupun di seluruh wilayah Keuskupan Palembang. Dalam rangka reorganisasi pengurus Yayasan, pada tahun 1965 terjadi pembaharuan Akte Yayasan dengan susunan sebagai berikut: R.I. Soediro Pranoto sebagai Ketua I, J.P. Manarap sebagai Ketua II, J.W.L. Toruan sebagai Sekretaris I, Pastor J.J. Goeman sebagai Sekretaris II, Frater J.J. Bosma sebagai Bendahara dengan anggota-anggotanya: Lim Tjeng Hian SH dan Tjiu Tjeng Hok.

Berdasarkan Akte tahun 1965, Yayasan Xaverius berkantor di jalan Tasik 18 Palembang dan kemudian pindah ke jalan Kol. Atmo 132, yang sejak itu pula R.I. Soediro Pranoto diangkat sebagai pimpinan Kantor Yayasan Xaverius Pusat. Yayasan tersebut sekarang ini membina 52 buah sekolah yang tersebar di delapan cabang dan tiga Perwakilan sebagai berikut :

- 1). Jambi memiliki dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas, yang masing-masing sebuah.
 - 2). Curup memiliki sebuah SD dan sebuah SMP.
 - 3). Sindang memiliki sebuah SD.
 - 4). Palembang kota memiliki lima buah TK, sembilan buah SD, lima buah SMP dan satu SMA.
 - 5). Tanjung Enim memiliki sebuah TK, satu SD dan satu SMP.
 - 6). Tanjungsakti memiliki satu SD dan satu SMP.
 - 7). Pagaralam terdapat sebuah SD dan sebuah SMP.
 - 8). Lubuk Linggau memiliki TK sampai dengan tingkat SMA, yang masing-masing sebuah.
 - 9). Tugu Mulyo memiliki sebuah SD dan sebuah SMP.
 - 10). Gumawang/Belitung terdapat satu SD, satu SMP dan satu SPG.
 - 11). Baturaja memiliki TK, SD dan SMP masing-masing sebuah.
- Secara keseluruhan jumlah Guru + 615 orang dengan murid 24.000 orang.

c. Sekolah Methodist I

Menurut penjelasan SMH. Panggabean SH sebagai Kepala Mithodist I Palembang, bahwa lembaga pendidikan ini baru dibuka kembali pada tahun 1947, karena di jaman pendudukan Jepang nasibnya sama dengan sekolah Swasta lainnya. Ketika lembaga ini dibuka kembali, maka sponsornya antara lain: Tan Hong Ki, ML. Tobing dan Napiun. Sebagai lembaga yang berbahasa pengantar bahasa Inggris, kurikulumnya sama dengan yang ada di Amerika dan lama belajar 12 tahun. Pemimpin-pemimpinnya orang asing seperti Albert Hamel dan John Wesley Day, sedangkan guru-gurunya banyak orang Indonesia. Sebagai akibat kebijaksanaan Pemerintah, maka pada tahun 1959 sekolah-sekolah asing harus dinasionalisasi, dan oleh karena itu lembaga pendidikan ini menyesuaikan diri dengan kurikulum Pemerintah dan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia.

Pada tahun 1964 gereja Mithodist Indonesia melepaskan diri dari Amerika dan berdiri sendiri sebagai Gereja Methodist Indonesia berpusat di Medan. Segala sesuatu dikomandokan dari Medan, sehingga kegiatan pendidikan di daerah ini tergantung kepada pimpinan Pusat di Medan, yang sampai sekarang ini di dalam kota Palembang sendiri memiliki tiga sekolah *Methodist*, yaitu *Methodist I*, *Methodist II* dan *Methodist III*. Sedangkan di luar kota Palembang sendiri terdapat sekolah *Methodist* di Prabumulih (baru dibuka tingkat SD dalam tahun 1975) dan di Pagaralam (baru dibuka TK pada tahun 1978).

Sekolah yang dibina oleh *Methodist I* meliputi SD, SMP dan SMA, sedangkan *Methodist II* meliputi SD, SMP dan SMA, dan demikian pula *Methodist III* mengelola SD, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1980 jumlah semua murid 2780 orang dengan perincian : SD 403 murid dengan 8 kelas, SMP 759 orang dengan 15 kelas dan SMA 1618 murid dengan 33 kelas.

d. Perguruan Kristen Palembang

Menurut penjelasan saudara C. Prapat SH, lembaga pendidikan ini yang dikenal dengan nama *Beatrix School* dengan guru-gurunya orang Belanda mengalami nasib yang sama, ketika Jepang menduduki daerah ini. Pada tahun 1964 *Vereniging Voor Christelĳk Onderwijs* te Palembang menjadi "Perkumpulan Perguruan Kristen Palembang" dengan Akte Notaris Tan Thong Kie No. 9 tahun 1964 tanggal 7 Desember 1964. Dalam Akte tersebut tercantum nama-nama: BAS, Lumban Tobing, PM, Tampubolon, Willem Mamesah dan Sudi Simanjuntak. Organisasi ini telah membina SD, SMP dan kemudian SMA dibuka tahun 1965, yang pada waktu itu SMP dan SMA dipimpin oleh R.B. Siahaan.

Pada tahun 1977 Perkumpulan Perguruan Kristen Palembang berubah menjadi "Pendidikan dan Perguruan Kristen Palembang" dengan Akte Notaris Yustin Aritonang SH No. 14/1977. Jumlah murid pada tahun ajaran 1980 + 1322 orang dengan rincian 15 kelas SD 680porang, 9 kelas SMP 402 orang dan enam kelas SMA 240 orang. Lembaga pendidikan ini dibina oleh tiga Gereja, Gereja Siloan (gereja Kristen Jawa), Gereja GPIB (Gereja Protestan Indonesia Batak) dan Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).

e. Muhammadiyah

Faham Muhammadiyah tiba di daerah ini sekitar tahun 1928, dan kemudian menjadi suatu organisasi Islam di antara organisasi-organisasi paralel, yang cukup banyak memberikan andilnya untuk masyarakat Islam dalam sosial budaya, terutama di bidang pendidikan.

Menurut penjelasan Ibrahim Jakfar, salah seorang tokoh Muhammadiyah di Palembang mengatakan ketika Muhammadiyah menjadi suatu organisasi di daerah ini, maka setiap Keresidenan diangkatlah seorang "Konsul" yang mendapat pengesahan dari pusatnya di Yogyakarta. Tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini daerah Sumatera Selatan dijadikan daerah wilayah sejak tahun 1960 Setelah perubahan tersebut, di mana Palembang dan Bangka dijadikan wilayah dipimpin oleh K. Masyhur Azhari, kemudian digantikan oleh Siddik Adim (almarhum) dan pada tahun 1975 dipimpin oleh M. Rasyid Thalib.

Sesuai dengan struktur organisasinya yang terbagi atas majelis-majelis, dan salahsatu majelis itu adalah "majelis Pendidikan dan pengajaran" Muhammadiyah wilayah Sumatera Selatan. Oleh karena tujuan Muhammadiyah itu sendiri ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya, maka kegiatan pendidikan dan pengajaran pun tidak dapat lepas dari pada tujuannya semula. Di bawah ini kami kemukakkan kegiatan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di daerah ini sebagai berikut :

- 1). *Kotamadya Palembang* : 19 buah SD, delapan buah SMP, tiga buah

SMA, tiga buah SPG, satu PGA, satu Madrasah Muallimin 6 tahun, satu SMEA dan satu STM.

- 2). *Kabupaten OKI* : 17 SD, dua SMP, satu PGA.
- 3). *Kabupaten OKU* : 24 SD, lima SMP, satu SMA, dan satu SPG.
- 4). *Kabupaten LIOT* : sembilan SD, empat SMP, satu SMA dan sebuah SPG.
- 5). *Kabupaten Lahat* : 34 SD, tujuh SMP, satu SMA, satu SPG dan satu PGA.
- 6). *Kabupaten MURA* : sembilan SD, satu SMP, satu SPG, satu PGA, satu Madrasah Muallimin 6 tahun.
- 7). *Kabupaten MUBA* : 10 SD, satu SMP, dan dua PGA.
- 8). *Kotamadya Pangkalpinang* : satu SD, satu SMP, satu SMA.
- 9). *Kabupaten Bangka* : sebuah SMP.
- 10). *Kabupaten Belitung* : dua buah SD.

f. Perguruan Yayasan Iba Palembang

Menurut penjelasan M. Asaaf sebagai administratur Yayasan tersebut, bahwa Yayasan IBA Palembang didirikan pada tanggal 1 September 1959 dengan Akte Notaris Tan Thong Kie No. 1 tahun 1959. Dalam Akte tersebut tercantum nama : BAYUMI WAHAB DAN DR. M. ISA.

Sejak berdiri yayasan IBA bergerak dalam dunia pendidikan dan masih terbatas dalam kota Palembang saja. Pada waktu peresmian pemakaian gedung sendiri pada tanggal 3 Oktober 1965, dilakukan oleh Jenderal Makmun Murod. Tingkat persekolahan yang pertama dibuka adalah TK dan SD. Ketika diresmikan gedung tersebut jumlah murid TK 60 orang dengan dua orang guru (Ny. Zuraidah dan Maryam), sedangkan SD muridnya 40 orang dengan lima orang Guru (M. Jamin, Salim, Sundari, Zubaidah dan Amrinah). Dalam perkembangan selanjutnya Yayasan IBA telah berhasil mendirikan SMP dalam tahun 1970, SMA dalam tahun 1970, STM dalam tahun 1972, ST dalam tahun 1974, SMEA dalam tahun 1974 dan SPG dalam tahun 1977.

Semenjak beridiri sampai sekarang ini Yayasan IBA tidak banyak mengalami hambatan-hambatan dalam hubungannya dengan perkembangan kehidupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan tersebut. Pada tahun ajaran 1980 tercatat sekolah-sekolah di bawah yayasan Iba sebagai berikut: Sebuah TK dengan murid 129 orang (lima orang Guru), sebuah SD dengan murid 980 (16 orang Guru), dua SMP dengan murid 574 (28 Guru), sebuah SMA dengan murid 712 (27 orang Guru), sebuah ST dengan murid 28 (10 orang Guru), sebuah STM dengan 459 murid (23 orang Guru), sebuah Sekolah Menengah Ekonomi Atas dengan 53 murid (7 orang Guru) dan sebuah SPG dengan 230 murid (13 Guru). Jumlah murid seluruhnya \pm 3093 dengan 129 tenaga pengajar.

g. Yayasan Pendidikan Umum Bina Warga

Menurut penjelasan Kepala Sekolah Menengah Atas Bina Warga (saudara Drs. Zainal Abidin Ali); Yayasan ini didirikan pada tanggal 5 Nopember 1966 atas permufakatan guru-guru SMP IV Negeri Palembang antara lain saudara Zainal Abidin Ali dan R.A. Karim. Sebagai latar belakang berdirinya sekolah-sekolah yang diusahakan oleh yayasan ini, adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak yang tidak tertampung pada sekolah pemerintah.

Mula-mula berdiri SMP pada tahun 1968 dengan 69 orang murid, dan pada tahun 1969 berdiri SMA dengan 45 orang murid dan SD pada tahun yang sama. Oleh karena sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan tersebut dari tahun ke tahun dengan hasil yang baik, maka Pemerintah memberikan subsidi.

h. Lembaga Pendidikan Maarif NU

Berdasarkan penjelasan saudara Mahmud Yunus BA sebagai Kepala SMP – NU; sejak berdiri NU pada tahun 1926 sampai tahun 1953 bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Tetapi karena keadaan politik pada waktu itu memaksa NU di samping bidang dakwah dan pendidikan, bergerak dalam lapangan politik sesuai dengan keputusan Mukhtamar NU seluruh Indonesia di Palembang. Kemudian dalam tahun 1973 berdasarkan hasil Kongres NU seluruh Indonesia di Jakarta, NU melepaskan diri dari kegiatan politik dan kembali pada kegiatan semula, khusus dalam dunia pendidikan dan dakwah. SMP NU didirikan pada tanggal 13 Januari 1972 yang langsung dikelola oleh Pengurus cabang Kotamadya Palembang dengan sponsornya: K.A. Malik Tadjudin, Mahmud Yunus Ba dan Taufik Abdullah Gathmyr.

Perkembangan SMP-NU yang berlokasi di jalan A. Yani seberang Ulu, menunjukkan perkembangan yang cukup baik, apabila dilihat dari jumlah murid dari tahun ke tahun semakin bertambah dan fasilitas pendidikannya. Sejak tahun 1975 sampai sekarang ini SMP-NU telah diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan EBTA sendiri dengan STTB dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ajaran 1979/1980 SMP-NU memiliki murid sebanyak 350 orang, memiliki tujuh lokal belajar, sebuah Kantor dan sebuah rumah sebagai tempat tinggal Kepala Sekolah. Di samping itu SMP-NU menerima beberapa orang Guru dari Departemen Agama dan buku-buku paket dari Departemen P dan K. Dari Kotamadya Palembang sendiri menerima uang Rp.1.060.000,- sebagai biaya rehabilitasi gedung-gedung sekolah, dan demikian pula mendapatkan bantuan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp.5.000.000,-.

Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Lembaga pendidikan Maarif NU cabang Sumatera Selatan : dalam kota Palembang sendiri terdapat SD dan SMP-NU; SD, SMP dan SMA-NU di kota Lahat; SD, SMP dan Muallim

Atas di Pagaram; SD dan SMP di Muara Dua; Madrasah-madrasah dan sekolah umum di daerah OKI.

i. Vikariat Apostolik Pangkal Pinang

Pada tahun 1949 di Prefektur Apostolik Bangka dan Belitung terdapat lima sekolah Dasar dengan 1082 orang murid, dan pada tahun 1951 SD menjadi 10 buah dengan 1503 orang murid. kemudian Prefektur Apostolik tersebut diubah statusnya menjadi Vikariat Apostolik Pangkalpinang pada tanggal 8 Pebruari 1951 di bawah pimpinan Pastor Van der Western. Mulai saat itu daerah pengaruhnya meliputi Bangka, Belitung dan Riau.¹⁴⁹) Usaha Misi Katolik ini terutama ditujukan kepada anak-anak Cina dalam rangka kristianisasi melalui jalur pendidikan di Tanjungbalai di pulau Karimun, di Tanjungpinang dan di Belinyu. Ketiga sekolah tersebut pada tahun 1957 dijadikan sekolah Indonesia.

Pada permulaan tahun 1951/1952 di Vikariat Pangkalpinang terdapat 16 sekolah dengan perincian: delapan SD, empat SMP dan empat sekolah menjahit. Lokasi SMP terdapat di Pangkalpinang, di Sungai Liat dan Belinyu, tetapi pada tahun 1953 SMP Katolik di Belinyu ditutup karena kekurangan tenaga guru. Dalam rangka mensukseskan usaha Misi di daerah ini, pada tanggal 10 Juli 1951 beberapa orang suster Pemeliharaan Illahi tiba di Sungai Liat untuk memimpin sekolah puteri disana, dan dalam tahun 1953 Misi membangun gedung-gedung sekolah di Pangkalpinang, Tanjungpinang dan Belinyu. Pada tanggal 1 Juli 1956 di Pangkalpinang dibuka SGA Puteri dengan tenaga pengajarnya 6 orang dan 11 orang murid. Kemudian dalam bulan Agustus 1959 SMP di Belinyu dibuka lagi dan dalam tahun itu juga dibuka SMP di Tanjungpinang. Pada tahun 1961 dibuka lagi SMP di Sungai Liat. Akhirnya sampai tahun 1961 sekolah Katolik di Vikariat Pangkalpinang berjumlah 20 buah yang terdiri dari: 10 SD, lima SMP, satu SGA dan empat sekolah menjahit dengan jumlah murid seluruhnya 5011 orang tanpa murid TK.¹⁵⁰)

j. Yayasan Tunas Karya Keuskupan Pangkalpinang

Ketika Keuskupan Pangkalpinang dibentuk, terjadilah sembilan paroki yang meliputi daerah: Pangkalpinang, Mentok, Belinyu, Sungai Liat, Manggar. Tanjungpandan, Tanjungbalai, Tanjungpinang dan Tanjungbato (Moto). Tetapi setelah tahun 1967 jumlah paroki berkurang menjadi tujuh buah paroki, sebab ada paroki yang digabungkan menjadi satu, dan Pangkalpinang sendiri tetap merupakan pusat paroki yang memiliki gereja Keuskupan.¹⁵¹) Urusan sekolah di wilayah Keuskupan Pangkalpinang dipegang oleh Yayasan

149). Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid 3a, Arnoldus Ende-Flores, 1974 halaman 285.

150). *Ibid.*, halaman 292 - 295.

151). *Ibid.*, halaman 299 - 300

TUNAS KARYA yang didirikan pada tahun 1958. Broeder Budi Mulia yang berpusat di Jakarta memiliki sekolah sendiri dan mengurus sebuah SD dan sebuah SMP Broederan. Dalam tahun 1961 di wilayah Keuskupan Pangkalpinang tercatat 15 buah sekolah Misi dengan perincian: 10 SD, empat SMP dan satu SPG dengan jumlah muridnya 8564 orang.¹⁵²⁾

**Keadaan Sekolah, murid di wilayah Keuskupan Pangkal Pinang
Tahun 1961 dan Tahun 1972**

Tahun	Pulau/Kepulauan	Jenis Sek.	Jumlah Sek.	Jumlah murid
1961	Bangka	SD	7	3830
		SMP	3	
		SPG	1	
	Belitung	SD	1	148
	Riau	SD	2	325
		SMP	1	
1972	Bangka	ST	10	6612
		SMP	6	
		SMA	1	
		SPG	1	
	Belitung	SD	1	628
		SMP	1	
	Riau	SD	2	1324
		SMP	2	

2. Pendidikan Dasar

Dengan aktifnya kembali pihak Swasta dalam dunia pendidikan, maka pada tahun 1952 dapat diketahui keadaan sekolah Rakyat partikelir di daerah ini, baik yang diusahakan oleh organisasi keagamaan maupun oleh suatu Yayasan. Pada tahun ajaran 1951/1952 tercatat 335 sekolah dengan tenaga pengajar 1515 orang dan 61.905 murid. Adapun sekolah-sekolah partikelir yang dimaksudkan ini diselenggarakan oleh Taman Siswa tujuh buah, Islam 135 buah Kristen 11 buah, Cina 124 buah, Konkordan 12 buah dan lain-lain 46 buah.¹⁵³⁾ Untuk mengetahui perkembangan SD swasta di daerah ini, di bawah ini kami gambarkan data kuantitatif sejak 1969–1980, sedangkan keadaan sebelumnya tidak kami dapati.

152). *Ibid.*, halaman 305

153). Kementerian Penerangan RI, *op.cit.*, halaman 625

**Keadaan SD Swasta di Propinsi Sumatera Selatan
1969/1980**

TAHUN	Jumlah Sekolah	Jumlah murid	Jumlah Guru
1969	405	102202	2335
1970	406	65436	2102
1971	411	99905	2424
1972	436	412713	2651
1973	400	76300	2340
1974	447	106449	2539
1975	450	111935	2836
1976	424	111287	2867
1977	411	98782	2791
1978/1979	430	108234	3026
1979/1980	378	105513	2933

SUMBER : Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

3. Pendidikan Menengah

a. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Keadaan SMP partikelir di Sumatera Selatan hingga bulan Desember 1952 tercatat 41 buah dengan perincian sebagai berikut: Keadaan pada 1 Juli 1952 tercatat 37 sekolah dengan murid 5.338 orang dan 238 orang tenaga pengajar, sedangkan pada tanggal 1 Desember 1952 tercatat 41 sekolah dengan 5845 murid dan 275 Guru.¹⁵⁴⁾

Timbulnya SMP swasta di daerah ini, disebabkan semakin banyaknya lulusan SD yang tidak tertampung oleh SMP Negeri, karena kemampuan Pemerintah dalam menangani sarana pendidikan masih terbatas. Di bawah ini kami gambarkan keadaan SMP Swasta dari tahun 1966—1980:

154) Kementerian Penerangan RI, *op. cit.*, halaman 635.

Keadaan SMP Swasta di Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah murid	Jumlah Guru
1966	83	12149	412
1967	92	12431	442
1968	97	12842	455
1969	104	15056	480
1970	116	15858	540
1971	128	18530	627
1972	148	19687	618
1973	166	25211	904
1974	175	28256	974
1975	192	34475	1038
1976	210	39605	1319
1977	218	44902	1425
1978/1979	245	49651	2534
1979/1980	268	54059	2933

SUMBER: Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

b. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Yayasan Xaverius Palembang mendirikan SMA/B pada tanggal 15 Juli 1951 dimulai dengan satu kelas dan murid sebanyak 36 orang. Sekolah ini mula-mula untuk menampung murid-murid lulusan SMP Xaverius dari berbagai tempat, yaitu dari Palembang, Lahat, Tanjungkarang, Pringsewu dan kalau masih ada tempat bisa menerima lulusan dari SMP Negeri. Setahun kemudian sekolah ini menerima subsidi dari Pemerintah, dan sponsor-sponsornya tercatat: L. Nienhuis dan kemudian diteruskan oleh J. Soudant. Berhubung belum memiliki gedung sendiri, SMA/B Xaverius ini menumpang pada gedung SMP Xaverius yang terletak di jalan Talangjawa, dan sejak tanggal 10 Agustus 1953 pindah ke gedung sendiri yang terletak di jalan Pagaram sekarang ini. Adapun Guru-gurunya antara lain: L. Nienhuis, J. Soudant, J. van Beek, J. Boonen dan J. We Wensten.¹⁵⁵⁾

Oleh karena banyaknya murid SMP Negeri yang tidak dapat ditampung pada SMA Negeri, maka atas usaha R. Nawawi mendirikan SMA/B Malam pada tanggal 21 Agustus 1953 dengan Direktornya R. Nawawi sendiri yang dibantu oleh beberapa orang tenaga pengajar seperti: R.M. Akil, R.M. Saleh, R. Kuparman dan Kgs. Nuroni Adil.

Pada tanggal 6 April 1953 atas usaha Yayasan Pendidikan Umum yang diketuai oleh A.S. Sumadi (eks. Kepala Penerangan Propinsi Sumatera Sela-

155) *Ibid.*, halaman 641.

tan) mendirikan SMA/C dengan 24 orang murid. Sekolah ini bermaksud untuk menampung anak-anak lulusan SMP Negeri dan Pegawai Negeri yang tak dapat kesempatan bersekolah pada waktu pagi hari. Direktornya A. Situ-morang yang dibantu oleh tenaga pengajar seperti: R. Adikusmo, RPL. Tobing, AS. Sumadi, Tadjudin, R.M. Akil, E.E. van Duersen, Hasan Delais dan A. Siregar. Untuk sementara waktu kegiatannya sekolah ini masih menumpang pada gedung SMP Xaverius Puteri.

Dalam tahun 1952 di Pangkalpinang (Bangka) berdiri SMA Partikelir dan setahun kemudian di Tanjungkarang (Lampung) berdisi SMA Partikelir, sehingga secara keseluruhan masyarakat di daerah ini telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi kekurangan sekolah-sekolah tingkat Atas pada waktu itu. Faktor kelangkaan ini pulalah yang menyebabkan para pemuda yang banyak meneruskan pelajarannya ke Jawa. Di bawah ini kami kemukakan data kuantitatif mengenai SMA Swasta sejak tahun 1966–1980.

Keadaan SMA Swasta di Propinsi Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	22	3772	133
1967	26	3292	134
1968	37	3820	143
1969	39	4414	149
1970	39	4772	164
1971	36	5522	175
1972	36	5901	175
1973	36	5864	212
1974	37	6400	207
1975	36	5227	221
1976	41	7282	225
1977	43	9503	557
1978/1979	57	13920	980
1979/1980	60	15408	990

SUMBER: Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan

4. Pendidikan Kejuruan

Data mengenai sekolah Kejuruan Swasta di daerah ini tidak begitu lengkap yang meliputi: SMEP, SKKP, ST, SMEA, SKKA, STM dan SPG sejak tahun 1966–1980 yang tertera di bawah ini:

Keadaan SMEP Swasta di Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	7	331	50
1967	6	284	56
1968	7	349	57
1969	10	539	61
1970	12	607	75
1971	10	607	—
1972	10	656	75
1973	10	613	104
1974	9	655	43
1975	9	645	43
1976	8	580	33
1977	8	433	53
1978/1979	10	750	120
1979/1980	—	—	—

SUMBER: Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Keadaan SKKP Swasta di Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	3	#	#
1967	6	—	—
1968	5	—	—
1969	5	—	—
1970	5	—	—
1971	2	—	—
1972	1	—	—
1973	1	45	4
1974	1	33	4
1975	1	34	4
1976	1	34	4
1977	1	35	6
1978/1979	2	47	19
1979/1980	—	—	—

Murid dan Guru bergabung pada SKKP Negeri.

Keadaan ST Swasta di Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru #
1966	11	1513	—
1967	12	1566	—
1968	11	1646	—
1969	11	2014	—
1970	11	2093	—
1971	11	1503	156
1972	12	1556	170
1973	12	1670	185
1974	12	2253	149
1975	13	2505	190
1976	13	2431	210
1977	12	2075	208
1978/1979	12	1158	126
1979/1980	7	587	70

Guru bergabung pada ST Negeri.

Keadaan SMEA Swasta di Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	9	911	10
1967	6	427	17
1968	6	631	95
1969	8	934	103
1970	8	1012	108
1971	10	902	48
1972	10	976	93
1973	10	969	124
1974	10	922	50
1975	10	879	55
1976	10	1103	35
1977	10	1647	39
1978/1979	11	1567	173
1979/1980	11	1719	192

Keadaan daftar di atas ini berasal dari sumber Kanwil P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

Kadaan STM Swasta di Sumatera Selatan Tahun 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	11	1310	161
1967	11	1284	168
1968	12	2841	181
1969	13	2875	201
1970	13	2992	234
1971	11	597	185
1972	14	980	168
1973	17	1862	305
1974	17	2389	91
1975	17	2485	60
1976	17	3104	66
1977	16	4020	123
1978/1979	16	4274	367
1979/1980	19	4079	426

SUMBER: Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan

Kadaan SKKA Swasta di Sumatera Selatan 1966–1980

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid #	Jumlah Guru #
1966	1	-	-
1967	1	-	-
1968	1	-	-
1969	1	-	-
1970	2	-	-
1971	2	-	-
1972	2	-	-
1973	2	-	-
1974	2	57	7
1975	2	76	4
1976	2	74	20
1977	2	77	24
1978/1979	4	125	49
1979/1980	1	37	25

Murid dan Guru bergabung pada SKKA Negeri.

SUMBER: Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan.

5. Pendidikan Guru

Berdasarkan hasil penelitian mengenai SPG Swasta di daerah ini, maka dengan ini tercatat sebagai berikut : Di dalam Kotamadya Palembang terdapat : SPG Muhammadiyah I didirikan pada tanggal 6 Januari 1968 Direktrisnya Dra. Suwarni Nursato, SPG Muhammadiyah II didirikan pada tanggal 15 Januari 1975 Direktrisnya Ibu Sumarti; SPG Aisyah didirikan pada tanggal 1 Januari 1960 Direktrisnya Dra. Siti Hodidjah; SPG Trisula didirikan 17 Agustus 1963; SPG PGRI didirikan 15 Januari 1975 di bawah pimpinan Drs. Bachri; SPG Yayasan IBA 1 Januari 1976 dipimpin oleh Ali Idrus Is-hak BA; SPG Qur'anyah 1 Januari 1976 dipimpin oleh Drs. Syafei Alim dan SPG Yaperzi (Yayasan Perguruan Fauziah) 1 Januari 1976 Direktrisnya Dra. Elly Manizar.

Di daerah MUBA terdapat SPG-PGRI di Sekayu 1 Januari 1976 dipimpin oleh Drs. M. Zain dan SPG Yapi (Yayasan Pendidikan Islam) di Musi Landas didirikan 1 Januari 1977 dipimpin oleh Anang Usih BBA. Di daerah OKI terdapat SPG-PGRI di Kayuagung dan SPG-PGRI di Tanjungraja didirikan 1 Januari 1976 dibawah pimpinan Drs. Syakrowi. Di daerah OKU terdapat SPG -PGRI di Baturaja didirikan pada tanggal 1 Pebruari 1969 dipimpin oleh M. Yuzuf, SPG Muhammadiyah di Baturaja didirikan 1 Januari 1975 dipimpin oleh Drs. Ali Akbar, SPG Xaverius di Belintang didirikan 4 Januari 1971 dipimpin oleh Suyono BA, SPG Muhammadiyah di Belintang didirikan 8 Januari 1975 dipimpin oleh Wiyono BA dan SPG Sumber Asih di Guma-wang Belintang didirikan 1 Januari 1974 dibawah pimpinan Siwoyo BA.

Di daerah LIOT (Muara Enim) terdapat: SPG Muara Enim didirikan 6 Januari 1969, di bawah pimpinan Subri BA; SPG-PGRI di Prabumulih didirikan 1 Januari 1971 dibawah pimpinan Nurhayati BA; SPG Muhammadiyah di Tanjung Enim didirikan 1 Januari 1974 yang dipimpin oleh Tony S. Isa dan SPG-ZION (Zending Protestan) di Tanjung Enim didirikan 1 Januari 1975 dibawah pimpinan Dra. F. Hutapea. Di kabupaten Lahat terdapat SPG-PGRI didirikan 13 September 1970 di bawah pimpinan Yapri BA, SPG Muhammadiyah di Lahat didirikan 3 Januari 1977 dipimpin Dahrumuddin MS.BA dan SPG-PGRI Pagaralam didirikan 1 Januari 1969 dipimpin oleh Marspin. Di daerah MURA terdapat SPG-PGRI Tugumulyo didirikan 1 Januari 1975 dipimpin oleh F.X. Salim BA, SPG-PGRI Lubuk Linggau didirikan 1 Maret 1967 dipimpin oleh Sukismoyo BA dan SPG Muhammadiyah Lubuk Linggau yang didirikan 1 Januari 1975. Di Bangka terdapat pula SPG Pemda Sungai Liat yang dipimpin oleh Drs. Achyar didirikan 1 Januari 1972, SPG Theresia di Pangkal Pinang dipimpin oleh J.B. Soeharto berdiri sejak 17 Juli 1956 dan SPG Nasional di Tanjung Pandan didirikan 6 Desember 1964 dipimpin oleh Sulaiman Rozak BA. Di samping itu terdapat pula KPG Lisan Swasta diawasi oleh Kabid Pendidikan Dasar/Guru seperti: KPG di Sekayu, KPG di Pangkal Pinang dan KPG di Belitung. KPG di Belitung ini atas permintaan Bupati se-

empat diakui kembali pada bulan Januari 1981. Mereka yang mengikuti KPG tersebut di atas adalah mereka yang telah memiliki ijazah SGB atau persamaan SGB.

**KEADAAN SPG SWASTA DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 1966-1980**

Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1966	11	226	21
1967	4	243	27
1968	6	308	27
1969	8	481	85
1970	10	707	127
1971	12	1118	157
1972	10	1399	145
1973	11	1528	142
1974	12	1528	138
1975	14	2625	182
1976	19	3425	189
1977	24	4246	375
1978/1979	27	3988	475
1979/1980	28	5557	496

SUMBER: Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Selatan

6. Pendidikan Tinggi

Status Sekolah Swasta pada tingkat Perguruan Tinggi terbagi atas tiga yaitu: yang disamakan, yang diakui dan yang terdaftar sesuai dengan isi Undang-Undang No. 22 tahun 1961 pasal 26 dan pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut: Apabila suatu Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi persyaratan tertentu dapat digolongkan ke dalam Perguruan Tinggi Terdaftar, dan selanjutnya atas putusan Menteri dapat ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi diakui, dan bila Persyaratannya telah dipenuhi, maka Perguruan Tinggi diakui ini dapat lebih ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi yang disamakan. Perguruan Tinggi yang disamakan ini dapat menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri, di mana ijazahnya disamakan dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri.

Adapun Pendidikan Tinggi Swasta yang ada di daerah ini antara lain: Akademi Perbankan "Perbanas," Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial "Candradimuka."

a. Akademi Perbankan "Perbanas" Palembang

Berdasarkan laporan tahunan 1979 Akademi tersebut, bahwa pada tanggal 15 Januari 1968 didirikanlah suatu Yayasan dengan nama "Yayasan Maha-

meru Palembang” dengan susunan pengurusnya: Abu Zed Ali sebagai Ketua; Muhammad Zen BA sebagai Sekretaris; Abumansyur dan Aruji Kartawinata masing-masing sebagai anggota. Struktur personalia ini dituangkan dalam Akte Notaris Soetanto SH tertanggal 15 Januari 1968 No. 7. Yayasan ini bertujuan untuk memajukan dan menambah pendidikan Tinggi di daerah ini, khususnya dalam Kotamadya Palembang. Sebagai tindak lanjutnya maka pada tanggal 3 Maret 1968 didirikanlah sebuah Akademi dengan nama “Akademi Keuangan dan Perbankan Mahameru Palembang” (AKUBANK MAHAMERU) dengan susunan pimpinan sebagai berikut: Drs. Syahrudin Aziz sebagai Ketua; Abu Zed Ali sebagai Sekretaris dan Muhammad Zen BA sebagai Bendahara. Ketika diumumkan penerimaan calon mahasiswa, ternyata yang mendaftarkan sebanyak 600 orang, tetapi oleh karena sarana lokal kuliah tidak mengizinkan, maka hanya dapat diterima 400 orang saja. Kegiatan perkuliahan diadakan pada sore dan malam hari di SD Negeri jalan Atmo Palembang.¹⁵⁶⁾

Sebagai hasil pertemuan antara Pengurus Yayasan dan Pimpinan Akademi pada tanggal 10 Maret 1971, maka ditunjuklah Moh. Hatta Ismail SH sebagai Direktur Akademi, dan telah berhasil mengadakan kontak dengan Drs. O.P. Simorangkir sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Perbanas Jakarta. Akhirnya Akademi Perbanas Mahameru Palembang menjadi bagian daripada Yayasan Pendidikan Perbanas Jakarta.¹⁵⁷⁾ Dengan kata lain sejak itu pula (13 April 1971) Akte yang lama diperbaharui dengan Akte Notaris Aminus SH tanggal 27 Mei 1971 No. 74 dan sekaligus berubah namanya dengan nama “Akademi Ilmu Perbankan Perbanas Cabang Palembang” dengan susunan pengurusnya: Moh. Hatta SH sebagai Direktur; Drs. A. Siahaan sebagai Sekretaris dengan dibantu oleh Direktur Bidang Akademis, Direktur Bidang Keuangan, Direktur bidang Kemahasiswaan, yang masing-masing dijabat oleh Drs. A. Rachman Manaf, Drs. A. Siahaan dan Drs. M.B. Sianipar. Pada tanggal 22 Juni 1972 Akademi Ilmu Perbankan Perbanas cabang Palembang dengan status terdaftar. Dewasa ini Akademi tersebut telah memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Mayor Santoso dekat Pekuburan Kamboja, yang telah ditempati sejak tanggal 11 Juni 1977. Jurusan yang ada pada Akademi itu adalah jurusan Perbankan, yang pada tahun 1979 terdaftar 492 Mahasiswa dengan 34 orang Dosen.¹⁵⁸⁾

b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Palembang

Menurut penjelasan Drs. Djakfar Murod dan berdasarkan buku pedoman Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Palembang tahun 1980, bahwa sekolah Tinggi ini didirikan pada tanggal 10 Maret 1965 dengan nama

156) Akademi Ilmu Perbankan Perbanas Palembang, *Laporan Tahunan 1979*, halaman 1.

157) *Ibid.*, halaman 2

158) *Ibid.*, halaman 15 dan 13.

"Universitas Muhammadiyah cabang Jakarta" dengan memiliki satu Fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Ilmu Filsafat, dengan jumlah mahasiswa 40 orang dan berlokasi di Mesjid Bukit Kecil. Sebagai sponsornya antara lain: Ki Mansyur Asa'ri, Zamhari Abidin SH, Drs. Djakfar Murod, Wantjik Saleh SH, Muchdi Muchtar SH dan Ali El Farissi SH.

Pada tahun 1968 kegiatan kuliah dipindahkan ke jalan Kol. Atmo di belakang Gaya Baru sekarang, dengan perubahan nama "Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat." Oleh karena tidak memenuhi persyaratan dari KOPERTIS, maka pada tanggal 28 Januari 1974 Universitas Muhammadiyah cabang Jakarta di Palembang dibekukan, karena pada tanggal 1 Juli 1973 telah didirikan Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Palembang dengan Nomor Akte 68 (Notaris Aminus SH).

Di atas puing-puing Universitas Muhammadiyah itu pulalah berdiri Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Palembang, yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan untuk membentuk Sarjana Muslim yang bertaqwa kepada Allah serta berbakti pada masyarakat dan Negara. Untuk mencapai tujuan Yayasan tersebut antara lain usahanya:

- 1) Mendirikan, membina dan menyantuni Perguruan-Perguruan Tinggi, Akademi dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang bersifat umum atau keagamaan. Sebagai langkah pertama Yayasan mendirikan "Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang berkedudukan di Palembang.
- 2) Mengadakan ceramah-ceramah, diskusi, seminar dan penerbitan buku-buku atau majalah ilmiah.
- 3) Mengadakan penelitian dalam usaha membantu Pemerintah di bidang Pembangunan.
- 4) Selanjutnya Yayasan akan melakukan segala usaha-usaha lain yang dipandang perlu yang tidak bertentangan dengan hukum, tata susila dan keterbitan umum.

Terhitung sejak tanggal 28 Januari 1974 berdirilah "Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah" dengan pendiriannya: Ali El Farissi SH dan Sulaiman Mastanun SH, yang pada tanggal 20 Mei 1975 Sekolah Tinggi tersebut berstatus "terdaftar" dengan surat keputusan No. 11/SKT/1975 dari Departemen P dan K. Pada bulan Maret 1976 pimpinan dipegang oleh Mustofa Seri SH sebagai pejabat sementara, dan berdasarkan keputusan Senat terpilih Sulaiman Mustanun SH sebagai Direktur Sekolah Tinggi tersebut pada bulan Mei 1976. Tetapi pada tanggal 16 Juni 1976 Sekolah Tinggi menghendaki Drs. Djakfar Murod sebagai Caretaker Pimpinan dan dalam bulan Juli 1977 pimpinan diserahkan-terimakan kepada Hambali SH berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah MAPENDAPU No. E-2/B.89/77 tertanggal 21 Juli 1977.

Setelah memiliki gedung sendiri, maka pada tahun 1976 kegiatan administrasi dan perkuliahan pindah ke jalan Ahmad Yani, dan mulailah terjadi pengembangan Sekolah Tinggi ini dengan membuka tiga Fakultas:

1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

2) Fakultas Ekonomi

3) Fakultas Teknik

Dalam proses pengembangan ini tercatat beberapa sponsor seperti: Adji Pasin SH, Drs. Djakfar Murod, Drs. Amiruddin, Drs. Syahrial Daya Alam, Drs. Tarmizi, Drs. Zainal Abidin Gaffar, Drs. M. Arif, Drs. Muchtar Ali dan Drs. Syarkowi Nur. Pengembangan Sekolah Tinggi itu baru dimulai tahun 1979, yang pada tahun 1980 tercatat mahasiswa 520 orang dengan tenaga pengajarnya berstatus tidak tetap. Kegiatan perkuliahan dilakukan pada sore dan malam hari, sehingga banyak tenaga-tenaga Dosen dari UNSRI dapat dimanfaatkan pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah.

c. Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial "Candradimuka" Palembang

Menurut penjelasan Ketua Sekolah Tinggi ini (Drs. Ismail Djalili), bahwa sekolah ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1979 di bawah naungan Yayasan Seni dan Ilmu Pengetahuan Palembang (YASIP). Oleh karena Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi tidak menentu statusnya, maka ia bernaung di bawah YASIP, dan di samping itu YASIP menyantuni Akademi Publisistik Candradimuka Palembang (APCP) yang telah berdiri pada tanggal 23 Maret 1967. Dalam proses perkembangan lebih lanjut YASIP menampung STIA kedalam APCP dengan peningkatannya menjadi STIS Candradimuka Palembang yang terbagi atas dua Departemen:

1) Eks APCP menjadi Departemen Ilmu Publisistik

2) Eks STIA Palembang menjadi Departemen Ilmu Administrasi

Berdasarkan SK No. 110/1979 tanggal 28 September 1979 status STIS "Candradimuka" Palembang adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah koertis Wilayah II Dep. P dan K, di mana Departemen Ilmu Publisistik sampai pada tingkat Sarjana Muda telah *terdaftar*, sedangkan untuk tingkat Sarjana masih dalam proses. Latar belakang pendirian STIS ini tidak lain daripada untuk menampung kehendak dan aspirasi masyarakat di daerah ini, yang tidak dapat mengikuti perkuliahan di pagi hari karena sebagian besar mereka itu adalah pegawai negeri/swasta. Pada umumnya tenaga pengajar adalah dosen tidak tetap, dan tercatat semua tingkat yang ada sebanyak ± 700 mahasiswa.

Menegenai Departemen Ilmu Publisistik terdapat tiga jurusan: Jurusan Pers, jurusan Radio/Televisi-Film dan jurusan Hubungan Masyarakat. Sedangkan Departemen Ilmu Administrasi memiliki 2 jurusan: Jurusan Administrasi Negara dan jurusan Administrasi Niaga.

Yasip berdiri berdasarkan badan hukum dengan Akte Notaris Aminus SH No. 25 tanggal 28 Oktober 1967. Tempat kegiatan kuliah di SMP I Negeri Palembang dengan pimpinannya sebagai berikut: Drs. Ismail Djalili sebagai Ketua STIS dengan dibantu oleh Drs. Syahrial Daya Alam sebagai Kepala Akademis dan Pengajaran, Drs. Syafiuddin sebagai Kepala Bidang Adminis-

trasi/Keuangan, Sumanto sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan, Drs. Tadjri Lukman Hanafi sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh M. Ridwan Syakroni BA, M. Nurdin Ali, M. Safawi BA, Malikin, Drs. Sumadi dan lain-lain.

Adapun Ketua Departemen Ilmu Publisistik yaitu Drs. Djekson H. Ariefai yang dibantu oleh M. Ridwan Syakroni BA, M. Stafawi BA, Drs. Tadjri Lukman Hanafi dan lain-lain. Sedangkan Ketua Departemen Ilmu Administrasi tercatat Max. M. Mamesa SE, yang dibantu oleh Yasbudaya BA, Therik Yoel, Drs. B. Syurmin, Drs. Fahrudin dan lain-lain.

7. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal yang dimaksudkan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pengawasan Departemen P dan K yang terkenal dengan sebutan "Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat" (PLSM). Dalam pelaksanaan PLSM di daerah ini berbentuk kursus-kursus yang memakan waktu dua atau tiga bulan lamanya. Setelah jangka waktu itu berakhir, diadakan ujian Negara dan ijazahnya dari Jakarta. Adapun kursus-kursus yang dimaksudkan itu misalnya: Kursus menjahit, Kursus Kecantikan/Tata rambut, Kursus Mengetik, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Tata buku dan lain-lain. Hampir semua daerah Kabupaten di daerah ini menyelenggarakan PLSM di bawah pengawasan Kandep P dan K setempat. Kursus-kursus yang terdaftar pada Kandep Kotamadya Palembang sampai akhir tahun 1980 adalah sebagai berikut:

Kursus-Kursus PLSM dalam Kotamadya Palembang

Kecamatan	R u m p u n										Keterangan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Jml
Iilir Timur	15	-	1	-	-	-	2	8	18	3	47	Rumpun :
Iilir Timur II	7	-	-	-	-	-	3	3	3	1	17	1. Rumah
Iilir Barat I	7	-	-	-	-	-	3	7	4	-	21	2. Kesehatan
Iilir Barat II	6	-	-	-	-	-	2	-	3	-	11	3. Olahraga
Seberang Ulu I	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7	4. Pertanian
Seberang Ulu II	1	-	-	-	-	-	-	6	2	-	9	5. Kesenian
												6. Kerajinan
												7. Teknik
												8. Adm.&Ni-
												aga
												9. Bahasa
												10. Khusus
Jumlah	38	-	1	-	-	-	10	24	25	4	112	

SUMBER : Kandep P dan K Kotamadya Palembang.

Salah satu PLSM di dalam Kotamadya Palembang yang diselenggarakan secara rutin adalah *Karang Teruna* yang terletak di jalan Jend. Sudirman Palembang

di bawah pimpinan Drs. Kencanawaty, yang sebagian besar memampung anak-anak *drop-out* yang belum berkeluarga. Di samping itu ada juga kegiatan PLSM dilokasi Tunasusila KM 9 Palembang dan PLSM yang dikelola dan dibimbing oleh Kanwil Depsos Sumatera Selatan yang terletak di Indralaya, khusus mengenai bidang jahit menjahit dan Rumah Tangga.

H. PENDIDIKAN LUAR BIASA

Sebagai akibat revolusi fisik di Indonesia, maka banyak pejuang-pejuang kita yang mengalami invalid, dan dalam masyarakat biasapun terdapat juga orang-orang/anak-anak seperti itu. Pada awal tahun 1952 di Indonesia berjangkit wabah penyakit kelumpuhan terhadap anak-anak yang lazim disebut *Poliomyeletis* yaitu infeksi virus pada syaraf yang melanda anak-anak di kota-kota besar seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Pangkal Pinang dan Palembang sendiri. Pada saat itu usaha pencegahan belum dapat dilakukan, sedangkan para korban penyakit folio memerlukan perawatan khusus, dan dalam hubungan ini pulalah timbul idee/gagasan Prof. Dr. Soeharso untuk mendirikan *Rehabilitation Centre*, yang mula-mula kampanye ini ditujukan kepada perkumpulan Wanita di kota Solo dan kepada Pemerintah Kotamadya Solo. Akhirnya pada tanggal 5 Pebruari 1953 berdirilah Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat (YPAC) di Solo dengan Akte Notaris No. 18 yang berstatus Swasta bersubsidi. Sebagai Ketua Umum pertama adalah Nj. Padmonegoro dan tiga tahun kemudian digantikan oleh Nj. D.Soeharso sampai sekarang.

Dalam mengembangkan YPAC di seluruh tanah air, Dr. Soeharso dan Ibu mendirikan perwakilan-perwakilan selain di pulau Jawa juga di luar pulau Jawa, dan perwakilan YPAC yang pertama didirikan di luar pulau Jawa adalah YPAC Pangkal Pinang (Bangka) yang dipimpin oleh Ikes, Dr. Moedarso dan Ibu. Seperti apa yang kita ketahui di Bangka sekitar tahun 1956-1958, epidemi Polio melanda pulau Bangka dan banyak anak yang menjadi cacat tubuh yang harus mendapatkan pertolongan khusus. Keadaan seperti ini tidak hanya terdapat di Bangka, tetapi juga terdapat di kota Palembang dan sekitarnya. Oleh sebab itu, ketika Prof. Dr. Soeharso dan Ibu mengunjungi Palembang dalam rangka kampanye untuk mengembangkan YPAC di daerah ini, mendapat respon dari Ibu Siti Bambang Utoyo dan langsung mengadakan pertemuan antara ibu-ibu terkemuka di daerah ini di rumah kediaman Mayjen Bambang Utoyo untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk langsung dari Ibu Soeharso.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Soeharso tentang tugas-tugas YPAC, maka atas prakarsa Ibu Siti Bambang Utoyo dengan beberapa orang Ibu mengadakan kunjungan/peninjauan di YPAC cabang Pangkal Pinang (Bangka). Setelah mereka kembali ke Palembang, maka pada tanggal 22 Desember 1959 tepat pada hari Ibu dan Hari Sosial, didirikan YPAC cabang Palembang dengan susunan pengurusnya sebagai berikut : Ny. R.Bambang

Utoyo sebagai Ketua; Ny. Z.Husin sebagai Wakil Ketua; Ny. L.Irsan Radjamin sebagai Sekretaris I, Ny. Soejono sebagai Sekretaris II; Ny. W.M. Wence sebagai Bendahara I; Ny. Oen Poo Khien sebagai Bendahara II dan dibantu oleh staf-staf lainnya seperti: Bagian Medis ditangani oleh Dr. H.Goepito, Dr. I.P. Radjamin, Dr. J.Rusad. Ass. Physiotherapis ditangani oleh: Annie Rachman, H. Marzoeki D, Sunardi. Bagian pendidikan oleh Dr. Ny. Ch. Goepito, Ny. Subronto yang dibantu oleh Nona Zoeliana Naim dan Ny. Darnelist Sayuti.

Bagian usaha oleh Ny. Oei Khik Tjhiang, Ny. Noesmir, Ny. Soejono. Bagian Sosial oleh Ny. R.Tobing, Ny. S.Tafsil Chatib, Ny. Ibnu Hajar. Bagian Penerangan oleh Ny. Nadjamuddin, Ny. Myrin Koesumo. Bagian Tata Usaha dikelola oleh Zainal Arifin—Tomi Hanif. Pembantu Pengurus adalah Ny. F. Manoe, Ny. Syarif dan untuk Work Shop dipegang oleh saudara Mochtar Affendi.¹⁵⁹)

Yayasan ini sifat dan tujuannya mengobati, mendidik dan membimbing anak-anak cacad tubuh agar dapat kembali ke masyarakat dengan penuh kepercayaan terhadap diri sendiri dengan ketrampilan yang dimilikinya. Sesuai dengan tugas YPAC sebagai wadah pusat Rehabilitasi yang disahkan oleh Pemerintah sebagai satu-satunya organisasi yang menangani pertolongan kecacadan anak-anak, maka YPAC berkewajiban mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang serupa di dalam wilayahnya. Oleh sebab itu atas prakarsa pengurus Yayasan Taman Bunga dalam asuhan Pansos Katolik di kota Palembang, maka pada tanggal 9 Januari 1978 yayasan tersebut bersepakat untuk bergabung dan meleburkan diri dalam YPAC cabang Palembang. Sebagai sponsor Yayasan Taman Bunga adalah Suster Jeanne d'Arc, yang pada saat itu mengasuh anak-anak sejumlah 50 orang dan berlokasi di jalan Letkol Iskandar No. 403.

Berdasarkan hasil Munas I di Semarang 19 s.d. 20 Juli 1977, maka YPAC cabang Palembang membentuk *Medical Board* pada tanggal 30 September 1978 yang diketuai oleh Dr. H.R.Soepanto bagian Bedah dan Dr. Rusdi Ismail sebagai dokter anak-anak. Adapun *Medical Board* ini merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh YPAC sebagai tenaga-tenaga pembantu pengurus yang merupakan suatu team tenaga ahli dalam memberikan bantuan-bantuan medis yang terdiri dari para spesialis. Sejak berdirinya YPAC (1959-1979) terdaftar 771 orang, yang meliputi semua jenis kecacadan kecuali tunanetra :

1. <i>Poliomyelitis Anterior Acuta</i>	304 orang
2. <i>Cerebral Palsy</i>	284 orang
3. <i>Congenital Deformety</i>	88 orang

159). *Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacad (YPAC) Cabang Palembang, Palembang, 1979, halaman 30-31.*

4. *Bone Disorders*
5. *Other Diseases*

23 orang
72 orang

Alat penolong 196 buah terdiri dari : 106 Brace, 22 Kruk, 18 Prothese, 50 Reparasi *Brace* dan *Prothese* dan pendidikan murid 149 orang terdiri dari sekolah-sekolah : 39 orang Taman Kanak-Kanak, 35 orang SLB Bag. B, 18 orang SLB Bag. C, 34 orang SLB Bag. D, dan 23 orang Kelas Karya. Untuk membiayai Sekolah Luar Biasa ini yang dikoordinasi oleh YPAC cabang Palembang, mendapatkan biaya dari Pemerintah, para donatur tetap, wali-wali murid dan bantuan dari Luar Negeri. Sekarang ini YPAC berlokasi di jalan Rajawali dengan memiliki gedung sendiri di atas tanah + 1 hektar. Dewasa ini Sekolah Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Sr. Jeanne d'arc sebagai Direktris, H. Marzoeke SM. Ph sebagai Kabag Fisioterapi, Zainal Arifin sebagai Kabag Tata Usaha, Mochtar Effendi sebagai Kabag *Orthopaedical workshop*, Ruslin Djakfar sebagai Kabag *Speech Therapy*, Sr. Catharina sebagai Kabag Rumah Tangga, Drs. S.M. Tambunan sebagai Kabag/Kepala SLB bag. C., Arif Budyanto sebagai Kabag/Kepala SLB bag. d., Th. Sugirno BA sebagai Kabag/Kepala SLB bag. B., M. Zaini A. Muin Ks sebagai Wakil Kepala/Guru SLB bag. C., Sr. Erlina CB sebagai Wakil Kepala/Guru SLB bag. D dan Tiorly Hoetabarat sebagai Wakil Kepala/Guru SLB bag. B.¹⁶⁰⁾

I. PESANTREN DAN MADRASAH

Sejak jaman Hindia Belanda dan Indonesia Merdeka lembaga pendidikan tersebut diusahakan oleh Swasta, seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia seperti Madrasah Swasta tingkat Ibtidaiyah, Tingkat Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Dalam tahun ajaran 1979/1980 ketiga tingkat madrasah itu hampir terdapat di seluruh Kabupaten/Kotamadya di daerah ini : *Kotamadya Palembang* terdapat 85 MIS, empat MTSS dan lima MAS; *di MUBA* terdapat 44 MIS dan sembilan MTsS; *di OKI* terdapat 72 MIS enam MTsS dan enam MAS; *di LIOT* tercatat 45 MIS, 10 MTsS dan lima MAS; *di Lahat* terdapat 32 MIS dan empat MTsS; *di OKU* terdapat 85 MIS, 20 MTsS dan empat MAS; *di MURA* terdapat 56 MIS, sembilan MTsS dan dua MAS; *di Bangka* tercatat 12 MIS, empat MTsS dan satu MAS, dan akhirnya *di Belitung* terdapat delapan MIS, satu MTsS dan satu MAS.¹⁶¹⁾ Secara keseluruhan dapat kami kemukakan di sini mengenai Madrasah-madrasah Swasta di daerah Sumatera Selatan : MIS jumlah sekolahnya 439 buah, muridnya 45123 dan gurunya 1740; MTsS sekolahnya 66 buah, muridnya 3225 dan gurunya 742; MAS jumlah sekolahnya 24 buah, muridnya 2460 dan gurunya 255 dan akhirnya Pendidikan Guru Agama Swasta di daerah ini hanya dapat diketahui jumlah muridnya saja yaitu 1497.¹⁶²⁾

160). *Ibid.*, halaman 17.

161). Kanwil Dep. Agama Sumsel. *Laporan tahunan Bid. Pend. Agama Islam tahun 1979/1980*, halaman 29.

162). *Ibid.*, halaman 37 dan 41

Mengenai pondok Pesantren yang ada di daerah ini sampai tahun 1979/1980 tercatat 23 buah dengan perincian sebagai berikut: tiga Pesantren di Palembang, tiga pesantren di MUBA, delapan pesantren di OKI, dua pesantren di OKU, dua pesantren di LIOT, sebuah pesantren di Lahat, sebuah pesantren di MURA dan tiga pesantren di Bangka.¹⁶³)

Berdasarkan penjelasan saudara Hadori Sekretaris *Pondok Pesantren Nurul Islam di Seri Bandung (OKI)*, bahwa pada tahun 1949 dibuka lagi tingkat *Ibtidaiyah* untuk puteri, dan dalam tahun 1954 dibuka tingkat *Tsanawiyah* untuk putera-puteri, tingkat *Tadiriyyah* dan tingkat *Aliyah*. Kemudian pada 15 Pebruari 1955 dibuka *Fakultas Syari'ah*, sehingga pondok pesantren Nurul Islam memiliki : tingkat Tahdiriyah, tingkat Ibtidaiyah, tingkat Tsanawiyah, tingkat Aliyah dan tingkat perguruan tinggi (Fak. Syari'ah).

Sarana yang dimiliki oleh Pesantren Nurul Islam di Seri Bandung adalah sebagai berikut: Luas tanah 12 hektar dan baru dipergunakan tujuh hektar, gedung permanen yang terdiri dari empat gedung dengan 20 buah lokal, tiga gedung sekolah semi permanen dengan 12 lokal, sebuah gedung Work-Shop yang semi permanen dengan tiga lokal, tiga gedung permanen untuk asrama yang dapat menampung 190 orang, tiga gedung semi permanen untuk asrama puteri dengan daya tampung 150 orang, sebuah gedung perpustakaan 6 x 10 meter, sebuah mushollah 10 x 10 meter, sebuah aula dalam tahap penyelesaian, sebuah balai obat semi permanen, ruang kantor dan guru terdapat pada tiap-tiap sekolah dan 600 pondok ukuran 2 x 3 meter yang dibuat sendiri oleh para pelajar untuk tempat tinggal di sana.

Pada tahun ajaran 1979/1980 jumlah siswa pada tingkat Tahdiriyah 84 orang; tingkat Ibtidaiyah 512 pria dan 363 wanita; tingkat Tsanawiyah 76 pria dan 32 wanita; tingkat Alyah 31 pria dan 24 wanita dan pada Fakultas Syari'a jumlah amahsiswanya 81 orang. Menenai guru-gurunya : 26 orang untuk tingkat Tahdiriyah, 12 orang, untuk Tsanawiyah, 12 untuk Alyah dan 21 dosen untuk Fakultas Syari'ah. Kurikulumnya pada tingkat Tahdiriyah/Ibtidaiyah 20% Umum dan 80% pelajaran Agama; tingkat Tsanawiyah 40% Umum dan 60% pelajaran agama; tingkat Alyah fifty-fifty dan kurikulum Fakultasnya disesuaikan dengan kurikulum IAIN.

Pondok Pesantren ini dikelola oleh: Ki H. Ahmad Dimiyati Anwar sebagai Kepala (Mudir); Ki. H. Zumrowi sebagai Sekretaris yang dibantu oleh kepala-kepala bagian seperti tingkat Tahdiriyah dan Ibtidaiyah dipimpin oleh Ki H. Zumrowi Anwar BA, tingkat Tsanawiyah dipimpin oleh Ki. H. Anwar dengan merangkap Aliyah dan tingkat Perguruan Tinggi (Fak. Syari'ah) dipimpin oleh Ki. H. Fachrurozi Lc.T.H. Metode yang dipergunakan adalah metode ceramah, demonstrasi dan sistem sorokan.

163). *Ibid.*, halaman 38

Keadaan siswa sejak tahun 1943–1980

Tahun	Laki	Perempuan	Jumlah	Tahun	Laki	Perempuan	Jumlah
1943	160	–	160	1962	1000	370	1370
1944	160	–	160	1963	1181	398	1579
1945	160	–	160	1964	920	330	1250
1946	160	–	160	1965	1060	340	1400
1947	160	–	160	1966	980	357	1337
1948	160	–	160	1967	1100	600	1700
1949	160	4	164	1968	637	429	1066
1950	160	4	164	1969	850	514	1364
1951	160	–	160	1970	886	625	1511
1952	160	–	160	1971	924	657	1581
1953	400	160	560	1972	918	671	1589
1954	600	200	800	1973	930	666	1596
1955	700	250	950	1974	1176	767	1943
1956	821	336	1157	1975	1241	768	2009
1957	888	353	1251	1976	1266	734	2000
1958	966	374	1340	1977	1201	692	1893
1959	1040	414	1454	1978	1111	704	1815
1960	1090	392	1482	1979	846	568	1414
1961	1091	340	1431	1980	770	443	1213

SUMBER : Kepala bagian administrasi Pondok pesantren "Nurul Islam"
Seri Bandung Tanjung Batu (OKI).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ahmadi, Drs., *Sejarah Pendidikan*, CV. Toha Putera, Semarang 1975.
- Ali, R.Moh, *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*, Bhratara, Jakarta, 1963.
- Amir Hamzah Wiryosukarto, Drs., *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah*, Peny. Publikasi Pembaharuan Pend. Pengajaran Islam, Jogjakarta, 1962.
- Aziz, M.A., *Japan's Colonialism and Indonesia*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1955.
- Bulletin Muhammadiyah Sumatera Selatan*, Nomor 3, Maret 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*, Jakarta, 1979.
- , *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Jakarta, 1977.
- , *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Dinas Sosial Daerah Tk. I Sumsel, *Perintis Kemerdekaan Indonesia*, Palembang, 1951.
- Ensiklopedia Umum*, Yayasan Kanisius, Jogjakarta, 1973.
- Graaf, H.J.de, *Geschiedenis van Indonesia*, W van Hoeve, s'Gravenhage, Bandung, 1949.
- Fakultas Teknik UNSRI, *Buku Petunjuk Pendidikan Ahli Teknologi (PAT)*, Palembang, 1978.
- I. Djumhur dan Drs. H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu, Bandung, 1976.
- Y.P.A.C. Cabang Palembang 22-12-1959 - 22-12-1979*, Palembang, 1979.
- Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang, 1954.
- Koentjaraningrat, Prof.Dr., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 1976.
- , *The Yapanese of South-Central Java*, dalam GP. Murdock (ed), *Social Structure of South East Asia*, Chicago, 1960.
- Krom, Prof.Dr. N.J., (terjemahan Arif Effendi), *Zaman Hindu*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1954.
- Ketua Senat/Rektor IAIN Rd. Fattah, *Laporan pada Peringatan Harijadi ke XV IAIN Rd. Fattah dan Wisuda ke V*, Bengkulu, 1979.
- Leur, J.C.van, *Indonesian Trade and Society*, The Hague, Bandung, 1955.

- Mahmud Yunus, Prof.H., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1979.
- M.O. Parlindungan, *TuanKu Rao*, Tanjung Pengharapan, Medan, 1964.
- Mochtar Abubakar, Drs.H. & Drs. Mansur Rachman, *Memorandum akhir tugas dan laporan phasing out AAN Negeri Palembang*, 1977/1978.
- Panitya Peny. MTQ Pertamina se Indonesia ke-2/1974, *Masuk dan Perkembangan agama Islam di Bumi Sriwijaya*, Plaju, 1974.
- Proyek IDKD Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Sumatera Selatan*, 1977-1978.
- Panitya Dasawarsa IAIN Rd. Fattah, *Sepuluh Tahun IAIN Rd. Fattah Palembang*, Palembang. 1975.
- Soegarda Purbakawatja, Prof., *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies I*, Sunur, Bandung, 1960.
- Sutari Imam Barnadib, Dra., *Pengantar Sejarah Pendidikan I*, Yayasan Penerbit FIP-IKIP, Jogyakarta, 1975 (diktat).
- Sutedjo Bradjanegara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Fasco, Jakarta 1956.
- Van Sevenhoven, *Lukisan Kota Palembang*, Bhratara, Jakarta, 1971.
- Vlekke, BHM., *Nusantara, a history of Indonesia*, PT, Soeroengan, Jakarta 1961.
- Vriens S.J.G. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid 3a, Arnoldus, Ende, 1974.

LAMPIRAN I

Keadaan Mahasiswa P3KD UNSRI Semester I tahun 1980/1981

PROGRAM	Bidang Studi	MAHASISWA		
		L	P	JUMLAH
D ₁	Bhs. Indonesia	23	65	88
	Matematika	24	23	47
	I P A	35	60	95
				230
D ₂	Bhs. Indonesia	13	29	42
	Bhs. Inggris	19	17	36
	Matematika	27	13	40
	I P A	14	21	35
				153
JUMLAH SELURUHNYA				383

SUMBER : Sekretariat P3KD UNSRI Palembang.

LAMPIRAN II

Keadaan Jumlah Mahasiswa ATN/PAT Palembang Th. 1974-1980

TAHUN	JURUSAN			JUMLAH
	MESIN	ELECTRO	SIPIL	
1974	50	50	43	143
1975	63	57	43	163
1976	86	56	45	187
1977	82	61	68	211
1978	104	81	94	279
1979	115	111	114	340
1980	119	110	110	339
1980/81	147	147	154	448

SUMBER : Kantor Sekretariat ATN/PAT

LAMPIRAN III

Alumni ATN Sebelum Integrasi (11 Peb. 1971 s.d. Sep. 1976)

T A H U N						
1971	1972	1973	1974	1975	1976	JUMLAH
3	5	1	3	25	77	113

SUMBER : Kantor Sekretariat ATN/PAT

LAMPIRAN IV

PROGRAM Tempat Praktek Mahasiswa AKPER Palembang

Tk.	Semester	Lama	TEMPAT
I	II	6 bln	R.S. dr. A.K. Gani Palembang
II	III/IV	12 bln	R.S. dr. A.K. Gani Palembang
III	V		- R.S. PN. Pertamina Plaju - R.S. Jiwa Palembang - Balai Lab. Tk. I Palembang - Puskesmas Kotamadya Palembang - K.K.N. (Kerja Lapangan) : -- R.S. di Kabupaten -- Puskesmas di Kecamatan dsb. nya.
III	VI		- R.S. dr. A.K. Gani Palembang.

SUMBER : Sekretariat Akademi Perawat Jurusan Umum Palembang.

LAMPIRAN




















Kadaan Jumlah Mahasiswa PAAP-UNSRI Palembang 1975-1979

T A H U N				
1975	1976	1977	1978	1979
111	136	192	246	281

SUMBER : Kantor Sekretariat PAAP UNSRI Palembang.

LAMPIRAN V

























CONTOH HURUF ULU YANG TERDAPAT DI DAERAH SUMATERA SELATAN

							
ke	ge	nge	pe	be	me	te	de
							
ne	tie	je	re	le	we	ae	se
							
dje	nje	ke					

Keterangan: Huruf di atas ini merupakan huruf asli yang terdiri dari 19 huruf.

								
i	o	ng	n	ai	h	r	ow	u

Di bawah ini contoh tulisan setelah dirangkaikan menjadi kata :

							
ka	ju	a	gung	mang	ku	a	lam.
							
tu	pai	dju	wa	dah	pe	lo	por
							
dang	su	sah	lan	bow	pe	ngan	ten

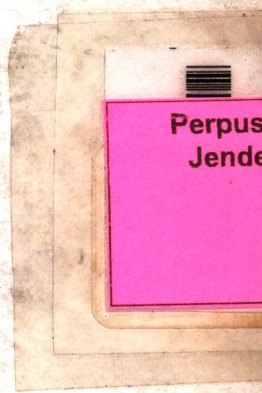
DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

- Abdulmalik SH, Eks. Walinegara
Sumatera Selatan, Jenderal
Sudirman KM.4½ Plg. (almarhum)
- A. Siahaan, Drs.eks.Dir. SMEA Neg. I
Plg, 43 th. Kanwil P dan K.
- A. Muis Bakry, Drs.Kep.Bag. Pdd.
SPMA, 43 th. Sumbawa Plg.
- Abdullah, Drs. Dosen Fakg. Keg. UNSRI.
45 th. UNSRI Plg.
- Asemah, Karyawan Kanwil P dan K
Sum.Sel. 42 th. P dan K Sum.Sel.
- Arsyad Yakin, Kasi Masorda Kandep
Lahat, 47 th. Lahat
- Bakhtiar, Ketua Pengurus Taman Siswa
cabang Palembang, 45 th. Perg.
Taman Siswa Palembang.
- Bharuddin, Karyawan Dep. P dan K
Sum.Sel. 46 th. PMK P dan K.
- Cipto Utomo Ramli BS.c.RSUP Palembang,
39 th. RSUP Plg.
- Cik Ayu Sumarni, Karyawan P dan K,
42 th. Kanwil Dep. P dan K Sum.
Sel. Palembang.
- Eddy Utomo, Kep.Bag. Pend. SMF Plg.
39 th. SMF Palembang.
- Haji A. Majid, Karyawan RSUP Plg.
48 th. RSUP Palembang
- Idrus Achmad, Drs. Direktur
APDN, 42 th. APDN Palembang
- Ibrachim HS, Drs. Dosen Fak.Keg.
UNSRI, 46 th. UNSRI Plg.
- Moh. Ali, Kep.Bag.Pengajaran
ATN Plg.43 th.ATN Plg.
- Moh. Dai Sulaiman, Drs. Kep.SMP
14 Plg.47 th.AMP 14 Negeri
Palembang.
- Ma'moen Abd.Drs.Dosen Fak.Keg.
UNSRI, 50 th.UNSRI Palembang.
- Nawawi Gaffar, Purnawirawan,
58 th.Veteran Palembang.
- Nurtjahaya, Karyawan Kanwil P .
dan K, 45 th.Kanwil Sum.
Sel. Palembang.
- RHA.Rani, Eks.Kepala Perwakilan
P dan K 60 th. Jalan Rengas
Palembang.
- R.Manulu, Karyawan P dan K
Sum.Sel. Kanwil P dan-K
Palembang.
- Syargawi, Kep.MIN Lumpatan, 50
th. Lumpatan Muba.
- Sutarmo BA, Wkl.Kep.SMOA Plg.
47 th. Kompleks SMOA Plg.

DAFTAR KATA-KATA

- | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------|
| A. | Aliyah | O. | Onderafdeling. |
| B. | Budha | | Onthoudings Politirk |
| | Batanghari Sembilan | P. | Politik Etika |
| | Borobudur | | Pyang |
| C. | CVO | | Pesantren |
| | Candradimuka | S. | Sriwijaya |
| D. | Demang | | Sekolah Desa |
| G. | Goeroe Ordonnantie. | | Schakel School |
| H. | HIS | T. | Taman Siswa |
| | HCS | U. | Ulama Guru |
| | Hakko-I Ciu. | V. | VOC |
| I. | I-Tsing | X. | Xaverius |
| K. | Kubu | Y. | Y.P.A.C. |
| | Kweekschool | | |
| M. | Muhammadiyah | | |
| | MULO | | |
| | Machmud Badharuddin II | | |
| | Methodist. | | |

10



Perpus
Jende